



Teknologi Karya Digital Nusa

Mni Office Central 88 Blok G1 No. 826
JL Trembesi Pademangan Timur
Kec. Pademangan
Kota Adm. Jakarta Utara
Telp : (021) 6586 7225
Email : corporate.secretary@tkdn.co.id

www.tkdn.co.id



PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA TBK TAHUN 2023

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	: 28 Februari 2023	Awal Perdagangan Waran Seri I	: 8 Maret 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 2 – 6 Maret 2023	Akhir Perdagangan Waran Seri I	: 6 Maret 2025
Tanggal Penjatahan	: 6 Maret 2023	- Pasar Reguler & Negosiasi	: 4 Maret 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 7 Maret 2023	- Pasar Tunai	: 6 Maret 2025
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	: 7 Maret 2023	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 8 September 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia	: 8 Maret 2023	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 7 Maret 2025
		Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 7 Maret 2025

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU Mendapat Perhatian Segera. Apabila Terdapat Keraguan Pada Tindakan Yang Akan Diambil, Sebaiknya Berkonsultasi Dengan Pihak Yang Kompeten.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA, TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



Teknologi Karya Digital Nusa

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam penyediaan solusi sistem informasi berbasis telematika dan Internet of Things (IoT) untuk pengembangan smart city

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826,
Jl. Trembesi Pademangan Timur, Kec. Pademangan Kota Adm. Jakarta Utara
Telp: (021)65867225
Email: corporate.secretary@tkdn.co.id
Website : tkdn.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 25,42% (dua puluh lima koma empat dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp180 (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Subrekening Efek pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah).

Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak-banyaknya 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham. Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,05% (tujuh belas koma nol lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke dua pencatatan Waran Seri I. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 8 September 2023 – 7 Maret 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya adalah sebesar Rp93.750.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain kustodian pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kustodian pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Surya Fajar Sekuritas

PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO IMPLEMENTASI FUNGSIONAL HARDWARE DAN SOFTWARE. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2023

PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan surat No. 118/TKDN/X/2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UUPM**")

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 18 Januari 2023 dengan surat No. S-00672/BEI.PP3/01-2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Surya Fajar Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xi
I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN	1
Penawaran Umum Perdana Saham	2
Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (<i>Employee Stock Allocation / ESA</i>).....	2
Penerbitan Waran Seri I	4
Pencatatan Saham dan Waran Seri I Perseroan di BEI	12
Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham	12
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	14
III. PERNYATAAN UTANG.....	16
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	22
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	25
VI. FAKTOR RISIKO	48
VII. KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ...	53
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	59
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	59
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	62
3. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAPORAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN	68
4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	78
5. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN PERUSAHAAN ASOSIASI	79
6. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	80
7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ASOSIASI	81
8. PENGURUSAN, PENGAWASAN PERSEROAN.....	83
9. TATA KELOLA PERUSAHAAN	85
10. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	100
11. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING PERSEROAN.....	103
12. ASET TETAP PERSEROAN	107
13. TANGGUNG JAWAB SOSIAL	107
14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN.....	108
15. ASURANSI	108
16. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	109



IX.	EKUITAS.....	124
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	126
XI.	PERPAJAKAN.....	127
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	129
	1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek	129
	2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana	129
XIII.	LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	130
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	132
XV.	TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	146
	1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham.....	146
	2. Pemesan Yang Berhak.....	148
	3. Jumlah Pemesanan.....	148
	4. Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif	148
	5. Masa Penawaran Umum	149
	6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham.....	149
	7. Penjatahan Saham	149
	8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.....	152
	9. Pengembalian Uang Pemesanan.....	153
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	154
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	155
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	181



DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut
 - (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Akuntan Publik” atau “KAP” : berarti Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB Internasional) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
- “BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta Utara.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perusahaan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan.
- “Daftar Pemegang Saham atau DPS” : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “PT DIKA” : yaitu PT Digital Karyaloka Nusantara (DIKA) yang merupakan Entitas Asosiasi
- “Harga Penawaran” : berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini yang besarnya ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dicantumkan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yaitu sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah).



- “Hari Bursa” : berarti hari di mana kegiatan-kegiatan perdagangan efek dilangsungkan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditentukan oleh Pemerintah atau hari lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.
- “Hari Kerja” : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
- “Kemenkumham” : berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
- “Konfirmasi Tertulis” : berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
- “Konsultan Hukum” : berarti Dentons HPRP yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “KSEI” : berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perusahaan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
- “Manajer Penjatahan” : berarti PT Surya Fajar Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan dari Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.A.7 dan Peraturan OJK No. 41/2020.
- “Masa Penawaran Umum Perdana Saham” : Jangka waktu masyarakat dapat mengajukan pemesanan saham, yang berlangsung paling singkat selama 3 (tiga) hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab IX mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
- “Masyarakat” : berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau Warga Negara Asing dan/atau entitas asing dan/atau badan hukum asing, dan baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia atau bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
- “Menkumham” : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangn Republik Indonesia).



- “OJK” : berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan amanya amanyaent penerus Bapepam- LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di amany Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- “Pasar Perdana” : berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
- ”Partisipan Admin” : PT Surya Fajar Sekuritas yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- ”Partisipan Sistem” : Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau Pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik
- “Pemegang Rekening” : berarti setiap pihak yang amanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.
- “Pemegang Saham Utama” : berarti pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- “Pemegang Saham Pengendali” : berarti pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.
- “Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Penawaran Awal” : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran saham.
- “Penawaran Umum” atau “Penawaran Umum Perdana Saham” : berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- “Penitipan Kolektif” : berarti jasa penitipan atas sejumlah Efek yang dimiiki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.



- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan atas Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT Surya Fajar Sekuritas.
- ”Penjataan Pasti” : berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek
- “Penjataan Terpusat” : berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No.15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- “Peraturan OJK No.16/2020” : berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- ”Peraturan OJK No.17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- ”Peraturan OJK No.41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik
- ”Peraturan OJK No.42/2020” : berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 23/2017” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.



- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Peraturan OJK No. 56/2014” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Peraturan Pencatatan Bursa Efek” : berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-102/SHM/KSEI/0922 tanggal 6 Oktober 2022 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penerbitan Waran Seri I” : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 15 tertanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dengan (i) Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 40 tertanggal 11 November 2022, (ii) Addendum Kedua No. 62 tertanggal 15 Desember 2022, (iii) Addendum Ketiga No. 48 tertanggal 20 Januari 2023, dan (iv) Addendum Keempat No. 43 tertanggal 20 Februari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 14 tertanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 47 tertanggal 20 Januari 2023, dan (ii) Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 42 tertanggal 20 Februari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I” atau “PPAW” : berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 16 tertanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 49 tertanggal 20 Januari 2023, dan (ii) Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 44 tertanggal 20 Februari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora.



- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Teknologi Karya Digital Nusa No. 13 tertanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 39 tertanggal 11 November 2022, (ii) Addendum Kedua No. 46 tertanggal 20 Januari 2023, dan (iii) Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 41 tertanggal 20 Februari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.
- “Pernyataan Efektif” : berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK yang menyatakan bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan angka 4 Peraturan No. IX.A.2.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran umum Perdana Saham kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM *juncto* Peraturan OJK No. 7/2017.
- “Perseroan” : berarti PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu Perusahaan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- “Perubahan dan/atau Tambahan :
Atas Prospektus Ringkas : berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
- “Perusahaan Anak” : berarti perusahaan yang:
1. Saham-sahamnya dimiliki oleh Perseroan dalam jumlah 50% atau lebih dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perusahaan yang bersangkutan; atau
 2. Kebijakan dan pengelolaan perusahaan dikendalikan oleh Perseroan; atau
 3. Laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “PP No. 13/2018” : berarti Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- “Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.



”Prospektus Awal”	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan
”Prospektus Ringkas”	: berarti suatu ringkasan dari isi Prospektus Awal.
”PSAK”	: berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
”Rekening Efek”	: berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
”Rekening Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dan menerima uang pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran.
”Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
”RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPM dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
”RUPSLB”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu pertemuan pemegang saham yang bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan atau masalah-masalah mendadak dan memerlukan penanganan segera karena jika tidak dilaksanakan segera maka akan menghambat operasional perusahaan.
”Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum
”Saham Yang Ditawarkan”	: berarti Saham Baru, yaitu sebesar 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebesar 25,42% (dua puluh lima koma empat dua persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp20,- (dua puluh) yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan
”SEOJK No. 15/2020”	: berarti Surat Edaran No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
”SABH”	: berarti Sistem Administrasi Badan Hukum, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.
”Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dimana penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah Tanggal Penjatahan.



- “Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal dimana penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek;
- “Tanggal Pencatatan” : berarti tanggal dimana pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
- “Tanggal Penjatahan” : berarti suatu tanggal dimana wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha yang seluruhnya tercantum di Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Teknologi Karya Digital Nusa (d/h PT Damai Harapan Sentosa) didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 7 Januari 2011 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 74 tertanggal 16 Maret 2011 yang keduanya dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita SH., notaris yang berkedudukan di Jakarta. Akta pendirian Perusahaan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan Menkumham No. 19005.AH.01.01. Tahun 2011 tertanggal 15 April 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030326.AH.01.09. Tahun 2011 tertanggal 15 April 2011 (“Akta Pendirian Perseroan”).

Anggaran Dasar Entitas telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Mutiara Hartanto S.H., No. 06, tanggal 6 Agustus 2021. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046168.AH.01.02. Tahun 2021, tanggal 27 Agustus 2021.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Entitas bergerak dalam bidang usaha perdagangan, aktivitas pengolahan data, aktivitas konsultasi, aktivitas manajemen, pemrograman komputer dan platform digital serta periklanan. Perseroan berkedudukan di Jakarta Utara.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	2.195.600.000	43.912.000.000	99,80%
Tn David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,14%
Tn Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,06%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.200.000.000	44.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portebel	3.800.000.000	76.000.000.000	

3. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial, Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan *Internet Of Things* (Iot), Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer, Perdagangan Besar Piranti Lunak, Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersil, Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, Penerbitan Piranti Lunak (Software), Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya, Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru, Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas, Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya, Perdagangan



Besar Suku Cadang Elektronik, Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya, Aktivitas Pengolahan Data, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

1. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019)
2. Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial (62015)
3. Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan Internet Of Things (Iot) (62024)
4. Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (62029)

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

1. Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer (46511)
2. Perdagangan Besar Piranti Lunak (46512)
3. Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (63122)
4. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (46100)
5. Penerbitan Piranti Lunak (Software) (58200)
6. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (46523)
7. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (46599)
8. Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (45401)
9. Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas (45402)
10. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya (45405)
11. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (46521)
12. Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya (62090)
13. Aktivitas Pengolahan Data (63111)
14. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)

4. PROSPEK USAHA

Indonesia merupakan negara dengan populasi ke-empat terbesar di dunia dengan lebih dari 270 juta penduduk. Disisi lain pertumbuhan jumlah jalan raya bersifat linear dan pertumbuhan kendaraan bersifat eksponensial. Survey BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah jalan di Indonesia pada tahun 2020 baru mencapai 548.366 km yang meningkat sebesar 0,71% dari tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan kendaraan pada tahun 2020 mencapai 4,95%. Dibandingkan dengan negara lain misalkan di kawasan negara-negara ASEAN, pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia berada pada urutan ketiga setelah Singapura dan Malaysia. Selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan infrastruktur transportasi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pembangunan infrastruktur jalan yang cukup masif dalam beberapa tahun ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas perjalanan yang efisien dan tepat waktu. Kebutuhan akan transportasi publik yang bersifat masal menjadi kian tak terelakkan. Saat ini, Pemerintah telah memperluas cakupan Program Prioritas Penyediaan Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Beberapa kota besar di Indonesia juga telah memperluas layanan transportasi angkutan masal berbasis jalan dengan menambah koridor layanan. Dengan pertumbuhan tersebut serta dukungan dari Pemerintah, kebutuhan akan layanan yang mendukung transportasi publik menjadi sangat tinggi. Untuk dapat meningkatkan penggunaan transportasi publik, maka penyediaan transportasi publik harus memiliki beberapa aspek kualitas. Transportasi publik menjadi pilihan yang harus dapat diandalkan, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Untuk itu Intelligent Transportation System (ITS) menjadi hal yang sangat dibutuhkan.

Saat ini, Perseroan memiliki prospek usaha untuk mengembangkan lini B2B dengan mengeksplorasi potensi bekerjasama dengan dominant player di industri logistik. Dengan semakin besarnya transaksi pembelian barang secara e-commerce, tentunya juga berdampak pada membesarnya market pada industri logistik. Prospek usaha lain adalah pengembangan teknologi untuk masyarakat luas yang bersifat B2C. Salah satu yang tengah direncanakan oleh Perseroan adalah sistem kartu untuk universal payment yang tidak terikat kepada bank tertentu dan bersifat universal. Dengan semakin banyaknya para commuter, penggunaan system universal payment ini menjadi sangat dibutuhkan dan akan sangat memudahkan masyarakat dalam menggunakan berbagai moda transportasi.



Perseroan siap mendukung pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Perseroan sangat optimistis mampu berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur IKN khususnya pembangunan infrastruktur transportasi cerdas dan digitalisasi mobilitas perkotaan, karena mempunyai keahlian dan kapabilitas dalam menyediakan dan mengimplementasikan produk-produk berbasis IOT untuk Smart City dan Smart Mobility sesuai konsep pembangunan infrastruktur cerdas di IKN. Perseroan mempunyai perencanaan matang dalam mengembangkan rekayasa industri transportasi massal berbasis teknologi dan ramah lingkungan seperti Electric Vehicle (EV) berbasis kendaraan tanpa awak (Autonomous Vehicle) guna mendukung pergerakan orang di dalam perkotaan cerdas seperti IKN. Untuk mendukung hal tersebut, saat ini Perseroan sedang menyusun sebuah peta jalan (roadmap) untuk pengembangan dan penerapan sistem transportasi cerdas untuk dapat diterapkan di kota-kota berbasis smart city di Indonesia termasuk Ibukota Nusantara (IKN). Secara keseluruhan, Perseroan akan mendukung implementasi dan standarisasi transportasi cerdas di IKN, diantaranya namun tidak terbatas dalam sistem connected vehicle, autonomus vehicle, green mobility, sistem pembayaran terintegrasi (integrated payment system), sistem angkutan massal cerdas (smart public transportation) termasuk semua sistem cerdas lalu lintas dan mobilitas (smart traffic and mobility) di dalam ekosistem smart city. Diharapkan wujud sinergi tersebut dengan kehadiran dan keterlibatan langsung Perseroan yang dapat memberikan dampak positif kepada IKN dan Indonesia sesuai dengan slogan yang diusung oleh Perseroan yakni “Empowering Management Through Technology

5. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut adalah ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

- a. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Saham Baru
- b. Persentase Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 25,42% (dua puluh lima koma empat dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham
- c. Nilai Nominal : Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham
- d. Harga Penawaran : Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham
- e. Nilai Emisi : Sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah).
- f. Masa Penawaran Umum : 2 – 6 Maret 2023
- g. Tanggal Pencatatan : 8 Maret 2023

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan hak yang sama dan sederajat kepada pemegangnya dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 Per Lembar Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000		6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	2.195.600.000	43.912.000.000	99,80%	2.195.600.000	43.912.000.000	74,43%
Tn David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,14%	3.168.000	63.360.000	0,11%
Tn Rudy Budiman Setiawan Masyarakat	1.232.000	24.640.000	0,06%	1.232.000	24.640.000	0,04%
				750.000.000	15.000.000.000	25,42%



Keterangan	Nilai Nominal Rp20 Per Lembar Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.200.000.000	44.000.000.000	100,00%	2.950.000.000	59.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	3.800.000.000	76.000.000.000		3.050.000.000	61.000.000.000	

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation / ESA*)

Perseroan telah menyetujui program kepemilikan saham Perseroan oleh Karyawan (*Employee Stock Allocation/ESA*) melalui penjatahan saham untuk Para Pemesan Khusus. Berdasarkan persetujuan tersebut, Direksi Perseroan telah menetapkan jumlah saham untuk Program ESA sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari jumlah penerbitan Saham Baru yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana atau sebanyak-banyaknya 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan dalam program ESA kurang dari 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham, maka kekurangan pemesanan tersebut akan diikutsertakan dalam mekanisme dan harga Penawaran Umum yang ditawarkan kepada masyarakat. Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini (sudah termasuk saham yang dialokasikan kepada manajemen dan karyawan dalam program ESA), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Sebelum ESA			Setelah Penawaran Umum Setelah ESA		
	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000		6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	2.195.600.000	43.912.000.000	74,43%	2.195.600.000	43.912.000.000	74,43%
Tn David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,11%	3.168.000	63.360.000	0,11%
Tn Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,04%	1.232.000	24.640.000	0,04%
Masyarakat	750.000.000	15.000.000.000	25,42%	712.500.000	14.250.000.000	24,15%
Karyawan (Program ESA)				37.500.000	750.000.000	1,27%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.950.000.000	59.000.000.000	100,00%	2.950.000.000	59.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	3.050.000.000	61.000.000.000		3.050.000.000	61.000.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per Waran Seri I selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 8 September 2023 sampai dengan 7 Maret 2025 Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.



Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

**Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Setelah ESA Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Setelah ESA Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000		6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	2.195.600.000	43.912.000.000	74,43%	2.195.600.000	43.912.000.000	66,03%
Tn David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,11%	3.168.000	63.360.000	0,10%
Tn Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,04%	1.232.000	24.640.000	0,04%
Masyarakat	712.500.000	14.250.000.000	24,15%	712.500.000	14.250.000.000	21,43%
Karyawan (Program ESA))	37.500.000	750.000.000	1,27%	37.500.000	750.000.000	1,13%
Pemegang Waran Seri I				375.000.000	7.500.000.000	11,28%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.950.000.000	59.000.000.000	100,00%	3.325.000.000	66.500.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	3.050.000.000	61.000.000.000		2.675.000.000	53.500.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

6. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk:

1. Sekitar 30% akan digunakan untuk belanja modal Perseroan dalam bentuk penambahan area operasional yang berlokasi di Jawa Barat. Perseroan juga akan melakukan pengembangan sistem yang sejalan dengan ekspansi Perseroan yang akan dimulai secara bertahap dari kuartal 2 tahun 2023. Transaksi perluasan area operasional direncanakan akan dilakukan dengan pihak ketiga pada kuartal dua tahun 2023, sedangkan penambahan dan pengembangan sistem akan dilakukan dengan pihak ketiga pada kuartal tiga tahun 2023.
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja yang terdiri dari biaya operasional proyek pekerjaan pengembangan smart city dan business solution provider dalam aspek transportasi di berbagai kota di Indonesia, biaya tenaga kerja dan pembelian bahan baku produk serta pengembangan segmen distribusi penjualan produk dan layanan melalui jalur Business-to-Business (B2B) dan Business-to-consumer (B2C) yang digunakan untuk pengembangan lini usaha Business Process Outsourcing (BPO) merupakan usaha penyediaan infrastruktur teknologi informasi kepada operator transportasi yang memiliki hak operasi di suatu kota.

Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.



7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Deassy Roosiana Tresna Handayani, CPA.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanton Dadang & Ali dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSi, CPA.

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H, S.E, CPA.

Dikarenakan Pernyataan Pendaftaran Perseroan tertanggal 11 Oktober 2022, maka Perseroan memenuhi persyaratan POJK No. 7/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana diubah dengan POJK No. 4/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tertanggal 18 Maret 2022 serta SEOJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Maret 2022 serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Laporan keuangan tanggal 30 November 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

DATA KEUANGAN 3 TAHUN BUKU TERAKHIR

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Juli		31 Desember	
	2022***	2021**	2022*	2021***	2021	2020*
Total Aset	83.367.300.740	69.120.307.460	52.193.983.685	30.970.461.882	6.474.404.579	
Total Liabilitas	23.190.851.888	16.516.721.423	23.609.292.984	11.802.177.496	757.563.154	
Total Ekuitas	60.176.448.852	52.603.586.037	28.584.690.701	19.168.284.386	5.716.841.425	

* Tidak dikonsolidasi

**Tidak diaudit

***Tidak dikonsolidasi dan tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Juli		31 Desember		
	2022***	2021**	2022*	2021***	2021	2020*	2019
Pendapatan	84.040.736.448	26.586.202.013	52.413.120.425	18.213.023.663	45.628.035.297	32.702.545.336	6.717.872.001
Laba kotor	34.149.410.258	10.800.848.028	17.776.591.023	8.111.046.205	15.252.905.335	7.567.900.126	2.976.491.858
Laba sebelum pajak penghasilan	17.353.147.592	5.752.020.623	7.324.401.062	4.944.043.161	8.559.445.949	1.926.068.377	166.218.993
Laba tahun berjalan	13.404.525.000	4.500.210.243	5.464.946.418	4.000.531.387	6.677.843.911	1.451.390.942	143.282.875
Laba komprehensif	12.396.056.640	4.260.559.114	4.823.193.825	3.848.026.123	6.416.406.315	1.751.442.961	116.324.115

* Tidak dikonsolidasi

**Tidak diaudit

***Tidak dikonsolidasi dan tidak diaudit



Rasio Keuangan

Keterangan	30 November		31 Juli		31 Desember		
	2022***	2021**	2022*	2021***	2021	2020*	2019
Rasio							
Rasio Likuiditas (x)							
<i>Current ratio</i>	2,51	1,72	2,65	1,59	1,79	1,52	18,45
<i>Quick ratio</i>	1,94	1,62	1,86	1,48	1,64	1,30	18,28
<i>Cash ratio</i>	0,01	0,01	0,23	0,05	0,29	0,83	5,13
Rasio Profitabilitas (%)							
<i>Return on Asset</i>	14,87%	8,48%	6,98%	8,88%	12,29%	5,66%	1,80%
<i>Return on Equity</i>	20,60%	16,12%	9,17%	16,72%	22,45%	9,14%	2,03%
Rasio Solvabilitas (x)							
<i>Debt-to-asset</i>	0,28	0,47	0,24	0,47	0,45	0,38	0,12
<i>Debt-to-equity</i>	0,39	0,90	0,31	0,88	0,83	0,62	0,13
<i>Debt service coverage ratio****</i>	4,22	3,34	1,67	0,99	5,69	0,83	N/A
<i>Interest coverage ratio****</i>	33,43	8,00	20,79	8,13	9,70	2,44	N/A

* Tidak dikonsolidasi

** Tidak diaudit

*** Tidak dikonsolidasi dan tidak diaudit

**** Debt Service Coverage Ratio dan Interest Coverage Ratio tidak diperhitungkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, karena pada tahun 2019 Perseroan tidak memiliki pinjaman.

8. FAKTOR RISIKO

Risiko Utama

Risiko Implementasi Fungsional Hardware dan Software

Risiko Usaha

1. Risiko Ketersediaan Bahan Baku
2. Risiko Perkembangan Teknologi
3. Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Risiko Permodalan
5. Risiko Atas Reputasi Perseroan
6. Risiko Persaingan

Risiko Umum

1. Risiko Perizinan
2. Risiko Kebijakan Pemerintah
3. Risiko Gugatan Hukum
4. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
5. Risiko Kebijakan Negara Lain atau Peraturan Internasional
6. Risiko Perekonomian Secara Makro atau Global

Risiko yang berkaitan dengan Investasi pada Saham Perseroan

1. Harga Saham Perseroan Mungkin Mengalami Fluktuasi yang Signifikan di Kemudian Hari
2. Likuiditas Saham Perseroan
3. Penjualan Saham di Masa Depan Dapat Memiliki Dampak Merugikan pada Harga Pasar Saham
4. Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari
5. Kepentingan Pemegang Saham Pengendali Dapat Bertentangan dengan Kepentingan Pembeli Saham yang Ditawarkan



9. KEBIJAKAN DIVIDEN PERSEROAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan, pemegang saham baru yang memperoleh saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham akan memiliki hak-hak yang sama dan setara dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih dimulai dari tahun 2024 memakai buku untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus.



I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 25,42% (dua puluh lima koma empat dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Subrekening Efek pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah).

Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak-banyaknya sebesar 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham. Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,05% (tujuh belas koma nol lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke dua pencatatan Waran Seri I. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 20, - (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 8 September 2023 sampai dengan 7 Maret 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya adalah sebesar Rp93.750.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



Teknologi Karya Digital Nusa

PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang industri penyediaan solusi sistem informasi berbasis telematika dan *Internet of Things* (IoT) untuk pengembangan *smart city*

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826,
Jl. Trembesi Pademangan Timur, Kec. Pademangan Kota Adm. Jakarta Utara
Telp: (021)65867225
Email: corporate.secretary@tkdn.co.id
Website: tkdn.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO IMPLEMENTASI FUNGSIONAL HARDWARE DAN SOFTWARE. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.



Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan pemegang saham dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 110 tertanggal 28 September 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Nurhayati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070056.AH.02.03.TAHUN 2022 tertanggal 28 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0193465.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 September 2022; (ii) diberitahukan kepada Menkumham (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan (a) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0296270 tertanggal 28 September 2022, dan (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0059742 tanggal 28 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0193465.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 September 2022 ("**Akta No. 110/2022**"), susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	2.195.600.000	43.912.000.000	99,80%
Tn David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,14%
Tn Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,06%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.200.000.000	44.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portebel	3.800.000.000	76.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah Sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 25,42% (dua puluh lima koma empat dua persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 Per Lembar Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000		6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	2.195.600.000	43.912.000.000	99,80%	2.195.600.000	43.912.000.000	74,43%
Tn David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,14%	3.168.000	63.360.000	0,11%
Tn Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,06%	1.232.000	24.640.000	0,04%
Masyarakat				750.000.000	15.000.000.000	25,42%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.200.000.000	44.000.000.000	100,00%	2.950.000.000	59.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	3.800.000.000	76.000.000.000		3.050.000.000	61.000.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation / ESA*)

Perseroan telah menyetujui program kepemilikan saham Perseroan oleh Karyawan (*Employee Stock Allocation/ESA*) melalui penjatahan saham untuk Para Pemesan Khusus. Berdasarkan persetujuan tersebut, Direksi Perseroan telah menetapkan jumlah saham untuk Program ESA sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari jumlah penerbitan Saham Baru yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana atau sebanyak-banyaknya 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham.



Dalam hal jumlah saham yang dipesan dalam program ESA kurang dari 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham, maka kekurangan pemesanan tersebut akan diikutsertakan dalam mekanisme dan harga Penawaran Umum yang ditawarkan kepada masyarakat. Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini (sudah termasuk saham yang dialokasikan kepada manajemen dan karyawan dalam program ESA), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Sebelum ESA			Setelah Penawaran Umum Setelah ESA		
	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000		6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Daya Kemilau						
Nusantara Investama	2.195.600.000	43.912.000.000	74,43%	2.195.600.000	43.912.000.000	74,43%
Tn David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,11%	3.168.000	63.360.000	0,11%
Tn Rudy Budiman						
Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,04%	1.232.000	24.640.000	0,04%
Masyarakat	750.000.000	15.000.000.000	25,42%	712.500.000	14.250.000.000	24,15%
Karyawan (Program ESA)				37.500.000	750.000.000	1,27%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.950.000.000	59.000.000.000	100,00%	2.950.000.000	59.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	3.050.000.000	61.000.000.000		3.050.000.000	61.000.000.000	

Program ESA melalui Bonus Saham merupakan program pemberian pasti dari saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana untuk pegawai Perseroan dengan tujuan sebagai berikut:

- Sebagai insentif bagi para pegawai atas kinerja yang telah dicapai;
- Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk turut memiliki saham Perseroan;
- Memberikan motivasi bagi pegawai untuk meningkatkan prestasi dan kinerjanya, serta untuk mencapai target Perseroan;
- Mempertahankan pegawai yang telah berprestasi dan memberikan kontribusi penting bagi Perseroan;
- Menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan pegawai untuk kemajuan Perseroan.

Program ESA diimplementasikan oleh Perseroan dalam hubungannya dengan Penawaran Umum Perdana dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan IX. A. 7 dalam rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum yang memperkenankan maksimum 10% (sepuluh persen) dari saham yang ditawarkan kepada publik, dialokasikan sebagai jatah pasti kepada pegawai Perseroan berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Perseroan. ("**Saham ESA Bonus**")

Kriteria pihak-pihak yang berpartisipasi dalam Program ESA:

- Pegawai yang tercatat pada tanggal **28 Juli 2022**;
- Pegawai yang tercatat pada saat Program ESA Bonus Saham dilaksanakan;
- Pegawai yang tidak sedang dikenakan sanksi administratif.

Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan Program ESA Bonus Saham

- Sumber dana pembayaran Saham Esa Bonus akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayarkan secara penuh oleh Perseroan dari sebagian keuntungan bersih Perseroan tahun berjalan sesuai harga saham dalam Penawaran Umum Perdana, untuk masing-masing Saham Esa Bonus.
- Batasan alokasi Saham Esa Bonus untuk setiap level pegawai tetap akan ditetapkan berdasarkan kebijakan Direksi Perseroan, dengan mempertimbangkan pada kinerja produktivitas pegawai.
- Mekanisme pendistribusian Saham ESA Bonus adalah sebagai berikut:



- Perseroan akan memberikan Saham ESA Bonus secara cuma-cuma kepada pegawai yang memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas, atas nama masing-masing pegawai pada tanggal distribusi dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
- Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pembayaran atas Saham ESA Bonus ke rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya pada hari kerja kedua dalam Masa Penawaran Umum.
- Saham ESA Bonus yang diberikan dalam Program ESA Bonus Saham akan dikenakan *lock-up* atau tidak dapat diperjualbelikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek.
- Saham ESA Bonus dicatatkan oleh Perseroan sebagai insentif kepada pegawai serta merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Hak kepesertaan dalam Program ESA Bonus Saham akan gugur apabila :
 - Pegawai berhenti bekerja dari Perseroan dalam periode *lock-up*, kecuali apabila pegawai tersebut pensiun.
 - Apabila pegawai terlibat perkara kriminal dalam kurun waktu *lock-up*.
 - Pegawai menyerahkan hak kepesertaannya kepada Perseroan atas kemauan sendiri.
 - Direksi dengan ini menunjuk pejabat bagian Nominasi dan Remunerasi untuk menjadi pengelola Program ESA Bonus Saham.
 - Apabila saham yang diberikan dalam Program ESA Bonus Saham kurang dari jumlah yang dialokasikan, maka sisanya akan ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana.
 - Program ESA Bonus Saham akan dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perseroan dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah pegawai yang berhak mengikuti program ESA adalah sebanyak-banyaknya 40 orang.

Hal-hal teknis lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Program ESA Bonus Saham yang belum tercantum di dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian oleh Direksi Perseroan dan diinformasikan kepada seluruh peserta program ESA Bonus Saham dengan selalu memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Penerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,05% (tujuh belas koma nol lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 7 September 2023 sampai dengan 6 Maret 2025 Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I dapat dilihat pada Huruf G dibawah ini.



Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

**Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Setelah ESA Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Setelah ESA Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000		6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	2.195.600.000	43.912.000.000	74,43%	2.195.600.000	43.912.000.000	66,03%
Tn David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,11%	3.168.000	63.360.000	0,10%
Tn Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,04%	1.232.000	24.640.000	0,04%
Masyarakat	712.500.000	14.250.000.000	24,15%	712.500.000	14.250.000.000	21,43%
Karyawan (Program ESA)	37.500.000	750.000.000	1,27%	37.500.000	750.000.000	1,13%
Pemegang Waran Seri I				375.000.000	7.500.000.000	11,28%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.950.000.000	59.000.000.000	100,00%	3.325.000.000	66.500.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	3.050.000.000	61.000.000.000		2.675.000.000	53.500.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- a. Daftar Pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegang Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjabatan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjabatan.
- b. Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Waran Seri I.
- c. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- d. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
- e. Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
- f. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
- g. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan Waran Seri I terkait.
- h. Pemegang Waran Seri I berarti individu atau orang-orang atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.



- i. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Emiten yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
- j. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke 2 (dua) pencatatan Waran Seri I, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham

B. Hak Atas Waran Seri I

- a. Setiap pemegang saham yang memiliki 2 Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan yaitu 3 Maret 2023 berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.
- b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I.
- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya 7 Maret 2025 pada pukul 15.00 (lima belas) WIB, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.



E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek diterbitkan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum ulang tahun ke 2 (dua) pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia, yaitu tanggal 8 September 2023 – 7 Maret 2025 pada pukul 15.00 (lima belas) WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan;
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali;
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham;
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan pengecekan terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya apabila: (i) Pengelola Administrasi Waran Seri I diberi kuasa oleh Emiten, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi dari bank tempat Emiten membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*); (ii) Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak diberi kuasa oleh Emiten, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi kepada Emiten mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja Emiten tidak memberikan jawaban, maka Emiten dianggap menyetujui. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Emiten, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I;
- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
- h. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak yang sama seperti saham yang lainnya yang telah diterbitkan Emiten kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham;
- i. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek;



- j. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I, sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif, sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
- k. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam penitipan kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
- l. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good funds*) kepada rekening bank Perseroan:

PT Bank Mayapada International Tbk
Cabang Jakarta Sudirman
Atas nama: PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk.
No. Rek.: 10030015487

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:

- ❖ Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*) atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- ❖ Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- ❖ Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT).

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

- Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri I;
- Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;
- Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan



- berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai Pemegang Waran Seri I;
- g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I;
 - h. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

I. Penggantian Waran Seri I

- a. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- b. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
- c. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- e. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- f. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan;
- g. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- h. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.



J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.

Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading

Jakarta Utara, Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Indonesia

Telepon : (021) 2974 5222, Fax : (021) 2928 9961

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Emiten lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

L. Penggabungan dan Peleburan

- a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Emiten berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada Pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dan harga pelaksanaan, yang mana hanya dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf G di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I;
- Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
- Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang berlaku, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.



N. Perubahan

Dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran, kecuali mengenai jangka waktu serta Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran, yang mana sehubungan dengan Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran hanya dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf G di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Yang Belum Dilaksanakan.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Wara sesuai dengan Syarat dan Kondisi angka 11 (sebelas) selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran lebih dari 50% (lima puluh persen) yang belum dilaksanakan tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka Pemegang Waran dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil mengenai perubahan tersebut dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran, Syarat Dan Kondisi, serta Peraturan Pasar Modal.
- d. Setelah akta perubahan Penerbitan Waran ditandatangani maka harus diberitahukan kepada Pemegang Waran, pemberitahuan atas setiap perubahan Penerbitan Waran sesuai dengan Syarat dan Kondisi angka 11 (sebelas)
- e. Perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran sejak akta perubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran dan Syarat Dan Kondisi serta Peraturan Pasar Modal.

O. Hukum yang berlaku

Syarat dan kondisi Waran ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pencatatan Saham dan Waran Seri I Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebanyak 25,42% (dua puluh lima koma empat dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, sehingga saham yang akan dicatatkan sebanyak 2.950.000.000 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta) saham yang terdiri dari 100,00% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, serta secara bersamaan Perseroan akan menerbitkan dan mencatatkan sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,05% (tujuh belas koma nol lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.

Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Sesuai dengan Pasal 2 dalam POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, DKNI yang mendapatkan seluruhnya sahamnya berdasarkan Akta No. 154/2022, Akta No. 170/2022, dan Akta No. 108/2022, serta David Santoso dan Rudy Budiman yang memperoleh tambahan saham berdasarkan Akta No. 170/2022, dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya yang diperoleh berdasarkan akta-akta tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif.



Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 30 November 2022, David Santoso, sebagai pihak pengendali Perseroan menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan pengedaliannya sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana menjadi efektif.

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN KECUALI SAHAM BARU YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN WARAN SERI I.



II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 30% akan digunakan untuk belanja modal Perseroan dalam bentuk penambahan area operasional yang berlokasi di Jawa Barat. Perseroan juga akan melakukan pengembangan sistem yang sejalan dengan ekspansi Perseroan yang akan dimulai secara bertahap dari kuartal 2 tahun 2023. Transaksi perluasan area operasional direncanakan akan dilakukan dengan pihak ketiga pada kuartal dua tahun 2023, sedangkan penambahan dan pengembangan sistem akan dilakukan dengan pihak ketiga pada kuartal tiga tahun 2023.
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja yang terdiri dari biaya operasional proyek pekerjaan pengembangan smart city dan business solution provider dalam aspek transportasi di berbagai kota di Indonesia, biaya tenaga kerja dan pembelian bahan baku produk serta pengembangan segmen distribusi penjualan produk dan layanan melalui jalur *Business-to-Business* (B2B) dan *Business-to-consumer* (B2C) yang digunakan untuk pengembangan lini usaha *Business Process Outsourcing* (BPO) merupakan usaha penyediaan infrastruktur teknologi informasi kepada operator transportasi yang memiliki hak operasi di suatu kota.

Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja.

Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan Waran Seri I, dalam hal transaksi yang dilakukan: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020, dan/ atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan wajib menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari sumber lainnya seperti pinjaman kepada pemegang saham, pinjaman bank dan institusi keuangan lainnya.



Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 3,812% (tiga koma delapan satu dua persen) dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 0,861%;
- b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 0,150%;
- c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,100%;
- d. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,935% yang terdiri dari; Akuntan Publik: 0,417%; Konsultan Hukum: 0,444%; dan Notaris 0,074%;
- e. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,081% yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek; dan
- f. Biaya Lain-lain: 1,685% yang terdiri dari biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI, KSEI, percetakan, iklan dan lain-lain.



III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang telah diaudit oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan Opini wajar tanpa modifikasi berdasarkan laporan tanggal 25 Januari 2023. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp16.516.721.423, dengan perincian sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	7.222.399.388
Utang usaha	
Pihak ketiga	1.708.668.293
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	273.852.135
Pihak ketiga	304.667.263
Beban yang masih harus dibayar	486.321.306
Utang pajak	3.692.755.455
Bagian jangka pendek	
Utang lembaga keuangan	201.210.614
Jumlah liabilitas jangka pendek	13.889.874.454
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Bagian jangka panjang	
Utang Lembaga keuangan	180.920.123
Liabilitas diestimasi atas imbalan pascakerja	2.445.926.846
Jumlah liabilitas jangka Panjang	2.626.846.969
Jumlah Liabilitas	16.516.721.423

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank Jangka Pendek

Utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp7.222.399.388, yang terdiri dari:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.195.830.405
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.026.568.983
Jumlah	7.222.399.388

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”)

Berdasarkan Perjanjian antara Perseroan dengan BRI No. 3028/KC-V/ADK/11/2020, tanggal 16 November 2020, Perseroan memperoleh fasilitas:

- Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (W/A) sebesar Rp4.000.000.000.
- Kredit Modal Kerja Credit Overeenkomst (CO) Tetap sebesar Rp1.000.000.000.



Tingkat suku bunga fasilitas kredit ini sebesar 9,95% sampai dengan 13% per tahun. Jangka waktu fasilitas berlaku sampai dengan tanggal 16 November 2021. Pinjaman dijamin dengan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1713 atas nama Rode Rosita Sari yang akan dilakukan balik nama waris ke ahli waris (David Santoso, Kezia Natania Santoso dan Nicholas Natanael Santoso).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 64 dan No. 65, tanggal 24 Desember 2021, pinjaman dengan BRI telah diperpanjang sampai dengan tanggal 16 November 2022. Tingkat suku bunga fasilitas kredit sebesar 9,95% sampai dengan 13% per tahun.

Jaminan fasilitas kredit atas tanah dan bangunan telah dibalik nama sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3600 atas nama pada tanggal 4 Januari 2021.

Selama periode pinjaman, Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari BRI tidak diperkenankan untuk:

- Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan, *go public*.
- Mengikatkan diri sebagai peminjam terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada pada saat ini.
- Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, dan atau perubahan pemilikan saham, dan komposisi permodalan.
- Memberikan piutang kepada pemegang saham dengan alasan apapun.
- Melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan.
- Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya.
- Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset perusahaan dengan nilai yang menurut pendapat pejabat bank dapat mengganggu cashflow usaha debitur dalam jangka waktu 1 tahun.
- Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang cash flow tidak terganggu serta *Net Working* (NWC) masih positif.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri debitur sendiri.
- Melunasi utang kepada pemegang saham sebelum hutang di BRI dilunasi terlebih dahulu.

Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana di atas, berdasarkan Surat No. B.99.e-RO-JKS/RLG/08/2022, tanggal 29 Agustus 2022, Perseroan telah mendapat persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Mengenai pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) serta penghapusan-penghapusan ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik, sebagaimana telah diakomodasi pada (i) Akta Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (W/A) Plafond No. 84 tertanggal 28 November 2022; dan (ii) Akta Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja CO Tetap No. 85 tertanggal 28 November 2022 yang keduanya dibuat di hadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Adapun berdasarkan kedua addendum tersebut, ketentuan terkait hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan BRI terlebih dahulu, telah berubah menjadi sebagai berikut:

- Melakukan kegiatan usaha dan turut serta dalam (i) kegiatan usaha yang bersifat spekulatif dan (ii) Usaha yang bertentangan dengan adat istiadat setempat, Undang-Undang termasuk lingkungan.
- Mengalihkan/menyewakan agunan kredit kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bank.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bank.
- Mengambil pinjaman dari Bank atau institusi keuangan lainnya tanpa pemberitahuan tertulis

Lebih lanjut, berdasarkan addendum-addendum di atas, pinjaman dengan BRI kembali diperpanjang sampai dengan tanggal 16 November 2023.

Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp4.195.830.405, Rp999.586.075, dan Rp1.000.000.000.

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 64 pada tanggal 26 April 2022, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari Mandiri berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional (M71) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bersifat Revolving. Jumlah fasilitas maksimal adalah sebesar Rp10.000.000.000, termasuk Sublimit Fasilitas Non-Cash Loan Bank Garansi sebesar Rp2.000.000.000 dengan suku bunga 9,50% per tahun. Kredit bertujuan dalam rangka tambahan modal kerja untuk pekerjaan atas dasar kontrak dengan Kementerian. Jangka waktu fasilitas ini sampai dengan tanggal 25 April 2023.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- Tanah dan Bangunan Ruko 3 lantai, yang berlokasi di Komplek Ruko Batu Ceper Permai, Jalan Batu Ceper Permai Blok V No. 18, Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang dengan Sertifikat Hak Milik No. 2860 atas nama David Santoso.
- Fidusia atas piutang senilai Rp12.500.000.000.

Selama periode perjanjian, tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:

- Melakukan perubahan anggaran dasar.
- Memindahtangankan barang agunan aset tetap.
- Menerima pinjaman baru dari pihak lain
- Mengikat diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain.
- Menyewakan objek agunan aset tetap.
- Mengambil bagian dividen atau modal.
- Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit.
- Mengalihkan kepemilikan saham atau membubarkan Perseroan.
- Berpindah lokasi kantor atau mengganti nomor telepon.
- Mengajukan restrukturisasi Covid-19 atas fasilitas kredit produktif.

Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp3.026.568.983.

Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 17 Oktober 2022.

2. Utang usaha

Utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp1.708.668.293, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga:	
PT Teknologi Rancang Olah Nusantara	981.427.533
PT Asaba	637.710.387
PT Softorb Technology Indonesia	55.500.000
Kristo Hananto	33.300.000
PT Easy Go Indonesia	382.950
B Smart Technology	347.423
Jumlah	1.708.668.293

PT Teknologi Rancang Olah Nusantara bukan lagi pihak berelasi sejak 14 Juli 2022.

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha kepada pihak ketiga tersebut.



3. Utang lain-lain

Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp578.519.398. Berikut adalah rincian dari akun utang lain-lain:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Berelasi	
PT Anugrah Damai Yaksa Teknologi	273.852.135
Pihak Ketiga	
PT Teknologi Rancang Ola Nusantara	193.540.509
PT Galaksak Brilliant Solusi	101.086.570
PT Tron Bandung Raya	6.015.180
Lain-lain	4.025.004
TOTAL UTANG LAIN-LAIN	578.519.398

Seluruh utang lain-lain Entitas belum jatuh tempo.

PT Teknologi Rancang Olah Nusantara bukan lagi pihak berelasi sejak 14 Juli 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, utang lain-lain – pihak berelasi terdapat bagian atas utang dividen kepada pemegang saham sebesar Rp1.500.000.000 masing-masing sebesar Rp1.080.000.000 dan Rp420.000.000 untuk David Santoso dan Rudy Budiman Setiawan.

4. Beban Masih Harus Dibayar

Beban masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp486.321.306. Berikut adalah rincian dari akun beban masih harus dibayar.

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Jasa konsultan	303.750.000
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	150.981.403
Bunga	31.589.903
TOTAL BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR	486.321.306

Beban masih harus dibayar berasal dari Jasa konsultan dan badan penyelenggara Jaminan Sosial.

5. Utang Lembaga Keuangan

Utang Lembaga Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp180.920.123. Berikut adalah rincian dari akun utang Lembaga keuangan.

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT CIMB Niaga Auto Finance	382.130.737
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	201.210.614
TOTAL UTANG LEMBAGA KEUANGAN	180.920.123

PT CIMB Niaga Auto Finance

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 453102100116 tanggal 7 Mei 2021, Entitas memperoleh fasilitas pembiayaan multiguna dari PT CIMB Niaga Auto Finance sebesar Rp591.500.000 dengan jangka waktu selama 3 tahun, suku bunga sebesar 11,10% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan unit kendaraan milik Perseroan.



6. Liabilitas imbalan pasca kerja

Berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, aktuaris independen, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dalam laporannya masing-masing No. 581/IPK/KKA-TBA/IX-2022, tanggal 6 September 2022, No. 432/IPK/KKA-TBA/VI-2022, tanggal 19 April 2022, No. 196/IPK/KKA-TBA/II-2021, tanggal 25 Februari 2021 dan No. 574/IPK/KKA-TBA/XII-2020, tanggal 21 Desember 2021 untuk tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Entitas mencatat imbalan pasti atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan masing-masing sebesar Rp2.445.926.846, Rp707.342.966, Rp145.478.321 dan Rp413.349.726 pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang disajikan sebagai akun "Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja" dalam laporan posisi keuangan.

Jumlah karyawan yang berhak diperhitungkan untuk imbalan pascakerja tersebut pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah 61, 32, 25 dan 17 karyawan.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program, namun sebagian akan di-offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Beberapa asumsi yang digunakan untuk perhitungan aktuarial tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2022
Usia Pensiun normal	56 tahun
Tingkat kenaikan gaji	8% per tahun
Tingkat mortalitas	TMI IV-2019
Tingkat diskonto	7,44%
Metode aktuarial	<i>Projected Unit Credit</i>

Besarnya beban yang timbul sehubungan dengan program imbalan karyawan adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
Biaya Jasa Kini	865.461.327
Biaya Bunga	50.362.819
TOTAL	915.824.146

Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai "Beban Umum dan Administrasi". Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	707.342.966
Beban imbalan kerja karyawan tahun berjalan	915.824.146
Pengukuran Kembali liabilitas imbalan kerja	822.759.734
SALDO AKHIR LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA	2.445.926.846



Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban jasa kini.

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
Tingkat Diskonto	
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	2.281.314.799
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	2.633.477.408
Tingkat Kenaikan Gaji	
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	2.630.611.794
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	2.280.680.035

Manajemen Entitas berpendapat bahwa jumlah penyisihan tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 11/2020, Peraturan Pemerintah No. 35/2021 dan PSAK No. 24 (Penyesuaian 2018).

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 31 JULI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. HINGGA DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 31 JULI 2022 PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 JULI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR HINGGA DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TERHADAP PINJAMAN-PINJAMAN YANG DIMILIKI PERSEROAN.

BERKAITAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADANYA *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor wajib membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini berikut dengan penjelasan manajemen sebagaimana disajikan pada Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen, serta catatan atas laporan keuangan Perseroan sebagaimana terlampir pada Bab XVII Prospektus ini.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Deassy Roosiana Tresna Handayani, CPA.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanton Dadang & Ali dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSi, CPA.

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H, S.E, CPA.

Dikarenakan Pernyataan Pendaftaran Perseroan tertanggal 11 Oktober 2022, maka Perseroan memenuhi persyaratan POJK No. 7/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana diubah dengan POJK No. 4/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tertanggal 18 Maret 2022 serta SEOJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Maret 2022 serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Laporan keuangan tanggal 30 November 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November	31 Juli	31 Desember		
	2022***	2022*	2021	2020*	2019
Aset					
Aset Lancar					
Kas dan bank	123.562.690	3.243.910.019	6.544.397.027	9.657.303.253	1.766.051.113
Piutang usaha:					
Pihak berelasi - neto	2.516.849.126	3.276.731.659	-	2.639.597.477	-
Pihak ketiga - neto	22.595.707.300	7.790.516.271	13.493.042.361	466.539.750	190.795.000
Aset Kontrak	3.088.153.004	3.935.551.534	-	-	-
Piutang lain-lain:					
Pihak berelasi - neto	-	248.299.204	9.477.158.865	1.930.393.427	4.244.811.799
Pihak ketiga - neto	2.618.267.320	4.095.085.016	7.463.145.870	-	89.903.500
Persediaan	11.078.407.716	11.048.784.140	3.354.466.500	2.471.723.810	60.125.193
Biaya dibayar di muka	-	-	-	172.303.000	-
Pajak dibayar di muka	4.028.700.565	1.781.544.391	-	-	-
Uang muka	-	-	99.108.400	329.306.617	-
Aset lancar lainnya	3.170.760.000	1.452.510.000	50.000.000	-	-
Jumlah Aset Lancar	49.220.407.721	36.872.932.234	40.481.319.023	17.667.167.334	6.351.686.605
Aset Tidak Lancar					
Aset pajak tangguhan	833.082.983	612.493.938	226.463.110	44.405.723	103.337.432
Uang muka	8.152.600.000	6.151.941.961	-	-	-
Investasi saham	3.747.937.080	3.747.937.080	-	-	-
Aset hak guna - neto	101.983.332	75.350.000	51.700.000	55.000.000	-
Aset takberwujud - neto	20.174.870.005	20.485.166.673	10.334.375.004	13.128.125.000	-
Aset tetap - neto	1.136.419.619	1.174.485.574	1.100.126.548	75.763.825	19.380.542
Jumlah Aset Tidak Lancar	34.146.893.019	32.247.375.226	11.712.664.662	13.303.294.548	122.717.974
Jumlah Aset	83.367.300.740	69.120.307.460	52.193.983.685	30.970.461.882	6.474.404.579



Keterangan	30 November	31 Juli	31 Desember		
	2022***	2022*	2021	2020*	2019
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang bank jangka pendek	4.693.122.044	7.222.399.388	999.586.075	7.400.000.000	-
Utang usaha:					
Pihak berelasi	-	-	1.898.763.900	-	-
Pihak ketiga	4.226.267.126	1.708.668.293	13.221.608.036	710.996.503	-
Liabilitas kontrak	922.105.879	-	-	-	-
Utang lain lain:					
Pihak berelasi	-	273.852.135	2.603.825.127	1.560.000.000	176.837.044
Pihak ketiga	1.806.640.184	304.667.263	1.772.343.969	600.000.000	9.300.000
Beban masih harus dibayar	813.027.961	486.321.306	4.030.428	630.611.352	142.606.407
Utang pajak	6.970.627.641	3.692.755.455	1.920.243.118	755.091.320	15.469.977
Bagian jangka pendek utang lembaga keuangan	215.670.609	201.210.614	178.199.201	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	19.647.461.444	13.889.874.454	22.598.599.854	11.656.699.175	344.213.428
Liabilitas Jangka Panjang					
Bagian jangka panjang utang lembaga keuangan	103.987.095	180.920.123	303.350.164	-	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	3.439.403.349	2.445.926.846	707.342.966	145.478.321	413.349.726
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.543.390.444	2.626.846.969	1.010.693.130	145.478.321	413.349.726
Jumlah Liabilitas	23.190.851.888	16.516.721.423	23.609.292.984	11.802.177.496	757.563.154
Ekuitas					
Modal ditempatkan dan disetor penuh	44.000.000.000	44.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	1.250.000.000
Tambahan modal disetor	-	-	3.000.000.000	-	-
Saldo laba	17.173.261.549	9.233.682.967	10.573.035.038	3.895.191.127	3.958.297.388
Komponen ekuitas lain	(996.812.697)	(630.096.930)	11.655.663	273.093.259	(26.958.760)
Sub-jumlah	60.176.448.852	52.603.586.037	28.584.690.701	19.168.284.386	5.181.338.628
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	535.502.797
Jumlah Ekuitas	60.176.448.852	52.603.586.037	28.584.690.701	19.168.284.386	5.716.841.425
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	83.367.300.740	69.120.307.460	52.193.983.685	30.970.461.882	6.474.404.579

* Tidak dikonsolidasi

**Tidak diaudit

***Tidak dikonsolidasi dan tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Juli		31 Desember		
	2022***	2021**	2022*	2021***	2021	2020*	2019
Pendapatan	84.040.736.448	26.586.202.013	52.413.120.425	18.213.023.663	45.628.035.297	32.702.545.336	6.717.872.001
Beban Pokok Pendapatan	(49.891.326.190)	(15.785.353.985)	(34.636.529.402)	(10.101.977.458)	(30.375.129.962)	(25.134.645.210)	(3.741.380.143)
Lab Kotor	34.149.410.258	10.800.848.028	17.776.591.023	8.111.046.205	15.252.905.335	7.567.900.126	2.976.491.858
Pendapatan lain – lain	120.101.926	23.327.738	88.666.372	20.444.037	22.003.164	18.641.948	9.431.933
Beban penjualan	(1.419.579.203)	(255.054.344)	(794.268.398)	(186.873.392)	(259.419.344)	(757.483.981)	(71.798.165)
Beban umum dan administrasi	(14.801.196.663)	(3.977.873.620)	(9.270.226.190)	(2.295.175.507)	(5.077.807.090)	(3.530.037.155)	(2.741.027.200)
Beban keuangan	(535.117.607)	(821.674.205)	(370.044.070)	(693.893.821)	(983.426.035)	(1.336.133.261)	-
Beban lain-lain	(160.471.119)	(17.552.974)	(106.317.675)	(11.504.361)	(394.810.081)	(36.819.300)	(6.879.433)
Lab Sebelum Beban Pajak Penghasilan	17.353.147.592	5.752.020.623	7.324.401.062	4.944.043.161	8.559.445.949	1.926.068.377	166.218.993
Beban Pajak Penghasilan							
Pajak Kini	(4.110.101.160)	(1.352.369.702)	(1.903.776.820)	(1.007.504.070)	(1.991.303.116)	(500.375.783)	(47.441.589)
Pajak Tangguhan	322.180.079	100.559.322	205.023.687	63.992.296	109.701.078	25.698.348	24.505.471
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(3.787.921.081)	(1.251.810.380)	(1.698.753.133)	(943.511.774)	(1.881.602.038)	(474.677.435)	(22.936.118)
Lab Periode/Tahun Berjalan Sebelum Penyesuaian Proforma	13.565.226.511	4.500.210.243	5.625.647.929	4.000.531.387	6.677.843.911	1.451.390.942	143.282.875
Proforma laba rugi	(160.701.511)	-	(160.701.511)	-	-	-	-
Lab Periode/Tahun Berjalan	13.404.525.000	4.500.210.243	5.464.946.418	4.000.531.387	6.677.843.911	1.451.390.942	143.282.875



Keterangan	30 November		31 Juli		31 Desember		
	2022***	2021**	2022*	2021***	2021	2020*	2019
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain							
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi							
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti	(1.292.908.153)	(305.977.746)	(822.759.734)	(194.713.111)	(333.793.905)	384.682.076	(35.945.013)
Pajak penghasilan terkait	284.439.793	66.326.617	181.007.141	42.207.847	72.356.309	(84.630.057)	8.986.253
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak	(1.008.468.360)	(239.651.129)	(641.752.593)	(152.505.264)	(261.437.596)	300.052.019	(26.958.760)
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	12.396.056.640	4.260.559.114	4.823.193.825	3.848.026.123	6.416.406.315	1.751.442.961	116.324.115
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	13.404.525.000	4.500.210.243	5.464.946.418	4.000.531.387	6.677.843.911	1.451.390.942	157.780.078
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	(14.497.203)
Laba Periode/Tahun Berjalan	13.404.525.000	4.500.210.243	5.464.946.418	4.000.531.387	6.677.843.911	1.451.390.942	143.282.875
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	12.396.056.640	4.260.559.114	4.823.193.825	3.848.026.123	6.416.406.315	1.751.442.961	130.821.318
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	(14.497.203)
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	12.396.056.640	4.260.559.114	4.823.193.825	3.848.026.123	6.416.406.315	1.751.442.961	116.324.115
Laba (Rugi) Per Saham Dasar	10,22	6,00	6,82	5,33	8,90	176,32	12.622,41

* Tidak dikonsolidasi

**Tidak diaudit

***Tidak dikonsolidasi dan tidak diaudit

Rasio Keuangan

Keterangan	30 November		31 Juli		31 Desember		
	2022***	2021**	2022*	2021***	2021	2020*	2019
Rasio							
Rasio Likuiditas (x)							
Current ratio	2,51	1,72	2,65	1,59	1,79	1,52	18,45
Quick ratio	1,94	1,62	1,86	1,48	1,64	1,30	18,28
Cash ratio	0,01	0,01	0,23	0,05	0,29	0,83	5,13
Rasio Profitabilitas (%)							
Return on Asset	14,87%	8,48%	6,98%	8,88%	12,29%	5,66%	1,80%
Return on Equity	20,60%	16,12%	9,17%	16,72%	22,45%	9,14%	2,03%
Rasio Solvabilitas (x)							
Debt-to-asset	0,28	0,47	0,24	0,47	0,45	0,38	0,12
Debt-to-equity	0,39	0,90	0,31	0,88	0,83	0,62	0,13
Debt service coverage ratio***	4,22	3,34	1,67	0,99	5,69	0,83	N/A
Interest coverage ratio***	33,43	8,00	20,79	8,13	9,70	2,44	N/A

* Tidak dikonsolidasi

** Tidak diaudit

*** Tidak dikonsolidasi dan tidak diaudit

**** Debt Service Coverage Ratio dan Interest Coverage Ratio tidak diperhitungkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, karena pada tahun 2019 Perseroan tidak memiliki pinjaman.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Deassy Roosiana Tresna Handayani, CPA.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanton Dadang & Ali dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSi, CPA.

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H, S.E, CPA

1. UMUM

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (d/h PT Damai Harapan Sentosa) didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 7 Januari 2011 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 74 tertanggal 16 Maret 2011 yang keduanya dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita, S.H., notaris yang berkedudukan di Jakarta. Akta pendirian Perusahaan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan Menkumham No. 19005.AH.01.01. Tahun 2011 tertanggal 15 April 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030326.AH.01.09. Tahun 2011 tertanggal 15 April 2011.

Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan yang mana perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 110/2022, yang telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 33/2014, dan Peraturan OJK No.15/2020.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Entitas bergerak dalam bidang usaha perdagangan, aktivitas pengolahan data, aktivitas konsultasi, aktivitas manajemen, pemrograman komputer dan platform digital serta periklanan. Perseroan berkedudukan di Jakarta Utara.

2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan laporan keuangan mewajibkan Perseroan untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta pertimbangan yang kompleks yang berkaitan dengan hal akuntansi. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan gunakan dan penilaian yang Perseroan buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan dapat memiliki segala dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen Perseroan terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Berikut ini adalah pembahasan kebijakan akuntansi yang perseroan yakini melibatkan perkiraan, asumsi, dan penilaian paling dignifikan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan. Kebijakan akuntansi, estimasi, asumsi dan penilaian penting Perseroan, yang penting untuk memahami kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan, dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan Perseroan yang termasuk dalam bagian dalam Prospektus ini.



Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”)

Penerapan dari amendemen, penyesuaian dan interpretasi standar berikut yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2022, tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan efek material terhadap laporan keuangan.

PSAK No. 22 (Amendemen 2020), mengenai “Kombinasi Bisnis terhadap referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan”

Amandemen PSAK No. 22 ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK No. 22, PSAK No. 57, ISAK No. 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Amendemen ini menambahkan deskripsi mengenai liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK No. 57 atau ISAK No. 30, serta mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang diakui pada tanggal akuisisi, dan terkait definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

PSAK No. 57 (Amendemen 2019), mengenai “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak yang Merugi – Biaya Memenuhi Kontrak”

Amendemen ini mengklasifikasikan biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan. Amendemen ini mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung terdiri dari: biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut dan alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

PSAK No. 69 (Penyesuaian 2020), mengenai “Agrikultur”

Penyesuaian ini mengklarifikasi pengakuan dan pengukuran yang sebelumnya “entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, perpajakan atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen”, menjadi “entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen”.

PSAK No. 71 (Penyesuaian 2020), mengenai “Instrumen Keuangan”.

PSAK No. 71 (Penyesuaian 2020) mengklarifikasi fee (imbalan) yang diakui oleh peminjam terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Dalam menentukan fee (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi fee (imbalan) yang diterima, peminjam hanya memasukkan fee (imbalan) yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk fee (imbalan) yang dibayar atau diterima baik peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

PSAK No. 73 (Penyesuaian Tahunan 2020), mengenai “Sewa”.

PSAK No. 73 (Penyesuaian 2020) mengklarifikasi pengukuran oleh penyewa dan pencatatan perubahan masa sewa terkait “perbaikan properti sewaan”.

3. ANALISA OPERASI PER SEGMENT

Pendapatan Neto Setiap Segmen dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Neto

Tabel berikut menunjukkan rincian pendapatan neto untuk tahun berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli				31 Desember					
	2022*	%	2021***	%	2021	%	2020*	%	2019	%
Pendapatan Jasa	30.315.822.263	57,84%	16.901.243.441	92,80%	26.061.108.933	57,12%	11.148.178.430	34,09%	4.750.900.000	70,72%
Penjualan Produk	22.097.298.162	42,16%	1.311.780.222	7,20%	19.566.926.364	42,88%	21.554.366.906	65,91%	1.966.972.001	29,28%
Jumlah	52.413.120.425	100,00%	18.213.023.663	100,00%	45.628.035.297	100,00%	32.702.545.336	100,00%	6.717.872.001	100,00%

* Tidak dikonsolidasi

**Tidak diaudit

***Tidak dikonsolidasi dan tidak diaudit



Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

Beban Pokok Pendapatan

Tabel berikut menyajikan beban pokok pendapatan Perseroan sebagai persentasi dari total beban pokok pendapatan untuk tahun yang disajikan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli				31 Desember					
	2022*	%	2021***	%	2021	%	2020*	%	2019	%
Pendapatan Jasa	18.954.152.609	54,72%	8.224.394.124	81,41%	17.349.192.566	57,12%	8.568.308.879	34,09%	2.645.915.689	70,72%
Penjualan Produk	15.682.376.793	45,28%	1.877.583.334	18,59%	13.025.937.396	42,88%	16.566.336.331	65,91%	1.095.464.454	29,28%
Jumlah	34.636.529.402	100,00%	10.101.977.458	100,00%	30.375.129.962	100,00%	25.134.645.210	100,00%	3.741.380.143	100,00%

* Tidak dikonsolidasi

** Tidak diaudit

*** Tidak dikonsolidasi dan tidak diaudit

4. ANALISIS KEUANGAN

4.1. KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tabel berikut merupakan hasil operasi Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dengan angka perbandingan 31 Juli 2021 dan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

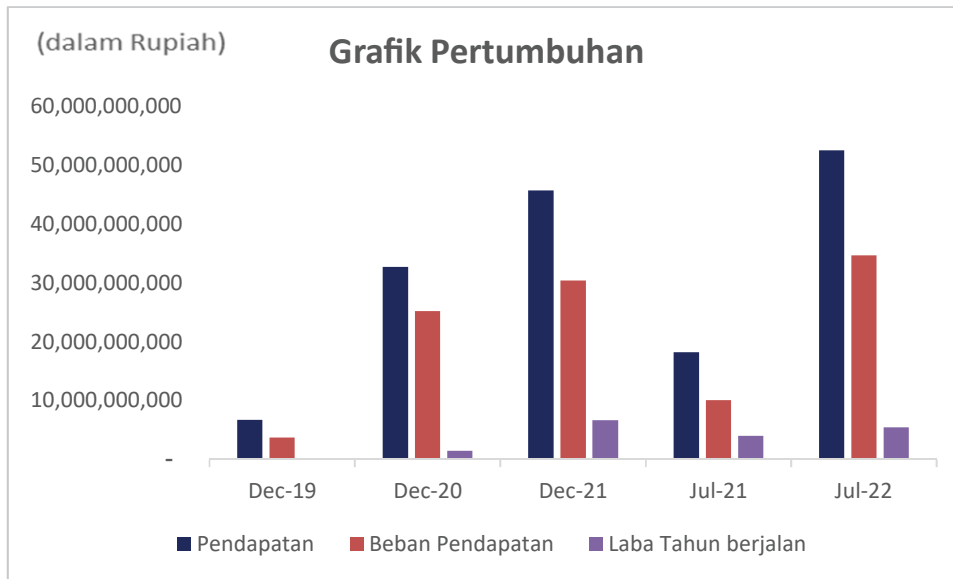
(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli			31 Desember	
	2022*	2021***	2021	2020*	2019
Pendapatan	52.413.120.425	18.213.023.663	45.628.035.297	32.702.545.336	6.717.872.001
Beban pokok pendapatan	(34.636.529.402)	(10.101.977.458)	(30.375.129.962)	(25.134.645.210)	(3.741.380.143)
LABA KOTOR	17.776.591.023	8.111.046.205	15.252.905.335	7.567.900.126	2.976.491.858
Pendapatan lain-lain	88.666.372	20.444.037	22.003.164	18.641.948	9.431.933
Beban Penjualan	(794.268.398)	(186.873.392)	(259.419.344)	(757.483.981)	(71.798.165)
Beban umum dan administrasi	(9.270.226.190)	(2.295.175.507)	(5.077.807.090)	(3.530.037.155)	(2.741.027.200)
Beban Keuangan	(370.044.070)	(693.893.821)	(983.426.035)	(1.336.133.261)	-
Beban lain-lain	(106.317.675)	(11.504.361)	(394.810.081)	(36.819.300)	(6.879.433)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	7.324.401.062	4.944.043.161	8.559.445.949	1.926.068.377	166.218.993
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Pajak kini	(1.903.776.820)	(1.007.504.070)	(1.991.303.116)	(500.375.783)	(47.441.589)
Pajak tangguhan	205.023.687	63.992.296	109.701.078	25.698.348	24.505.471
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(1.698.753.133)	(943.511.774)	(1.881.602.038)	(474.677.435)	(22.936.118)
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA	5.625.647.929	4.000.531.387	6.677.843.911	1.451.390.942	143.282.875
Proforma laba rugi	(160.701.511)	-	-	-	-
LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN	5.464.946.418	4.000.531.387	6.677.843.911	1.451.390.942	143.282.875
JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN	(641.752.593)	(152.505.264)	(261.437.596)	300.052.019	(26.958.760)
LABA KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN	4.823.193.825	3.848.026.123	6.416.406.315	1.751.442.961	116.324.115

* Tidak dikonsolidasi

** Tidak diaudit

*** Tidak dikonsolidasi dan tidak diaudit



a) Pendapatan

Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 (tidak diaudit)

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp52.413.120.425, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp34.200.096.762 atau setara dengan 187,78% dibandingkan dengan pendapatan sebesar Rp18.213.023.663 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021. Kenaikan pendapatan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan produk sebesar Rp20.785.517.940 atau setara dengan 1.584,53% dan peningkatan pendapatan jasa sebesar Rp13.414.578.822 atau setara dengan 79,37%. Kontribusi pendapatan Perseroan yang berasal dari pendapatan jasa dan penjualan produk yaitu masing-masing sebesar 57,84% dan 42,16%.

Pertumbuhan infrastruktur dan transportasi publik di Indonesia saat ini menjadikan permintaan akan produk peralatan telematika semakin meningkat. Hal ini dikarenakan tingginya kebutuhan masyarakat akan transportasi publik, sehingga dalam menunjang kenyamanan bagi masyarakat, pihak penyedia transportasi publik membutuhkan *Intelligent transportation system (ITS)* baik *hardware* dan *software*. Selain itu, pertumbuhan akan *IoT (Internet of Things)* saat ini mendorong permintaan *IoT (Internet of Things)* secara khusus pada industri transportasi. Sehingga, dengan adanya peningkatan permintaan tersebut menjadikan pendapatan Perseroan pada segmen penjualan produk meningkat cukup signifikan.

Dalam menunjang penjualan produk, Perseroan juga menyediakan jasa untuk pengoperasian produk atas *SaaS (Software as Service)*. *Platform Saas* sangat diperlukan untuk memudahkan pengguna dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Perseroan menyediakan jasa *maintenance* aplikasi, data, dan lainnya. Pendapatan atas jasa *SaaS (Software as Service)* berkontribusi pada peningkatan pendapatan Perseroan untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp45.628.035.297, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp12.925.489.961 atau setara dengan 39,52% dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp32.702.545.336. Kenaikan pendapatan ini disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan jasa. Kontribusi pendapatan terbesar Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berasal dari pendapatan jasa yaitu setara 57,12%, sedangkan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berasal dari penjualan produk yaitu setara 65,91%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp32.702.545.336, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp25.984.673.335 atau setara dengan 386,80% dibandingkan dengan pendapatan sebesar Rp6.717.872.001 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan pendapatan ini disebabkan oleh kenaikan penjualan produk sebesar Rp19.587.394.905 atau setara dengan 995,81% dan kenaikan pendapatan jasa sebesar Rp6.397.278.430 atau setara dengan 134,65%. Kontribusi pendapatan terbesar Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berasal dari penjualan produk yaitu setara 65,91% sedangkan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 berasal dari pendapatan jasa yaitu setara 70,72%.

b) Beban Pokok Pendapatan***Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 (tidak diaudit)***

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp34.636.529.402 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp24.534.551.944 atau setara dengan 242,87% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp10.101.977.458. Kenaikan pada beban pokok pendapatan sejalan dengan meningkatnya pendapatan Perseroan dan terutama disebabkan oleh kenaikan beban pembelian aplikasi dan system sebesar Rp5.563.906.000.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.375.129.962 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp5.240.484.752 atau setara dengan 20,85% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp25.134.645.210. Kenaikan beban pokok pendapatan terutama disebabkan oleh kenaikan beban pemasangan alat. Secara umum peningkatan beban pokok pendapatan terjadi seiring dengan meningkatnya pendapatan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.134.645.210 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp21.393.265.067 atau setara dengan 571,80% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.741.380.143. Kenaikan beban pokok pendapatan terutama disebabkan oleh Amortisasi sebesar Rp3.921.875.000. Secara umum peningkatan beban pokok pendapatan terjadi seiring dengan meningkatnya pendapatan Perseroan.

c) Pendapatan Lain – Lain***Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 (tidak diaudit)***

Pendapatan lain – lain Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp88.666.372 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp68.222.335 atau setara dengan 333,70% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp20.444.037. Kenaikan pendapatan lain-lain terjadi karena adanya pemulihan cadangan piutang tak tertagih.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp22.003.164, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp3.361.216 atau setara dengan 18,03% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp18.641.948. Kenaikan pendapatan lain-lain seiring dengan adanya peningkatan giro bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.641.948, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp9.210.015 atau setara dengan 97,65% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp9.431.933. Kenaikan pendapatan lain-lain seiring dengan adanya peningkatan giro bank.

d) Beban Penjualan

Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Beban Penjualan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp794.268.398 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp607.395.006 atau setara dengan 325,03% dibandingkan dengan beban penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp186.873.392. Kenaikan beban penjualan terutama disebabkan oleh kenaikan beban perjalanan dinas. Beban ini terjadi atas perjalanan dinas yang dilakukan ke beberapa kota untuk melakukan survey atau *maintenance* sistem yang terpasang dalam unit transportasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp259.419.344 dimana terjadi penurunan sebesar Rp498.064.637 atau setara dengan 65,75% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp757.483.981. Penurunan beban penjualan terutama disebabkan oleh penurunan biaya promosi dan pemasaran sebesar Rp346.283.430 atau setara dengan 80,62%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp757.483.981 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp685.685.816 atau setara dengan 955,02% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp71.798.165. Kenaikan beban penjualan terutama disebabkan oleh kenaikan biaya promosi dan pemasaran sebesar Rp389.083.558.

e) Beban Administrasi dan Umum

Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 (tidak diaudit)

Beban administrasi dan umum Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp9.270.226.190 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp6.975.050.683 atau setara dengan 303,90% dibandingkan dengan beban administrasi dan umum untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp2.295.175.507. Kenaikan beban administrasi dan umum terutama disebabkan oleh kenaikan beban BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan sebesar



1.119,46%, beban imbalan kerja sebesar 493,86%, dan beban gaji dan tunjangan sebesar 322,29% seiring dengan meningkatnya jumlah karyawan Perseoran. Selain itu, terjadi peningkatan operasional Perseroan yang menyebabkan peningkatan pada beban perlengkapan kantor sebesar 341,32%, beban pemeliharaan gedung sebesar 193,14% dan beban rumah tangga kantor sebesar 42,49%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban administrasi dan umum Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.077.807.090 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp1.547.769.935 atau setara dengan 43,85% dibandingkan dengan beban administrasi dan umum untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.530.037.155. Kenaikan beban administrasi dan umum terutama disebabkan oleh kenaikan beban pemeliharaan gedung sebesar Rp275.000.022 atau setara dengan 1.000,00% dan kenaikan beban penyusutan sebesar Rp158.597.133 atau setara dengan 450,25%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban administrasi dan umum Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.530.037.155 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp789.009.955 atau setara dengan 28,79% dibandingkan dengan beban administrasi dan umum untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.741.027.200. Kenaikan beban administrasi dan umum terutama disebabkan oleh kenaikan beban rumah tangga kantor sebesar Rp160.973.129 atau setara dengan 1.939,23%.

f) Beban Keuangan

Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 (tidak diaudit)

Beban keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp370.044.070 dimana terjadi penurunan sebesar Rp323.849.751 atau setara dengan 46,67% dibandingkan dengan beban keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp693.893.821. Penurunan beban keuangan terutama disebabkan oleh penurunan bunga utang bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp983.426.035, dimana terjadi penurunan sebesar Rp352.707.226 atau setara dengan 26,40% dibandingkan dengan beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.336.133.261. Penurunan beban keuangan disebabkan oleh bunga utang bank seiring dengan adanya penurunan utang bank jangka pendek.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.336.133.261. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan tidak mencatatkan adanya beban keuangan. Beban keuangan tercatat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan terdapat pinjaman kepada Bank dan lembaga keuangan.



g) Beban Lain-lain

Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 (tidak diaudit)

Beban Lain - lain Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp106.317.675 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp94.813.314 atau setara dengan 824,15% dibandingkan dengan beban lain-lain untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp11.504.361. Kenaikan beban lain-lain terutama disebabkan oleh kenaikan beban penyisihan penurunan nilai piutang seiring dengan meningkatnya piutang usaha Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Lain - lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp394.810.081 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp357.990.781 atau setara dengan 972,29% dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp36.819.300. Kenaikan beban lain-lain terutama disebabkan oleh kenaikan saldo penyisihan penurunan nilai piutang yang meningkat sebesar Rp322.034.810.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Lain - lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp36.819.300 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp29.939.867 atau setara dengan 435,21% dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.879.433. Kenaikan beban lain-lain terutama disebabkan oleh beban administrasi bank yang meningkat sebesar Rp29.939.867.

h) Laba tahun berjalan

Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laba tahun berjalan Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 (tidak diaudit)

Laba berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp5.464.946.418 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp1.464.415.031 atau setara dengan 36,61% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp4.000.531.387. Secara umum, persentase laba tahun berjalan terhadap pendapatan mengalami kenaikan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021. Kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto pada 31 Juli 2022 pada segmen penjualan produk sebesar Rp20.785.517.940 dan pendapatan jasa sebesar Rp13.414.578.822. Pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 juga terdapat efisiensi beban-beban operasional sehingga berkontribusi terhadap peningkatan laba tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.677.843.911, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp5.226.452.969 atau setara dengan 360,10% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.451.390.942. Secara umum, persentase laba tahun berjalan terhadap pendapatan mengalami kenaikan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 menjadi sebesar 14,64% dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto pada 31 Desember 2021 terutama pada segmen pendapatan jasa sebesar Rp14.912.930.503.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.451.390.942, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp1.308.108.067 atau setara dengan 912,95% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp143.282.875. Secara umum, persentase laba tahun berjalan terhadap pendapatan mengalami kenaikan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 menjadi sebesar 4,44% dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto pada 31 Desember 2020 terutama pada segmen penjualan produk sebesar Rp19.587.394.905.

i) Laba komprehensif tahun berjalan

Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan Periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 (tidak diaudit)

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp4.823.193.825 dimana terjadi kenaikan sebesar 25,34% atau setara dengan Rp975.167.702 dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp3.848.026.123. Secara umum, persentase laba komprehensif untuk periode 7 (tujuh) bulan berjalan terhadap pendapatan mengalami kenaikan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 menjadi sebesar 9,20% dibandingkan dengan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.416.406.315 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp4.664.963.354 atau setara dengan 266,35% dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.751.442.961. Secara umum, persentase laba komprehensif tahun berjalan terhadap pendapatan mengalami kenaikan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 menjadi sebesar 14,06% dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.751.442.961 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp1.635.118.846 atau setara dengan 1405,66% dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp116.324.115. Secara umum, persentase laba komprehensif tahun berjalan terhadap pendapatan mengalami kenaikan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 menjadi sebesar 5,36% dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar 2,13%.

4.2. LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tabel berikut merupakan Laporan Posisi Keuangan Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

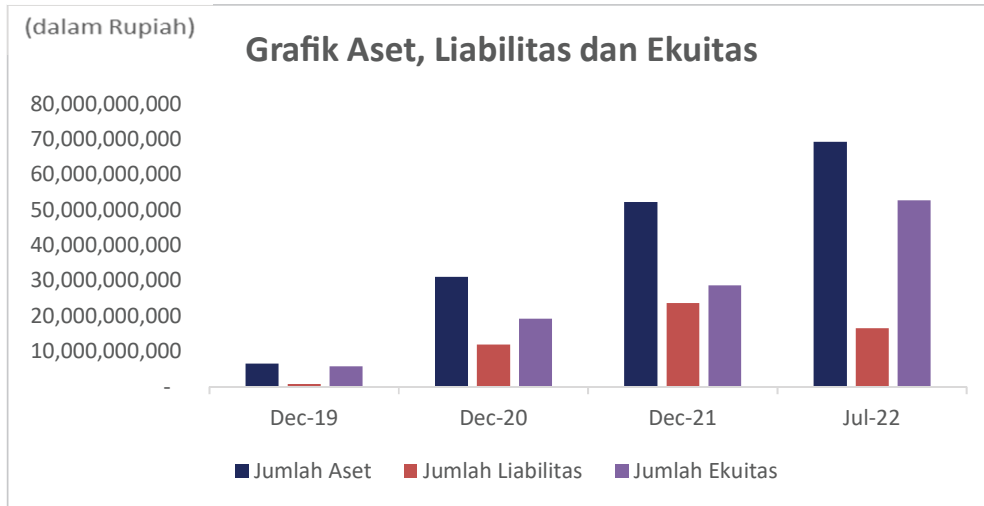
(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022*	2021	2020*	2019
TOTAL ASET LANCAR	36.872.932.234	40.481.319.023	17.667.167.334	6.351.686.605
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	32.247.375.226	11.712.664.662	13.303.294.548	122.717.974
TOTAL ASET	69.120.307.460	52.193.983.685	30.970.461.882	6.474.404.579

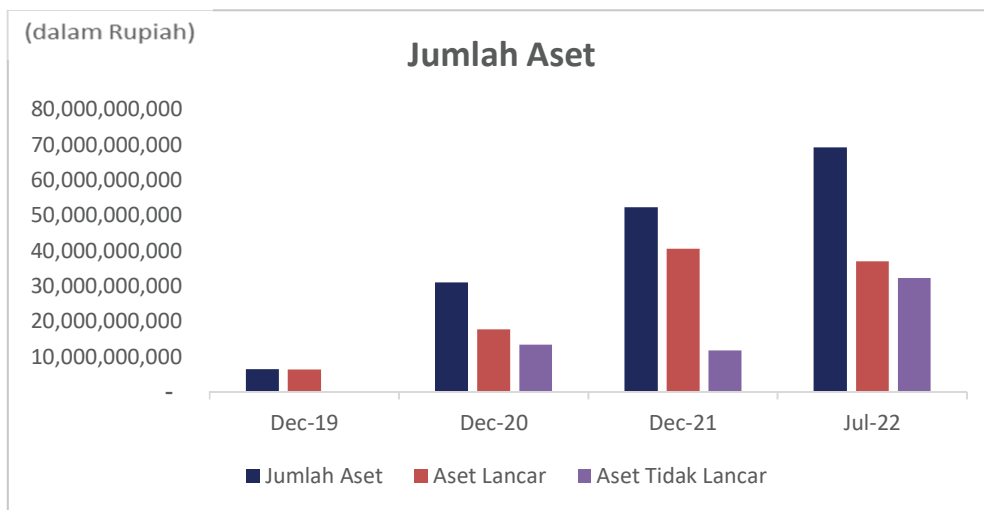


Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022*	2021	2020*	2019
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	13.889.874.454	22.598.599.854	11.656.699.175	344.213.428
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	2.626.846.969	1.010.693.130	145.478.321	413.349.726
TOTAL LIABILITAS	16.516.721.423	23.609.292.984	11.802.177.496	757.563.154
TOTAL EKUITAS	52.603.586.037	28.584.690.701	19.168.284.386	5.716.841.425

* Tidak dikonsolidasi



A. ASET



Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total Aset

Pada tanggal 31 Juli 2022, total aset Perseroan adalah sebesar Rp69.120.307.460, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp16.926.323.775 atau setara dengan 32,43%, dibandingkan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp52.193.983.685. Hal ini disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar sebesar 175,32%.

**Total Aset Lancar**

Pada tanggal 31 Juli 2022, total aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp36.872.932.234, dimana terjadi penurunan sebesar Rp3.608.386.789 atau setara dengan 8,91%, dibandingkan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp40.481.319.023. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada kas dan bank sebesar 50,43% yang digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan kegiatan operasional Perseroan.

Total Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Juli 2022, total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp32.247.375.226, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp20.534.710.564 atau setara dengan 175,32% dibandingkan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp11.712.664.662. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada aset takberwujud sebesar 98,22% dimana Perseroan dalam memberikan jasanya membutuhkan perangkat lunak berupa *Transportation Management System* (TMS) yang memiliki beberapa fitur sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut Perseroan melakukan penambahan aset takberwujud seperti *Fleet Management System*, *Mobile Apps Monitoring Tracking*, *Logistic Management System*, dan *Logistic Dashboard*. Peningkatan juga terjadi pada aset pajak tangguhan sebesar 170,46% serta investasi saham sebesar 100% atas investasi entitas asosiasi ke PT Digital Karyaloka Nusantara.

Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2020**Total Aset**

Pada tanggal 31 Desember 2021, total aset Perseroan adalah sebesar Rp52.193.983.685, dimana terjadi kenaikan sebesar 68,53% atau setara dengan Rp21.223.521.803, dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp30.970.461.882. Hal ini disebabkan oleh kenaikan aset lancar setara 129,13 % dan penurunan aset tidak lancar setara 11,96%.

Total Aset Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2021, total aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp40.481.319.023, dimana terjadi kenaikan sebesar 129,13% atau setara dengan Rp22.814.151.689, dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp17.667.167.334. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar berupa piutang usaha sebesar 334,40% atau setara dengan Rp10.386.905.134 seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan baik dari segmen pendapatan jasa maupun segmen penjualan produk dan kenaikan pada piutang lain-lain sebesar 777,56% atau setara dengan Rp15.009.911.308 dikarenakan adanya peningkatan atas piutang David Santoso, PT Teknologi Rancang Olah Nusantara, PT Teknologi Unggul Nusantara, PT Gumrining Sentosa, PT Galang Suar Teknologi, PT Galaksak Brilliant Solusi, dan piutang karyawan.

Total Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2021, total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp11.712.664.662 dimana terjadi penurunan sebesar Rp1.590.629.886 atau setara dengan 11,96% dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp13.303.294.548. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tidak lancar berupa aset takberwujud sebesar Rp2.793.749.996 atau setara dengan 21,28%.

Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2019**Total Aset**

Pada tanggal 31 Desember 2020, total aset Perseroan adalah sebesar Rp30.970.461.882, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp24.496.057.303 atau setara dengan 378,35%, dibandingkan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp6.474.404.579 Hal ini disebabkan oleh kenaikan aset lancar setara 178,15% dan kenaikan aset tidak lancar sebesar 10.740,54%.



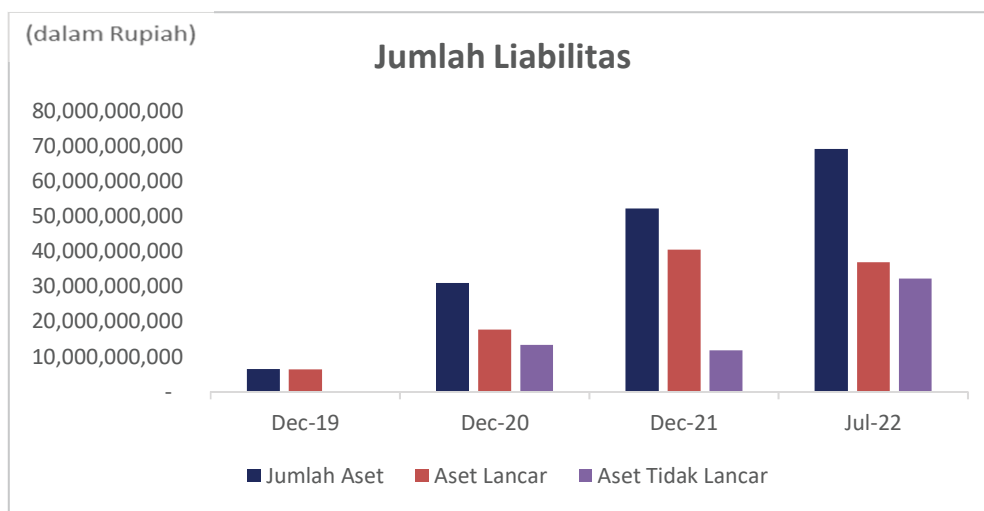
Total Aset Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2020, total aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp17.667.167.334 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp11.315.480.729 atau setara dengan 178,15%, dibandingkan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp6.351.686.605. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar berupa kas dan bank sebesar Rp7.891.252.140 atau setara dengan 446,83% sejalan dengan kenaikan signifikan atas pendapatan Perseroan tahun 2020 dan pesediaan sebesar Rp2.411.598.617 atau setara dengan 4.010,96%.

Total Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2020, total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp13.303.294.548 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp13.180.576.674 atau setara dengan 10.740,54% dibandingkan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp122.717.974. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tidak lancar berupa aset takberwujud sebesar Rp13.128.125.000.

B. LIABILITAS



Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Total Liabilitas

Pada tanggal 31 Juli 2022, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp16.516.721.423, dimana terjadi penurunan sebesar Rp7.092.571.561 atau setara dengan 30,04%, dibandingkan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp23.609.292.984. Hal ini disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek sebesar 38,49%.

Total Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Juli 2022, total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp13.889.874.454, dimana terjadi penurunan sebesar Rp8.708.725.400 atau setara dengan 38,54%, dibandingkan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp22.598.599.854. Hal ini disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek berupa utang usaha – pihak berelasi yaitu kepada vendor PT Teknologi Rancang Olah Nusantara dan PT Anugrah Damai Yaksa Teknologi. Selain itu disebabkan pula adanya penurunan utang usaha – pihak ketiga dikarenakan adanya pembayaran utang oleh Perseroan terutama kepada vendor PT Galang Suar Teknologi Indonesia dan B Smart Technology. Penurunan juga terjadi pada utang lain-lain – pihak berelasi dan pihak ketiga.

Total Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Juli 2022, total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp2.626.846.969, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp1.616.153.839 atau setara dengan 159,91%, dibandingkan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp1.010.693.130. Hal ini disebabkan oleh peningkatan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja sejalan dengan peningkatan jumlah karyawan Perseroan pada 2022.

**Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2020****Total Liabilitas**

Pada tanggal 31 Desember 2021, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp23.609.292.984, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp11.807.115.488 atau setara dengan 100,04% , dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp11.802.177.496. Hal ini disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek setara 93,87% dan kenaikan liabilitas jangka panjang setara 594,74%

Total Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2021, total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp22.598.599.854, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp10.941.900.679 atau setara dengan 93,87%, dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp11.656.699.175. Hal ini disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek berupa utang usaha.

Total Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2021, total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp1.010.693.130, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp865.214.809 atau setara dengan 594,74%, dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp145.478.321. Liabilitas jangka panjang Perseroan hanya berasal dari liabilitas imbalan kerja yang menggunakan hasil perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafril & Amran Nangasan, aktuaris independen.

Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2019**Total Liabilitas**

Pada tanggal 31 Desember 2020, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp11.802.177.496 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp11.044.614.342 atau setara dengan 1.457,91%, dibandingkan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp757.563.154. Hal ini disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp11.312.485.747 dan penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp267.871.405.

Total Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2020, total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp11.656.699.175, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp11.312.485.747 atau setara dengan 3.286,47%, dibandingkan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp344.213.428 Hal ini disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek berupa pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp 7.400.000.000.

Total Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2020, total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp145.478.321, dimana terjadi penurunan sebesar Rp267.871.405 atau setara dengan 64,81%, dibandingkan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp413.349.726 Liabilitas jangka panjang Perseroan hanya berasal dari liabilitas imbalan kerja yang menggunakan hasil perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafril & Amran Nangasan, aktuaris independen.

C. EKUITAS**Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2021**

Pada tanggal 31 Juli 2022, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp52.603.586.037, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp24.018.895.336 atau setara dengan 84,03% dibandingkan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp28.584.690.701. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan modal saham.

**Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2020**

Pada tanggal 31 Desember 2021, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp28.584.690.701, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp9.416.406.315 atau setara dengan 49,12% dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp19.168.284.386. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba bersih Perseroan.

Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp19.168.284.386, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp13.451.442.961 atau setara dengan 269,95% dibandingkan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp5.716.841.425. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan modal disetor.

4.3. LAPORAN ARUS KAS

Kas dan bank Perseroan utamanya untuk mendanai modal kerja, belanja modal, pembayaran bunga dan pajak. Secara historis, sumber likuiditas Perseroan adalah kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan (yaitu dari utang bank jangka pendek). Selain dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan memperkirakan penerimaan kas dari aktivitas operasi dan fasilitas pinjaman jangka pendek dari bank maupun lembaga keuangan nonbank akan menjadi sumber likuiditas utama untuk membiayai modal kerja dan belanja modal dalam rangka peningkatan pendapatan Perseroan.

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditas, dari sisi internal, Perseroan berusaha menjaga tingkat Kesehatan pembiayaan dari pencairan piutang usaha dari pendapatan sebelumnya, sehingga arus kas tetap dapat terjaga tingkat kelancarannya. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan terus berupaya mencari sumber pendanaan baru. Saat ini, sumber pendanaan yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagian besar dari bank dan setoran modal dari pemegang saham. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan melakukan upaya untuk mendapatkan sumber pendanaan lain, salah satunya adalah dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Tabel berikut merupakan Laporan Arus Kas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021 (tidak diaudit) serta untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022*	2021***	2021	2020*	2019
Arus Kas Bersih yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(10.930.334.215)	(2.718.238.459)	9.064.330.985	1.605.443.468	2.363.709.230
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(11.028.771.491)	(324.859.400)	(2.123.384.200)	(17.196.607.627)	(8.000.000)
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	18.658.618.698	(5.577.302.931)	(10.053.853.011)	23.482.416.299	(2.808.674.755)
K E N A I K A N (P E N U R U N A N) BERSIH KAS DAN BANK	(3.300.487.008)	(8.620.400.790)	(3.112.906.226)	7.891.252.140	(452.965.525)
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	6.544.397.027	9.657.303.253	9.657.303.253	1.766.051.113	2.219.016.638
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	3.243.910.019	1.036.902.463	6.544.397.027	9.657.303.253	1.766.051.113

* Tidak dikonsolidasi

***Tidak dikonsolidasi dan tidak diaudit



Periode 7 bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 (tidak diaudit)

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan membukukan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp10.930.334.215, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp8.212.095.756 atau setara dengan 75,13% dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp2.718.238.459. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kas kepada pemasok sehubungan dengan adanya kenaikan operasi Perseroan dari peningkatan beban pokok pendapatan dan persediaan. Peningkatan pembayaran kepada pemasok seiring dengan peningkatan pendapatan pada periode terkait. Sementara peningkatan pada arus kas pembayaran karyawan terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada jumlah karyawan Perseroan sebesar 29 karyawan.

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan membukukan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp11.028.771.491, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp10.703.912.091 atau setara dengan 97,05% dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp324.859.400. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh perolehan aset tak berwujud dimana Perseroan dalam memberikan jasanya membutuhkan perangkat lunak berupa *Transportation Management System (TMS)* yang memiliki beberapa fitur sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut Perseroan melakukan penambahan aset takberwujud seperti *Fleet Management System, Mobile Apps Monitoring Tracking, Logistic Management System, dan Logistic Dashboard*. Selain itu, pembayaran uang muka aset tetap pihak berelasi sehubungan dengan pembelian tanah dan bangunan kantor milik David santoso yang berlokasi di Komplek Perumahan Batu Ceper Permai Blok V No. 17-18, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang.

Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan membukukan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp18.658.618.698, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp24.235.921.529 atau setara dengan 129,89% dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada 31 Juli 2021 sebesar Rp5.577.302.931. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan modal disetor sebesar Rp22.000.000.000, penambahan Utang lain-lain pihak berelasi merupakan dividen yang belum dibayarkan kepada David Santoso dan Rudy Budiman Setiawan, termasuk pinjaman atas perolehaan pendanaan dari PT Anugrah Damai Yaksa dan PT Gumrining Sentosa.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp9.064.330.985, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp7.458.887.517 atau setara dengan 82,29% dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.605.443.468. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp5.262.916.177 atau setara dengan 15,02%.

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp2.123.384.200 dimana terjadi penurunan sebesar Rp15.073.223.427 atau setara dengan 709,87% dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp17.196.607.627. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pengeluaran kas untuk aset tetap.



Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp10.053.853.011 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp33.536.269.310 atau setara dengan 333,57% dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp23.482.416.299. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari aktivitas pendanaan seperti tambahan modal disetor dan penerimaan piutang lain-lain yang sudah tidak ada lagi di tahun 2021 serta adanya pembayaran kas untuk utang bank sebesar Rp13.400.413.925.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan membukukan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp1.605.443.468, dimana terjadi penurunan sebesar Rp758.265.762 atau setara dengan 47,23% dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.363.709.230. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran beban keuangan, pembayaran pajak penghasilan badan dan pembayaran kas lainnya.

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan membukukan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp17.196.607.627 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp17.188.607.627 atau setara dengan 99,95% dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp8.000.000. Kenaikan ini tersebut terutama disebabkan oleh pembelian aset takberwujud oleh perusahaan sebesar Rp17.050.000.000, pembelian aset tetap sebesar Rp72.607.627, dan perolehan aset hak-guna sebesar Rp66.000.000.

Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan membukukan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp23.482.416.299 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp26.291.091.054 atau setara dengan 111,96% dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.808.674.755. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penambahan utang bank sebesar Rp7.400.000.000 dan penambahan modal disetor sebesar Rp13.750.000.000.

4.4. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

a) Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar 2,65x, 1,59x, 1,79x, 1,52x dan 18,45x.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi.



Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas, deposito yang dijamin dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:

- Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset); dan
- Liabilitas dibagi Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas).

Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar 0,24x, 0,47x, 0,45x, 0,38x dan 0,12x. Fluktuasi yang terjadi pada rasio ini dikarenakan adanya peningkatan dan penurunan pada aset dan liabilitas.

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar 0,31x, 0,88x, 0,83x, 0,62x dan 0,13x. Terjadinya instabilitas pada rasio solvabilitas ekuitas disebabkan oleh peningkatan dan penurunan pada liabilitas dan ekuitas.

c) Imbal Hasil Aset dan Ekuitas

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (Return on Asset/ROA) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar 6,98%, 8,88%, 12,29%, 5,66% dan 1,80%. Imbal hasil aset mengalami fluktuasi pada setiap tahun disebabkan oleh adanya peningkatan dan penurunan laba tahun berjalan Perseroan.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity/ROE) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar 9,17%, 16,72%, 22,45%, 9,14% dan 2,03%. Imbal hasil ekuitas mengalami fluktuasi pada setiap tahun disebabkan oleh adanya peningkatan dan penurunan laba tahun berjalan Perseroan.

5. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG PADA LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Pada tanggal 31 Juli 2022, jumlah pinjaman yang masih terutang tercatat sebesar Rp16.516.721.423 yang terdiri dari Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp13.889.874.454 dan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp2.626.846.969.

Perseroan tidak memiliki kebutuhan pada pinjaman musiman, karena Perseroan tidak memiliki siklus atau pola tertentu dalam usahanya. Tidak terdapat tambahan fasilitas pinjaman dari perbankan sampai dengan prospektus ini diterbitkan serta tidak terdapat pembatasan penggunaan pinjaman dan jaminan selain yang telah diungkapkan dalam BAB III Pernyataan Utang.



Tidak terdapat tambahan fasilitas pinjaman dari perbankan lainnya, kecuali yang telah diungkapkan sampai dengan prospektus ini diterbitkan tidak terdapat pembatasan penggunaan pinjaman dan jaminan selain yang telah diungkapkan dalam Bab III Pernyataan Utang.

6. SEGMENT OPERASI

Segmen operasi yang dilaporkan sesuai dengan informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Segmen operasi disajikan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2022*		
	Pendapatan Jasa	Penjualan Produk	Jumlah
PENDAPATAN	30.315.822.263	22.097.298.162	52.413.120.425
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(18.954.152.609)	(15.682.376.793)	(34.636.529.402)
LABA KOTOR	11.361.669.654	6.414.921.369	17.776.591.023
Pendapatan lain-lain	51.284.754	37.381.618	88.666.372
Beban penjualan	(459.405.954)	(334.862.444)	(794.268.398)
Beban umum dan administrasi	(5.361.911.812)	(3.908.314.378)	(9.270.226.190)
Beban keuangan	(214.034.008)	(156.010.062)	(370.044.070)
Beban lain-lain	(61.494.292)	(44.823.383)	(106.317.675)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	5.316.108.342	2.008.292.720	7.324.401.062
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(1.101.147.179)	(802.629.641)	(1.903.776.820)
Tanggungan	118.585.988	86.437.699	205.023.687
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(982.561.191)	(716.191.942)	(1.698.753.133)
LABA PERIODE BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA	4.333.547.151	1.292.100.778	5.625.647.929
Proforma laba rugi	(92.949.979)	(67.751.532)	(160.701.511)
LABA PERIODE BERJALAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	4.240.597.172	1.224.349.246	5.464.946.418
POS YANG TIDAK AKAN DI REKLASIFIKASI KE LABA RUGI:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(475.885.382)	(346.874.352)	(822.759.734)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	104.694.784	76.312.357	181.007.141
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan – Setelah Pajak	(371.190.598)	(270.561.995)	(641.752.593)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	3.869.406.574	953.787.251	4.823.193.825
INFORMASI LAINNYA			
Penyusutan	99.959.622	72.860.882	172.820.504
Amortisasi	1.564.696.288	1.140.512.043	2.705.208.331
Aset Segmen	39.979.282.644	29.141.024.816	69.120.307.460
Liabilitas Segmen	9.553.294.804	6.963.426.619	16.516.721.423

* Tidak dikonsolidasi



(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2021**		
	Pendapatan Jasa	Penjualan Produk	Jumlah
PENDAPATAN	16.901.243.441	1.311.780.222	18.213.023.663
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(8.224.394.124)	(1.877.583.334)	(10.101.977.458)
LABA KOTOR	8.676.849.317	(565.803.112)	8.111.046.205
Pendapatan lain-lain	18.971.570	1.472.467	20.444.037
Beban penjualan	(173.413.967)	(13.459.425)	(186.873.392)
Beban umum dan administrasi	(2.129.867.105)	(165.308.402)	(2.295.175.507)
Beban keuangan	(643.916.606)	(49.977.215)	(693.893.821)
Beban lain-lain	(10.675.767)	(828.594)	(11.504.361)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	5.737.947.442	(793.904.281)	4.944.043.161
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(934.939.298)	(72.564.772)	(1.007.504.070)
Tanggungan	59.383.296	4.609.000	63.992.296
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(875.556.002)	(67.955.772)	(943.511.774)
LABA PERIODE BERJALAN	4.862.391.440	(861.860.053)	4.000.531.387
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
POS YANG TIDAK AKAN DI REKLASIFIKASI KE LABA RUGI:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(180.689.036)	(14.024.075)	(194.713.111)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan – Setelah Pajak	39.167.857	3.039.990	42.207.847
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan – Setelah Pajak	(141.521.179)	(10.984.085)	(152.505.264)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	4.720.870.261	(872.844.138)	3.848.026.123
INFORMASI LAINNYA			
Penyusutan	79.036.119	6.134.343	85.170.462
Amortisasi	2.307.372.918	179.085.413	2.486.458.331
Aset Segmen	4.218.888.153	327.446.561	4.546.334.714
Liabilitas Segmen	2.495.029.539	193.650.273	2.688.679.812

* Tidak dikonsolidas dan tidak diauditi

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021		
	Pendapatan Jasa	Penjualan Produk	Jumlah
PENDAPATAN	26.061.108.933	19.566.926.364	45.628.035.297
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(17.349.192.566)	(13.025.937.396)	(30.375.129.962)
LABA KOTOR	8.711.916.367	6.540.988.968	15.252.905.335
Pendapatan lain-lain	12.567.424	9.435.740	22.003.164
Beban penjualan	(148.171.091)	(111.248.253)	(259.419.344)
Beban umum dan administrasi	(2.900.262.588)	(2.177.544.502)	(5.077.807.090)
Beban keuangan	(561.697.931)	(421.728.104)	(983.426.035)
Beban lain-lain	(225.501.459)	(169.308.622)	(394.810.081)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	4.888.850.722	3.670.595.227	8.559.445.949
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(1.137.361.429)	(853.941.687)	(1.991.303.116)
Tanggungan	62.657.349	47.043.729	109.701.078
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(1.074.704.080)	(806.897.958)	(1.881.602.038)
LABA PERIODE BERJALAN	3.814.146.642	2.863.697.269	6.677.843.911



Keterangan	31 Desember 2021		
	Pendapatan Jasa	Penjualan Produk	Jumlah
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
POS YANG TIDAK AKAN DI REKLASIFIKASI KE LABA RUGI:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(190.651.192)	(143.142.713)	(333.793.905)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	41.327.347	31.028.962	72.356.309
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan – Setelah Pajak	(149.323.845)	(112.113.751)	(261.437.596)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	3.664.822.797	2.751.583.518	6.416.406.315
INFORMASI LAINNYA			
Penyusutan	110.703.926	83.117.551	193.821.477
Amortisasi	2.452.437.096	1.841.312.900	4.293.749.996
Aset Segmen	35.235.321.654	16.958.662.031	52.193.983.685
Liabilitas Segmen	15.938.255.208	7.671.037.776	23.609.292.984

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020*		
	Pendapatan Jasa	Penjualan Produk	Jumlah
PENDAPATAN	11.148.178.430	21.554.366.906	32.702.545.336
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(8.568.308.879)	(16.566.336.331)	(25.134.645.210)
LABA KOTOR	2.579.869.551	4.988.030.575	7.567.900.126
Pendapatan lain-lain	6.354.972	12.286.976	18.641.948
Beban penjualan	(258.223.526)	(499.260.455)	(757.483.981)
Beban umum dan administrasi	(1.203.376.791)	(2.326.660.364)	(3.530.037.155)
Beban keuangan	(455.482.955)	(880.650.306)	(1.336.133.261)
Beban lain-lain	(12.551.565)	(24.267.735)	(36.819.300)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	656.589.686	1.269.478.691	1.926.068.377
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(170.576.279)	(329.799.504)	(500.375.783)
Tangguhan	8.760.473	16.937.875	25.698.348
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(161.815.806)	(312.861.629)	(474.677.435)
LABA PERIODE BERJALAN	494.773.880	956.617.062	1.451.390.942
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
POS YANG TIDAK AKAN DI REKLASIFIKASI KE LABA RUGI:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	131.136.717	253.545.359	384.682.076
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(28.850.078)	(55.779.979)	(84.630.057)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan – Setelah Pajak	102.286.639	197.765.380	300.052.019
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	597.060.519	1.154.382.442	1.751.442.961
INFORMASI LAINNYA			
Penyusutan	12.007.850	23.216.494	35.224.344
Amortisasi	1.336.952.883	2.584.922.117	3.921.875.000
Aset Segmen	10.557.717.498	20.412.744.384	30.970.461.882
Liabilitas Segmen	4.023.319.263	7.778.858.233	11.802.177.496

* Tidak dikonsolidasi



(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019		
	Pendapatan Jasa	Penjualan Produk	Jumlah
PENDAPATAN	4.750.900.000	1.966.972.001	6.717.872.001
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(2.645.915.689)	(1.095.464.454)	(3.741.380.143)
LABA KOTOR	2.104.984.311	871.507.547	2.976.491.858
Pendapatan lain-lain	6.670.292	2.761.641	9.431.933
Beban penjualan	(50.775.886)	(21.022.279)	(71.798.165)
Beban umum dan administrasi	(1.938.462.972)	(802.564.228)	(2.741.027.200)
Beban lain-lain	(4.865.156)	(2.014.277)	(6.879.433)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	117.550.589	48.668.404	166.218.993
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(33.550.839)	(13.890.750)	(47.441.589)
Tangguhan	17.330.345	7.175.126	24.505.471
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(16.220.494)	(6.715.624)	(22.936.118)
LABA PERIODE BERJALAN	101.330.095	41.952.780	143.282.875
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
POS YANG TIDAK AKAN DI REKLASIFIKASI KE LABA RUGI:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(25.420.425)	(10.524.588)	(35.945.013)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	6.355.106	2.631.147	8.986.253
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan – Setelah Pajak	(19.065.319)	(7.893.441)	(26.958.760)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	82.264.776	34.059.339	116.324.115
INFORMASI LAINNYA			
Penyusutan	28.949.168	11.985.561	40.934.729
Aset Segmen	4.578.719.081	1.895.685.498	6.474.404.579
Liabilitas Segmen	535.751.022	221.812.132	757.563.154

7. BELANJA MODAL

Belanja Modal Historis

Belanja modal Perseroan untuk tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Belanja modal Perseroan umumnya berhubungan dengan biaya terkait pembelian aset tetap dan aset takberwujud. Aset tetap meliputi inventaris kantor dan kendaraan sementara aset takberwujud meliputi system perangkat lunak *platform*. Tabel dibawah ini menyajikan ringkasan mengenai belanja modal Perusahaan historis untuk masing-masing periode

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022*	2021	2020*	2019*
Aset Tetap				
Inventaris Kantor	204.829.530	287.457.200	80.607.627	8.000.000
Kendaraan	-	861.427.000	-	-
Sub Jumlah	204.829.530	1.148.884.200	80.607.627	8.000.000
Aset takberwujud				
Perangkat Lunak	12.856.000.000	1.500.000.000	17.050.000.000	-
Jumlah belanja modal	13.060.829.530	2.648.884.200	17.130.607.627	8.000.000

* Tidak dikonsolidasi



Belanja modal yang dilakukan oleh Perseroan adalah untuk perolehan aset tetap dan aset takberwujud. Pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas yang tersedia dari aktivitas operasi dan pendanaan. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, utang lembaga keuangan dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi ekonomi Indonesia, perubahan peraturan dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

Komitmen Investasi Belanja Modal

Belanja modal melalui utang Lembaga keuangan adalah sebagai berikut:

<u>Pihak yang Terkait</u>	<u>Nomor Perjanjian</u>	<u>Tanggal Perjanjian</u>	<u>Jenis</u>	<u>Bunga</u>	<u>Jumlah Pembayaran</u>	<u>Jangka Waktu</u>
PT CIMB Niaga Auto Finance	453102100116	7 Mei 2021	Kendaraan Alphard	11,10%	591.500.000	36 bulan

Belanja modal untuk aset takberwujud adalah sebagai berikut:

<u>Pihak yang Terkait</u>	<u>Nomor Perjanjian</u>	<u>Tanggal Perjanjian</u>	<u>Jenis</u>	<u>Jumlah Pembayaran</u>
PT Teknologi Rancang Olah Nusantara	No. 001A/DHS-PKS/XII/2019 diperbaharui dan diamandemen menjadi No. 018A/TKDN-PKS/VI/2021	26 Desember 2019 diperbaharui dan diamandemen menjadi 2 Juni 2021	Pembelian aplikasi	18.550.000.000 diperbaharui dan diamandemen menjadi 31.406.000.000

Tujuan dari Investasi Barang Modal

Tujuan investasi barang modal Perseroan historis digunakan untuk kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan. Terdapat penambahan aset takberwujud yang digunakan oleh Perseroan dalam menghasilkan pendapatan. Penambahan atas aset tetap untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.

Peningkatan Kapasitas Produksi

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, sehingga atas penambahan belanja modal tidak dapat dihubungkan dengan kapasitas produksi.

8. PENGARUH FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA TERHADAP PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perubahan kurs valuta asing tidak berdampak terhadap kinerja keuangan Perseroan. Hal ini dikarenakan seluruh transaksi Perseroan terkait penjualan kepada pelanggan, pembelian kepada pemasok maupun biaya-biaya operasional lainnya telah dilakukan dalam mata uang Rupiah.

9. DAMPAK PERUBAHAN HARGA DAN INFLASI TERHADAP PENJUALAN

Perubahan harga dan inflasi tidak berdampak material terhadap penjualan neto Perseroan serta laba usaha Perseroan melainkan dipengaruhi secara langsung oleh kenaikan volume barang atau jasa yang dijual dan tambahan produk atau jasa baru yang dijual.

10. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI YANG MEMPENGARUHI PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan Perseroan.

11. INVESTASI BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN REGULASI DAN ISU LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan tidak melakukan investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

12. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perseroan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

- Risiko kredit: kemungkinan bahwa pelanggan tidak membayar sebagian atau seluruh piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Perseroan.
- Risiko likuiditas: Perseroan menetapkan risiko likuiditas atas kolektibilitas dari piutang usaha seperti yang dijelaskan di atas, yang dapat menimbulkan kesulitan Perseroan dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan liabilitas keuangan.
- Risiko pasar: pada saat ini tidak terdapat risiko pasar, selain risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing karena Perseroan tidak berinvestasi di instrumen keuangan dalam aktivitas normal.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi telah menyetujui strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perseroan.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko Perseroan terjadinya kerugian keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan *counterparty* untuk memenuhi liabilitas kontraktualnya. Untuk meyakinkan bahwa penurunan nilai terdeteksi secara dini, portofolio kredit dimonitor secara aktif pada setiap tingkatan struktur risiko dan akan dikurangi melalui pelaksanaan strategi pemulihan.

Perseroan mengantisipasi risiko kredit dengan penuh kehati-hatian dengan menerapkan kebijakan manajemen risiko kredit. Selain penilaian kredit dengan penuh kehati-hatian, manajemen penagihan yang baik dan secara berkala melakukan pemantauan dan analisa terhadap kondisi usaha debitur dan obyek pembiayaan sepanjang kontrak berjalan.

Risiko Likuiditas

Melalui kegiatan operasi dan sumber dana yang ada, Perseroan dapat memenuhi seluruh liabilitas keuangannya pada saat jatuh tempo, karena Perseroan memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Dalam mengelola risiko likuiditas Perseroan melakukan pengawasan yang ketat atas proyeksi dan realisasi dari arus kas secara terus menerus baik kolektibilitas piutang maupun pemenuhan kewajiban dan tanggal jatuh temponya.

Risiko Suku Bunga

Risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Perseroan tidak secara signifikan terekspos risiko suku bunga. Sehingga, Perseroan tidak memiliki kebijakan atau pengaturan tertentu untuk mengelola risiko tingkat bunga. Tidak terdapat aktivitas lindung nilai tingkat bunga pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.



VI. FAKTOR RISIKO

Sebelum melakukan investasi pada saham Perseroan, para calon investor harus memerhatikan risiko-risiko yang disebutkan di bawah ini, beserta dengan informasi-informasi lainnya yang terdapat pada bagian-bagian lain dalam Prospektus ini. Perseroan telah mengungkapkan seluruh faktor risiko yang memengaruhi Perseroan dan industrinya yang secara material yang dapat memengaruhi kondisi keuangan dan/atau operasional dan/atau prospek Perseroan. Risiko-risiko sebagaimana disebutkan di bawah ini merupakan semua risiko yang dapat memengaruhi secara material terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek Perseroan. Dalam kondisi tersebut di atas, calon investor mungkin dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Setiap calon investor dalam Penawaran Umum ini harus memperhatikan seluruh fakta yang dibuat dan diatur dalam peraturan hukum yang berlaku.

Seperti halnya bidang usaha lainnya, bidang usaha Perseroan juga tidak lepas dari tantangan dan risiko secara makro maupun mikro. Perseroan telah mengurutkan risiko usaha dan risiko umum yang diperkirakan dapat memengaruhi usaha Perseroan sesuai dengan bobot risiko, dimulai dari risiko utama Perseroan yang dikelompokkan sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Implementasi Fungsional Hardware dan Software

Keberhasilan kontrak pekerjaan yang dimiliki Perseroan ditentukan oleh keberhasilan implementasi selama periode kontrak pekerjaan yang diperoleh atau dijalankan Perseroan. Risiko implementasi dalam kontrak pekerjaan yang diperoleh Perseroan, yaitu kerusakan maupun ketidaksesuaian produk yang dapat merugikan perusahaan secara material dan dapat berdampak pada keterlambatan penerimaan pembayaran maupun penggantian unit baru kepada pembeli dimana Perseroan akan mengeluarkan biaya tambahan. Kondisi ini, walaupun jarang terjadi, dapat muncul apabila ada kerusakan pada peralatan IoT dan telematika yang sudah terpasang yang merugikan Perseroan. Risiko implementasi dalam kontrak pekerjaan yang dijalankan atas inisiatif Perseroan sendiri, dapat muncul apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan yang tidak diantisipasi dalam desain atau rencana awal. Perseroan selalu berusaha untuk menyusun desain sistem sesuai kebutuhan pelanggan dengan memprediksi kebutuhan pelanggan yang mungkin terjadi dalam waktu tertentu, maupun menyusun desain sesuai kebutuhan pasar dengan mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi dalam waktu tertentu, sehingga risiko implementasi dapat diminimalisasi. Kegagalan Perseroan untuk mengantisipasi risiko ini dapat mengakibatkan semakin lamanya jangka waktu penyelesaian kontrak pekerjaan yang berdampak pada proses penagihan pembayaran dan juga perlunya penyesuaian terhadap alokasi sumber daya manusia terkait. Untuk memitigasi risiko implementasi ini, Perseroan selalu meminta fitur garansi atas produk *hardware* yang dibeli dari vendor untuk diberikan kepada pelanggan dan Perseroan selalu melakukan analisis kebutuhan pelanggan dan konfirmasi proses bisnis sebelum implementasi *software* dilakukan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

1) Risiko Ketersediaan Bahan Baku

Risiko yang mungkin timbul adalah terkait ketersediaan bahan baku dan sistem teknologi yang sebagian besar diperoleh dari luar negeri Perseroan juga sudah memperluas kerjasama pemasok dari negara-negara lain diluar pemasok yang sudah saat ini. Harga bahan baku yang berfluktuasi tergantung dari kondisi-kondisi yang berada di luar kendali Perseroan, seperti pertumbuhan ekonomi, fluktuasi nilai tukar mata uang, ketersediaan pasokan, pajak dan bea cukai, perubahan pada kebijakan pemerintah, dan keadaan lain yang tidak dapat diprediksi. Risiko ketersediaan bahan baku tersebut dapat memberikan dampak negatif kepada tingkat pertumbuhan penjualan Perseroan, yang mana Volatilitas harga bahan baku dapat meningkatkan beban yang menyebabkan penurunan profitabilitas Perseroan.



Selain itu apabila terdapat hambatan pada ketersediaan bahan baku baik dalam hal kuantitas atau kualitas, maka akan berpengaruh pada bisnis Perseroan, sehingga secara material dapat merugikan dan mempengaruhi bisnis dan kondisi keuangan Perseroan.

2) Risiko Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi yang berjalan semakin cepat seiring dengan perkembangan zaman dengan semakin maraknya digitalisasi di berbagai sektor. Teknologi IoT saat ini merupakan teknologi yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Pertumbuhan teknologi yang sangat cepat akan memiliki pengaruh terhadap kebutuhan pasar, sehingga teknologi yang ada saat ini dapat ditinggalkan oleh pasar karena kehadiran teknologi yang lebih baru. Apabila Perseroan tidak dapat mengikuti perubahan perkembangan teknologi tersebut, maka ini akan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dalam mempertahankan solusi ataupun produk yang dihasilkan, sehingga dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

3) Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satu aset penting bagi Perseroan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) terutama karyawan yang memiliki kompetensi dalam bidang teknologi IoT dan Telematika. Apabila terjadi tingkat pergantian staff profesional yang tinggi, maka dapat berdampak negatif terhadap rencana pertumbuhan agresif perusahaan untuk menjadi pemimpin pasar pada bidang teknologi IoT dan Telematika. Di Industri yang tergolong baru ini, tidak tertutup kemungkinan akan terdapat keterbatasan SDM yang telah memiliki kompetensi tersebut. Dalam hal ini, maka Perseroan dan Entitas Asosiasi membutuhkan waktu untuk dapat memberikan pelatihan kepada SDM baru agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang telah diterapkan oleh Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi kebutuhan SDM, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

4) Risiko Permodalan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang teknologi IOT, Perseroan membutuhkan modal yang cukup dalam rangka membiayai investasi Perseroan pada mesin dan/ atau perlengkapan dan/atau ruang kendali dengan fasilitas yang cukup yang dibutuhkan dalam rangka mendukung kelancaran usaha Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko permodalan, dimana dalam hal Perseroan tidak berhasil memperoleh pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran usaha dan/ atau pengembangan usaha Perseroan, maka hal tersebut akan menghambat kinerja operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

5) Risiko Atas Reputasi Perseroan

Risiko reputasi dapat timbul apabila pelanggan merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Apabila persepsi publik atas produk dan layanan Perseroan tidak memberikan hasil usaha yang memuaskan, maka hal ini dapat merusak reputasi Perseroan, menurunkan nilai dari *brand* Perseroan, mengurangi kepercayaan dan kredibilitas yang telah dibangun Perseroan dan menimbulkan dampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk menarik pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan yang telah ada, walaupun jika hal tersebut pada kenyataannya tidak benar atau merupakan insiden tersendiri. Apabila Perseroan tidak mampu mempertahankan reputasi Perseroan, meningkatkan *brand awareness* Perseroan, maka Perseroan mungkin akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan posisi pasar Perseroan, dan sebagai akibatnya, kegiatan usaha dan prospek pertumbuhan Perseroan dapat mengalami dampak kerugian yang material.



6) Risiko Persaingan

Risiko Persaingan adalah adanya pesaing yang dapat mewujudkan kebutuhan pelanggan sesuai dengan tujuan utama pelanggan dalam menggunakan teknologi informasi. Apabila Perseroan tidak dapat bersaing secara *flexible* dalam memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut, maka hal ini dapat memberi dampak negatif bagi penetrasi pangsa pasar Perseroan dalam industri terkait. Pada saat ini, di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang mengembangkan teknologi berbasis IoT di berbagai macam bidang, secara khusus Perseroan memiliki pengalaman dan keahlian dalam implementasi teknologi berbasis IoT yang fokus mengembangkan *Intelligent Transportation System (ITS)* secara *end to end solution*. Walaupun sampai dengan saat ini belum terdapat sumber data untuk perusahaan yang sejenis dengan Perseroan yaitu yang bergerak dalam bidang teknologi berbasis IoT pada transportasi, namun Perseroan senantiasa akan terus mempertahankan daya saing dari segi harga, desain produk, kualitas, dan layanan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Jika Perseroan tidak dapat mempertahankan daya saing, maka mengakibatkan pendapatan dapat menurun dan mempengaruhi pangsa pasar Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1) Risiko Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan diharuskan untuk memiliki lisensi dan penerbitan izin tertentu yang validitasnya harus diperbarui secara berkelanjutan dan Perseroan harus patuh dengan persyaratan tersebut. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa regulator terkait, tidak akan mencabut atau menolak untuk mengeluarkan atau memperbarui izin yang diperlukan untuk menjalankan bisnis Perseroan. Kehilangan atau kegagalan untuk mendapatkan atau memperbarui perizinan dan perjanjian yang diperlukan untuk operasi Perseroan dapat berdampak negatif dan material bagi bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha operasional, dan prospek usaha Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan selalu berupaya untuk mengevaluasi perjanjian dan memeriksa secara berkala seluruh validasi izin dan legalitas yang berkaitan dengan operasi usaha Perseroan, serta segera melakukan pembaruan legalitas atau validitas ketika masa berlaku akan berakhir.

2) Risiko Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah pada sektor ekonomi pada umumnya serta kebijakan pemerintah di bidang teknologi informasi dan transportasi pada khususnya dapat berubah dari waktu ke waktu. Saat ini Pemerintah memiliki kebijakan yang sangat mendukung perkembangan Perseroan di bidang teknologi informasi, namun di masa depan dapat juga terjadi perubahan undang-undang dan aturan lainnya. Kondisi perubahan kebijakan dari Pemerintah yang tidak menguntungkan akan berdampak pada keputusan investasi dan bisnis serta dapat menyebabkan terganggunya kinerja dan operasi Perseroan.

3) Risiko Gugatan Hukum

Perseroan dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk Perseroan, klaim dari pelanggan, sengketa perjanjian, atau sengketa lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional, dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian manajemen dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Perseroan selalu berusaha untuk memenuhi kewajibannya, baik kepada pihak lain dalam perjanjian yang melibatkan Perseroan maupun kepada pemangku kepentingan lainnya dari Perseroan, sebagai bagian dari langkah mitigasi untuk meminimalkan timbulnya risiko gugatan hukum.



4) Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan regulator dan/atau keterlambatan dalam pelaporan akan menyebabkan dikenakan denda yang cukup besar terhadap Perseroan atau dibatasinya kegiatan usaha Perseroan atau turunnya reputasi Perseroan yang akan berpengaruh secara negatif terhadap kinerja Perseroan. Perseroan selalu berusaha untuk memenuhi seluruh undang-undang dan peraturan yang berlaku sebagai bagian dari langkah mitigasi untuk meminimalkan timbulnya risiko kepatuhan.

5) Risiko Kebijakan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Perseroan saat ini menggunakan sebagian teknologi yang berasal dari atau dimiliki oleh perusahaan lain di luar negeri. Ketidakpastian terkait regulasi di pasar internasional atau ketentuan negara lain pemilik teknologi dapat memengaruhi kegiatan usaha perusahaan. Oleh karena itu, Perseroan berusaha untuk bekerja sama dengan mitra distribusi resmi di Indonesia sebagai salah satu langkah memitigasi risiko ini.

6) Risiko Perekonomian Secara Makro atau Global

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian nasional dan global, dimana suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus bisnis yang naik atau turun seiring masa pertumbuhan dan penurunan/resesi ekonomi. Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global. Secara umum, kinerja Perseroan terhubung dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Namun, sektor transportasi yang menjadi bidang garapan Perseroan memiliki sifat defensif terhadap siklus bisnis sehingga penurunan pertumbuhan ekonomi tidak akan berdampak banyak pada kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan sarana transportasi. Apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi, meskipun akan berdampak pada kegiatan usaha Perseroan, namun diperkirakan materialitas dampak risiko perubahan kondisi ekonomi tersebut tidak sebesar risiko lainnya.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1) Harga Saham Perseroan Mungkin Mengalami Fluktuasi yang Signifikan di Kemudian Hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri jasa teknologi dan sistem informasi secara umum; perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia; perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis; perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia; putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang; dan penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

2) Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.



3) Penjualan Saham di Masa Depan Dapat Memiliki Dampak Merugikan pada Harga Pasar Saham

Penjualan saham Perseroan di masa depan dengan jumlah besar di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat berdampak merugikan pada harga pasar saham Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui Penawaran Umum atau Penawaran Umum Terbatas atas efek yang bersifat ekuitas.

4) Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang memengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

5) Kepentingan Pemegang Saham Pengendali Dapat Bertentangan dengan Kepentingan Pembeli Saham yang Ditawarkan

Setelah Penawaran Umum Perdana, Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang beredar, pada umumnya dapat memegang kendali efektif atas Perseroan, termasuk kewenangan untuk memilih Direktur dan Komisaris Perseroan dan menentukan hasil dari suatu tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Walaupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan setiap kepentingan pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas, namun dengan mempertimbangkan bahwa Pemegang Saham Pengendali dapat memiliki kepentingan bisnis di luar Perseroan, Pemegang Saham Pengendali dapat mengambil tindakan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan bisnis Pemegang Saham Pengendali tersebut dibandingkan kepentingan Perseroan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat melakukan transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tidak ada jaminan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan, namun setiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK) yang dilakukan Perseroan baik dengan pihak afiliasi maupun pihak selain afiliasi setelah Penawaran Umum Perdana wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan OJK diantaranya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN UMUM MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO DARI YANG PALING TINGGI SAMPAI PALING RENDAH, TERHADAP DAMPAK MASING-MASING RISIKO PADA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.



VII. KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 25 Januari 2023 atas (i) laporan Keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Deassy Roosiana Tresna Handayani, CPA (ii) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto Dadang & Ali dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSi, CPA, (iii) laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H, S.E, CPA., yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Dikarenakan Pernyataan Pendaftaran Perseroan tertanggal 11 Oktober 2022, maka Perseroan memenuhi persyaratan POJK No. 7/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana diubah dengan POJK No. 4/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tertanggal 18 Maret 2022 serta SEOJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Maret 2022 serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Laporan keuangan tanggal 30 November 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan atas laporan keuangan interim yang tidak diaudit sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Fasilitas Kredit Investasi

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 16 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat (“**Akta KI BRI No. 16/2023**”), Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari BRI dengan jumlah maksimum sebesar Rp4.875.000.000 dengan suku bunga sebesar 11,50% per tahun.

Jangka waktu fasilitas yang diperoleh Perseroan sebagaimana di atas adalah lima tahun atau sampai dengan 26 Januari 2028.



Pinjaman ini dijamin dengan:

- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Agung Barat 4 – B Blok B – 1A No. 34, 35, dan 36, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 16701/Sunter Agung, yang akan berakhir pada tanggal 6 Juli 2052, seluas 353 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Desember 2019, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 09050305.20069, terdaftar atas nama:
 1. Magarita Van Den Berg;
 2. Tomi Adriyadi;
 3. Gary Dwi Adriyadi;
 4. Steven Tri Adriyadi;
 5. Michael Cahyo Adriyadi;
 6. Ananda Diah Anggraini Adriyadi,

yang akan dibalik nama menjadi nama Perseroan.

Tanah dan bangunan sebagaimana di atas akan diikat secara Hak Tanggung Peringkat I (Pertama) sebesar Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan cross collateral dengan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi W/A Plafond.

(selanjutnya disebut sebagai "**Tanah dan Bangunan 16701/Sunter Agung**")

- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Paradise VII Blok F 13, Kavling No. 24, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 012, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 3600/Sunter Agung, seluas 204m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4 Januari 2021, No. 05676/Sunter Agung/2020, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 09.05.03.05.01661, terdaftar atas nama:
 1. David Santoso, untuk 4/6 bagian;
 2. Nona Kezia Natania Santoso, untuk 1/6 bagian;
 3. Nicholas Natanael Santoso, untuk 1/6 bagian.

Tanah dan bangunan sebagaimana di atas telah diikat secara Hak Tanggung Peringkat I (Pertama) tertanggal 17 Februari 2022, No. 47/2022 sebesar Rp 5.652.000.000,00, dan cross collateral dengan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi W/A Plafond.

(selanjutnya disebut sebagai "**Tanah dan Bangunan 3600/Sunter Agung**")

- Tanah dan Bangunan yang terletak di Blok V No. 18, Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 2860/Batu Ceper, seluas 204m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 6 Juni 2007, No. 118/Batu Ceper/2007, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 28.05.05.01.01017, terdaftar atas nama David Santoso.

Tanah dan bangunan sebagaimana di atas telah diikat secara Hak Tanggung Peringkat I (Pertama) sebesar Rp5.500.000.000,00, dan cross collateral dengan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi W/A Plafond.

(selanjutnya disebut sebagai "**Tanah dan Bangunan 2860/Batu Ceper**")

Berdasarkan Akta KI BRI No. 16/2023, sejak tanggal perjanjian sampai dengan seluruh kewajiban yang terutang oleh Perseroan kepada BRI, maka Perseroan wajib diantaranya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menjaga agar NWC (aktiva lancar-hutang lancar) selalu dalam angka positif.
- Menjaga Debt to Equity Ratio maksimal sebesar 300%. Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara total utang terhadap ekuitas.
- Memberitahukan kepada BRI mengenai (i) sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya; (ii) tuntutan kerusakan yang diderita; (iii) tuntutan hukum terhadap Perseroan atau *guarantor*; dan (iv) permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditur atau pihak lain.

Selanjutnya, berdasarkan Akta KI BRI No. 16/2023, sejak tanggal perjanjian sampai dengan seluruh kewajiban yang terutang oleh Perseroan kepada BRI, maka Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan dan go publik.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini.
- Melakukan perubahan anggaran dasar atau merubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan.
- Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang *cash flow* tidak terganggu serta NWC positif.
- Melunasi atau membayar hutang kepada pemegang saham atau hutang pada pihak terafiliasi sebelum hutang di BRI lunas.
- Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham kecuali dipergunakan Kembali untuk tambahan setoran modal disetor perusahaan.
- Mengadakan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- Memberikan piutang kepada pemegang saham.
- Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.
- Menerima pinjaman baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya kecuali transaksi dagang yang lazim.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit.
- Menjual, memindah tangankan dan/ atau menyewakan aset yang dijadikan agunan tambahan di BRI.

Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana di atas, berdasarkan Surat Bank BRI No. B.517/KC-V/ADK/02/2023 tertanggal 9 Februari 2023 ("**Surat BRI No. 517/2023**"), Perseroan telah mendapat persetujuan dari BRI mengenai pelaksanaan Initial Public Offering (IPO). Lebih lanjut, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BRI untuk menghapus ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik, sebagaimana telah diakomodasi pada Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 31 tertanggal 15 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang mana merupakan addendum terhadap Akta KI BRI No. 16/2023 ("**Akta Addendum KI BRI**").

Berdasarkan Akta Addendum KI BRI, ketentuan terkait hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan BRI terlebih dahulu, telah berubah menjadi sebagai berikut:

- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini.
- Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang *cash flow* tidak terganggu serta NWC positif.
- Memberikan piutang kepada pemegang saham.
- Melunasi atau membayar hutang pada pemegang saham atau hutang pada pihak terafiliasi sebelum hutang di BRI lunas.



- Mengadakan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- Menerima pinjaman baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya kecuali transaksi dagang yang lazim.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit.
- Menjual, memindah tangankan dan/ atau menyewakan asset yang dijadikan agunan tambahan di BRI kepada pihak lain.

Lebih lanjut, berdasarkan Akta Addendum KI BRI, Perseroan dan BRI mengubah ketentuan mengenai hal-hal yang wajib dilakukan oleh Perseroan yang mana kewajiban Perseroan sejak tanggal perjanjian sampai dengan seluruh kewajiban yang terutang oleh Perseroan kepada BRI adalah sebagai berikut:

- Menjaga agar NWC (aktiva lancar-hutang lancar) selalu dalam angka positif.
- Menjaga Debt to Equity Ratio maksimal sebesar 300%. Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara total utang terhadap ekuitas.
- Melaporkan kepada BRI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan dan go publik.
 - Melakukan perubahan anggaran dasar atau merubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan.
 - Melakukan pembagian deviden kepada pemegang saham kecuali dipergunakan kembali untuk tambahan modal disetor perusahaan.
 - Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.

Fasilitas Kredit Modal Kerja

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 18, tanggal 26 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("**Akta KMK W/A BRI No. 18/2023**"), Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari BRI dengan jumlah maksimum sebesar Rp9.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 9,75% - 11,50% per tahun, yang mana merupakan suplesi sebesar Rp5.000.000.000 atas Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (W/A) eksisting yang diperoleh Perseroan berdasarkan Addendum Novasi Perjanjian Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (W/A) Plafond Interchangeable dengan Bank Garansi Plafond No. 64 tertanggal 24 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Dr. Abraham Yazdi Martin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah oleh Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (W/A) Plafond No. 84 tertanggal 28 November 2022.

Fasilitas yang diperoleh Perseroan sebagaimana di atas akan berakhir pada tanggal 18 November 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan:

- Tanah dan Bangunan 16701/Sunter Agung.
- Tanah dan Bangunan 3600/Sunter Agung.
- Tanah dan Bangunan 2860/Batu Ceper.

Berdasarkan Akta KMK W/A BRI No. 18/2023, sejak tanggal perjanjian sampai dengan seluruh kewajiban yang terutang oleh Perseroan kepada BRI, maka Perseroan wajib diantaranya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menjaga agar NWC (aktiva lancar-hutang lancar) selalu dalam angka positif.
- Menjaga Debt to Equity Ratio maksimal sebesar 300%. Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara total utang terhadap ekuitas.
- Memberitahukan kepada BRI mengenai (i) sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya; (ii) tuntutan kerusakan yang diderita; (iii) tuntutan hukum terhadap Perseroan atau *guarantor*; dan (iv) permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditur atau pihak lain.

Selanjutnya, berdasarkan Akta KMK W/A BRI No. 18/2023, sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan seluruh kewajiban yang terhutang oleh Perseroan kepada BRI, maka Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan dan go publik.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini.
- Melakukan perubahan anggaran dasar atau merubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan.
- Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang *cash flow* tidak terganggu serta NWC positif.
- Melunasi atau membayar hutang kepada pemegang saham atau hutang pada pihak terafiliasi sebelum hutang di BRI lunas.
- Melakukan pembagian deviden kepada pemegang saham kecuali dipergunakan Kembali untuk tambahan setoran modal disetor perusahaan.
- Mengadakan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- Memberikan piutang kepada pemegang saham.
- Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.
- Menerima pinjaman baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya kecuali transaksi dagang yang lazim.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit.
- Menjual, memindah tangankan dan/ atau menyewakan aset yang dijadikan agunan tambahan di BRI.

Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana di atas, berdasarkan Surat BRI No. 517/2023, Perseroan telah mendapat persetujuan dari BRI mengenai pelaksanaan Initial Public Offering (IPO). Lebih lanjut, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BRI untuk menghapus ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik, sebagaimana telah diakomodasi pada Addendum Perjanjian Kredit No. 32 tertanggal 15 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang mana merupakan addendum terhadap Akta KMK W/A BRI No. 18/2023 ("**Akta Addendum KMK WA BRI**").

Berdasarkan Akta Addendum KMK WA BRI, ketentuan terkait hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan BRI terlebih dahulu, telah berubah menjadi sebagai berikut:

- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini.
- Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang *cash flow* tidak terganggu serta NWC positif.
- Memberikan piutang kepada pemegang saham.
- Melunasi atau membayar hutang pada pemegang saham atau hutang pada pihak terafiliasi sebelum hutang di BRI lunas.
- Mengadakan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- Menerima pinjaman baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya kecuali transaksi dagang yang lazim.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit.
- Menjual, memindah tangankan dan/ atau menyewakan asset yang dijadikan agunan tambahan di BRI kepada pihak lain



Lebih lanjut, berdasarkan Akta Addendum KMK WA BRI, Perseroan dan BRI mengubah ketentuan mengenai hal-hal yang wajib dilakukan oleh Perseroan yang mana kewajiban Perseroan sejak tanggal perjanjian sampai dengan seluruh kewajiban yang terutang oleh Perseroan kepada BRI adalah sebagai berikut:

- Menjaga agar NWC (aktiva lancar-hutang lancar) selalu dalam angka positif.
- Menjaga Debt to Equity Ratio maksimal sebesar 300%. Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara total utang terhadap ekuitas.
- Perseroan wajib segera melaporkan kepada BRI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan dan go publik.
 - Melakukan perubahan anggaran dasar atau merubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan.
 - Melakukan pembagian deviden kepada pemegang saham kecuali dipergunakan kembali untuk tambahan modal disetor perusahaan.
 - Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Teknologi Karya Digital Nusa (d/h PT Damai Harapan Sentosa) selanjutnya disebut “**Perseroan**” didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 7 Januari 2011 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 74 tertanggal 16 Maret 2011 yang keduanya dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita SH., notaris yang berkedudukan di Jakarta. Akta pendirian Perusahaan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan Menkumham No. 19005.AH.01.01. Tahun 2011 tertanggal 15 April 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030326.AH.01.09. Tahun 2011 tertanggal 15 April 2011 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Susunan pemegang saham Perseroan saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tn Joko Suyanto	2.500	250.000.000	50,00%
Tn Wibowo Nanggolo	2.500	250.000.000	50,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	5.000	500.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portebel	15.000	16.000.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan yang mana perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 110/2022, yang telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 33/2014, dan Peraturan OJK No.15/2020.

Berdasarkan Akta No. 110/2022, kegiatan usaha Perseoran ialah menjalan kegiatan usaha di bidang Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial, Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan Internet Of Things (Iot), Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer, Perdagangan Besar Piranti Lunak, Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersil, Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, Penerbitan Piranti Lunak (Software), Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya, Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru, Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas, Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya, Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik, Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya, Aktivitas Pengolahan Data, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama:

- **Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019)**

Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk



penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

- **Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial (62015)**
Kelompok ini mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) termasuk subset dari AI seperti *machine learning*, *natural language processing*, *expert system*, dan subset AI lainnya.
- **Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan Internet Of Things (Iot) (62024)**
Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan dan pembuatan solusi sistem terintegrasi berdasarkan pesanan (bukan siap pakai) dengan cara memodifikasi perangkat keras (*hardware*) yang sudah ada, seperti sensor, *microcontroller*, dan perangkat keras (*hardware*) lainnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat keras (*hardware*) IoT dan/atau perangkat lunak (*software*) yang tertanam didalamnya. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas manufaktur chip (26120) dan aktivitas penerbitan/pengembangan perangkat lunak IoT (58200 dan 62019).
- **Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (62029)**
Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.

2. **Kegiatan Usaha Penunjang:**

- **Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer (46511)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
- **Perdagangan Besar Piranti Lunak (46512)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.
- **Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (63122)**
Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (*Fintech*). *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* (6495) dan *Fintech jasa pembayaran* (6641).



- **Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (46100)**
Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.
- **Penerbitan Piranti Lunak (Software) (58200)**
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan *video game* untuk semua platform sistem operasi.
- **Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (46523)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.
- **Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (46599)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.
- **Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (45401)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped.
- **Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas (45402)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor bekas, termasuk motor sepeda atau moped.
- **Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya (45405)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya.
- **Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (46521)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan IC dan PCB.
- **Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya (62090)**
Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.



- **Aktivitas Pengolahan Data (63111)**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).
- **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)**
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur

Perseroan berdomisili Mini Office Central 88, Jalan Trembesi Blok G-1 No.826 Pademangan Timur, Jakarta Utara Perusahaan memulai kegiatan komersilnya tahun 2016.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 42 tertanggal 24 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Suswanti B. Sumarto S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-00105953 tertanggal 25 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037978.AH.01.11 Tahun 2020 Tanggal 25 Februari 2020, para pemegang saham perseroan diantaranya menyetujui peralihan saham dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Menyetujui keikutsertaan Tuan David Santoso dan Tuan Rudy Lucas dalam Perseroan.
 - b. Menyetujui penjualan dan pengalihan saham yang dimiliki oleh Nona Nony Kusuma dalam perseroan masing-masing kepada:
 - Tuan David Santoso tersebut sebesar 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham dari keseluruhan saham sebesar 10.000 (sepuluh ribu) saham yang dimiliki dalam Perseroan. Pengalihan saham sebagaimana di atas dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 43 tertanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Suswanti B. Sumarto S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
 - Tuan Rudy Lucas tersebut sebesar 1.500 (seribu lima ratus) saham dari keseluruhan saham sebesar 10.000 (sepuluh ribu) saham yang dimiliki dalam Perseroan. Pengalihan saham sebagaimana di atas dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 44 tertanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Suswanti B. Sumarto S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta

Selanjutnya susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Nona Nony Kusuma sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar lima ratus juta rupiah Rp500.000.000.
- Tuan David Santoso sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar tiga ratus lima puluh juta rupiah Rp350.000.000.



- Tuan Rudy Lucas sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar seratus lima puluh juta rupiah Rp150.000.000.
- Tuan Herry sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah Rp250.000.000.

Sehingga seluruhnya berjumlah 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah Rp1.250.000.000.

Dengan adanya perubahan pada akta tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Ny. Nony Kusuma	5.000	500.000.000	40,00%
Tn. David Santoso	3.500	350.000.000	28,00%
Tn. Rudy Lucas	1.500	150.000.000	12,00%
Tn. Herry	2.500	250.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	12.500	1.250.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portebel	37.500	3.750.000.000	

2. Berdasarkan Akta Keputusan Rapat No. 16 tertanggal 23 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Henny Ardiyani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0170943 tertanggal 1 April 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062436.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 01 April 2020, para pemegang saham perseroan diantaranya menyetujui peralihan saham dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) milik Nyonya Nony Kusuma kepada Tuan Rudy Lucas
Pengalihan saham sebagaimana di atas dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 18 tertanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Henny Ardiyani S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta.
- Sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) milik Tuan Herry kepada Tuan Rudy Lucas
Pengalihan saham sebagaimana di atas dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 17 tertanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Henny Ardiyani S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Tuan David Santoso sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah)
- Tuan Rudy Lucas sebanyak 9.000 (sembilan ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta Rupiah)

Sehingga seluruhnya berjumlah 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).



Dengan adanya perubahan akta tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tn. David Santoso	3.500	350.000.000	28,00%
Tn. Rudy Lucas	9.000	900.000.000	72,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	12.500	1.250.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portebel	37.500	3.750.000.000	

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 5 tertanggal 11 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Edi Suryajaya S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-00418286 tertanggal 11 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0209321.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020, para pemegang saham perseroan diantaranya menyetujui peralihan saham dengan rincian sebagai berikut:

- Pengalihan sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) saham milik Tuan Rudy Lucas kepada Tuan David Santoso dengan nilai nominal Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta Rupiah). Pengalihan saham sebagaimana di atas dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham PT Damai Harapan Sentosa tertanggal 8 Desember 2020.
- Sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham milik Tuan Rudy Lucas kepada Tuan Rudy Budiman dengan nilai nominal Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).

Selanjutnya ketentuan penutup Anggaran Dasar Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

- Tuan David Santoso sebanyak 9.000 (sembilan ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah)

Pengalihan saham sebagaimana di atas dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 8 Desember 2020.

- Tuan Rudy Budiman Setiawan sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Pengalihan saham sebagaimana di atas dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 10 Desember 2020.

Sehingga seluruhnya berjumlah 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah Rp1.250.000.000.

Dengan adanya perubahan akta tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tn. David Santoso	9.000	900.000.000	72,00%
Tn. Rudy Budiman Setiawan	3.500	350.000.000	28,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	12.500	1.250.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portebel	37.500	3.750.000.000	

4. Berdasarkan akta Perubahan PT Teknologi Karya Digital Nusa No.44 Tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Yunita Aristina,SH,M.Kn., notaris yang berkedudukan di Jakarta Utara yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0218771.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 28 Desember 2020, para pemegang saham perseroan menyetujui untuk:
- Melakukan perubahan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) menjadi Rp20 (dua puluh Rupiah).
 - Meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp5.000.000.000 (empat miliar Rupiah) menjadi Rp60.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) saham dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).
 - Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).
 - Mengeluarkan saham baru sebanyak Rp687.500.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) atau sebesar Rp13.750.000.000 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang diambil dan disetor penuh dengan uang tunai oleh:
 - David Santoso sebesar 495.000.000 saham atau sejumlah Rp9.900.000.000 (sembilan miliar sembilan ratus juta Rupiah).
 - Rudy Budiman Setiawan sebesar 192.500.000 saham atau sejumlah Rp3.850.000.000 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah).

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.000.000.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tn. David Santoso	540.000.000	10.800.000.000	72,00%
Tn. Rudy Budiman Setiawan	210.000.000	350.000.000	28,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	750.000.000	15.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portebel	2.250.000.000	45.000.000.000	

Tahun 2021

Tidak ada perubahan pada struktur dan susunan pemegang saham.

Tahun 2022

- Berdasarkan akta Perubahan PT Teknologi Karya Digital Nusa No.103 Tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notaris yang berkedudukan di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan AHU-0083756. AH.01.11. Tahun 2022 Tanggal 27 April 2022, para pemegang saham Perseroan diantaranya menyetujui untuk:
 - Pengurangan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta Rupiah) terbagi atas 12.000.000 (dua belas juta) lembar saham; dan
 - pengurangan modal disetor semula sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta Rupiah) terbagi atas 3.000.000 (tiga juta) lembar saham Perseroan.



Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.000.000	240.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tn. David Santoso	2.160.000	43.200.000	72,00%
Tn. Rudy Budiman Setiawan	840.000	16.800.000	28,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.000.000	60.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portebel	9.000.000	180.000.000	

2. Berdasarkan akta Perubahan PT Teknologi Karya Digital Nusa No.154 Tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notaris yang berkedudukan di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan AHU-0084723. AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal 27 April 2022, para pemegang saham Perseroan diantaranya menyetujui untuk:

- a. peningkatan modal dasar perseroan semula sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 3.000.000.000 (tiga miliar) lembar saham.
- b. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, semula sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) terbagi atas 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham.
- c. Menyetujui sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut untuk mengeluarkan saham baru sebanyak 747.000.000 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta) saham dari portepel atau sebesar Rp14.940.000.000 (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah) yang seluruhnya akan diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh pemegang saham baru DKNI, dibuktikan dengan bukti setor oleh DKNI tertanggal 7 April 2022.

Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.000.000.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	747.000.000	14.940.000.000	99,60%
Tn. David Santoso	2.160.000	43.200.000	0,29%
Tn. Rudy Budiman Setiawan	840.000	16.800.000	0,11%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	750.000.000	15.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portebel	2.250.000.000	45.000.000.000	

3. Berdasarkan Akta Perubahan PT Teknologi Karya Digital Nusa No.170 tanggal 28 April 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notaris yang berkedudukan di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan AHU-0085924. AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal 28 April 2022, para pemegang saham Perseroan diantaranya menyetujui untuk

- a. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang dilakukan melalui konversi Dividen Perseroan yang ditahan menjadi modal disetor Perseroan sebesar Rp7.000.000.000 (tujuh miliar Rupiah), yang dibagikan secara proporsional kepada masing-masing pemegang saham Perseroan. Dividen Perseroan yang ditahan, yang kemudian dikonversi tersebut diberikan kepada:
 - PT Daya Kemilau Nusantara Investama sejumlah 348.600.000 lembar saham dengan jumlah nominal Rp 6.972.000.000
 - David Santoso sejumlah 1.008.000 lembar saham dengan jumlah nominal Rp 20.160.000
 - Rudy Budiman sejumlah 392.000 lembar saham dengan jumlah nominal Rp 7.840.000



- b. Dengan adanya Dividen Perseroan yang ditahan sehingga mengakibatkan naiknya modal disetor Perseroan menjadi sebesar Rp22.000.000.000 (dua puluh dua miliar Rupiah) terbagi atas 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) lembar saham.

Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.000.000.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	1.095.600.000	21.912.000.000	99,60%
Tn. David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,29%
Tn. Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,11%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.100.000.000	22.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portebel	1.899.800.000	59.912.000.000	

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 108 tertanggal 28 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah (a) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0053277. AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 29 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0146996.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Juli 2022; (b) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0272357 tertanggal 29 Juli 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145996.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Juli 2022, yang telah diumumkan dalam BNRI No. 061 dan Tambahan BNRI No. 025626 tanggal 28 Juli 2022, para pemegang saham Perseroan diantaranya menyetujui untuk
- a. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari modal semula Rp22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar Rupiah) menjadi Rp44.000.000.000,- (empat puluh empat miliar Rupiah);
- b. bahwa dalam peningkatan modal setor Perseroan tersebut, dilakukan penerbitan saham baru, yang diambil sepenuhnya oleh DKNI sebanyak 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta) saham atau sebesar Rp22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar Rupiah).

Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.000.000.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	2.195.600.000	43.912.000.000	99,60%
Tn. David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,14%
Tn. Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,16%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.200.000.000	44.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portebel	800.000.000	16.000.000.000	

- d. Berdasarkan Akta No. 110/2022, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui sebagai berikut:
- a. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari modal semula Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) menjadi Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah);



Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	2.195.600.000	43.912.000.000	99,60%
Tn. David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,14%
Tn. Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,16%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.200.000.000	44.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portebel	3.800.000.000	76.000.000.000	

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Akta No. 110/2022, merupakan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir

3. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAPORAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN

Perizinan Umum

A. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

NIB No. 0220106143418 tertanggal 31 Januari 2020 sebagaimana telah mengalami Perubahan ke-46 pada tanggal 6 Oktober 2022 dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
NPWP	: 31.316.790.0-074.000

Sebagaimana tercantum pada Lampiran NIB Perseroan, Kode KBLI dan Nama KBLI yang tercakup adalah sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Alamat	Klasifikasi Risiko
1.	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410	Rendah
2.	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410	Rendah
3.	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410	Rendah
4.	63122	Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410	Rendah
5.	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410	Rendah
6.	58200	Penerbitan piranti lunak (Software)	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410	Rendah



No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Alamat	Klasifikasi Risiko
7.	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410	Rendah
8.	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410	Rendah
9.	62024	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410	Menengah Rendah
10.	62015	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410	Menengah Rendah
11.	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410	Menengah Tinggi

NPWP

Nomor	Tanggal Terdaftar	Alamat
31.316.790.0-074.000	5 Mei 2011	Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi Pademangan Timur Pademangan

B. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Nomor	Tanggal	Penerbit
S-286PKP/WPJ.21/KP.0203/2016	27 September 2018	Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara KPP Pratama Jakarta Pademangan

C. Surat Keterangan Terdaftar

Nomor	Tanggal	Penerbit
S-6530KT/WPJ.21/KP.0203/2016	27 September 2016	Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara KPP Pratama Jakarta Pademangan

D. Sertifikat Standar

Perseroan telah memiliki Serifikat Standar yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“UPPMPTSP”) Kota Administrasi Jakarta Utara, Menteri Komunikasi dan Informatika, atau Menteri Inventasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan rincian sebagai berikut:

- Sertifikat Standar No. 02201061434180007 diterbitkan tanggal 3 Agustus 2022 dengan perubahan ke-1 tertanggal 3 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
NIB	: 0220106143418
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Status Penanaman Modal	: PMDN
Nama KBLI	: Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial
Kode KBLI	: 62015
Instansi Penerbit	: Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Inventasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Persyaratan dan/atau Kewajiban	: Kewajiban: <ul style="list-style-type: none"> i. Memenuhi standar aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifiisial; ii. Membuat dan menerapkan internal company policies mengenai data dan etika internal Kecerdasan Artifiisial; iii. Pelaporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun mengenai kegiatan manajemen dan keamanan data (data security and governance) yang dilakukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; iv. Mempublikasikan inovasi dan pengembangan teknologi kepada publik melalui event, demo, maupun cara-cara yang dapat diakses oleh publik dengan memperhatikan aspek privasi dan legalitas informasi; v. Memenuhi self-declare untuk tenaga ahli sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) minimal untuk Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) bidang Keahlian Artificial Intelligence Sub Bidang Data Science; vi. Memenuhi self-declare untuk tenaga ahli sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) minimal untuk Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) bidang Keahlian Artificial Intelligence Sub Bidang Data Science.
Bukti Pemenuhan	: Pernyataan Mandiri

- b. Sertifikat Standar No. 02201061434180002 diterbitkan tanggal 3 Agustus 2022 dengan perubahan ke-1 tertanggal 3 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
NIB	: 0220106143418
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Status Penanaman Modal	: PMDN
Nama KBLI	: Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)
Kode KBLI	: 62024
Instansi Penerbit	: Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Inventasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Persyaratan dan/atau Kewajiban	: Kewajiban: <ul style="list-style-type: none"> i. Memenuhi standar aktivitas konsultasi dan perancangan Internet of Things (IoT); ii. Memenuhi self-declare untuk tenaga ahli sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi bidang Internet of Things (IoT); dan iii. Pelaporan kegiatan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
Bukti Pemenuhan	: Pernyataan Mandiri

- c. Sertifikat Standar No. 02201061434180006 diterbitkan tanggal 3 Agustus 2022 dengan perubahan ke-1 tertanggal 3 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
NIB	: 0220106143418
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Status Penanaman Modal	: PMDN
Nama KBLI	: Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
Kode KBLI	: 62029
Instansi Penerbit	: Gubernur DKI Jakarta dan Kepala UPPMPTSP Kota Administrasi Jakarta Utara



Persyaratan dan/atau Kewajiban	: Persyaratan: Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. Kewajiban: i. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; ii. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; iii. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; iv. Memenuhi Standar Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; dan v. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
--------------------------------	---

E. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (“PKKPR”)

Perseroan telah memiliki 3 (tiga) PKKPR Perseroan yang diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“DPMPTSP”) Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

a. PKKPR No. 02082210213172154 tanggal 2 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
Lokasi Usaha	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Nama KBLI	: <ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak • Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial • Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi • Penerbitan piranti lunak (Software) • Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) • Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya • Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya • Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial • Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
Kode KBLI	: <ul style="list-style-type: none"> • 46100 • 63122 • 46523 • 58200 • 62024 • 46599 • 62029 • 62015 • 62019
Luas Tanah	: 4.083,03 m ²
Instansi Penerbit	: Gubernur DKI Jakarta dan Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
Keberlakuan	: Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang



b. PKKPR No. 24082210213172123 tanggal 24 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
Lokasi Usaha	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Nama KBLI	: Perdagangan Besar Piranti Lunak
Kode KBLI	: 46512
Luas Tanah	: 4.083,03 m ²
Instansi Penerbit	: Gubernur DKI Jakarta dan Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
Keberlakuan	: Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

c. PKKPR No. 24082210213172124 tanggal 24 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
Lokasi Usaha	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Nama KBLI	: Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
Kode KBLI	: 46511
Luas Tanah	: 4.083,03 m ²
Instansi Penerbit	: Gubernur DKI Jakarta dan Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
Keberlakuan	: Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

Perizinan Operasional

Perseoran telah memperoleh perizinan-perizinan operasional sebagai berikut:

A. Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (“TDPSE”)

a. Perseroan telah memiliki TDPSE No. PB-UMKU: 022010614341800070005 tertanggal 9 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
Nomor Induk Berusaha	: 0220106143418
Nomor TDPSE	: 003273.05/DJAI.PSE/08/2022
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Status Penanaman Modal	: PMDN
Nama KBLI	: Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
Kode KBLI	: 46100
Lokasi Usaha	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Fungsi Sistem Elektronik	: Platform dan website yang bertujuan untuk memudahkan user, operator dan/atau konsumen untuk mengelola atau berfungsi sebagai pengawasan transportasi kendaraan
Kewajiban	: i. Memastikan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ii. Melakukan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan iii. Melakukan uji kelayakan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Perseroan telah memiliki TDPSE No. PB-UMKU: 022010614341800070006 tertanggal 9 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
Nomor Induk Berusaha	: 0220106143418
Nomor TDPSE	: 003273.06/DJAI.PSE/08/2022



Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Status Penanaman Modal	: PMDN
Nama KBLI	: Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
Kode KBLI	: 46523
Lokasi Usaha	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Fungsi Sistem Elektronik	: Platform dan website yang bertujuan untuk memudahkan user, operator dan/atau konsumen untuk mengelola atau berfungsi sebagai pengawasan transportasi kendaraan.
Kewajiban	: i. Memastikan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ii. Melakukan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan iii. Melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

- c. Perseroan telah memiliki TDPSE No. PB-UMKU: 022010614341800070008 tertanggal 9 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
Nomor Induk Berusaha	: 0220106143418
Nomor TDPSE	: 003273.08/DJAI.PSE/08/2022
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Status Penanaman Modal	: PMDN
Nama KBLI	: Penerbitan piranti lunak (Software)
Kode KBLI	: 58200
Lokasi Usaha	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Fungsi Sistem Elektronik	: Platform dan website yang bertujuan untuk memudahkan user, operator dan/atau konsumen untuk mengelola atau berfungsi sebagai pengawasan transportasi kendaraan
Kewajiban	: i. Memastikan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ii. Melakukan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan iii. Melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

- d. Perseroan telah memiliki TDPSE No. PB-UMKU: 022010614341800070010 tertanggal 9 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
Nomor Induk Berusaha	: 0220106143418
Nomor TDPSE	: 003273.10/DJAI.PSE/08/2022
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Status Penanaman Modal	: PMDN
Nama KBLI	: Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
Kode KBLI	: 62019
Lokasi Usaha	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Fungsi Sistem Elektronik	: Platform dan website yang bertujuan untuk memudahkan user, operator dan/atau konsumen untuk mengelola atau berfungsi sebagai pengawasan transportasi kendaraan



Kewajiban	: i. Memastikan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ii. Melakukan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan iii. Melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.
-----------	---

- e. Perseroan telah memiliki TDPSE No. PB-UMKU: 022010614341800070007 tertanggal 9 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
Nomor Induk Berusaha	: 0220106143418
Nomor TDPSE	: 003273.07/DJAI.PSE/08/2022
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Status Penanaman Modal	: PMDN
Nama KBLI	: Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)
Kode KBLI	: 62024
Lokasi Usaha	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Fungsi Sistem Elektronik	: Platform dan website yang bertujuan untuk memudahkan user, operator dan/atau konsumen untuk mengelola atau berfungsi sebagai pengawasan transportasi kendaraan.
Kewajiban	: i. Memastikan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ii. Melakukan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan iii. Melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

- f. Perseroan telah memiliki TDPSE No. PB-UMKU: 022010614341800070009 tertanggal 9 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
Nomor Induk Berusaha	: 0220106143418
Nomor TDPSE	: 003273.09/DJAI.PSE/08/2022
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Status Penanaman Modal	: PMDN
Nama KBLI	: Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
Kode KBLI	: 62029
Lokasi Usaha	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Fungsi Sistem Elektronik	: Platform dan website yang bertujuan untuk memudahkan user, operator dan/atau konsumen untuk mengelola atau berfungsi sebagai pengawasan transportasi kendaraan
Kewajiban	: i. Memastikan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ii. Melakukan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan iii. Melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.



- g. Perseroan telah memiliki TDPSE No. PB-UMKU: 022010614341800070004 tertanggal 9 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
Nomor Induk Berusaha	: 0220106143418
Nomor TDPSE	: 003273.04/DJAI.PSE/08/2022
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Status Penanaman Modal	: PMDN
Nama KBLI	: Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
Kode KBLI	: 63122
Lokasi Usaha	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Fungsi Sistem Elektronik	: Platform dan website yang bertujuan untuk memudahkan user, operator dan/ atau konsumen untuk mengelola atau berfungsi sebagai pengawasan transportasi kendaraan
Kewajiban	: i. Memastikan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ii. Melakukan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan iii. Melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Perizinan Lingkungan

Perseroan telah memiliki Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 03082201131720263 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial di Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta oleh PT Teknologi Karya Digital Nusa tertanggal 2 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
Nomor Induk Berusaha	: 0220106143418
Nama Usaha dan/atau Kegiatan	: Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial
KBLI dan Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan	: 62015 - Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial
Nama Penanggung Jawab	: Rudy Budiman Setiawan
Jabatan	: Direktur
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Lokasi Kegiatan	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410



Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> i. Melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi; ii. Melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana Lampiran VI Keputusan Menteri ini; iii. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; iv. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini; v. Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan; vi. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Lampiran I keputusan ini; vii. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP); viii. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini; ix. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut; x. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan xi. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.
-----------	---

- b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 03082201131720262 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) di Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta oleh PT Teknologi Karya Digital Nusa tertanggal 2 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
Nomor Induk Berusaha	: 0220106143418
Nama Usaha dan/atau Kegiatan	: Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)
KBLI dan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	: 62024 - Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan Internet Of Things (IoT)
Nama Penanggung Jawab	: Rudy Budiman Setiawan
Jabatan	: Direktur
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Lokasi Kegiatan	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14410
Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> i. Melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi; ii. Melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana Lampiran VI Keputusan Menteri ini; iii. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; iv. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini; v. Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan; vi. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Lampiran I keputusan ini; vii. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP); viii. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;



	<ul style="list-style-type: none"> ix. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut; x. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan xi. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.
--	---

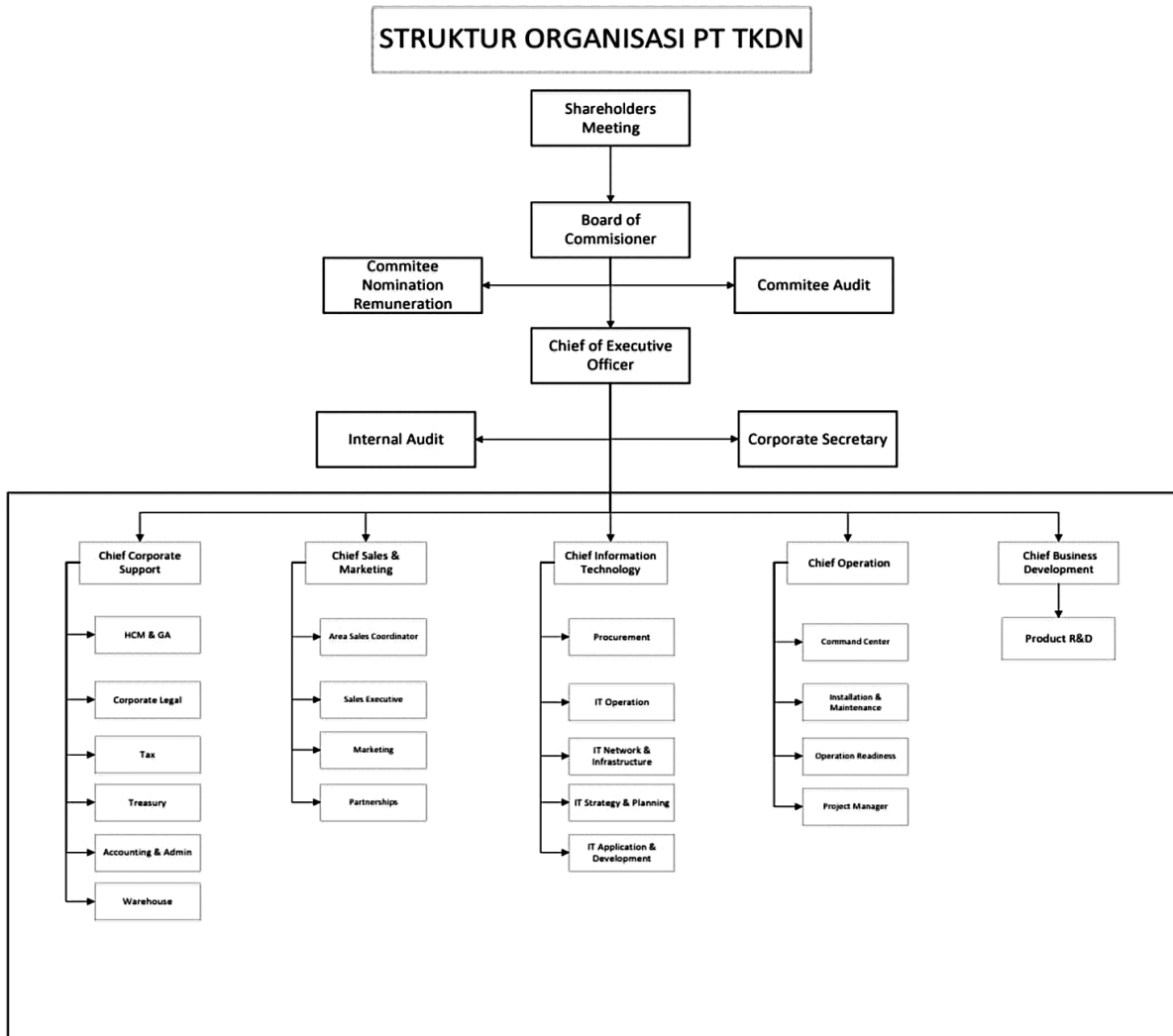
c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT Teknologi Karya Digital Nusa
Nomor Induk Berusaha	: 0220106143418
Nama Penanggung Jawab	: Rudy Budiman Setiawan
Jabatan	: Direktur
Alamat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826, Jl. Trembesi, Desa/Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
No. Telepon	: 081280704189
Kode KBLI	: <ul style="list-style-type: none"> • 63122 • 46100 • 46523 • 62024 • 58200 • 62029 • 62015 • 62019 • 46599
Bidang Usaha/Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none"> • Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial • Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak • Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi • Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) • Penerbitan piranti lunak (Software) • Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya • Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial • Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya • Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya
Pernyataan Kesanggupan	: <ul style="list-style-type: none"> i. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang; ii. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; iii. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan; iv. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan; v. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya; vi. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi; vii. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; viii. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan ix. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan pada butir 1 sampai 8 SPPL.



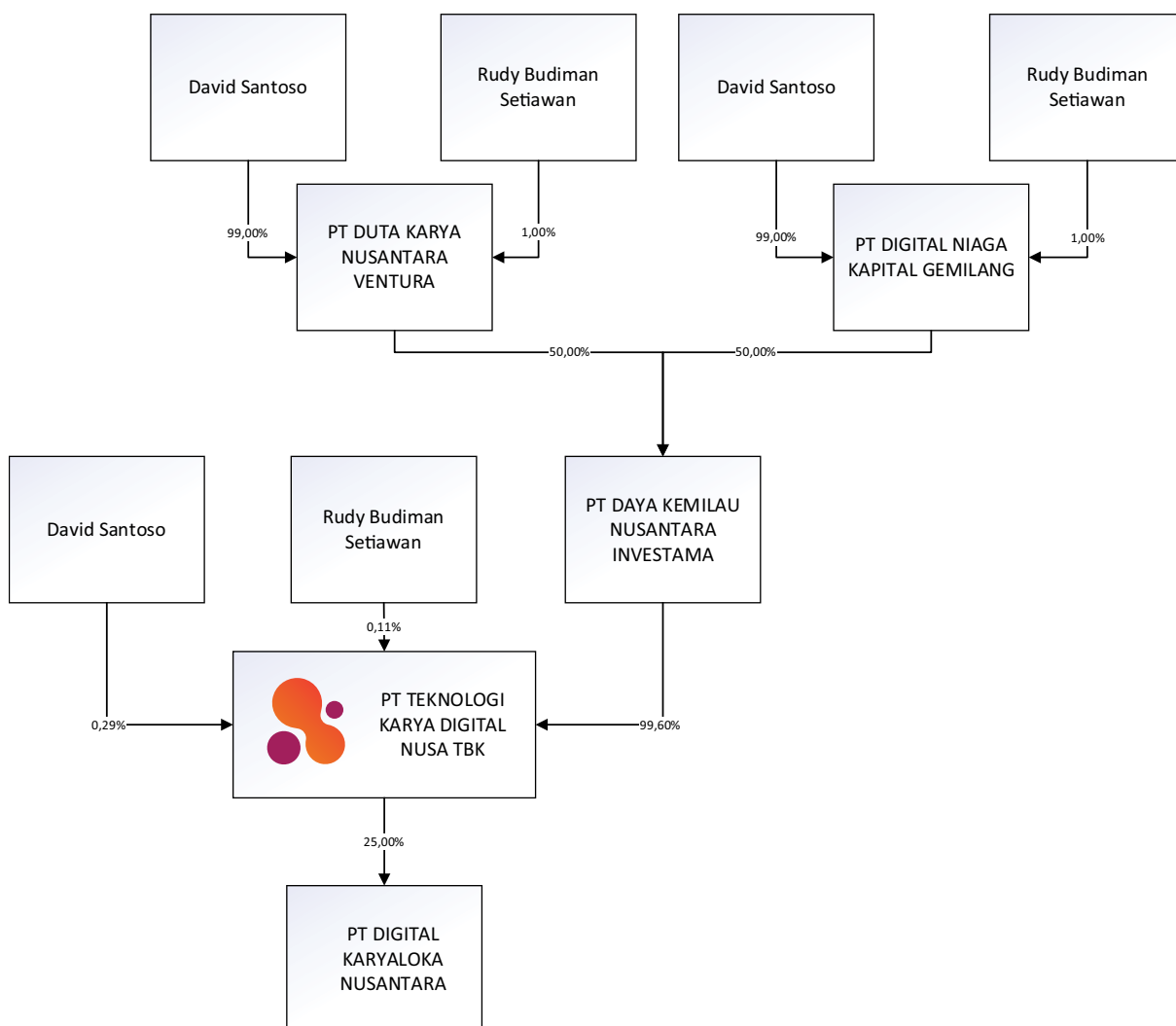
4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



5. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan:



Sumber: Perseroan

Pengendali Perseroan sekaligus Ultimate Beneficiary Owner (UBO) adalah David Santoso berdasarkan:

- Peraturan OJK No. 9/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, David Santoso telah memenuhi kriteria pengendali Perusahaan Terbuka yaitu memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh serta mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.
- Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme atas pengendali Perseroan ("**PePRES 13/2018**"), David Santoso telah memenuhi kriteria berdasarkan huruf e PePRES 13/2018 dikarenakan David Santoso memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan tanpa harus mendapatkan otorisasi dari pihak manapun.



Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan dan Entitas Asosiasi.

Nama	Perseroan	DKNI	DIKA
Budi Setiyadi	KU	-	-
Dr. Ir. Resdiansyah	KI	-	-
David Santoso	DU	KU	KU
Rudi Budiman Setiawan	D	D	-
Yudhi Haryadi	D	-	D

Catatan:

KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama
 KI : Komisaris Independen D : Direktur

6. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai pemegang saham berbadan hukum dari Perseroan.

PT Daya Kemilau Nusantara Investama (DKNI)

a) Riwayat Singkat

PT Daya Kemilau Nusantara Investama (DKNI) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 50 tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, notaris yang berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan No. AHU-0020532.AH.01.01.TAHUN 2022 tertanggal 22 Maret 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056283.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Maret 2022 ("**Akta Pendirian DKNI**").

b) Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar DKNI, maksud dan tujuan DKNI adalah berusaha dalam bidang jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT DKNI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Aktivitas perusahaan holding (64200)

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

b. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209)

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur



c) Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian DKNI, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DKNI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	597.600.000	59.760.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Digital Niaga Kapital Gemilang	74.700.000	7.470.000.000	50,00%
PT Duta Karya Nusantara Ventura	74.700.000	7.470.000.000	50,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	149.400.000	14.940.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portebel	448.200.000	44.820.000.000	

d) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian DKNI, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : David Santoso

Direksi

Direktur : Rudy Budiman Setiawan

7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ASOSIASI

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai pemegang saham berbadan hukum dari Perseroan.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Entitas Asosiasi.

PT Digital Karyaloka Nusantara (DIKA)

a) Riwayat Singkat

PT Digital Karyaloka Nusantara (PT DIKA) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tertanggal 28 September 2021 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0066696.AH.01.01.TAHUN 2021 tertanggal 22 Oktober 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0183991.AH.01.11. Tahun 2021 tertanggal 22 Oktober 2021 serta diumumkan dalam BNRI No. 14 tertanggal 18 Februari 2022 serta TBNRI No. 006564 tertanggal 18 Februari 2022.

b) Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar DIKA sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 18 tertanggal 5 April 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0024426.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 5 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Data Perseroan No. AHU-0067233.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 5 April 2022; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0001458 tertanggal 5 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067233.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 5 April 2022 ("Akta DIKA No. 18/2022"), maksud dan tujuan DIKA adalah berusaha dalam bidang jasa.



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, DIKA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (62090), kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa computer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan computer, instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan computer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.
2. Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) (66411), kelompok ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (*end user*) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi *front end*, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/*acquiring* (dompet elektronik, *acquirer* dan *payment gateway*); menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana.
3. Aktivitas Pengolahan Data (63111), kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entry data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*).
4. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (63122), kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech). *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).

c) Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 110 tertanggal 29 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0038557 tertanggal 29 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147312.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 29 Juli 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT DIKA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000 Per Lembar Saham		
	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk	37.500	3.750.000.000	25,00%
Tn Ari Wibowo	82.500	8.250.000.000	55,00%
Tn David Santoso	30.000	3.000.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	150.000	15.000.000.000	100,00%

d) **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta DIKA No. 18/2022 susunan pemegang saham DIKA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : David Santoso
Komisaris : Natalia Johana Lim

Direksi

Direktur Utama : Sandy Wardhana
Direktur : Yudhi Haryadi

8. **PENGURUSAN, PENGAWASAN PERSEROAN**

Berdasarkan Akta No.98 tanggal 31 Oktober 2022 yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan No. AHU-AH.01.09-0071518, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Budi Setiyadi
Komisaris Independen : Dr. Ir. Resdiansyah

Direksi

Direktur Utama : David Santoso
Direktur : Rudy Budiman Setiawan
Direktur : Yudhi Haryadi

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Budi Setiyadi
Komisaris Utama

Warga negara Indonesia. Saat ini berusia 60 tahun. Meraih gelar Sarjana di Unswagati pada tahun 1999. Selain itu beliau juga menempuh pendidikan militer di Akpol (1985), PTIK (1993), SESPIM (2000), SESPATI (2008), dan LEMHANAS RI (2012). Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Jendral Perhubungan Darat dengan pangkat terakhir Inspektur Jendral Polisi. Beliau memiliki pengalaman sebagai Kapolres di Sumatera Selatan, dan Dirlantas di Maluku, Riau, dan Sulawesi Selatan. Terakhir beliau berkarir di Lemhanas RI sebagai Kepala Biro Umum dan Tenaga Pengkaji Bidang Iptek, Karoum Settama. Selain itu, beliau juga merupakan Analis Kebijakan Madya Regiden di Korps Lalu Lintas (Korlantas) POLRI.

Masa Jabatan sejak tahun 2022 hingga saat ini.



Dr. Ir. Resdiansyah
Komisaris Independen

Warga negara Indonesia. Saat ini berusia 51 tahun. Meraih gelar Sarjana dalam bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, Master dalam bidang Sistem dan Teknik Transportasi dari Universitas Gajah Mada dan juga meraih gelar Doktor dalam bidang *Urban Transportation Infrastructure and Intelligent Transportation System* di National University of Malaysia. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022. Beliau memiliki pengalaman sebagai *Technical Expert* di Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan – LLAJ, Kementerian Perhubungan Indonesia (2021- saat ini), *Focal Point for Transportation* di United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESSCAP) (2021 – saat ini), *Pool of Expert*, Badan Pengatur Jalan Tol (2020 – saat ini), *Technical Expert* di Sistem Pengendali lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (2020 – saat ini), *Technical Expert* di Direktorat Lalu Lintas, Polda Kepulauan Riau (2021 – saat ini), *Technical Expert* Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat (2021 – saat ini).

Masa Jabatan sejak tahun 2022 hingga saat ini.



David Santoso
Direktur Utama

Warga negara Indonesia. Saat ini berusia 47 tahun. Meraih gelar Sarjana dalam bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Institute Bisnis Indonesia (STIE IBII) pada tahun 1998 dan Master dalam Bidang *General Management* dari Institute of Management Development pada tahun 2008. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun (2020-2021), *Chief Executive Officer* di TRON (2019-2022), *Chief Financial Officer* di Kaspro (2018-2019), *Chief Financial Officer* di Paypro Indonesia (2017-2018), *Commercial and Business Development Director* di Express Group (2015-2017), *Chief Financial Officer* di Express Group (2007-2015).

Masa Jabatan sejak tahun 2022 hingga saat ini.



Rudy Budiman Setiawan
Direktur

Warga negara Indonesia. Saat ini berusia 53 tahun. Meraih gelar Sarjana dalam bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas pada tahun 1992. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun (2020-2021) *Senior General Manager – Finance, Accounting and Tax* di PT Express Trasindo Utama (2007-2017), *Finance Controller* di PT Terrindo Mining (2005-2007), *Finance Controller* di PT Calmic Indonesia (1998-2004), *Accounting Manager* di PT Access Matsushita Denko Mitra Indonesia (1992-1996). *Senior Auditor* di Coopers & Lybrand (Intl) (1991-1992).

Masa Jabatan sejak tahun 2022 hingga saat ini.



Yudhi Haryadi
Direktur

Warga negara Indonesia. Meraih gelar Sarjana dalam bidang Teknik Elektro dari Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) pada tahun 1997. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai *Solutions Director* di Indonesian Cloud (2019-2020), *Project and Operation Director* di Indonesian Cloud (2018-2019), *Chief Technology Officer* di Indonesian Cloud (2015-2018), *Head of Technology* di PT Linktone Indonesia (2012-2015), dan *Head of IT Department* di Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) (2006-2011).

Masa Jabatan sejak tahun 2022 hingga saat ini.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan.

9. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Implementasi Tata Kelola Perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan bagi Perseroan bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan akan tetapi merupakan bagian dari budaya dan pedoman perilaku dalam aktivitas sehari-hari. Implementasi Tata Kelola Perusahaan merupakan bagian dari komitmen Perusahaan untuk mendorong terwujudnya Perusahaan yang kokoh dan independen.

Landasan Pelaksanaan GCG

Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan Perusahaan mengacu kepada beberapa peraturan/perundangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 2003.
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Pemerintah
 - a. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
 - b. Peraturan OJK yang terkait dengan implementasi Tata Kelola
3. Anggaran Dasar Perusahaan
4. Pedoman Umum Governansi Korporat yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2021.



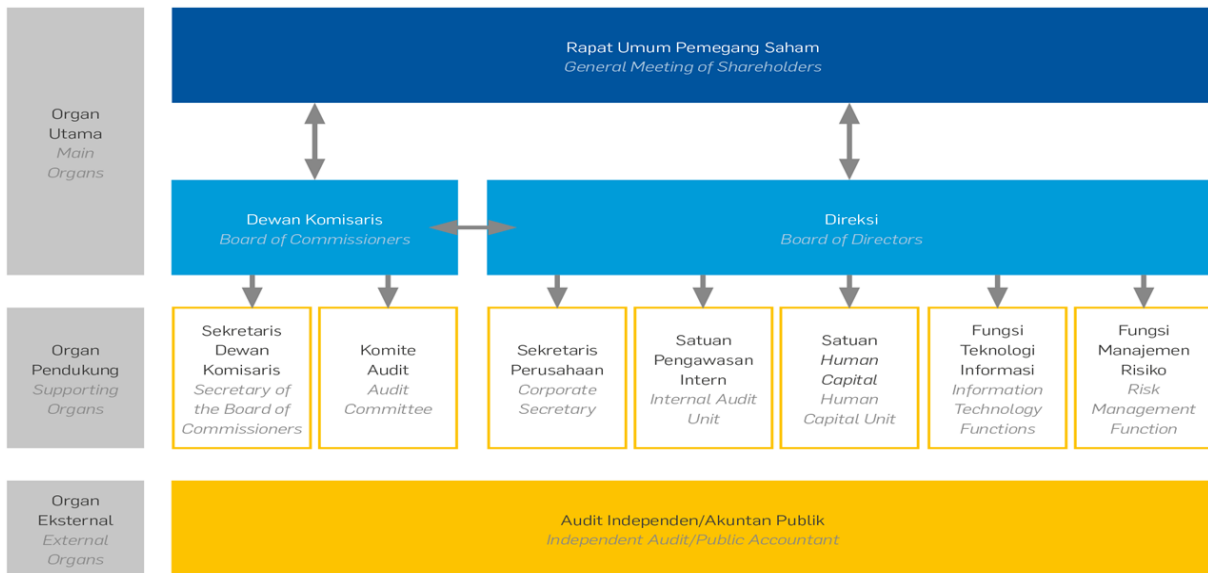
Dalam implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, disiplin dan kewajaran. Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik diperlengkapi Code of Conduct, yang berisi pedoman etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan stakeholder lainnya. Untuk memastikan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perusahaan memastikan bahwa implementasi Tata Kelola mengacu pada kerangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)
yaitu struktur tata kelola yang terdiri dari organ utama dan organ pendukung.
2. Proses Tata Kelola (*Governance Process*)
yaitu proses dan mekanisme kerja dari organ tata kelola.
3. Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)
aitu hasil dari penerapan tata kelola dengan tujuan akhir mencapai visi Perusahaan yaitu "Memanfaatkan teknologi terkini untuk selalu memberikan solusi terbaik yang terintegrasi dan bermanfaat baik bagi bisnis maupun masyarakat".

Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)

Perusahaan telah memiliki ketiga organ utama tersebut, baik RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang. oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan. Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang baik juga mengikutsertakan beberapa aspek penting yang berperan untuk mendukung penguatan kontrol dan pengelolaan terhadap Perusahaan, terdiri dari organ pendukung yang meliputi Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Divisi Human Capital, Divisi Manajemen Risiko, dan Divisi pendukung bisnis yang berada di bawah Direksi, serta Komite Audit yang berada di bawah Dewan Komisaris.

Bagan Struktur Tata Kelola Perseroan



Proses Tata Kelola (*Governance Process*)

Governance process merupakan serangkaian mekanisme dan proses penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur agar dapat menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perusahaan.

Agar tatanan Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan mekanisme dan proses yang tertuang dalam perangkat kebijakan yang dimiliki Perusahaan. Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan praktek terbaik prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perusahaan telah melakukan peninjauan dan penyempurnaan terhadap softstructure Perusahaan yakni

pedoman dan perangkat kebijakan. Pedoman dan kebijakan tersebut secara jelas mengatur segala aspek pengelolaan Perusahaan, termasuk di antaranya memberikan definisi visi, misi dan Nilai-Nilai Perusahaan; menjelaskan kebijakan penyusunan strategi, penyusunan organisasi, kesekretariatan korporasi, manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan pengawasan, standar etika, keuangan, akuntansi, pengelolaan SDM, dan sebagainya.

Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik di Perusahaan bertujuan untuk meningkatkan pencapaian hasil usaha serta memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan pemegang saham, dan guna mendukung visi dan misi Perusahaan. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik memiliki manfaat yang besar bagi Perusahaan, salah satunya adalah untuk memandu Perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya. Dengan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik Perusahaan berkomitmen dalam mencapai visi dan misi, target, serta kinerja yang optimal yang dapat menjadi nilai bersama (*shared value*) bagi pemangku kepentingan.

Organ Tata Kelola

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan rapat yang dilangsungkan minimal setahun sekali dimana Pemegang Saham memiliki kewenangan eksklusif untuk memperoleh keterangan mengenai Perusahaan dan menerima pertanggungjawaban kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kewenangan Pemegang Saham melalui RUPS adalah:

1. Menetapkan jumlah dan komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta jumlah jabatan sebagai Dewan Komisaris yang dapat dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris.
3. Menetapkan pedoman penilaian kinerja Direksi (kolegial dan individu), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan, serta menetapkan indikator kinerja utama Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan.
4. Menetapkan target kinerja berupa kontrak manajemen baik kolegial maupun individual bagi Direksi dan kontrak kinerja bagi Dewan Komisaris, dengan disahkan oleh RUPS.
5. Melakukan penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individual, melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara majelis, dan menuangkan hasilnya dalam risalah RUPS.
6. Menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Menetapkan Auditor Eksternal untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan.
8. Memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris.
9. Menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan.
10. Memberikan arahan mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
11. Menetapkan sistem dan memberikan tanggapan atas informasi mengenai gejala penurunan kinerja Perusahaan yang signifikan yang disampaikan Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Akuntabilitas Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

1. Pemegang Saham berkewajiban untuk memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan tetap sesuai dengan tujuan pendirian Perusahaan.
2. Pemegang Saham melaksanakan GCG sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.
3. Pemegang Saham tepat waktu mengesahkan terhadap laporan tahunan dan persetujuan terhadap laporan keuangan.
4. Pemegang saham mengambil keputusan sesuai ketentuan Perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah.
5. Pemegang saham mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.
6. Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.



DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Proses pemilihan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, tanpa mengurangi hak RUPS untuk menentukan lain. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan dengan pertimbangan aspek integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan.

Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, berikut adalah tugas dan kewenangan Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

Selain yang dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan RUPS
2. Beritikad baik dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan
3. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan
5. Melaksanakan kepentingan Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS
6. Memantau efektivitas praktik *Good Corporate Governance* yang diterapkan Perusahaan antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*
7. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berikutnya
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS
9. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan penyusunan visi, misi serta rencana-rencana strategis lain yang diatur dalam Anggaran Dasar
10. Memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Anggaran Dasar, dan ketentuan perundang-undangan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan
11. Mengajukan calon auditor eksternal kepada RUPS
12. Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, serta memberikan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju) terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan
13. Dewan Komisaris mengusulkan calon Anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan

14. Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham
15. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi
16. Melakukan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan terutama tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama
17. Menelaah laporan-laporan dari komite-komite yang ada dibawah Dewan Komisaris
18. Mengevaluasi dan memberi masukan serta saran atas permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham
19. Memonitor dan mengatasi masalah benturan pada tingkat manajemen, anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, termasuk penyalahgunaan aset Perusahaan dan manipulasi transaksi Perusahaan
20. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS

Wewenang Dewan Komisaris

Berikut adalah wewenang dari Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana Direksi dalam hal:
 - a. Menerima pinjaman jangka pendek dari Bank atau Lembaga Keuangan lain;
 - b. Memberikan pinjaman jangka pendek yang bersifat operasional di bawah jumlah tertentu yang ditetapkan RUPS atas nama Perusahaan.
 - c. Mengagunkan aset tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek
 - d. Melepaskan dan menghapuskan aset bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, dan menghapuskan piutang macet, persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan RUPS
 - e. Mengadakan kerja sama operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha
 - f. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi
 - g. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam suatu persero atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru atau mendirikan anak perusahaan yang melibatkan nilai sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh RUPS
 - h. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan modal Perusahaan dalam suatu perseroan atau badan-badan lain yang melibatkan nilai sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh RUPS
 - i. Menjaminkan sebagian saham yang melibatkan nilai sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh RUPS
2. Dengan suara terbanyak, memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, jikalau mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris
6. Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris
7. Membentuk Komite-komite selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan
8. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu
9. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan

**Komisaris Independen**

Perusahaan memiliki seorang Komisaris Independen yaitu Dr. Ir. Resdiansyah. Sebagai seorang Komisaris Independen, beliau tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Beberapa persyaratan menjadi Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Kompetensi dibidang auditing, keuangan, dan akuntansi;
2. Telah tidak menjabat sebagai anggota Direksi perusahaan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
3. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
4. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
5. Tidak mempunyai afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan;
6. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran

Selama tahun 2021 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 6 (Enam) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Berikut adalah frekuensi rapat kehadiran Dewan Komisaris:

Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Tingkat Kehadiran Rapat
2021			
David Santoso	4	4/4	100%
Shafruhan Sinungan	4	4/4	100%
2022			
David Santoso	1	1/2	50%
Shafruhan Sinungan	1	1/2	50%
Budi Setiyadi	1	1/2	50%
Kelik Irwantono*	1	1/2	50%

*Sudah tidak menjabat sebagai komisaris berdasarkan akta no 98 tanggal 31 Oktober 2022.

Selama tahun 2021 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan rapat gabungan sebanyak 6 (Enam) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Tingkat Kehadiran Rapat
Dewan Komisaris			
2021			
David Santoso	4	4/4	100%
Shafruhan Sinungan	4	4/4	100%
2022			
David Santoso	1	1/2	50%
Shafruhan Sinungan	1	1/2	50%
Budi Setiyadi	1	1/2	50%
Kelik Irwantono*	1	1/2	50%



Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Tingkat Kehadiran Rapat
Dewan Direksi			
2021			
Rudy Budiman Setiawan	4	4/4	100%
Herwan Gozali	4	4/4	100%
2022			
Rudy Budiman Setiawan	2	2/2	100%
Herwan Gozali	1	1/2	50%
David Santoso	1	1/2	50%
Yudhi Haryadi	1	1/2	50%

*Sudah tidak menjabat sebagai komisaris berdasarkan akta no 98 tanggal 31 Oktober 2022.

DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola Perusahaan agar seluruh sumber daya yang dimiliki dapat berfungsi optimal, profitabilitas meningkat sehingga meningkatkan nilai Perusahaan secara berkelanjutan. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan dapat mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Direksi

Berdasarkan Anggaran dasar Perusahaan, berikut adalah Tugas dan Kewenangan Direksi:

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
2. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku.
3. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Selain yang dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi juga bertanggung jawab untuk:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Direksi:
 - Wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan
 - Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran
 - Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan perundang-undangan
 - Bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan
2. Dalam mengurus Perusahaan, Direksi melaksanakan petunjuk yang diberikan RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan



Adapun tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
 - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut
2. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh RUPS menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

Kewenangan Direksi tergantung pada pembagian tugas pengurusan Direksi, secara umum kewenangan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan Kepengurusan Perusahaan yang dianggap tepat dalam Kepengurusan Perusahaan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain.
3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pekerja Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan RUPS.
4. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris.
6. Menghapuskan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan anggaran Dasar yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan- pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perusahaan dan/ atau Keputusan RUPS.

Ketentuan Masa Jabatan

Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud berakhir, dimana 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun. Anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dengan tidak mengurangi hak RUPS, RUPS dapat sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir atau memperpanjangnya setelah mencapai 2 (dua) periode masa jabatan.

Frekuensi Rapat Direksi dan Tingkat Kehadiran

Selama tahun 2021 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Direksi telah melakukan rapat sebanyak 6 (Enam) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Berikut adalah frekuensi rapat kehadiran Direksi:

Nama Direksi	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Tingkat Kehadiran Rapat
2021			
Rudy Budiman Setiawan	12	12/12	100%
Drs. Herwan Gozali	12	12/12	100%



Nama Direksi	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Tingkat Kehadiran Rapat
2022			
Rudy Budiman Setiawan	7	7/7	100%
Drs. Herwan Gozali	7	6/7	99%
David Santoso	1	1/7	14%
Rudy Budiman Setiawan	12	12/12	100%

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris di mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini dilakukan demi menghindari konflik kepentingan dimana Dewan Komisaris bisa menentukan remunerasinya sendiri. Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Komisaris dan Direktur Perusahaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp1.615.163.233.

KOMITE AUDIT

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit. Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan menunjuk Ketua dan Anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk No.: 107/TKDN/IX/2022 tanggal 28 September 2022.

Kriteria dan Komposisi Komite Audit

Kriteria penunjukan Komite Audit didasarkan pada integritas, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman masing-masing anggota. Salah seorang anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Komite Audit Perusahaan bersifat independen, bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, dan bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Anggota Komite Audit juga tidak diperkenankan memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan. Anggota Komite Audit tidak diijinkan memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Jumlah dan Komposisi

Susunan dan komposisi keanggotaan Komite Audit terdiri dari:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
Dr. Ir. Resdiansyah	Ketua Komite Audit	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 107/TKDN/IX/2022 tanggal 28 September 2022 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit	28 September 2022 - 27 September 2027
Dwi Afrilianto	Anggota Komite Audit		
Muhammad Arif Hartono	Anggota Komite Audit		

Berikut adalah keterangan singkat dari masing – masing Ketua dan Anggota Komite Audit Perusahaan:

Nama	Dr. Ir. Resdiansyah
Jabatan	Ketua Komite Audit



Keterangan mengenai riwayat jabatan dan riwayat pendidikan Ketua Komite Audit dapat dilihat pada sub bab Pengurusan, Pengawasan Perseroan

Nama	Muhammad Arif Hartanto
Jabatan	Anggota Komite Audit
Usia	43
Riwayat Jabatan	2022 – Sekarang: Direktur, PT Ajwa Karsa Mulia 2018 – 2021: Tax Specoalist, PT Eureka Analytics Indonesia 2016 – 2018: Tax Assisten Manager, PT Pesona Sentra Utama 2012 – 2016: Tax Assisten Manager, PT Express Trasindo Utama Tbk 2009 – 2012: <i>Accounting & Finance Manager</i> , PT Mahesa Agro Pratama 2004 – 2009: Internal Audit Senior, PT Delta Internusa (Nojorono Group) 2002 – 2004: A/P & Inventory, PT Fastrata Buana (Kapal Api Group) Jakarta
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> S1 Jurusan Akuntansi, STEI Rawamangun

Nama	Dwi Afrilianto SE Ak., CA, CMA
Jabatan	Anggota Komite Audit
Usia	45 tahun
Riwayat Jabatan	2018 – Sekarang: <i>Controller</i> di PT Digi Asia Bios 2016 – 2018: <i>Accounting and Finance Manager</i> di PT Equator Marindo 2007 – 2016: <i>Senior Manager Accounting and Tax</i> di PT Express Trasindo Utama, Tbk 2005 – 2007: <i>Senior Auditor</i> di Moores Rowland International, KAP Jimmy Budhi & Rekan 2003 – 2005: <i>Senior Auditor</i> di Russel Bedford International, KAP Syarief Basir & Rekan 2001 – 2003: <i>Junior Auditor</i> di DFK International, KAP Kanaka Puradiredja & Rekan
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Diploma III Jurusan Akuntansi, Politeknik ITB S1 Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, yang meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya yang terdapat dalam Rencana dan Anggaran Perusahaan, Laporan Manajemen, Laporan Tahunan dan Rencana Jangka Panjang (RJP).
2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari Kantor Akuntan Publik termasuk menelaah independensi dan objektivitas Kantor Akuntan Publik serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan dan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku.
3. Mengevaluasi kepatuhan manajemen terhadap perundangan-undangan yang berhubungan dengan transaksi dan berdampak langsung pada perusahaan serta mempunyai nilai material.
4. Melakukan penelaahan atas tingkat kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaannya.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal dan eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
6. Menelaah laporan audit internal yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
7. Pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan dan rekomendasi Auditor Internal dan Auditor Eksternal/Kantor Akuntan Publik.
8. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.
10. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk meminta Audit Internal melaksanakan audit khusus jika diperlukan.
11. Mengevaluasi kecukupan Piagam Internal Audit dan memberikan masukan untuk penyempurnaan jika diperlukan.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit wajib:

1. Membuat pedoman kerja yang dituangkan dalam Piagam Komite Audit.
2. Membuat program kerja Komite Audit di awal tahun dan akhir tahun berikutnya.
3. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan.
4. Komite Audit memiliki wewenang yang dibutuhkan agar dapat melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:
5. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, asset serta sumber daya perusahaan lainnya dan meminta serta memperoleh keterangan dari Direksi, Pejabat maupun Karyawan Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sepanjang diperlukan sesuai dengan penugasan dari Dewan Komisaris.
6. Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana huruf 1 di atas, Komite Audit bekerjasama dengan Auditor Internal.
7. Sebagai bagian tugas dan untuk memberikan sarana komunikasi yang terbuka, Komite Audit dapat bekerja sama dengan dan atau mendapatkan data/ informasi dari pihak internal auditor, eksternal auditor, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penugasan Komite Audit dan dapat bertemu dengan Komite Audit tanpa atau dengan kehadiran anggota manajemen.
8. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit dapat menerima pengaduan dan pelaporan sehubungan dengan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik, dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan menunjuk Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk No.: 128/TKDN/XI/2022 tanggal 1 November 2022.

Jumlah dan Komposisi

Susunan dan komposisi keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
Dr. Ir. Resdiansyah	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.: 128/TKDN/XI/2022 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 1 November 2022.	1 November 2022 - 1 November 2027
Drs. Herwan Gozali	Anggota Komite		
Luluk Sri Utami	Anggota Komite		

Keterangan mengenai riwayat jabatan dan riwayat pendidikan Dr. Ir Resdiansyah dapat dilihat pada sub bab Pengurusan, Pengawasan Perseroan

Berikut adalah keterangan singkat dari Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan:

Nama	Drs. Herwan Gozali
Jabatan	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Usia	60 tahun
Riwayat Jabatan	2016 – Sekarang: Komisaris, PT Teknologi Rancang Olah Nusantara 2020 – 2021: Direktur, PT Teknologi Karya Digital Nusantara 1999 – 2016: Chief Operations Officer, PT Express Trasindo Utama Tbk 1995 – 1999: Deputi Direktur, PT Express Trasindo Utama 1993 – 1995: General Manager Operation, PT Express Trasindo Utama 1989 – 1993: Finance Manager, PT Express Trasindo Utama 1986 – 1989: Supervisor, Kantor Akuntan Publik Sayuli Gazali
Riwayat Pendidikan	• S1 Jurusan Akuntansi, Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat



Nama	Luluk Sri Utami
Jabatan	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Usia	39 tahun
Riwayat Jabatan	2021 – Sekarang: Assistant Human Capital, PT Teknologi Karya Digital Nusa 2019 – 2021: Executive Asisten, PT Leon Boga Sentosa 2018 – 2019: Senior HR & GA, PT Bahanasemesta Cita Nusantara 2011 – 2016: Personal Assistant, PT Megah Satu Properti 2007 – 2011: Administration Finance Auditor, PT Indo Global Prima Solusi
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> S1 Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana, Jakarta S2 Jurusan Marketing dan Komunikasi, Universitas Mercu Buana, Jakarta

FUNGSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah memiliki fungsi remunerasi dan nominasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Fungsi Nominasi yang dijalankan Dewan Komisaris adalah:

1. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Fungsi Remunerasi yang dijalankan Dewan Komisaris adalah:

1. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Struktur Remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif, dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/ atau variabel.
5. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi harus memperhatikan:
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya.
 - b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik.
 - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris didukung oleh Kepala Divisi Sumber Daya Manusia yang membantu Dewan Komisaris dalam penyusunan kebijakan, proses, dan evaluasinya terkait proses nominasi dan remunerasi. Dewan Komisaris telah menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang terkait pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi seperti yang termaktub dalam POJK terkait.

UNIT AUDIT INTERNAL (Satuan Pengawasan Intern)

Jumlah dan Komposisi

Susunan dan komposisi keanggotaan Unit Audit Internal terdiri dari:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
Citra Dewi	Kepala Unit Audit Internal	Surat Keputusan Direksi No. 108/TKDN/IX/2022 tentang	28 September 2022 - 27 September 2027
Ibnu Sina Azly	Anggota Unit Audit Internal	Pengangkatan Anggota Unit	
Dini Afrilyan	Anggota Unit Audit Internal	Audit Internal tertanggal 28 September 2022	

Unit Audit Internal merupakan salah satu organ pendukung Direksi yang memiliki suatu fungsi pengendalian internal yang mengidentifikasi dan mengukur secara objektif dan independen mengenai keselarasan antara pelaksanaan aktivitas dengan rencana, kebijakan, peraturan dan ketentuan, sistem pencatatan dan pelaporan, serta sistem pembinaan sumber daya manusia yang telah ditetapkan.



Berikut profil dari Kepala Satuan Pengawas Intern:

Nama	Citra Dewi
Jabatan	Kepala Internal Audit
Usia	35 Tahun
Riwayat Jabatan	2022 – Sekarang: Internal Audit Officer, PT Teknologi Katya Digital Nusa Tbk 2020 – 2021: Spv Tax Accounting Finance, PT Citra Selaras Logistik 2019 – 2020: Accounting Tax, PT Unimitra Pasific Kharisma 2016 – 2019: Spv Tax Accounting, PT Grand Wie Sukses Properti 2015 – 2016: External Tax Accounting, PT Inti Indah Group 2012 – 2015: Head Accounting, PT Mitra Dana Putra Utama Finance 2009 – 2012: Spv Tax Accounting, PT Griya Trada 2006 – 2009: Senior Tax Accounting, Konsultan Pajak Manajemen Hirwan
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">Diploma III Jurusan Komputer Akuntansi Perpajakan STIAMI, JakartaS1 Jurusan Akuntansi Perpajakan STIAMI, Jakarta

Nama	Ibnu Sina Azly
Jabatan	Internal Audit
Usia	30 tahun
Riwayat Jabatan	2022 – Sekarang: Internal Audit Officer, PT Teknologi Katya Digital Nusa Tbk 2020 – 2022: Project Finance Administrator, PT Teknologi Rancang Olah Nusantara 2019 – 2020: Admin Operation Support, PT Solusi Pasti Indonesia 2017 – 2019: Operating Support Officer, PT Solusi Pasti Indonesia 2016 – 2017: Admin Staff, ADR Consulting 2014 – 2016: Internal Audit Staff, PT Indah Prakasa Sentosa
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">S1 Jurusan Ekonomi, STIE YAI, Jakarta

Nama	Dini Afriliyan
Jabatan	Internal Audit
Usia	27 tahun
Riwayat Jabatan	2022 – Sekarang: Internal Audit di PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk 2022 – 2022: Human Capital Management di PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk 2019 – 2020: Human Resource Corporate, PT Kharisma Cipta Internusa 2015 – 2019: Human Resource Officer, PT Marga Sahya Swasti
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">Diploma III Jurusan Akuntansi, Akademi Akuntansi YAI, Jakarta

Piagam Audit Internal

Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal Perusahaan yang disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. Piagam Audit Intern merupakan pernyataan formal untuk menguraikan kewenangan, lingkup dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perusahaan. Berdasarkan Piagam Internal Audit diatur mengenai struktur Satuan Pengawasan Internal dan beberapa pengaturan diantaranya adalah:

1. Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern
2. Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris
3. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris jika Kepala Satuan Pengawasan Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal sebagaimana diatur dalam Charter ini dan atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern melapor kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Ketua Komite Audit.
5. Kepala Satuan Pengawasan Intern membawahi Kepala Bagian Audit dan Kepala Bagian Perencanaan, Pengawasan dan Dukungan Audit.
6. Dalam melakukan audit/ reuiu Kepala Satuan Pengawasan Intern membentuk Tim Audit yang terdiri dari *Supervisor*, Ketua Tim dan anggota tim.



Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pemeriksaan Tahunan (PKPT) berbasis risiko khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan yang dapat terdiri dari:
 - a. Audit Operasional.
 - b. Reviu atas efektivitas pengendalian internal laporan keuangan.
 - c. Reviu atas pelaksanaan manajemen risiko.
 - d. Audit kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 - e. Audit Khusus.
2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas pada bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya dalam organisasi Perusahaan sesuai dengan rencana pemeriksaan tahunan yang berbasis risiko.
3. Melakukan audit investigasi, verifikasi fisik persediaan dan aktiva tetap serta tugas lain yang diperlukan oleh Perusahaan untuk mempertahankan transparansi dan akuntabilitas.
4. Melakukan audit/reviu atas anak Perusahaan dan afiliasinya berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Direktur Utama Perusahaan dengan persetujuan RUPS anak Perusahaan/afiliasi, atau Dewan Komisaris anak Perusahaan/afiliasi kepada Direktur Utama Perusahaan.
5. Melakukan pemeriksaan kepada pihak ketiga sesuai permintaan Direksi, namun terbatas pada konfirmasi dan klarifikasi baik secara administratif maupun fisik di lapangan.
6. Pemeriksaan atas integritas data dan sistem informasi Perusahaan termasuk efektivitas sistem pengendalian intern di tingkat korporat.
7. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
8. Membuat Laporan Hasil Audit dan Hasil Reviu dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama, serta memberikan tembusannya kepada:
 - a. Dewan Komisaris dan Ketua Komite Audit terkait dengan Laporan Hasil Audit dan Hasil Reviu. Khusus Laporan Hasil Audit dan Hasil Reviu Anak Perusahaan dan afiliasi dilaporkan melalui mekanisme pelaporan Direksi kepada Dewan Komisaris apabila diminta oleh Dewan Komisaris.
 - b. Direktur terkait untuk Laporan Hasil Audit dan Hasil Reviu di lingkungan Direktorat masing-masing atau yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya Direktorat tersebut.
9. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
10. Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penugasan eksternal auditor.
11. Mengevaluasi efektivitas dari Surat Keputusan Direksi, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan.
12. Menyusun program quality assurance untuk mengevaluasi mutu kegiatan Internal Audit yang dilakukannya.
13. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan berdasarkan penugasan khusus dari Direktur Utama, Direktur, Komisaris atau sebagai pengembangan pemeriksaan sebelumnya.
14. Melakukan *Self-Assessment Good Corporate Governance*, bekerja sama dengan Komite Audit, Sekretaris Dewan Komisaris, Perwakilan Dewan Komisaris dan Divisi yang terkait dengan GCG.
15. Pemberian konsultasi dalam perancangan sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
16. Secara terus-menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku.
17. Menjamin ketersediaan sumber daya pengawasan, sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal.
18. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dalam rangka penyempurnaan sistem, prosedur, anggaran dan kebijakan.

Komite Audit, Unit Audit Internal, dan Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk pada pertengahan tahun 2022 dan belum melaksanakan rapat komite hingga prospektus ini dibuat.

SEKRETARIS PERUSAHAAN (*Corporate Secretary*)

Sekretaris Perusahaan adalah satuan fungsi struktural dalam organisasi perusahaan yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Direksi dalam melaksanakan tugasnya. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/2014. Perseroan telah membentuk Sekretaris Perusahaan dengan menunjuk Wendy Jolanda Waas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk No.: 109/TKDN/IX/2022 tanggal 28 September 2022.

Profil Sekretaris Perusahaan

Nama	Wendy Jolanda Waas
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Usia	42 tahun
Riwayat Jabatan	2021 – sekarang : Chief of Sales and Partnership di PT Teknologi Karya Digital Nusa 2020 – 2021: Regional Business Development Head at PT Teknologi Karya Digital Nusa 2017- 2018: General Manager of Commercial at PT Express Transindo Utama 2014 -2017: Senior Manager/Division Head of VATB I & Eagle Tour and Travel at Express Group 2011 – 2014: Corporate Relations and Marketing Manager at Express Group, 2009 – 2011: Corporate & Relations Assistant Manager, Bali / Deputy Area Manager Bali-Lombok di PT Ekspres Mulia Perdana (Express Group) 2008 – 2009: Manajer Sales dan Marketing, PT Bali Food Lestari 2006 – 2008: Koordinator Penyambut, Picolo Crystal Bar Restaurant Milan, Italy 2005 – 2006: Personal Asisten, Kitasatubali M.I.C.E 2000 – 2005: Marketing, PT Nirbaya Transarana
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Sekolah Tinggi Pariwisata Dhyana Pura Dalung• Manajemen Rumah Sakitt, Goulburn Ovens Institute of TAFE Australia

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab

Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah:

1. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Sebagai penghubung (*liaison officer*); dan
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Direktur Utama dan apabila diminta dapat memberikannya kepada Dewan Komisaris.

Selain melaksanakan fungsi pokok tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menghadiri Rapat Direksi dan dan membuat risalah rapat.
2. Menyiapkan Daftar Khusus.
3. Membuat Daftar Pemegang Saham.
4. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan/kegiatan rutin Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar.
5. Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal hal yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan Perusahaan.
6. Memfasilitasi rapat-rapat dalam lingkungan Direksi, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin.
7. Menindaklanjuti setiap keputusan Direksi dengan jalan mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam rapat Direksi dan memantau serta mengecek tindak lanjut hasil rapat.

**Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan**

Belum ada pelatihan untuk *Corporate Secretary* pada tahun 2022.

Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan *stakeholders* lainnya

**Kantor Pusat
Sekertaris Perusahaan**

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826,
Jl. Trembesi Pademangan Timur, Kec. Pademangan,
Koda Adm. Jakarta Utara
Telepon: (021) - 65867225
Email: corporate.secretary@tkdn.co.id
Website: www.tkdn.co.id

10. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber Daya Manusia (“SDM”) merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Sampai dengan 31 Juli 2022, jumlah karyawan Perseroan sebanyak 61 karyawan, dengan rincian sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan status kerja:

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Karyawan Tetap	40	13	10	8
Karyawan Kontrak	21	19	15	9
Jumlah	61	32	25	17

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang jabatan:

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Chief (Direktur)	1	1	1	1
Head of Department (Wakil Direktur)	5	3	1	1
Manager (Manajer)	13	0	2	1
Officer (Staf)	42	28	21	14
Jumlah	61	32	25	17

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan:

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Pasca Sarjana	4	2	1	-
Sarjana	42	22	18	14
Diploma	5	3	2	1
SMK/STM/SMA	10	5	4	2
Jumlah	61	32	25	17

**Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang usia:**

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
>55 tahun	3	3	3	1
41 - 55 tahun	17	10	4	5
26 - 40 tahun	36	18	16	9
17 - 25 tahun	5	1	2	2
Jumlah	61	32	25	17

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan aktivitas utama:

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Corporate Support	20	5	5	5
IT & Technology	7	5	2	2
Marketing	5	1	1	1
Sales & Lease Partnership	6	1	1	1
Business Development	1	1	1	1
Operational	22	19	15	7
Jumlah	61	32	25	17

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan lokasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Indonesia (DKI Jakarta)	61	32	25	17
Jumlah	61	32	25	17

Sampai dengan 31 Juli 2022, jumlah karyawan Entitas Asosiasi sebanyak 4 karyawan, dengan rincian sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan status kerja:

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021*	2020*	2019*
Karyawan Tetap	1	-	-	-
Karyawan Kontrak	3	-	-	-
Jumlah	4	-	-	-

*belum beroperasi

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang jabatan:

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021*	2020*	2019*
Chief (Direktur)	-	-	-	-
Head of Department (Wakil Direktur)	-	-	-	-
Manager (Manajer)	-	-	-	-
Officer (Staf)	4	-	-	-
Jumlah	4	-	-	-

*belum beroperasi

**Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan:**

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021*	2020*	2019*
Pasca Sarjana	-	-	-	-
Sarjana	3	-	-	-
Diploma	-	-	-	-
SMK/STM/SMA	1	-	-	-
Jumlah	4	-	-	-

*belum beroperasi

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang usia:

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021*	2020*	2019*
>55 tahun	-	-	-	-
41 - 55 tahun	-	-	-	-
26 - 40 tahun	4	-	-	-
17 - 25 tahun	-	-	-	-
Jumlah	4	-	-	-

*belum beroperasi

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan aktivitas utama:

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021*	2020*	2019*
Corporate Support	-	-	-	-
IT & Technology	4	-	-	-
Marketing	-	-	-	-
Sales & Lease Partnership	-	-	-	-
Business Development	-	-	-	-
Operational	-	-	-	-
Jumlah	4	-	-	-

*belum beroperasi

Komposisi Karyawan tetap Perseroan berdasarkan lokasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021*	2020*	2019*
Indonesia (DKI Jakarta)	4	-	-	-
Jumlah	4	-	-	-

*belum beroperasi

Tidak ada Serikat Pekerja yang berhubungan dengan Perseroan dan Entitas Asosiasi.

11. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING PERSEROAN

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki perjanjian penting antara lain yang terbagi menjadi perjanjian kredit dan perjanjian dengan pihak ketiga. Adapun perjanjian kredit yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

A. PERJANJIAN KREDIT

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Fasilitas Pinjaman	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Addendum Novasi Perjanjian Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (W/A) Plafond Interchangable dengan Bank Garansi Plafond No. 64 tertanggal 24 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Dr. Abraham Yazdi Martin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah oleh (i) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (W/A) Plafond No. 84 tertanggal 28 November 2022; (ii) Akta KMK W/A BRI No. 18/2023; dan (iii) Akta Addendum KMK WA BRI yang ketiganya dibuat di hadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat (" KMK BRI 1 ")	1. Perseroan; dan 2. BRI.	Tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi yang dimenangkan oleh Perseroan dan Group Usahanya.	16 November 2021 – 18 November 2023	Rp9.000.000.000 (sembilan miliar Rupiah)
2.	Addendum Novasi Perjanjian Kredit Modal Kerja Crediet Overeencomst (CO) Tetap No. 65 tertanggal 24 Desember 2021 sebagaimana diubah oleh Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja CO Tetap No. 85 tertanggal 28 November 2022 yang dibuat di hadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat (" KMK BRI 2 ")	1. Perseroan; dan 2. BRI.	Tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi yang dimenangkan oleh Perseroan.	16 November 2021 – 16 November 2023	Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah)
3.	Akta KI BRI No. 16/2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum KI (" KMK BRI 3 ")	1. Perseroan; dan 2. BRI	Kredit investasi pseudo R/C Maksimum Co. Menurun.	26 Januari 2023 – 26 Januari 2028	Rp4.875.000.000 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)

Berdasarkan (i) Akta KMK W/A BRI No. 18/2023, (ii) Addendum Novasi Perjanjian Kredit Modal Kerja Crediet Overeencomst (CO) Tetap No. 65 tertanggal 24 Desember 2021, dan (iii) Akta KI BRI No. 16/2023, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BRI, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan, go publik.
2. Mengikatkan diri sebagai peminjam terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada pada saat ini.
3. Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, dan atau perubahan pemilikan saham dan komposisi permodalan.
4. Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang *cashflow* tidak terganggu serta *Nett Working Capital* (NWC) masih positif.
5. Melunasi atau membayar hutang kepada pemegang saham atau hutang pada pihak terafiliasi sebelum hutang di BRI lunas.
6. Memberikan piutang kepada pemegang saham.
7. Memberikan piutang kepada pemegang saham dengan alasan apapun.



8. Melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan.
9. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
10. Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya.
11. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit.
12. Menjual, memindah tangankan dan/atau menyewakan aset yang dijadikan agunan tambahan di BRI.

Sehubungan dengan pembatasan di atas, untuk KMK BRI 2, Perseroan telah memperoleh persetujuan mengenai pelaksanaan *Initial Public Offering (IPO)* serta pencabutan negative covenants dari BRI sebagaimana tertuang dalam Surat Bank BRI No. B.99.e.RO-JKS/RLG/08/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 yang mana telah diakomodasi pada Akta Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja CO Tetap No. 85 tertanggal 28 November 2022 yang dibuat di hadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Sehingga, berdasarkan addendum tersebut, ketentuan terkait hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan BRI terlebih dahulu, telah berubah menjadi sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan usaha dan turut serta dalam (i) kegiatan usaha yang bersifat spekulatif dan (ii) Usaha yang bertentangan dengan adat istiadat setempat, Undang-Undang termasuk lingkungan.
2. Mengalihkan/menyewakan agunan kredit kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bank.
3. Mengikatkan diri sebagai penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bank.
4. Mengambil pinjaman dari Bank atau institusi keuangan lainnya tanpa pemberitahuan tertulis.

Selanjutnya untuk KMK BRI 1 dan KMK BRI 3, Perseroan telah memperoleh persetujuan mengenai pelaksanaan *Initial Public Offering (IPO)* sebagaimana tertuang dalam Surat BRI No. 517/2023. Lebih lanjut Perseroan juga telah memperoleh pencabutan negative covenants dari BRI hal mana telah diakomodir dalam (i) Akta Addendum KI BRI, dan (ii) Akta KMK W/A BRI No. 18/2023. Sehingga, berdasarkan kedua addendum tersebut, ketentuan terkait hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan BRI terlebih dahulu, telah berubah menjadi sebagai berikut:

1. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini.
2. Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang cash flow tidak terganggu serta NWC positif.
3. Memberikan piutang kepada pemegang saham.
4. Melunasi atau membayar hutang pada pemegang saham atau hutang pada pihak terafiliasi sebelum hutang di BRI lunas.
5. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada diluar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
6. Menerima pinjaman baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya kecuali transaksi dagang yang lazim.
7. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit.
8. Menjual, memindah tangankan dan/ atau menyewakan asset yang dijadikan agunan tambahan di Bank kepada pihak lain.



B. PERJANJIAN PEMBIAYAAN

No	Nama Perjanjian	Pihak	Fasilitas Pinjaman	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Konsumen No. 453102100116	1. Perseroan; 2. PT CIMB Niaga Auto Finance ("CIMB").	Pembiayaan guna keperluan pembelian kendaraan bermotor.	36 (tiga puluh enam) bulan	Rp591.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah)
2.	Perjanjian Fasilitas Pembiayaan No. XXXVII/30/09/2022/PKS/BM-TKDN tertanggal 30 September 2022	1. Perseroan; 2. PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia ("UPRI")	Fasilitas Pembiayaan	2 September 2022 – 2 September 2023	Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
3.	Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pinjaman No. 30232/LGL-TDF/PKS/IX/2022 tertanggal 30 September 2022	1. Perseroan; dan 2. UPRI.	Fasilitas Pembiayaan	12 (dua belas) bulan sejak tanggal perjanjian, atau 30 September 2022 – 30 September 2023	Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah)

C. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan juga memiliki beberapa perjanjian penting dengan pihak ketiga antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Sewa Alat Pengawasan Angkutan Jalan Perintis Nomor KU.003/KONT-DMOPABPJ/4/SKDAJ/II/2022 tertanggal 27 Januari 2022	1. Satuan Kerja Direktorat Angkutan Jalan – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia; dan 2. Perseroan.	Penyewaan alat pengawasan angkutan jalan Perintis oleh Perseroan	Berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.	Rp5.663.435.000
2.	Perjanjian Fleet Management System Operasional Angkutan Perkotaan dengan Skema Buy the Service No. KU.003/KONT-DOPA/J/7/SKDAJ/II/2021 tertanggal 7 Januari 2021	1. Satuan Kerja Direktorat Angkutan Jalan – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia; dan 2. Perseroan.	Penyediaan kegiatan Fleet Management System Operasional Angkutan Perkotaan dengan Skema Buy the Service oleh Perseroan	Berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.	Rp29.935.066.238
3.	Perjanjian Kerja Sama Sistem Integrator untuk Pembayaran Uang Elektronik No. 001/PKS/DHS/04/2020 tertanggal 1 April 2020	1. PT Softorb Technology Indonesia ("Softorb"); dan 2. Perseroan.	Pengadaan <i>reader</i> uang elektronik beserta layanan sistem integrator untuk pembayaran uang elektronik oleh Softorb.	Berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan dihitung sejak tanggal penandatanganan.	0,8% (nol koma delapan persen) dari nilai transaksi uang elektronik

**D. PERJANJIAN SEWA**

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Akta Sewa Menyewa No. 39 tertanggal 29 September 2020, yang dibuat di hadapan Sukawaty Sumadi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Akta No. 07 tertanggal 22 September 2022, yang di hadapan Sukawaty Mila Handari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	1. Perseroan; dan 2. PT Aneka Jaya Lenggeng Sentosa ("AJLS").	Perseroan menyewa sebidang tanah yaitu sebuah bangunan yaitu Mini Office Central 88, Jl. Trembesi Blok G 1 No. 826, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Pademangan milik AJLS.	Perpanjangan Sewa menyewa ini dimulai pada tanggal 29 September 2022 dengan demikian akan berakhir pada tanggal 29 September 2023.	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah).

E. PERJANJIAN OPERASIONAL DENGAN PIHAK TERAFILIASI

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Peralatan Telematika No. 004A/TKDN- PKS/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020	1. PT Anugrah Damai Yaksa Teknologi ("ADYT"); 2. Perseroan.	Perseroan dan ADYT memiliki hubungan afiliasi dikarenakan David Santoso merupakan pemegang saham utama dari ADYT.	Perseroan sebagai penyedia peralatan telematika untuk ADYT.	Berlaku 5 (lima) tahun sejak penandatanganan yaitu 28 Desember 2020, atau berlaku sampai dengan terlaksananya seluruh hak dan kewajiban para pihak dan jangka waktu berdasarkan Purchase Order ("PO") terakhir yang diterbitkan oleh ADYT kepada Perseroan selama jangka waktu perjanjian.	Nilai dari masing-masing item akan dicantumkan dalam PO yang diterbitkan kepada Perseroan.
2.	Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Kantor No. 001A/TKDN- PKS/III/2022 tertanggal 1 Maret 2022	1. David Santoso; dan 2. Perseroan.	Perseroan dan David Santoso memiliki hubungan afiliasi dikarenakan David Santoso merupakan Direktur Utama pemegang saham Perseroan.	Perseroan bekerjasama untuk menggunakan sebuah kantor milik David Santoso, yang terletak di Komplek Perumahan Batu Ceper dengan opsi membeli.	Sejak 1 Maret 2022 dan berlaku terus menerus.	Rp5.000.000.000

F. PERJANJIAN TANAH PERSEROAN

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Lokasi Tanah	Nilai Jual Beli
1.	Akta Pengikatan Jual Beli tertanggal 22 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Cecilia, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.	a. Magarita Van Den Berg; b. Tomi Adriyadi; c. Gary Dwi Adriadi; d. Steven Tri Adriadi; e. Michael Cahyo Adriari; f. Ananda Diah Anggraini Adriadi; dan g. Perseroan	Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Rp7.500.000.000

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Emiten.



G. PERJANJIAN TANAH PERSEROAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Lokasi Tanah	Nilai Jual Beli
1.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 41 tertanggal 11 November 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	a. David Santoso; dan b. Perseroan	Kecamatan Batu Ceper, Kelurahan Batu Ceper, Tangerang, Banten	Rp5.500.000.000

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Emiten.

12. ASET TETAP PERSEROAN

Berikut ini adalah daftar aset tetap dalam bentuk inventaris kantor dan kendaraan yang dimiliki Perseroan.

No.	Nama Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Masa Manfaat
1.	Inventaris Kantor	662.937.857	48 Bulan
2.	Kendaraan	861.427.000	96 Bulan
3.	Jumlah	1.524.364.857	

Berikut ini adalah daftar aset takberwujud dalam bentuk *software* yang dimiliki Perseroan.

No.	Nama Aset Takberwujud	Nilai Perolehan (Rp)	Masa Manfaat
1.	Aplikasi: <i>Quality Assurance Apps</i>	5.450.000.000	48 Bulan
2.	Performance Analytic Apps	6.000.000.000	48 Bulan
3.	Platform Transportation	5.600.000.000	48 Bulan
4.	Terminal Management System	1.500.000.000	48 Bulan
5.	Fleet Management System	7.000.000.000	48 Bulan
6.	Mobile Apps Monitoring Tracking	856.000.000	48 Bulan
7.	Logistic Management System	3.500.000.000	48 Bulan
8.	Logistic Dashboard	1.500.000.000	48 Bulan
9.	Jumlah	31.406.000.000	

13. TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Perseroan meyakini bahwa aktivitas bisnis Perseroan juga harus diikuti dengan pemenuhan tanggung jawab masyarakat dalam penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Bentuk tanggung jawab sosial Perseroan menggambarkan bentuk kepedulian Perseroan dalam rangka mendorong kemajuan masyarakat di Indonesia. Walaupun lingkup usaha dan skala bisnis Perseroan masih terbatas, serta diakibatkan adanya Pandemi COVID-19, Perseroan tetap melaksanakan beberapa kegiatan tanggung jawab sosial selama tiga tahun terakhir antara lain sebagai berikut :

No.	Kegiatan
1.	Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pelatihan kepada supir angkutan umum.
2.	Menjadi penyelenggara <i>Acara/Event Organizer (EO)</i> dalam kegiatan mudik lebaran bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam rangka penyediaan teknologi informasi yang dibutuhkan selama kegiatan berlangsung.
3.	Pengadaan laboratorium pemanfaatan sistem teknologi informatika dan perangkat IoT Smart Bus (<i>TAM Fleet</i>), laboratorium digitalisasi parkir tepi jalan, dan pemanfaatan digitalisasi belajar mengajar melalui aplikasi digital (<i>integrated education system and solutions</i>) sebagai <i>platform</i> pendaftaran, pendidikan, sampai data alumni. Pemberian sumbangan alat IT ke Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)



14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat pada perkara-perkara hukum di bidang perdata, pidana, perpajakan, perniagaan (termasuk yang menyangkut kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang), persaingan usaha, hubungan industrial, tata usaha negara dan perkara-perkara lain yang penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase (termasuk perkara hukum lainnya di luar pengadilan) di hadapan badan peradilan umum, pengadilan pajak, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tata usaha negara dan badan penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase (termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), termasuk juga dalam pendaftaran atau perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang, termasuk sebagaimana dimaksud dalam UUPT, dalam lingkup wilayah Republik Indonesia, yang bersifat material yang dapat memberi pengaruh merugikan material (*material adverse effect*) pada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat pada perkara-perkara hukum di bidang perdata, pidana, perpajakan, perniagaan (termasuk yang menyangkut kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang), persaingan usaha, hubungan industrial, tata usaha negara dan perkara hukum yang penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase (termasuk perkara hukum lainnya di luar pengadilan) di hadapan badan peradilan umum, pengadilan pajak, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tata usaha negara dan badan penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase (termasuk BANI), baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, dan/atau menerima somasi, klaim atau teguran apa pun, yang bersifat material yang dapat memberi pengaruh merugikan material (*material adverse effect*) pada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

15. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan aset sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, berikut adalah ringkasan dari polis tersebut

No	Nama Polis	Penanggung	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Klausula Bank/ Leasing Clause	Premi	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
1.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor NO. KG-AMO-000053-00015-2021-05	PT Sampo Insurance Indonesia	PT CIMB Niaga Auto Finance QQ Perseroan QQ Miftahudin	11 Mei 2021 – 11 Mei 2024	PT CIMB Auto Finance	Rp14.188.000	Tahun 1: Rp845.000.000 dan Rp10.000.000 Tahun 2: Rp718.250.000 dan Rp10.000.000 Tahun 3: Rp633.750.000 dan Rp10.000.000	Toyota Alphard 2.5 G A/T

16. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Jejak Langkah

Perseroan mulai beroperasi pada tahun 2011 didirikan oleh para pakar, praktisi dan akademisi dalam bidang transportasi serta fokus untuk menjadi perusahaan pengembang sistem IT dan telematika di bidang transportasi. Perseroan ini telah berkembang cepat dan berbeda dengan perusahaan lainnya dalam pemberian solusi pada sistem layanan serta perangkat untuk teknologi transportasi melalui kombinasi solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Selanjutnya, bisnis Perseroan dikelompokkan dalam 4 (empat) lini bisnis utama yang saling bersinergi satu sama lain. Didukung dengan solusi sistem layanan untuk transportasi dan armada dengan menggabungkan teknologi terkini guna memudahkan operasional bisnis di bidang transportasi, Perseroan telah berkembang menjadi sebuah perusahaan berbasis IT yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memfokuskan bisnisnya pada Sistem Transportasi Cerdas (*Intelligent Transport System*) berbasis sistem IT dan telematika transportasi yang tidak hanya untuk angkutan penumpang namun juga angkutan barang. Selain itu, bisnis Perseroan juga ikut mendukung dalam industri *supply chain technology* yang dibutuhkan oleh klien.

Kegiatan usaha Perseroan bergerak dalam bidang penyedia solusi sistem informasi berbasis telematika dan *Internet of Things* (IoT) untuk pengembangan *smart city*.

Lini bisnis Perseroan terdiri dari:

1. **Software as a Service (SaaS)**

Pada lini bisnis ini Perseroan memberikan layanan berbasis *Cloud* maupun on premis dengan menggunakan internet untuk mengirimkan aplikasi, yang dikelola oleh Perseroan, kepada penggunanya. *Platform* SaaS yang ditawarkan oleh Perseroan didesain untuk mendukung kemudahan mobilitas masyarakat, monitoring operasional perusahaan dan mengintegrasikan teknologi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam lini bisnis ini terdapat beberapa jasa yang ditawarkan yaitu:

a. **Solusi Manajemen Transportasi (*Transport Management Solutions*)**

Perseroan menghadirkan Sistem Manajemen Armada yang lengkap untuk membantu perusahaan transportasi guna meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan dapat diintegrasikan dengan armada yang ada menggunakan sistem API terbuka (open API). Solusi yang ditawarkan ini meliputi fitur pelacakan dengan *Global Positioning System* (GPS) secara waktu nyata (*real time*) dan juga berfungsi sebagai alat pengamanan kendaraan. Selain itu, solusi yang ditawarkan Perseroan berdampak untuk efisiensi bahan bakar yang lebih untuk armada transportasi. Disamping itu, Perseroan memiliki teknologi yang dapat menghitung tingkat bahan bakar yang digunakan sebenarnya dan akan memberikan sinyal peringatan melalui *dashboard* pelaporan. Dengan demikian terdapat pengendalian yang baik dalam penggunaan bahan bakar. *Transport Management Solution* ini mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan jasa transportasi yang mencakup:

- *Fleet Management System* dan *Transit Management System*
- *Dispatching Management*
- *Safety Management*
- *Consequence Management*
- *Driver Management*
- *Booking Management*
- *Security Management*
- *Preventive Management*
- *Passenger Management*
- *Cash Management*
- *Compliance Management*
- *Operational Efficiency*



b. Solusi Parkir Cerdas (*Smart Parking Solutions*)

Dalam bidang pengelolaan Parkir modern, Perseroan menawarkan solusi parkir cerdas terintegrasi yang dapat digunakan baik pada pengelolaan Parkir Tepi Jalan (*On-Street Parking*) maupun Parkir Area (*Off Street Parking*). Perseroan menggunakan teknologi terkini dalam memberikan pengalaman pengelolaan dan operasional perparkiran, antara lain teknologi aplikasi mobile terkini, teknologi sensor berbasis AI CCTV maupun Laser dan Radar, serta teknologi pembayaran non tunai terkini yang sudah diakui oleh Bank Indonesia. Sistem terintegrasi ini dapat memberikan informasi yang akurat kepada seluruh kepentingan, maupun mempermudah masyarakat pengguna jasa parkir.

Beberapa keunggulan sistem parkir cerdas yang dikembangkan oleh Perseroan antara lain:

- Dapat menampilkan informasi avaiibilitas titik parkir secara real time
- Dapat menampilkan rekap informasi transaksi parkir secara real time
- Mendukung sistem pembayaran non tunai (uang elektronik berbasis kartu, uang elektronik berbasis server, dan QRIS)
- Meliputi aplikasi Jukir, Pengawas, End User (masyarakat), dan Dashboard Operasional & Finansial
- Mendukung monitoring yang Transparan dan Akuntabel baik bagi Operator Parkir maupun Regulator

c. Solusi Manajemen Proyek (*Project Management Solutions*)

Perseroan membangun *platform* solusi manajemen proyek untuk mendigitalkan proses internal, dan membawanya ke tingkat bisnis komersial melalui skema B2B dan B2C.

2. *Internet of Thing (IoT) dan Bus Cerdas Telematik (Telematics Smart Bus)*

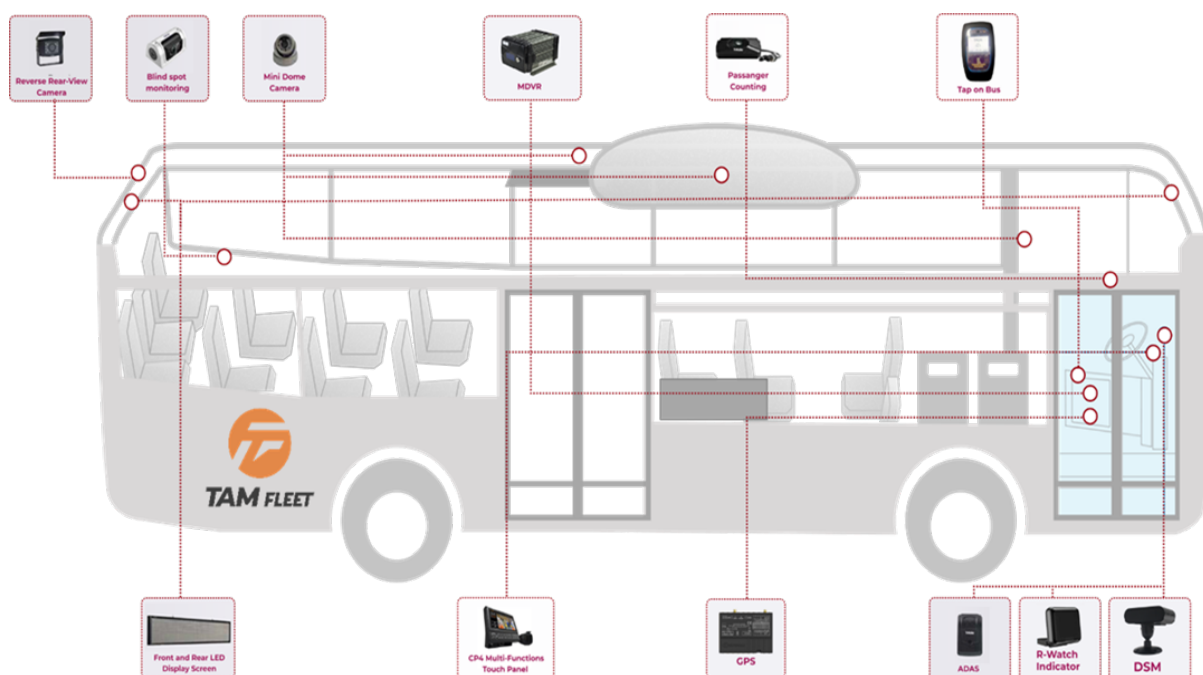
Perseroan menyediakan berbagai perangkat *Internet of Things (IoT)* dengan teknologi kecerdasan buatan atau *artificial intelligent (AI)* untuk memantau perilaku & pengidentifikasian pengemudi, penginderaan jalan dengan tingkat akurasi hingga 95%, yang dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas. Salah satunya yakni Solusi TAM Fleet (*IoT Smart Bus System Integrator*) yang merupakan teknologi keamanan dan pengawasan armada yang bertujuan meningkatkan pelayanan serta memaksimalkan dan efisiensi operasional sesuai dengan kebutuhan industri transportasi di Indonesia. Adapun produk dan perangkat dari TAM Fleet antara lain *Driver Monitoring System (DSM)* dan *Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)*. DSM dan ADAS mampu melakukan verifikasi identitas, perilaku pengemudi, pengawasan jalan dan *sensor alarm*. Terdapat juga perangkat kamera CCTV serta alat sensor penghitung jumlah penumpang otomatis, yaitu *automatic passenger counting (APC)*. Semua perangkat tersebut dilengkapi dengan *artificial intelligence (AI)*.

Rincian produk-produk yang ditawarkan Perseroan yang mendukung TAM Fleet yakni:

- a. Pengawasan Keamanan Pengemudi (*Driver Safety Monitoring (DMS)*)
Alat ini dipasang di *dashboard* dengan mengarah ke kursi pengemudi yang dilengkapi dengan teknologi AI (*Artificial Intelligence*) yang berfungsi untuk memberikan peringatan alarm jika pengemudi merokok, menggunakan ponsel atau saat pengemudi tidak ada/tidak duduk di tempat yang benar.
- b. Sistem Bantuan Pengemudi Tingkat Lanjut/Cerdas atau ADAS (*Advanced Driver Assistance Systems*)
Sistem ini memiliki sebuah kamera pengintai jalan yang dilengkapi dengan teknologi AI (*Artificial Intelligence*) yang berfungsi untuk memberikan peringatan dini kepada pengemudi jika bus melaju kencang, menyimpang jalur dan berpotensi tabrakan. Alat ini dipasang di depan bus.
- c. Penghitung Penumpang Otomatis atau *Automatic Passenger Counting (APC)*
Alat ini digunakan untuk menghitung penumpang bus secara otomatis yang dipasang di atas pintu bus. Alat ini dilengkapi dengan teknologi AI (*Artificial Intelligence*) dan teknologi pemrosesan gambar 3D terbaru untuk memberikan penghitungan penumpang dengan tingkat akurasi yang tinggi.

- d. Kamera Definisi Tinggi Analog atau Analog High Definition (*AHD & Wide AHD Small Dome Camera*)
Kamera definisi tinggi analog CCTV dengan sudut normal dan lebar yang digunakan untuk memantau kondisi di bus dengan sensor noise digital siang/malam (ICR), *dynamic range*, dan kompensasi cahaya otomatis yang dipasang di depan dan langit-langit bagian belakang bus.
- e. Sensor Bahan Bakar Ultrasonik (*Ultrasonic Fuel Sensor*)
Teknologi ini dapat menghitung level bahan bakar yang sebenarnya dan akan memberikan sinyal peringatan melalui *reporting dashboard* yang akan berikan jika ada hasil perhitungan yang salah.
- f. Kamera Pengintai Indikator (*Indicator R-Watch Camera*)
Sebuah kamera pengintai jalan yang dilengkapi dengan teknologi AI (*Artificial Intelligence*) yang berfungsi untuk memberikan peringatan dini kepada pengemudi jika bus melaju kencang, menyimpang jalur dan berpotensi tabrakan depan. Alat ini dipasang di *dashboard* dengan kamera mengarah ke kursi pengemudi.
- g. Kartu RFID dan Kotak Tahan Api (*Fireproofbox & RFID Card*)
Alat ini merupakan perangkat elektronik tahan api yang berfungsi untuk mendukung *blackbox* utama yang digunakan untuk kebutuhan analisis dan verifikasi jika terjadi kecelakaan. Perangkat ini dipasang di *dashboard* atau panel khusus yang tersembunyi di dalam bus.
- h. Panel Sentuh Multi-fungsi C4 (*C4-Multi-function Touch Panel*)
Alat ini merupakan panel sentuh multifungsi yang digunakan untuk membaca kartu saat pengemudi mulai beroperasi dan sebagai kontrol *blackbox* serta media komunikasi dua arah antara pengemudi – penumpang. Alat ini dipasang di *dashboard* bus dekat panel pengemudi.
- i. Solusi HD dan Dual Hard Disk (*Dual-hard Disk and HD Solutions*)
Perangkat elektronik ini yang merekam video dalam format digital dan disimpan ke media penyimpanan lokal atau penyimpanan jaringan (server) yang terdiri dari 8 saluran yang dapat berfungsi sebagai *blackbox* utama yang dilengkapi dengan WIFI 3G/4G, GPS, HDD, SD card dan sensor untuk mengumumkan stasiun/pemberhentian terdekat.

Produk-produk yang ditawarkan oleh Perseroan untuk mendukung *Telematics Smart Bus* dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Sumber: Perseroan



3. Pengalihdayaan Proses Bisnis (*Business Process Outsourcing*)

Perseroan menyediakan pengalihdayaan proses bisnis atau BPO (*Business Process Outsourcing*) terintegrasi serta memiliki *dashboard* pelaporan kinerja terintegrasi secara waktu nyata (*real-time*) yang mencakup sumber daya manusia, pengalaman pelanggan, teknologi, dan layanan nilai tambah untuk membantu perusahaan berbasis mobilitas dan transportasi lebih fokus pada bisnis intinya.

a. Pusat Komando Cerdas (*Smart Command Center*)

Pusat komando cerdas adalah solusi layanan terkelola untuk kegiatan operasional khususnya di industri transportasi (termasuk pelatihan, pemantauan, dan pelaporan). Perseroan menyederhanakan pengoperasian semua fitur produk terintegrasi di satu tempat, yaitu melalui pusat komando cerdas yang memudahkan pengendalian dan pemantauan keselamatan serta keamanan baik penumpang maupun armada. Pusat komando tersebut juga terhubung secara waktu nyata (*real time*) ke armada dan *dashboard* pelaporan.

b. Operator Transportasi Umum (*Public Transport Operator*)

Perseroan berpengalaman sebagai operator angkutan umum di DKI Jakarta, Bekasi, Bandung, dan juga transportasi pariwisata di wilayah Jawa.

4. Solusi Pembayaran Transportasi (*Transportation Payment Solution*)

Perseroan menawarkan jasa pembayaran digital dengan menggunakan kombinasi metode pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*) yang menyederhanakan pembayaran transportasi melalui kartu berbasis *payment gateway*, QRIS, dan NFC. Validasi pembayaran dalam sistem ini lebih cepat karena menggunakan teknologi pembaca *Tap on Bus* (ToB) yang dikembangkan Perseroan dengan *platform* sistem *Account Based Ticketing* (ABT). Sistem ini dapat terintegrasi dengan *platform* lain (API terbuka), yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran untuk mendukung mobilitas masyarakat. Perseroan memiliki sistem manajemen keamanan (*security management*) yang kuat untuk solusi pembayaran yang dapat membantu para penumpang transportasi umum untuk mengawal mengontrol dan mengurangi penipuan, memberikan pemantauan secara waktu nyata (*real time*), catatan terperinci, dan *log* untuk penyelidikan.

Solusi dan Penawaran Kami

Berdasarkan penjelasan lini bisnis di atas, kami menawarkan produk dan jasa yang bersifat *end-to-end* dengan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Produk dan jasa kami dapat dibagi menjadi 2 (dua) segmen bisnis utama yaitu:

- *Smart City Solution*
- *IoT-as-a-Servic*



Penawaran produk dan jasa kami dapat dilihat berdasarkan klasifikasi segmen seperti di bawah ini:

Segmen	Lini Bisnis	Produk/ Jasa	Natur Pendapatan
IoT-as-a-Service	Internet of Thing (IoT) dan Bus Cerdas Telematik (Telematics Smart Bus)	Solusi TAM Fleet (IoT Smart Bus System Integrator)	Project Fees Product Sales
	Software as a Service (SaaS)	Solusi Manajemen Transportasi	Recurring based on a subscription model
		Solusi Parkir Cerdas	
		Solusi Manajemen Proyek	
	Sistem Pendidikan Terpadu		
Smart City Solution	Solusi Pembayaran Transportasi (Transportation Payment Solution)	Tap on Bus (ToB)	Project Fees Product Sales
	Pengalihdayaan Proses Bisnis (Business Process Outsourcing)	Pusat Komando Cerdas (Smart Command Center)	
		Operator Transportasi Umum (Public Transport Operator)	

Sumber: Perseroan

Pelanggan Utama

Hingga saat Prospektus ini dibuat, Perseroan telah memiliki kerjasama dengan 12 kota penyedia sarana transportasi umum. Berikut adalah sebagian dari klien-klien Perseroan:



Sumber: Perseroan



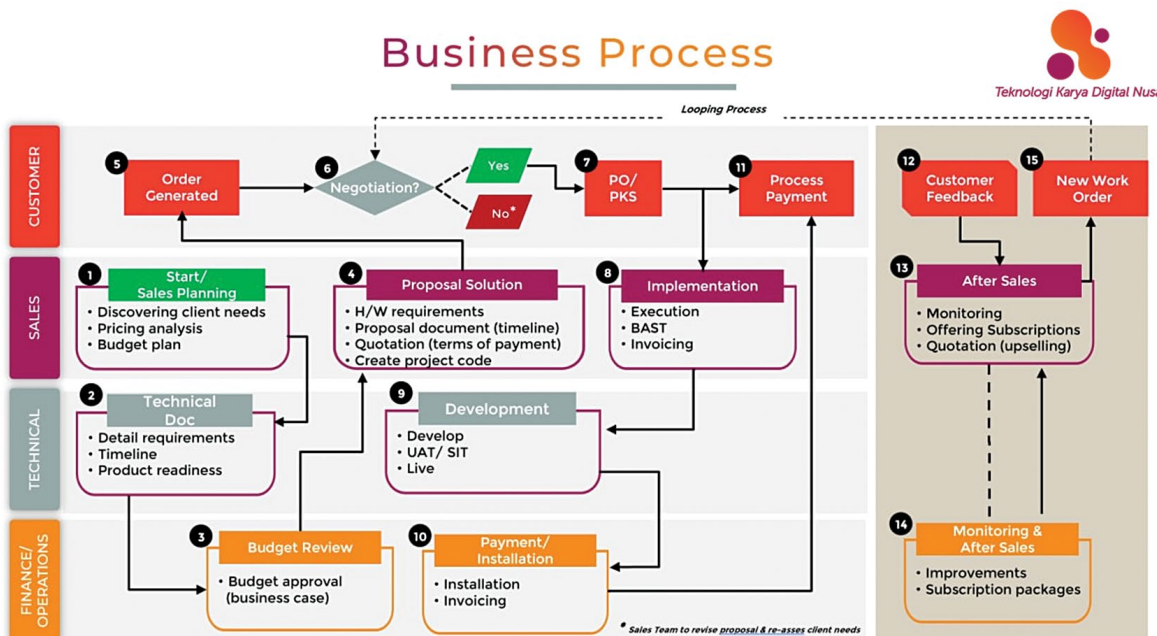
Dari keseluruhan klien Perseroan, terdapat beberapa pelanggan yang merupakan pelanggan utama Perseroan. Meskipun Perseroan bergantung pada hubungannya dengan pelanggan utama tersebut, kami meyakini bahwa Perseroan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan risiko ketergantungan pada pelanggan utama kami sehingga tidak berdampak negatif bagi operasi bisnis Perseroan, yaitu:

1. Hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan utama
Perseroan meyakini bahwa terdapat hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan utama sehingga dapat dijalin hubungan bisnis yang erat dan stabil satu sama lain. Hal ini dikarenakan Perseroan merupakan pemain terkemuka dari sedikit perusahaan penyedia jasa layanan IoT khususnya dibidang transportasi dan *smart city*.
2. Diversifikasi basis pelanggan dan perluasan penawaran produk dan layanan
Perseroan terus memasarkan layanan kepada pelanggan B2B. Pada saat yang sama, Perseroan terus melanjutkan upaya perluasan penawaran produk dan layanan kami dengan pelanggan B2B yang ada dan bermaksud untuk memberikan penawaran layanan kami kepada konsumen B2C untuk mendiversifikasi sumber pendapatan.
3. Permintaan yang stabil atas produk dan layanan
Permintaan untuk produk dan layanan kami telah stabil dan Perseroan memperkirakan permintaan tersebut akan terus meningkat jika minat terhadap solusi IoT meningkat.

Dengan demikian Perseroan yakin bahwa basis pelanggan akan terus berkembang dan perseroan dapat meningkatkan basis pelanggan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan Pemerintah dalam mengembangkan *smart city* tetapi juga memperbesar basis pelanggan B2B dan B2C.

Alur Bisnis Proses Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, secara umum Perseroan memiliki alur bisnis, sebagai berikut:



Sumber: Perseroan

Secara umum, bisnis proses Perseroan ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh klien, yang mana Perseroan akan menyediakan design dan solusi atas kebutuhan klien tersebut sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh klien. Untuk proses awal, tim sales Perseroan melakukan analisa awal dengan klien untuk menentukan dan memahami kebutuhan yang diinginkan oleh klien, rencana budget dan perkiraan biaya yang direncanakan oleh klien. Selanjutnya tim sales akan melakukan diskusi

dan design dengan tim teknis untuk menentukan kebutuhan tersebut secara detail produk, sistem dan fitur apa saja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan klien tersebut, menentukan jangka waktu dan kesiapan atas produk. Kemudian anggaran yang telah disusun tersebut akan di review oleh tim Finance untuk selanjutnya dapat menentukan penawaran harga kepada klien. Setelah itu, tim sales akan memberikan penawaran harga atau proposal kepada klien, yang mana akan ditentukan juga jangka waktu pelaksanaan proyek, jatuh tempo pembayaran dan penentuan perangkat yang dibutuhkan yang mana proses ini dilanjutkan dengan tahap negosiasi.

Selanjutnya bila penawaran atau proposal tersebut sudah disetujui bersama dengan adanya perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama, maka proses implementasi atau pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pada tahap ini akan dilakukan BAST dan pembayaran uang muka yang akan dilanjutkan dengan pengerjaan mengembangkan system dan instalasi software. Bilamana instalasi software dan hardware tersebut sudah dilakukan, maka Perseroan akan membuat tagihan untuk melakukan pelunasan atas sisa pembayaran yang telah disetujui bersama.

Persaingan Usaha, Keunggulan Kompetitif, dan Strategi Bisnis

Persaingan Usaha

Bila dibandingkan dengan perusahaan sejenis di industri teknologi, saat ini Perseroan berfokus dalam menyediakan solusi sistem informasi berbasis telematika dan IoT di bidang transportasi. Dikarenakan kompleksitas dan peluang di sektor transportasi, Perseroan mengintegrasikan teknologi IoT berbasis virtual dengan transportasi yang dikenal sebagai Intelligent Transport System. Ide integrasi teknologi cerdas berbasis virtual tersebut merupakan sebuah penemuan kebaruan (novelty) di bidang transportasi dan memainkan peranan yang penting untuk mengatasi masalah di dunia global dimana Intelligent Transportation System (ITS) mengambil bagian penting dalam dunia transportasi secara global. Teknologi ini merupakan integrasi baru dalam bidang sistem transportasi, seperti manajemen transportasi, infrastruktur, operasi, kebijakan, metode kontrol, dan sebagainya. Intelligent Transportation System (ITS) dapat memainkan peran utama dalam mengurangi risiko tingkat kecelakaan yang tinggi, kemacetan lalu lintas, emisi karbon, polusi udara dan disisi lain meningkatkan keselamatan dan keandalan, kecepatan perjalanan, arus lalu lintas, dan kepuasan pengguna transportasi untuk semua moda.

Industri teknologi merupakan salah satu industri yang kompetitif. Perseroan percaya bahwa faktor persaingan dalam industri ini ditentukan oleh fitur teknologi, kinerja, dan harga. Hingga saat ini belum banyak perusahaan yang dapat dan mampu menyediakan teknologi cerdas dalam mendukung implementasi *Intelligent Transportation System (ITS)* untuk pengembangan *smart city* yang bersifat *end to end solution*. Di Indonesia sendiri, belum banyak perusahaan berbasis IoT yang berfokus pada pengembangan *Intelligent Transportation System (ITS)*. Perseroan merupakan perusahaan yang mengawali penyediaan jasa di bidang ini dengan menyediakan hardware dan didukung oleh software yang akan mengintegrasikan data secara real time armada penumpang dengan stakeholder sehingga hal tersebut bisa membuat efisiensi dalam hal tenaga kerja dan reliabilitas data yang digunakan. Pada saat ini di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang mengembangkan teknologi berbasis IoT di berbagai bidang yang secara tidak langsung menjadi pesaing Perseroan, namun saat ini belum terdapat sumber data terpercaya tentang pesaing yang mengembangkan teknologi berbasis IoT yang fokus mengembangkan *Intelligent Transportation System (ITS)* secara *end to end solution*. Perusahaan lain tersebut dapat saja melakukan ekspansi untuk mengembangkan *Intelligent Transportation System (ITS)* secara *end to end solution* sehingga perusahaan lain tersebut dapat saja mengambil pangsa pasar Perseroan.

Secara global, terdapat beberapa perusahaan yang menyediakan *Intelligent Transportation System (ITS)* seperti ACCENTURE PLC, ALSTOM SA, MSR Traffic GmbH, Siemens AG, Thales Group, TomTom International, Cisco Systems Inc., Cubic Corporation, IBM Corporation, Iteris, Inc, dan lain-lain. Namun demikian *barrier to entry* bagi perusahaan global tersebut untuk menyediakan jasa tentunya cukup tinggi. Agar pendatang baru dapat bersaing secara efektif, mereka memerlukan pengetahuan teknis, rekam jejak, dan kemampuan yang diperlukan untuk menyesuaikan solusi dengan kebutuhan pelanggan. Selain itu, dalam mengikuti tender, perusahaan dituntut untuk memenuhi persyaratan yang



ketat dalam hal layanan, produk, dan kemampuan. Kompetensi dan kemampuan untuk merancang solusi spesifik untuk memenuhi persyaratan ketat dari pelanggan dan spesifikasi tender, khususnya dalam konteks kebutuhan di Indonesia, hanya dapat dibangun melalui pengalaman bertahun-tahun dalam merancang dan menyesuaikan solusi IoT yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Oleh karena itu, Perseroan berkeyakinan bahwa pendaftar baru akan mengalami kesulitan yang signifikan dalam memberikan tingkat layanan yang sama dengan para pemain industri yang berpengalaman dalam jangka pendek.

Keunggulan Kompetitif

Sebagai pemain utama dalam industri ini Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif. Perseroan memiliki *cumulative knowledge* di bidang teknologi transportasi, khususnya untuk transportasi umum. Pengalaman Perseroan dalam bidang transportasi dan *network* menjadi bekal yang kuat bagi Perseroan untuk mengembangkan bisnisnya dibidang teknologi transportasi. Perseroan hadir dengan memberikan layanan solusi kepada klien yang berfokus pada peningkatan standarisasi aspek keselamatan, keamanan dan kelayakan armada transportasi, dimana aspek ini menjadi perhatian penting bagi para pemangku kepentingan termasuk penyedia fasilitas maupun pengguna armada transportasi. Selain itu Perseroan didukung oleh SDM berkualitas yang memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang tinggi, sehingga potensi mengembangkan penyediaan jasa teknologi disektor lain dan pengembangan kesektor terkait seperti logistik juga menjadi keunggulan kompetitif Perseroan. Hingga saat ini Perseroan telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di pemerintahan untuk menyediakan teknologi tepat guna yang memberikan *end to end solution*, mendukung sektor transportasi publik di lebih dari 15 kota di luar Jakarta. Di Jakarta sendiri, Perseroan telah banyak bekerjasama dengan PT Transjakarta untuk mendukung infrastruktur teknologi manajemen transportasinya dan akan melakukan pengembangan di semua koridor Transjakarta. Saat ini Perseroan sedang melakukan uji coba untuk teknologi transportasi tersebut pada armada bus Transjakarta. Artinya, tim Perseroan telah terbukti dapat mengeksekusi teknologi tepat guna pada skala yang besar. Manajemen transportasi saat ini dan kedepannya akan berkembang ke industri yang membutuhkan IT dan *telematics* yang banyak digunakan baik Pemerintah maupun Bisnis untuk membantu juga memberikan pelayanan publik kepada masyarakat maupun jasa kepada pelanggan.

Keunggulan kompetitif kami adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk memberikan solusi IoT yang bersifat *end-to-end* secara *customized* kepada pelanggan.
Pelanggan semakin mencari penyedia solusi yang dapat menawarkan solusi yang bersifat *end-to-end* yang komprehensif. Dengan *cumulative knowledge* di bidang teknologi transportasi, khususnya utk transportasi umum, Perseroan telah mencapai integrasi rantai nilai (*value chain*) dalam menyediakan layanan yang bersifat *end-to-end* dan solusi satu atap kepada pelanggan dengan memanfaatkan kompetensi dan kemampuan inti kami untuk merancang solusi IoT yang disesuaikan, mengawasi dan mengelola proses manufaktur, menerapkan solusi secara efektif dan memberikan dukungan purna jual.
2. Spektrum pelayanan yang luas
Perseroan menawarkan berbagai solusi di setiap segmen bisnis *smart city solutions* dan *IoT-as-a-Service*. Perseroan percaya bahwa spektrum penawaran solusi yang beragam dan luas memberi kami fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan terus update terhadap perkembangan teknologi dan perubahan demand dari pasar.
3. Ceruk pasar yang masih besar
Dengan pertumbuhan permintaan akan transportasi publik yang semakin tinggi dan teknologi yang menyertainya, dan belum banyaknya perusahaan yang secara spesifik memberikan layanan seperti yang diberikan oleh Perseroan, kami yakin bahwa ceruk pasar yang dimiliki oleh Perseroan masih sangat besar. Kedepan, kami optimis bahwa pengembangan smart city dan teknologi yang menyertainya menjadi kebutuhan banyak kota di Indonesia.

4. SDM yang berkualitas yang memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang tinggi
Salah satu asset utama pada perusahaan berbasis teknologi terletak pada sumber daya manusia yang memiliki kemampuan tinggi dan terus beradaptasi pada perubahan teknologi. Perseroan dibangun oleh para ahli dibidang teknologi dan didukung oleh SDM yang memiliki kemampuan yang sangat baik untuk mendukung pengembangan penyediaan jasa teknologi.
5. *Networking*
Dengan akumulasi pengetahuan dan kemampuan dari praktisi di bidang teknologi transportasi, Perseroan telah dapat membangun networking yang sangat baik, khususnya dengan Pemerintah dan B2B. Dengan network yang baik, Perseroan dapat memahami kebutuhan spesifik dari pelanggan dan dapat masuk pada pasar-pasar baru.

Strategi Utama Perseroan

Strategi utama Perseroan saat ini adalah fokus pada pengembangan teknologi transportasi melalui *Intelligent Transportation System (ITS)*. Dengan arah pembangunan kota di Indonesia menuju *smart city* dan masih besarnya potensi penyediaan layanan berbasis teknologi khususnya sektor transportasi, Perseroan berfokus pada strategi untuk memperdalam pasar di bidang *Intelligent Transportation System (ITS)*. Selain itu, Perseroan juga melihat potensi pada sektor lainnya yang dapat dikembangkan oleh Perseroan seperti industri logistik, komoditas, sawit, batubara, dimana Perseroan dapat menyediakan teknologi tepat guna untuk mendukung pengembangan bisnis klien. Berikut adalah strategi usaha Perseroan:

1. Pengembangan Penyediaan jasa *Intelligent Transportation System (ITS)* melalui ekstensifikasi kota-kota yang telah menerapkan *smart city* dan masuk dalam kota-kota yang akan menerapkan konsep *smart city*.
 - a. Hingga saat ini Perseroan telah bekerjasama dengan 12 kota untuk menyediakan jasa teknologi transportasi. Strategi usaha Perseroan kedepannya adalah memperluas cakupan layanan dan jasa yang ditawarkan dengan bekerjasama secara *Business to Government (B2G)* dan *Business to Business (B2B)*.
 - b. Indonesia akan menuju ke 100 *smart city*, yang artinya Perseroan akan menetapkan strategi untuk memperluas pangsa pasarnya ke kota-kota lain di Indonesia dengan memberikan jasa layanan yang terintegrasi. Dengan tingginya potensi kota-kota lain yang telah menerapkan *smart city* tetapi belum tercakup oleh Perseroan dan kota yang akan menerapkan *smart city*, dan termasuk potensi pengembangan Ibu Kota Baru yang tentunya membutuhkan teknologi transportasi terintegrasi, Perseroan berfokus pada strategi perluasan pangsa pasar tersebut. Melalui strategi ini Perseroan akan menjadi *smart city enabler* dalam bidang transportasi yang mendukung dan mempercepat penerapan *smart city* di Indonesia.
 - c. Perseroan juga akan menjadi pendukung dari penerapan teknologi dibidang transportasi dengan menyediakan teknologi seperti penyediaan produk-produk teknologi alat transportasi truk dan bus seperti *AI Dashcam Solution* dan *Blind Spot Detection (BSD) Solutions* dan bekerjasama dengan pihak pemenang lelang untuk menyediakan perangkat *On Board Unit (OBU)* dalam rangka mendukung sistem pembayaran tol non-tunai-nir-sentuh berbasis MLFF dan juga penerapan *Electronic Road Pricing (ERP)* di Indonesia.
2. Perluasan jasa layanan yang bersifat *Business to Business (B2B)* yang bersifat *tailor made* yakni menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna melalui perluasan industri layanan. Perseroan juga mengembangkan layanan di luar industri transportasi seperti logistik, komoditas, dan pertambangan. Industri-industri tersebut memberikan potensi yang sangat besar dan Perseroan dapat men-support penyediaan teknologi dalam mendukung proses bisnisnya.
3. Penyediaan teknologi yang bersifat *Business to Customer (B2C)*. Perseroan berpandangan pengembangan teknologi retail yang digunakan masyarakat banyak dapat memberikan *stream of revenue* yang lebih *sustainable* untuk perusahaan. Pengembangan ini selain berfokus kepada *mobility service* juga dapat dikembangkan ke jenis jasa lainnya. Salah satu contoh layanan B2C yang akan dikembangkan oleh Perseroan adalah *universal payment platform* termasuk perangkat keras (*hardware*) yang tentunya akan sangat memudahkan pengguna kartu dan aplikasi dalam melakukan transaksi dan pembayaran. Potensi-potensi lain dalam penyediaan teknologi B2C sangat banyak dan akan terus digali oleh Perseroan untuk dapat memberikan teknologi terbaik yang tepat guna bagi masyarakat.



4. Peningkatan kerjasama dan kolaborasi strategis yang mendukung bisnis Perseroan. Beberapa kerja sama dan kolaborasi Perseroan saat ini yakni:
- a. Kerja sama dengan *Silence Laboratories* perusahaan keamanan siber yang berbasis di Singapura, untuk memastikan kelancaran otentikasi dalam layanan mobilitas, terutama dalam *e-ticketing* atau tiket elektronik. Kerja sama ini memastikan implementasi untuk penggunaan teknologi tiket suara yang pertama di Indonesia. Tiket suara ini menggunakan teknologi yang disebut *Silent Auth* yang nantinya para penumpang akan lebih mudah melakukan verifikasi tiket baik untuk moda transportasi maupun pertunjukan acara. Penerapan teknologi ini akan memberikan peningkatan besar dalam pengalaman pengguna. Tidak seperti kode QR, waktu yang diperlukan untuk melakukan verifikasi hanya membutuhkan waktu kurang dari 1,5 detik, sehingga solusi teknologi ini lebih tepat dan handal. Oleh karena itu, integrasi *Silent Auth* dengan aplikasi Perseroan akan mengurangi antrean saat naik moda transportasi atau saat memasuki acara pertunjukan. Melalui kerja sama dan kolaborasi dengan *Silence Laboratories*, kedepannya, teknologi verifikasi tiket suara berbasis jarak akan terus dikembangkan. Teknologi ini tidak hanya bisa digunakan untuk transportasi atau dunia *entertainment* atau *showbiz* saja tapi bisa juga digunakan untuk bisnis atau industri lainnya, dimana tujuannya untuk memudahkan pengguna dalam mendapatkan tiket dan melakukan verifikasi dengan lebih cepat dan akurat. Perseroan berharap teknologi ini dapat menjadi pilihan yang lebih baik untuk *e-ticketing* dibanding penggunaan teknologi kode QR dan kartu NFC, yang diharapkan dapat mengurangi antrean di gerbang karena kecepatan dan keandalannya.



Sumber: BeritaSatu.com, Juni 2022

- b. Kerjasama dengan Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD). Kerjasama yang disepakati kedua belah pihak bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan aspek keselamatan kendaraan dalam pengangkutan penumpang yakni terkait penggunaan perangkat IoT (TKDN *Advance Mobility* atau TAM Fleet) di unit-unit bus milik Perum PPD. Beberapa alat dan teknologi IoT yang akan diimplementasikan satu implementasi IoT yakni *Driver Safety Monitoring* (DSM) yang memberikan *Driver Behavior Analysis* untuk memantau perilaku pengemudi, perangkat *Blind Spot Detection* yang mampu mendeteksi keberadaan pejalan kaki maupun kendaraan disekitar armada dengan akurat, perangkat APC dimana alat ini dapat menghitung jumlah penumpang yang naik secara akurat, *Advance Driver Assistance System* (ADAS) dan *Indicator R-Watch* yang dapat memberikan peringatan awal jika armada kendaraan terdeteksi menyimpang dari jalur, melewati batas kecepatan ataupun jika terjadi potensi tabrakan depan, serta fitur perangkat pelacak dan keamanan kendaraan yang menggunakan perpaduan teknologi *Global Positioning System* (GPS) dan dikombinasikan dengan *Global System for Mobile Communication* (GSM) yang mampu melacak, memantau posisi dan status kendaraan secara *real time*. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen Perseroan untuk program digitalisasi di sektor transportasi melalui teknologi IoT canggih yang terintegrasi demi mendukung *smart city*. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan kualitas dan layanan kendaraan pengangkut penumpang dapat semakin meningkat sesuai dengan standar minimum pelayanan yang dibuat oleh pemerintah.



Pemasaran dan Promosi

Aktivitas pemasaran Perseroan berlandaskan pada strategi-strategi penting berikut:

1. Mengembangkan dan memperluas layanan yang ditawarkan baik untuk teknologi transportasi yang telah di-cover oleh Perseroan maupun yang belum dengan menjalin kerjasama dengan daerah-daerah di Indonesia. Hingga saat ini Perseroan telah memiliki *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan operator-operator jasa transportasi di 12 kota di Indonesia. Perseroan terus memperluas kehadirannya di kota-kota lain di Indonesia.
2. Mempertahankan dan meningkatkan pelanggan dan mitra usaha dari sektor bisnis. Pemasaran dan promosi di B2B ini dilakukan dengan melakukan *networking* dan penawaran secara langsung kepada perusahaan-perusahaan atas solusi yang dimiliki oleh Perseroan.
3. Melakukan kerjasama dengan berbagai institusi untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Berikut merupakan data penjualan Perseroan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	2021	31 Desember	2019
	2022*		2020*	
Pendapatan jasa	30.315.822.263	26.061.108.933	11.148.178.430	4.750.900.000
Pendapatan produk	22.097.298.162	19.566.926.634	21.554.366.906	1.966.972.001
Jumlah	52.413.120.425	45.628.035.297	32.702.545.336	6.717.872.001

* Tidak dikonsolidasi

• Pendapatan Jasa

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	2021	31 Desember	2019
	2022		2020	
Jasa Buy The Service:				
Medan	1.339	1.523	858	-
Palembang	1.823	1.291	727	-
Yogyakarta	818	931	524	-
Solo	3.739	4.253	2.395	-
Denpasar	1.953	2.222	1.251	-
Bandung	1.674	1.904	-	-
Surabaya	2.102	2.391	-	-
Banjarmasin	1.581	1.798	-	-
Makasar	1.804	2.052	-	-
Banyumas	1.190	1.354	-	-
Bogor	911	1.037	-	-
Kegiatan pengawasan lainnya	4.846	5.305	5.394	4.751
Sistem Pelayanan Parkir Jakarta:				
Jakarta	6.533	-	-	-
Jumlah	30.315	26.061	11.148	4.751

* Tidak dikonsolidasi

• Pendapatan Produk

(dalam unit)

Keterangan	31 Juli	2021	31 Desember	2019
	2022		2020	
Jakarta	122	498	483	-
Jumlah	122	498	483	-

Tidak ada kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.



Riset dan Pengembangan

Ditengah perubahan teknologi yang sangat pesat, dalam memastikan teknologi yang digunakan selalu *terupdate*, Perseroan terus melakukan upaya untuk menerapkan teknologi terkini yang tepat guna. Fokus kegiatan riset dan pengembangan Perseroan adalah pada teknologi yang dapat digunakan. Kecanggihan teknologi sering kali tidak sejalan dengan kemampuannya untuk digunakan oleh masyarakat banyak. Perseroan selalu berfokus pada teknologi yang dibutuhkan di masa kini.

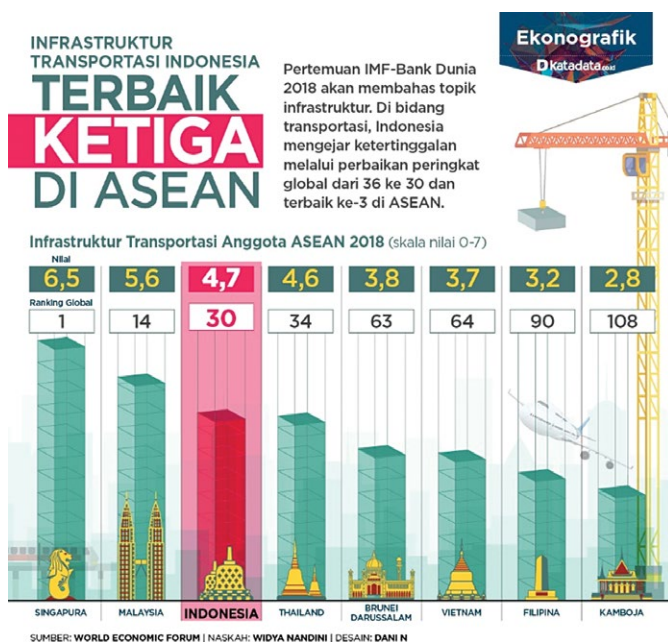
Disisi lain, Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, terus mendorong optimalisasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, jumlah produk yang memiliki sertifikat TKDN pada tahun 2020 minimal sebesar 25% dengan target sebanyak 6.000 produk, dan ditargetkan meningkat menjadi 8.400 produk pada tahun 2024. Tentunya target tersebut bisa tercapai melalui sinergi yang kuat antara kementerian dan lembaga-lembaga terkait.

Berdasarkan UU No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 66 menyebutkan bahwa kementerian/ lembaga/ perangkat daerah wajib menggunakan produk dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40%.

Dengan adanya dorongan untuk memastikan teknologi terkini dan peraturan Pemerintah dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri, Perseroan kedepannya akan mengembangkan produk sendiri dengan memperhatikan TKDN yang sesuai dengan ketetapan Pemerintah. Saat ini, komponen *software* dan *hardware* atas produk yang ditawarkan Perseroan masih dipasok oleh vendor di luar negeri. Di masa depan, Perseroan berencana untuk mengembangkan *software* di Indonesia melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Selain itu, Perseroan juga akan mengembangkan perakitan komponen-komponen hardware di Indonesia. Upaya ini memerlukan Riset dan Pengembangan yang matang serta pendanaan yang kuat. Dengan demikian diharapkan nantinya Perseroan akan menjadi salah satu perusahaan yang menawarkan barang/jasa yang memiliki TKDN tinggi di Indonesia khususnya di bidang jasa penyediaan solusi sistem informasi berbasis telematika dan *Internet of Things* (IoT) untuk pengembangan *smart city*.

Prospek Usaha

Indonesia merupakan negara dengan populasi ke-empat terbesar di dunia dengan lebih dari 270 jiwa penduduk. Disisi lain pertumbuhan jumlah jalan raya bersifat linear dan pertumbuhan kendaraan bersifat eksponensial. Survey BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah jalan di Indonesia pada tahun 2020 baru mencapai 548.366 km yang meningkat sebesar 0,71% dari tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan kendaraan pada tahun 2020 mencapai 4,95%. Dibandingkan dengan negara lain misalkan di kawasan negara-negara ASEAN, pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia berada pada urutan ketiga setelah Singapura dan Malaysia. Selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan infrastruktur transportasi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pembangunan infrastruktur jalan yang cukup masif dalam beberapa tahun ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas perjalanan yang efisien dan tepat waktu. Kebutuhan akan transportasi publik yang bersifat masal menjadi kian tak terelakkan. Saat ini, Pemerintah telah memperluas cakupan Program Prioritas Penyediaan Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Beberapa kota besar di Indonesia juga telah memperluas layanan transportasi angkutan masal berbasis jalan dengan menambah koridor layanan. Dengan pertumbuhan tersebut serta dukungan dari Pemerintah, kebutuhan akan layanan yang mendukung transportasi publik menjadi sangat tinggi. Untuk dapat meningkatkan penggunaan transportasi publik, maka penyediaan transportasi publik harus memiliki beberapa aspek kualitas. Transportasi publik menjadi pilihan yang harus dapat diandalkan, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Untuk itu *Intelligent Transportation System* (ITS) menjadi hal yang sangat dibutuhkan.



Sumber: Katadata, 2018

Indonesia saat ini memiliki 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi. Sebagai inisiasi pemerintah melalui 100 *smart city*, kedepannya akan dibentuk 100 *smart city* dan 5 provinsi yang akan menerapkannya. Saat ini Perseroan telah meng-cover 12 kota di Indonesia. Pada kota-kota tersebut total *market size potential* mencapai lebih dari Rp12 triliun dengan potensi pertumbuhan signifikan pada periode berikutnya, seiring dengan pulihnya kegiatan perekonomian. Untuk pangsa pasar ini Perseroan memiliki prospek untuk memperdalam ceruk pasarnya. Selain itu potensi pertumbuhan lainnya Perseroan dapat menjadi *smart city enabler* dengan memperluas cakupan layanan pada kota-kota yang akan menjadi *smart city*.

Pasar truk global bernilai USD 809,46 miliar pada tahun 2020 dan diharapkan mengalami pertumbuhan pada CAGR 7,5% dalam lima tahun ke depan hingga tahun 2026. Secara kuantitas, pasar truk di dunia tahun 2021 adalah sekitar 120 juta truk sedangkan untuk pasar asia pasifik untuk *medium* dan *heavy trucks* sebesar 14 juta (12% dari pasar global). Di Indonesia sendiri, pasar untuk truk dan bus masih cukup berpeluang besar untuk berkembang. Berdasarkan data penjualan Gaikindo tahun 2021, penjualan bus dan truk naik 51,8% dari tahun 2020 dan diproyeksi akan terus meningkat. Selain itu, proyeksi peningkatan penjualan truk dan bus di Indonesia juga didukung masifnya proyek pembangunan infrastruktur dan perbaikan di sektor perkebunan dan pertambangan setelah pandemi covid-19. Proyeksi penjualan bus dan truk di Indonesia masih cukup luas ini membuka peluang untuk produk-produk teknologi yang mendukung alat transportasi truk dan bus seperti *AI Dashcam Solution* dan *Blind Spot Detection (BSD) Solutions*. Perseroan merupakan salah satu perusahaan berbasis teknologi yang fokus mengembangkan *Intelligent Transportation System (ITS)* baik *hardware software* secara *end to end solution* yang memudahkan kebutuhan pengguna dan pengemudi armada.

Salah satu permasalahan di sektor transportasi adalah kemacetan termasuk kemacetan di area jalan tol. Penyebabnya yakni tingginya volume kendaraan dan juga permasalahan dalam sistem pembayaran elektronik *e-toll*. Tingkat volume kendaraan di jalan tol juga bertumbuh signifikan di tahun 2022. Hal ini dilihat dari peningkatan pengguna kendaraan yang naik 80% pada arus mudik 2022 dibandingkan periode lebaran di 2021. Pihak Jasa Marga juga mencatat rata-rata lalu lintas jalan tol naik 12,8% pada kuartal 1 di tahun 2022 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Untuk menangani masalah pembayaran *e-toll*, Pemerintah akan untuk menerapkan sistem pembayaran tol tanpa henti atau *Multi Lane Free Flow (MLFF)*. Melalui sistem MLFF, pengguna jalan tol tidak perlu lagi berhenti ketika hendak membayar tol. Dalam penerapannya, MLFF harus didukung oleh Lembaga pengelola yang berperan sebagai *toll service provider* atau *electronic toll collection (ETC)*. Saat ini Perseroan bekerjasama dengan pihak pemenang lelang untuk menyediakan perangkat *On Board Unit (OBU)* dalam rangka mendukung sistem pembayaran tol non-tunai-nir-sentuh berbasis MLFF dan juga penerapan *Electronic Road Pricing (ERP)* di Indonesia.



Berdasarkan data dari Mordor Intelligence atas *Internet of Things (IoT) Market Trend* sebagaimana dikutip oleh IWOW Technology Limited, nilai pasar IoT global diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 10,5% dari US\$761 miliar pada tahun 2020 menjadi US\$1.386 miliar pada tahun 2026. Jika dilihat secara geografis, pengeluaran Asia Pasifik untuk IoT diperkirakan akan mencapai ukuran pasar sebesar US\$288 miliar pada tahun 2021 dan diproyeksikan mencapai tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 11,7% selama tahun 2020 hingga 2024. Lebih lanjut, adopsi IoT secara keseluruhan di ASEAN diperkirakan akan tumbuh lebih jauh karena Pemerintah melanjutkan upaya untuk mendorong *smart city* di kawasan ini dan upaya Industri 4.0 terus berkembang. Ukuran pasar keseluruhan untuk IoT di ASEAN (semua negara kecuali Singapura) diperkirakan mencapai US\$4,6 miliar pada tahun 2020, tumbuh dari basis yang sangat kecil sebesar US\$280 juta pada tahun 2014. Selain itu, tren industri IoT masih belum banyak digarap dan belum banyak perusahaan berbasis IT yang fokus dibidang IoT di Indonesia. Perseroan berkeyakinan dengan tren dan pertumbuhan akan IoT akan mendorong permintaan akan solusi IoT khususnya pada industri transportasi di Indonesia.

Top ASEAN¹ Countries Expected IoT Market Size in 2020

USD Million



Sumber: IMDA, 2020

Dengan rencana pemerintah untuk membangun Ibu Kota Negara baru, terdapat potensi yang cukup besar bagi Perseroan untuk dapat memberikan jasa layanan *Intelligent Transportation System (ITS)* di ibu kota baru tersebut. Paling tidak terdapat beberapa layanan yang dapat diberikan Perseroan seperti *Advanced Traffic Management System (ATMS)*, *Advanced Commercial Vehicle Operation System (ACVOS)*, *Advance Parking Management System (APMS)*, *Electronic Payment System (EPS)*, *Emergency management System*, *Advanced Transport Demand Management (ATDM)*, *Advanced Public Transportation System (APTS)*, *Advanced Traveller Information System (ATIS)*, *Advanced Control Vehicle System (ACVS)*, *Advanced Rural Transportation Systems (ARTS)*, bahkan hingga teknologi pendukung *Autonomous Driving System (ADS)*.

Saat ini, Perseroan memiliki prospek usaha untuk mengembangkan lini B2B dengan mengeksplorasi potensi bekerjasama dengan *dominant player* di industri logistik. Dengan semakin besarnya transaksi pembelian barang secara *e-commerce*, tentunya juga berdampak pada membesarnya market pada industri logistik. Dari segi teknologi, Perseroan dapat memberikan layanan berbasis teknologi untuk jasa angkutan barang. Selain industri logistik secara B2B, Perseroan memiliki potensi untuk memberikan jasa layanannya kepada industri seperti pertambangan terkait dengan *project management* dan *mining practices*, dan industri komoditas seperti kelapa sawit. Prospek ini akan digarap oleh Perseroan dengan menyiapkan teknologi-teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan spesifik klien.

Prospek usaha lain adalah pengembangan teknologi untuk masyarakat luas yang bersifat B2C. Salah satu yang tengah direncanakan oleh Perseroan adalah sistem kartu untuk *universal payment* yang tidak terikat kepada bank tertentu dan bersifat universal. Dengan semakin banyaknya para *commuter*, penggunaan *system universal payment* ini menjadi sangat dibutuhkan dan akan sangat memudahkan masyarakat dalam menggunakan berbagai moda transportasi. Potensi usaha dalam hal ini sangat besar mengingat jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat besar, berada di kota-kota besar dan pertumbuhan pengguna transportasi publik yang cukup tinggi. On Board Unit Berdasarkan



penjelasan prospek diatas, dapat dilihat bahwa Perseroan memiliki prospek yang cukup besar, baik sebagai *smart city enabler* yang memberikan teknologi tepat guna dalam sektor transportasi, baik bagi kota-kota yang telah mengembangkan konsep *smart city* maupun melakukan penetrasi ke kota-kota yang akan mengembangkan konsep *smart city*. Selain itu Perseroan juga memiliki prospek yang cukup besar dalam pengembangan lini bisnis yang bersifat B2B maupun B2C.

Perseroan siap mendukung pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Perseroan sangat optimistis mampu berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur IKN khususnya pembangunan infrastruktur transportasi cerdas dan digitalisasi mobilitas perkotaan, karena mempunyai keahlian dan kapabilitas dalam menyediakan dan mengimplementasikan produk-produk berbasis IOT untuk Smart City dan Smart Mobility sesuai konsep pembangunan infrastruktur cerdas di IKN. Perseroan mempunyai perencanaan matang dalam mengembangkan rekayasa industri transportasi massal berbasis teknologi dan ramah lingkungan seperti Electric Vehicle (EV) berbasis kendaraan tanpa awak (Autonomous Vehicle) guna mendukung pergerakan orang di dalam perkotaan cerdas seperti IKN. Untuk mendukung hal tersebut, saat ini Perseroan sedang menyusun sebuah peta jalan (roadmap) untuk pengembangan dan penerapan sistem transportasi cerdas untuk dapat diterapkan di kota-kota berbasis smart city di Indonesia termasuk Ibukota Nusantara (IKN). Secara keseluruhan, Perseroan akan mendukung implementasi dan standarisasi transportasi cerdas di IKN, diantaranya namun tidak terbatas dalam sistem connected vehicle, autonomus vehicle, green mobility, sistem pembayaran terintegrasi (integrated payment system), sistem angkutan massal cerdas (smart public transportation) termasuk semua sistem cerdas lalu lintas dan mobilitas (smart traffic and mobility) di dalam ekosistem smart city. Diharapkan wujud sinergi tersebut dengan kehadiran dan keterlibatan langsung Perseroan yang dapat memberikan dampak positif kepada IKN dan Indonesia sesuai dengan slogan yang diusung oleh Perseroan yakni "Empowering Management Through Technology".



IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan Keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Deassy Roosiana Tresna Handayani, CPA.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanton Dadang & Ali dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSi, CPA.

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H, S.E, CPA.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022*	2021	2020*	2019
Ekuitas				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	44.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	1.250.000.000
Tambahan modal disetor	-	3.000.000.000	-	-
Saldo laba	9.223.682.967	10.573.035.038	3.895.191.127	3.958.297.388
Komponen ekuitas lain	(630.096.930)	11.655.663	273.093.259	(26.958.760)
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	535.502.797
Total Equity	52.603.586.037	28.584.690.701	19.168.284.386	5.716.841.425

* Tidak dikonsolidasi

** Tidak diaudit

Tabel Proforma Ekuitas

Proforma ekuitas pada tanggal laporan keuangan terakhir yang menggambarkan posisi perubahan permodalan terakhir dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, setelah dikurangi asumsi biaya emisi sebesar Rp5.146.575.133,- atau sekitar 3,812% (tiga koma delapan satu dua persen) dari nilai emisi, pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Saldo Laba	Komponen ekuitas lain	Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Juli 2022	44.000.000.000	-	9.233.682.967	(630.096.930)	-	52.603.586.037
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Juli 2022, jika diasumsikan:						
• Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 750.000.000 saham dengan harga penawaran Rp180- per saham	15.000.000.000	120.000.000.000	-	-	-	135.000.000.000



Uraian	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Saldo Laba	Komponen ekuitas lain	Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas
• Biaya Emisi Proforma ekuitas pada tanggal 31 Juli 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan tanpa waran	-	(5.146.575.133)	-	-	-	(5.146.575.133)
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Juli 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan tanpa waran	59.000.000.000	114.853.424.867	9.233.682.967	(630.096.930)	-	182.557.010.904
• Konversi seluruh Waran Seri I sebanyak 375.000.000 waran menjadi 375.000.000 saham dengan nilai nominal Rp20,- dan harga pelaksanaan Rp250,- per saham	7.500.000.000	86.250.000.000	-	-	-	93.750.000.000
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Juli 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan dengan waran	66.500.000.000	201.103.424.867	9.233.682.967	(630.096.930)	-	276.307.010.904

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 31 JULI 2022 TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.



X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan, pemegang saham baru yang memperoleh saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham akan memiliki hak-hak yang sama dan setara dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembagian dividen mengacu pada ketentuan – ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembagian dividen tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembagian dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif.

Dividen interim dapat dibagikan pada akhir tahun keuangan selama tidak melanggar ketentuan dari Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor. Pembagian dividen interim ditentukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih dimulai dari tahun 2024 memakai buku untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

- 1) Laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis; dan
- 2) Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini).

Riwayat pembagian dividen Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun Buku	Keterangan	Jumlah Pembayaran Dividen (Rp)
2018 & 2019	Perseroan membagikan dividen pada tahun 2020 dengan tahun buku 2018 dan 2019 berbentuk tunai, kepada seluruh pemegang saham.	1.500.000.000
2021	Perseroan membagikan dividen pada tahun 2022 dengan tahun buku 2021 berbentuk saham.	7.000.000.000

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”), dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPH Umum Nomor 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPH atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”. Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, atas dividen yang diterimanya dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang Pajak Penghasilan. tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih rendah dari itu apabila dividen diterima oleh pemegang saham yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan Indonesia. Untuk dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah, wajib pajak harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009



tanggal 05 November 2009, juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan ketentuan harus menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD). Dokumen SKD adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Form DGT 2) yang wajib diisi dan ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat pajak yang berwenang di Negara mitra P3B.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai wajib pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk PPh, PPN dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada utang pajak laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Perseroan telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku untuk tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019, 2020, dan 2021

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Surya Fajar Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan POJK No. 41/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Surya Fajar Sekuritas	750.000.000	135.000.000.000	100,00
Total	750.000.000	135.000.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan pada tanggal 10 – 20 Februari 2023 dengan kisaran harga penawaran Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) sampai dengan Rp220,- (dua ratus dua puluh Rupiah) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada investor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Permintaan (*demand*) dari investor domestik dan internasional;
3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (*Qualified Institutional Buyer / QIB*);
4. Kinerja Keuangan Perseroan;
5. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan;
6. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
7. Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
8. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan.



XIII. LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan

Alamat: HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan, World Capital Tower 12th floor

Jl. DR Ide Anak Agung Gede Agung Lot D

Kawasan Mega Kuningan – Jakarta, Indonesia

Tel : (62) 21 5091 7957

Fax: (62) 21 5091 7955

Website: www.hlbindonesia.id

STTD : STTD.AP-17/NB.122/2022
Tanggal STTD : 2 Juni 2022
No. Asosiasi : Registrasi Akuntan Publik No.AP. 1725
Nama Partner : Deassy Roosiana Tresna Handayani, CPA.
Pedoman Kerja : Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
Surat Penunjukkan Kerja : Surat Penunjukkan No. 059/PROP-JKT1/A/II/2022, tanggal 24 Februari 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Kantor Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM

Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP)

Alamat: Wisma 46 - Kota BNI, Lantai 32 & 41, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

Tel : (62) 21 5701837

Fax: (62) 21 5701835

Website: www.dentons.com

STTD : STTD.KH-97/PM.2/2018
Tanggal STTD : 15 Mei 2018
Nomor Anggota HKHPM : 201313
Nama Partner : Erwin Kurnia Winenda, S.H., M.B.A
Pedoman Kerja : Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018
Surat Penunjukkan Kerja : Surat Penunjukkan No. 278/EKW/III/22 tanggal 1 Maret 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.



NOTARIS

Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn.

Alamat Jl. RC. Veteran Bintaro Raya No 11A, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan

Tel : (021) 7349 0201

STTD : STTD.N-135/PM.2/2018
Tanggal STTD : 7 Agustus 2018
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No.0639319800705
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Surat Penunjukkan Kerja : Surat Penunjukkan No. 030/SH/ADM/VIII/2022 Tanggal 29 Agustus 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuatkan Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.

Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

Tel : 021-2974 5222

Fax: 021-2928 9961

Email: opr@adimitra-jk.co.id

No Ijin Usaha : OJK KEP-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan dan LK
Surat Penunjukkan Kerja : Surat Penunjukkan No. PW-139/TKDN/082022 tanggal 31 Agustus 2022

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sitem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok BAE dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum.

BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam UUPM.



XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta No. tanggal adalah sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:
Informasi dan komunikasi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, dan Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

- **AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA (62019)**

Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimpelementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

- **AKTIVITAS PEMROGRAMAN BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL (62015)**

Kelompok ini mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) termasuk subset dari AI seperti *machine learning*, *natural language processing*, *expert system*, dan *subset AI* lainnya.

- **AKTIVITAS KONSULTASI DAN PERANCANGAN INTERNET OF THINGS (IOT) (62024)**

Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan dan pembuatan solusi sistem terintegrasi berdasarkan pesanan (bukan siap pakai) dengan cara memodifikasi perangkat keras (*hardware*) yang sudah ada, seperti sensor, *microcontroller*, dan perangkat keras (*hardware*) lainnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat keras (*hardware*) IoT dan/atau perangkat lunak (*software*) yang tertanam didalamnya. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas manufaktur chip (26120) dan aktivitas penerbitan/pengembangan perangkat lunak IoT (58200 dan 62019).

- **AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA (62029)**

Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit

yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.

Kegiatan usaha penunjang:

- **PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER (46511)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.

- **PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK (46512)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.

- **PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL (63122)**

Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup *finacial technology* (Fintech). *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).

- **PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK (46100)**

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat, furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.

- **PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) (58200)**

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan *video game* untuk semua platform sistem operasi.



- **PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI (46523)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.

- **PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA (46599)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

- **PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU (46501)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped.

- **PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS (45402)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped.

- **PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA (45405)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya.

- **PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK (46521)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan IC dan PCB.

- **AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA (62090)**

Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.

- **AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA (6311)**

Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).

- **AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA (70209)**

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber data manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan *agricultural economis* pada bidang

pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

MODAL

1. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah), terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar Rupiah).
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. Memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
 - e. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;
 - g. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
 - Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;



- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - (a) Perbaikan posisi keuangan;
 - (b) Selain perbaikan posisi keuangan;
 - (c) Penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
 - Yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
 - (a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperoleh penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam ayat (5) huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.



7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) butir b;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) butir b ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (8) butir c tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) butir a, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) butir d.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

DIREKSI

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi
5. Pemenuhan persyaratan yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat Pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.
6. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
7. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.



8. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
9. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
10. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowong tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
11. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
13. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat (9) dan (10) Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
14. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat (1) Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
15. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
17. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut yang mana RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS tersebut atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini menjadi batal.
18. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini.
19. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tindak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (17) Pasal ini, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
20. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian;
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat (6) Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat (7) Pasal ini;
 - e. Membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. Menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat (7) Pasal ini;Harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau



- b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
8. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
9. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Dirkeis, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (9) Anggaran Dasar ini.
10. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1). Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2). Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat (10) butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
11. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
12. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
13. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
15. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
16. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

DEWAN KOMISARIS

- a. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- b. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- c. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
- e. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- f. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
- g. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
- h. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
- i. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
- j. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat (8) dan (9) Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- k. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat (1) Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
- l. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- m. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.



TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai Langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama

tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal-mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu (90) sembilan puluh hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki Kembali jabatannya.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini. Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi – atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan system yang disediakan oleh Perseroan;
dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3.
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;
dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat (3) Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, harus:
 - i. Dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. Mempertimbangkan kepentingan perseroan;
 - iii. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan rups;
 - iv. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam rups; dan
 - v. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar ini.



7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraannya RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan Kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini, diterima Dewan Komisaris
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini.
13. Dalam hal ini Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham, dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakannya RUPS; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini telah terlampaui.



20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (19).
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8) Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) pasal ini dan ayat (19) Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) pasal ini; wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseran, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.



XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada Masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan dari nasabah PT Surya Fajar Sekuritas dapat disampaikan melalui email ke **cs.eipo@sfsekuritas.co.id** atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Surya Fajar Sekuritas dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1). Identitas pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan);
- 2). Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar);
- 3). Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Perdana Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham Yang Ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan Harga Penawaran saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai Harga Penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Subrekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.



2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b) Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.



Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan 6 Maret 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10.00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

Penawaran Umum saham PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebesar Rp 135.000.000.000, - (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Penjamin Emisi Efek bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (“SEOJK No. 15/2020”).



PT Surya Fajar Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, SEOJK No. 15/2020 dan Peraturan No. IX.A.7.

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Maret 2023.

a) Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain Ritel. Penjatahan Terpusat Selain Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
Kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
Kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c. Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.



- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Keterangan	Batasan minimal % Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I 2,5x ≤ X < 10x	Penyesuaian II 10x ≤ X < 25x	Penyesuaian III ≥ 25x
I (IPO ≤ Rp 250 Miliar)	Min (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp 250 miliar < IPO ≤ Rp 500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp 500 miliar < IPO ≤ Rp 1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp 1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

* Mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebesar 15% atau Rp20.250.000.000 (dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu berbanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel golongan II. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat akan diambil dari Porsi Penjatahan Pasti.



b) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
- c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum sesuai Peraturan No. IX.A.2, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - (1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - (2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - (3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - (2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
 - (3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
 - (4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan

Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara prorata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - (2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - (3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - (4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan system Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia system.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.



XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan, dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



SEKURITAS

PT Surya Fajar Sekuritas

Satrio Tower Lt. 9, Unit B,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4
Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 2788 3989
Faksimili: (021) 2788 3990
www.sfsekuritas.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara, Kirana Boutique Office Blok F3 No.5, Indonesia
Telepon: (021) 2974 5222
Faksimili: (021) 2928 9961



XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. Ref.: 341/EKW/II/23

Jakarta, 27 Februari 2023

Kepada Yth.

PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk
Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826,
Jl. Trembesi, Pademangan Timur,
Pademangan, Jakarta Utara
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

U.p.: **Direksi PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk**

Perihal: **Pendapat Segi Hukum atas PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk ("Perseroan")
Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), kami, Kantor Konsultan Hukum **Hanafiah Ponggawa & Partners**, ("**Dentons HPRP**") berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Erwin Kurnia Winenda, S.H., MBA., selaku Rekan, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No.STTD.KH-97/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") No. 201313, yang telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat tugas kepada kami sebagaimana tercantum di dalam surat Nomor Ref.: 278/EKW/III/22 tertanggal 1 Maret 2022 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Segi Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham ("**Penawaran Umum Perdana Saham**") sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 25,42% (dua puluh lima koma empat dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("**Saham Baru**") dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham sehingga jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah) ("**Saham Yang Ditawarkan**").

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,05% (tujuh belas koma nol lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke dua pencatatan Waran Seri I.

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

No. Ref.: 341/EKW/II/23

Halaman - 2 -

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 7 September 2023 sampai dengan 6 Maret 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya adalah sebesar Rp93.750.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan Akta No. 110/2022 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 5% (lima persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak-banyaknya sebesar 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham untuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (Employee Stock Allocation atau “**ESA**”).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“**UUPT**”). Saham Yang Ditawarkan merupakan saham dalam portepel yang dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain, kecuali dalam Penawaran Umum Perdana ini. Seluruh saham Perseroan termasuk Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) di mana Perseroan telah mendapatkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas berdasarkan Surat No. S-00672/BEI.PP3/01-2023 tertanggal 18 Januari 2023.

Penawaran Umum Perdana ini akan dijamin oleh **PT Surya Fajar Sekuritas** selaku Penjamin Emisi Efek berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk Nomor 13 tertanggal 6 Oktober 2022, sebagaimana telah diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 39 tertanggal 11 November 2022, (ii) Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 46 tertanggal 20 Januari 2023, dan (iii) Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 41 tertanggal 20 Februari 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta PPEE**”). Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Surya Fajar Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek.

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 30% akan digunakan untuk belanja modal Perseroan dalam bentuk penambahan area operasional yang berlokasi di Jawa Barat. Perseroan juga akan melakukan pengembangan sistem yang sejalan dengan ekspansi Perseroan yang akan dimulai secara bertahap dari kuartal 2 tahun 2023. Transaksi perluasan area operasional direncanakan akan dilakukan dengan pihak ketiga

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

No. Ref.: 341/EKW/II/23

Halaman - 3 -

pada kuartal dua tahun 2023, sedangkan penambahan dan pengembangan sistem akan dilakukan dengan pihak ketiga pada kuartal tiga tahun 2023.

2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja yang terdiri dari biaya operasional proyek pekerjaan pengembangan *smart city* dan *business solution provider* dalam aspek transportasi di berbagai kota di Indonesia, biaya tenaga kerja dan pembelian bahan baku produk serta pengembangan segmen distribusi penjualan produk dan layanan melalui jalur *Business-to-Business* (B2B) dan *Business-to-consumer* (B2C) serta digunakan untuk pengembangan lini usaha *Business Process Outsourcing* (BPO) merupakan usaha penyediaan infrastruktur teknologi informasi kepada operator transportasi yang memiliki hak operasi di suatu kota.

Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan Waran Seri I, dalam hal transaksi yang dilakukan: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan wajib menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari sumber lainnya seperti pinjaman kepada pemegang saham, pinjaman bank dan institusi keuangan lainnya.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan, yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 110 tertanggal 28 September 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Nurhayati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070056.AH.02.03.TAHUN 2022 tertanggal 28 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0193465.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 September 2022; (ii) diberitahukan kepada Menkumham (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan (a) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0296270 tertanggal 28 September 2022, dan (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0059742 tanggal 28 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

No. Ref.: 341/EKW/II/23

Halaman - 4 -

0193465.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 September 2022 (“**Akta No. 110/2022**”) yang antara lain memuat persetujuan sehubungan dengan:

- a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- b. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:
 - i. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk.
 - ii. pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham baru yang mewakili 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;

Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu memberi saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut;

- iii. Penerbitan Waran Seri I Perseroan, sebanyak-banyaknya 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) yang merupakan sekitar 17,05% (tujuh belas koma nol lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjataan;
- iv. Memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation*), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- v. pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI;
- vi. perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

No. Ref.: 341/EKW/II/23

Halaman - 5 -

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**"); dan

- vii. perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum.
- c. Menyetujui untuk Perseroan melakukan peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) menjadi Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) sehingga mengubah bunyi Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Perseroan.

Persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat di dalam Akta No. 110/2022 di atas tidak secara spesifik menyetujui pendaftaran Efek bersifat ekuitasnya pada penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, namun persetujuan tersebut sudah tercakup dalam persetujuan pada butir V Akta No. 110/2022, yaitu untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan guna tercapainya aksi korporasi Perseroan di atas, termasuk pencatatan atas saham-saham Perseroan dan penawaran umum melalui pasar modal.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, kami telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang kami terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan dan Entitas Asosiasi terkait rencana Penawaran Umum Perdana Saham, yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam laporan uji tuntas atas aspek hukum sebagaimana tercantum di dalam Laporan Uji Tuntas No. Ref: 340/EKW/II/23 tanggal 27 Februari 2023 yang kami lakukan atas Perseroan hingga tanggal Pendapat Segi Hukum ini diterbitkan dan merupakan satu kesatuan dengan Pendapat Segi Hukum ini ("**Laporan Uji Tuntas**"). Pendapat Segi Hukum ini, menggantikan Pendapat Segi Hukum No. Ref: 290/EKW/II/23 tertanggal 20 Februari 2023, yang pernah kami terbitkan sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Perseroan tidak memiliki entitas anak. Dalam Pendapat Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Entitas Asosiasi**" berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dalam hal ini adalah PT Digital Karyaloka Nusantara, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan presentase kepemilikan Perseroan sebesar 25% (dua puluh lima persen) ("**DKN**").

Pendapat Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM.

I. BATASAN - BATASAN

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan tidak mengacu pada hukum lainnya.
2. Ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada hal-hal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pasar modal.
3. Dalam rangka pembuatan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada dokumen-dokumen dan keterangan yang kami terima dari Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini; dan

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

No. Ref.: 341/EKW/II/23

Halaman - 6 -

4. Sehubungan dengan pendapat hukum kami, secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, penjaminan dan perjanjian-perjanjian yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas dimana, izin-izin, harta kekayaan, penjaminan dan perjanjian-perjanjian yang kami opinikan tersebut berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.

II. ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, lengkap dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
2. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan sebenarnya;
3. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau Entitas Asosiasi, Direksi, Komisaris Perseroan/Entitas Asosiasi dan/atau pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material dan tambahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum ini;
4. Surat-surat pernyataan Perseroan dan Entitas Asosiasi yang telah kami terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan dan Entitas Asosiasi, adalah benar, akurat, dan sesuai dengan yang sebenarnya;
5. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan dan/atau Entitas Asosiasi atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinan untuk kebutuhan Perseroan dan/atau Entitas Asosiasi, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut dan kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar;
6. Pendapat Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang merupakan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
7. Dalam memberikan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan terkait lainnya di dalam wilayah Hukum Republik Indonesia; dan
8. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

No. Ref.: 341/EKW/II/23

Halaman - 7 -

III. PENDAPAT SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan pembatasan dan asumsi-asumsi yang diuraikan di atas, dengan ini kami memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

A. RENCANA PENAWARAN UMUM PERDANA PERSEROAN

Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

1. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan, yang telah dituangkan dalam Akta No. 110/2022 yang antara lain memuat persetujuan sehubungan dengan:
 - a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
 - b. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:
 - i. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk;
 - ii. pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham baru yang mewakili 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;

Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu memberi saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut;
 - iii. Penerbitan Waran Seri I Perseroan, sebanyak-banyaknya 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) yang merupakan sekitar 17,05% (tujuh belas koma nol lima persen) dari total

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

No. Ref.: 341/EKW/II/23

Halaman - 8 -

jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan;

- iv. Memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation*), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - v. pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI;
 - vi. perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar;
 - vii. perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum.
- c. Menyetujui untuk Perseroan melakukan peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) menjadi Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) sehingga mengubah bunyi Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Perseroan.

Jumlah saham dan waran yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham telah sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh para pemegang Perseroan berdasarkan Akta No. 110/2022.

2. Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan sebagai berikut:
 - a. Sekitar 30% akan digunakan untuk belanja modal Perseroan dalam bentuk penambahan area operasional yang berlokasi di Jawa Barat. Perseroan juga akan melakukan pengembangan sistem yang sejalan dengan ekspansi Perseroan yang akan dimulai secara bertahap dari kuartal 2 tahun 2023. Transaksi perluasan area operasional direncanakan akan dilakukan dengan pihak ketiga pada kuartal dua tahun 2023, sedangkan penambahan dan pengembangan sistem akan dilakukan dengan pihak ketiga pada kuartal tiga tahun 2023.
 - b. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja yang terdiri dari biaya operasional proyek pekerjaan pengembangan *smart city* dan *business solution provider* dalam aspek transportasi di berbagai kota di Indonesia,

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

No. Ref.: 341/EKW/II/23

Halaman - 9 -

biaya tenaga kerja dan pembelian bahan baku produk serta pengembangan segmen distribusi penjualan produk dan layanan melalui jalur *Business-to-Business* (B2B) dan *Business-to-consumer* (B2C) serta digunakan untuk pengembangan lini usaha *Business Process Outsourcing* (BPO) merupakan usaha penyediaan infrastruktur teknologi informasi kepada operator transportasi yang memiliki hak operasi di suatu kota.

Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal transaksi yang dilakukan: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada POJK No. 30/2015. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan wajib menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari sumber lainnya seperti pinjaman kepada pemegang saham, pinjaman bank dan institusi keuangan lainnya.

3. Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**POJK No. 25/2017**"), setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

No. Ref.: 341/EKW/II/23

Halaman - 10 -

Dalam hal ini tidak terdapat pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 25/2017.

4. Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan pernyataan sebagai berikut:

- a. Akta PPEE;
- b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 14 tertanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dengan (i) Addendum Pertama Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 47 tertanggal 20 Januari 2023, dan (ii) Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 42 tertanggal 20 Februari 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
- c. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 16 tertanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dengan (i) Addendum Pertama Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 49 tertanggal 20 Januari 2023, dan (ii) Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 44 tertanggal 20 Februari 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
- d. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 15 tertanggal 6 Oktober 2022, sebagaimana telah diubah dengan (i) Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 40 tertanggal 11 November 2022, (ii) Addendum Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 62 tertanggal 15 Desember 2022, (iii) Addendum Ketiga Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 48 tertanggal 20 Januari 2023, dan (iv) Addendum Keempat Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 43 tertanggal 20 Februari 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; dan
- e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-102/SHM/KSEI/0922 tanggal 6 Oktober 2022.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap perjanjian-perjanjian dan pernyataan tersebut, perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas telah sah, mengikat dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perjanjian PPEE yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam (i) POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik; dan (ii) Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

No. Ref.: 341/EKW/II/23

Halaman - 11 -

B. PERSEROAN

1. Perseroan telah sah didirikan sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**Perppu CK**") ("**UUPT**") dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia **kecuali** atas pengumuman Akta Pendirian No. 25 tertanggal 7 Januari 2011 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 74 tertanggal 16 Maret 2011 yang keduanya dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-19005.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 15 April 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030326.AH.01.09.Tahun 2011 tertanggal 15 April 2011 ("**Akta Pendirian Perseroan**") tersebut dalam BNRI dan Tambahan BNRI.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUPT kewajiban pengumuman dalam Tambahan BNRI merupakan kewajiban Menkumham yang dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya persetujuan Menkumham atas akta sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu, tidak ada sanksi yang berlaku bagi Perseroan dengan ketiadaan atau keterlambatan pengumuman pada BNRI dan TBNRI tersebut kecuali atas konsekuensi tidak terpenuhinya asas publisitas yang dimanifestasikan melalui pengumuman BNRI dan TBNRI.

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta No. 110/2022 yang untuk selanjutnya disebut ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Akta Pendirian Perseroan beserta seluruh perubahannya termasuk Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 110/2022, telah sesuai dengan: (i) Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BI/2008, Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), (ii) UUPT, (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), dan (v) peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya **kecuali** atas pengumuman Akta No. 110/2022 tersebut dalam BNRI dan Tambahan BNRI.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUPT kewajiban pengumuman dalam Tambahan BNRI merupakan kewajiban Menkumham yang dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya persetujuan Menkumham atas akta sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu, tidak ada sanksi yang berlaku bagi Perseroan dengan ketiadaan atau keterlambatan pengumuman pada BNRI dan TBNRI tersebut kecuali atas konsekuensi tidak terpenuhinya asas publisitas yang dimanifestasikan melalui pengumuman BNRI dan TBNRI.

2. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, pengungkapan maksud dan kegiatan usaha Perseroan dalam Akta No. 110/2022, telah (i) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") Tahun 2020, dan (ii) memuat substansi sesuai dengan Peraturan No.

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

No. Ref.: 341/EKW/II/23

Halaman - 12 -

IX.J.1, dan (iii) peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya.

Kegiatan usaha yang saat ini sudah dijalankan oleh Perseroan, sudah dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

3. Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sesuai dan peralihan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **kecuali** sehubungan dengan:

- a. **terlampauinya batas waktu penyeteroran modal pada saat pendirian yang baru dilakukan pada tahun 2020;**

Kami mencatat bahwa penyeteroran modal saat pendirian Perseroan baru dilakukan pada tahun 2020.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas ("PP No. 29/2016"), sebagai peraturan yang berlaku pada saat setoran pendirian Perseroan pertama kali dilakukan, modal dasar suatu perseroan harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah dan bukti setor tersebut wajib disampaikan secara elektronik kepada Menkumham dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian perseroan terbatas ditandatangani. Meskipun UUPT maupun PP No. 29/2016 tidak mengatur terkait sanksi terlampauinya batas waktu penyeteroran modal pada saat pendirian sebagaimana dimaksud di atas, terdapat risiko adanya teguran dan/atau gugatan, baik dari instansi maupun pihak ketiga manapun terkait dengan keabsahan kepemilikan saham pemegang saham perseroan terkait.

Namun demikian, berdasarkan Keputusan Sirkuler tertanggal 26 September 2022, penyeteroran modal Perseroan sejak pendirian sampai dengan peningkatan modal yang dilakukan pada tahun 2020 telah dilakukan seluruhnya oleh para pemegang saham pada tahun 2020, dan Perseroan tidak pernah menerima teguran dan/atau gugatan, baik dari instansi maupun pihak ketiga manapun terkait dengan keabsahan kepemilikan saham pemegang saham dalam Perseroan sejak pendirian sampai dengan tahun 2020.

Lebih lanjut, sehubungan dengan pengalihan saham yang dilakukan sejak tahun didirikannya Perseroan hingga tahun 2020, dengan telah dilakukannya pengalihan saham melalui akta jual beli saham, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta di bawah tangan, serta dengan telah dicatatkannya perubahan-perubahan pemegang saham sejak pendirian hingga tahun 2020 pada daftar perseroan oleh Menkumham, maka pengalihan saham telah sah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

No. Ref.: 341/EKW/II/23

Halaman - 13 -

- b. **belum dilakukannya pengumuman sebelum dan pasca pengambilalihan yang sebagaimana tertuang dalam Akta No. 16/2020, Akta No. 5/2020, dan Akta No. 154/2020 yang mana merupakan kewajiban berdasarkan Pasal 127 ayat (2) dan Pasal 133 UUPT; dan**

Terkait dengan belum dilakukannya pengumuman sebelum pengambilalihan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 16/2020, Akta No. 5/2020, dan Akta No. 154/2020 yang mana merupakan kewajiban berdasarkan Pasal 127 (2) UUPT, yang mengatur bahwa Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Terkait dengan belum dilakukannya pengumuman pasca pengambilalihan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 16/2020, Akta No. 5/2020, dan Akta No. 154/2020 yang mana merupakan kewajiban berdasarkan Pasal 133 UUPT, yang mengatur sebagai berikut:

- a. Direksi perseroan yang menerima penggabungan atau direksi perseroan hasil peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan atau peleburan.
- b. Ketentuan di atas berlaku juga terhadap direksi dari perseroan yang sahamnya diambil alih.

Lebih lanjut, pengertian dari surat kabar menurut Pasal 1 angka 14 UUPT adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

Namun demikian, UUPT tidak mengatur lebih lanjut terkait akibat dari tidak diumumkannya pengambilalihan ke dalam surat kabar. Adapun konsekuensi dari tidak dilakukannya pengumuman sebelum pelaksanaan pengambilalihan adalah kemungkinan adanya gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap pengambilalihan tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat gugatan-gugatan dan/atau keberatan dari kreditur, karyawan dan/atau pihak ketiga mana pun terkait pengambilalihan saham sebagaimana terdapat dalam Akta No. 16/2020, Akta No. 5/2020, dan Akta No. 154/2020.

- c. **belum disisihkannya cadangan wajib sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.**

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan tertanggal 21

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

No. Ref.: 341/EKW/II/23

Halaman - 14 -

September 2022 (“**Keputusan Sirkuler RUPST 2022**”), Perseroan telah melakukan penyisihan cadangan wajib untuk memenuhi persyaratan Pasal 70 ayat (1) UUPT, sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) atau setara dengan 2,27% (dua koma dua tujuh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan saat ini.

Penyisihan cadangan wajib sebagaimana dimaksud di atas belum memenuhi ketentuan penyisihan cadangan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) UUPT. Namun demikian, UUPT tidak mengatur terkait dengan jangka waktu pasti terkait waktu harus dipenuhinya angsuran cadangan wajib sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor. Lebih lanjut, UUPT tidak mengatur adanya sanksi ataupun konsekuensi atas belum disisihkannya cadangan wajib sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Sirkuler tertanggal 29 Oktober 2022, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi persyaratan Pasal 70 ayat (1) UUPT penyisihan cadangan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.

4. Sehubungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, (i) susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014 baik pada saat pengangkatan maupun selama menjabat, (ii) berdasarkan pemeriksaan yang diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, selama menjabat masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan yang melanggar ketentuan dalam POJK No. 33/2014, dan (iii) pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT.

Keberadaan Komisaris Independen dalam susunan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014, dimana dalam hal lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Lebih lanjut, pengangkatan Ir. Resdiansyah selaku Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) POJK No. 33/2014.

5. **Sekretaris Perusahaan**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No109/TKDN/IX/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tertanggal 28 September 2022, Perseroan telah mengangkat Wendy Jolanda Waas sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

No. Ref.: 341/EKW/II/23

Halaman - 15 -

6. Unit Audit Internal

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan dan penetapan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

7. Komite Audit Perseroan

Pembentukan Komite Audit telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

8. Komite Nominasi dan Remunerasi

Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

9. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang telah dijalankan sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan menjalankan kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum, **kecuali** sehubungan dengan:

a. Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

Sertifikat Standar Perseroan No. 02201061434180006 diterbitkan tanggal 3 Agustus 2022 belum terverifikasi.

Merujuk pada Pasal 14 ayat (4) dan (5) *juncto* Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“**PP No. 5/2021**”), Sertifikat Standar yang belum terverifikasi merupakan dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha yang mana terbatas pada kegiatan (i) pengadaan tanah; (ii) pembangunan bangunan gedung; (iii) pengadaan peralatan atau sarana; (iv) pengadaan sumber daya manusia; (v) pemenuhan standar usaha; dan/atau (vi) kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial.

Lebih lanjut, Pasal 17 PP No. 5/2021 mengatur bahwa Sertifikat Standar yang telah terverifikasi merupakan dasar bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan sebagaimana diperkuat oleh konfirmasi Perseroan, Perseroan mengkonfirmasi bahwa Perseroan sedang dalam proses pengurusan Sertifikat Standar yang terverifikasi yang saat ini sedang dalam tahap verifikasi persyaratan pada dinas terkait, sebagaimana dibuktikan pada tangkapan layar sistem OSS yang diakses pada tanggal 27 Februari 2023.

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

No. Ref.: 341/EKW/II/23

Halaman - 16 -

b. Belum dipenuhinya persyaratan sebagaimana tercantum dalam masing Masing Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (“TDPSE”) milik Perseroan

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan sedang dalam proses untuk memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam masing-masing TDPSE.

Merujuk pada Pasal 1 angka 14 *juncto* Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP No. 71/2019”), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib untuk wajib melaksanakan prinsip perlindungan Data Pribadi dan melakukan uji kelaikan terhadap sistem elektronik, yang mana uji kelaikan tersebut dapat dilakukan secara mandiri dan/atau institusi yang berwenang dan kompeten.

Selanjutnya, Pasal 100 ayat (1) PP No. 71/2019 mengatur bahwa pelanggaran terhadap Pasal 34 ayat (1) PP No. 71/2019 dapat dikenakan sanksi administratif yang dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara;
- d. pemutusan Akses; dan/atau
- e. dikeluarkan dari daftar.

Lebih lanjut, Berdasarkan konfirmasi Perseroan, Perseroan masih dalam proses untuk melakukan pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam masing-masing TDPSE Perseroan. Hal tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Pembayaran Uji Kelaikan Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO/IEC 27001:2013 tertanggal 17 Januari 2023. Lebih lanjut, berdasarkan Timeline Konsultasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO/IEC 27001:2013 yang diterbitkan oleh Kualita Konsultan, Perseroan telah melewati tahapan pengumpulan informasi sebagai salah satu tahapan dalam pelaksanaan Uji Kelaikan Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO/IEC 27001:2013 tersebut, yang mana kemudian akan dilanjutkan dengan sosialisasi dokumen manual, prosedur, instruksi kerja dan formulir terkait Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO/IEC 27001:2013.

10. Sehubungan dengan harta kekayaan berupa (i) Harta Berwujud, (ii) Harta Tidak Berwujud, dan (iii) Hak Kekayaan Intelektual Perseroan, yang material yang digunakan dan dimiliki oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya (“**Aset Material Perseroan**”), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

- a. Kepemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas Aset Material Perseroan adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan, sepanjang pengetahuan Perseroan, Aset Material Perseroan bukan merupakan objek sengketa; dan

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

No. Ref.: 341/EKW/II/23

Halaman - 17 -

- c. Aset Material yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan tidak sedang dijaminkan kepada kreditur Perseroan guna kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditur Perseroan atau kepada pihak ketiga, **kecuali** atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Agung Barat 4-B Blok B-1A No. 34, 35, dan 36, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 16701/Sunter Agung seluas 353 m², yang dijaminkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan:
- (i) Addendum Novasi Perjanjian Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (W/A) Plafond Interchangable dengan Bank Garansi Plafond No. 64 tertanggal 24 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Dr. Abraham Yazdi Martin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah oleh (a) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (W/A) Plafond No. 84 tertanggal 28 November 2022; (b) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 18, tanggal 26 Januari 2023, dan (c) Addendum Perjanjian Kredit No. 32 tertanggal 15 Februari 2023, yang ketiganya dibuat di hadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat; dan
 - (ii) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 16 tertanggal 26 Januari 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 31 tertanggal 15 Februari 2023, yang keduanya dibuat di hadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat,

yang mana hingga tanggal Pendapat Segi Hukum ini Perseroan masih dalam proses untuk melakukan balik nama atas tanah tersebut menjadi nama Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Notaris Githa Nadya Maridina, S.H., No. 11/GNM-I/2023 tertanggal 26 Januari 2023.

11. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Entitas Asosiasi sebesar 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) atau setara dengan 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan, penyertaan saham Perseroan pada Entitas Asosiasi telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Kemudian, berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan, yang diperkuat dengan konfirmasi Perseroan, penyertaan saham yang dimiliki Perseroan dalam Entitas Asosiasi tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada kreditur Perseroan guna kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditur Perseroan atau kepada pihak ketiga.

12. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban asuransi atas Aset Material Perseroan, Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
- a. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan, Aset Material Perseroan telah diasuransikan dengan

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

No. Ref.: 341/EKW/II/23

Halaman - 18 -

jumlah pertanggungan yang sudah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan dan menutup risiko yang dipertanggungjawabkan sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian kredit dan/atau pinjaman yang dimiliki Perseroan.

- b. Polis-polis asuransi sehubungan dengan pengasuransian atas Aset Material Perseroan tersebut masih berlaku.
13. Sehubungan dengan (i) perjanjian-perjanjian material Perseroan dengan Pihak Ketiga ("**Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan**"), dan (ii) perjanjian-perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi yang dianggap penting ("**Perjanjian Afiliasi Perseroan**");

(Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan, dan Perjanjian Afiliasi Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Perseroan**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

- a. Perjanjian Perseroan telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya Perjanjian Perseroan sah dan mengikat Perseroan;
- b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan, sepanjang pengetahuan Perseroan, Perseroan sedang tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya yang mengakibatkan Perseroan dalam keadaan wanprestasi dan dinyatakan cidera janji pula dengan perjanjian lainnya (*cross default*);
- c. Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam (i) Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan dan (ii) Perjanjian Afiliasi Perseroan yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (termasuk kewajiban Perseroan untuk mendapatkan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan terkait dengan rancangan Penawaran Umum Perdana Saham), menghalangi realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.
- d. Berdasarkan pemeriksaan hukum kami dan konfirmasi dari Perseroan, Perjanjian Afiliasi Perseroan telah dilakukan oleh Perseroan secara wajar (*arm's length basis*); dan
- e. Perjanjian Afiliasi Perseroan telah diungkapkan di dalam Prospektus Penawaran Perdana Perseroan, sehingga kewajiban terkait Perjanjian Afiliasi berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 menjadi tidak perlu dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d POJK No. 42/2020.
14. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan dan masing-masing Unit Bisnisnya telah memenuhi kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan, antara lain pemenuhan kewajiban atas, Peraturan Perusahaan, upah minimum, Wajib Laporan Ketenagakerjaan dan keikutsertaan Perseroan dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**") dan Badan

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

No. Ref.: 341/EKW/II/23

Halaman - 19 -

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (“**BPJS Ketenagakerjaan**”).

15. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap (i) Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan terkait keterangan bebas perkara tertanggal 20 Januari 2023 dan (ii) surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
 - a. Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik pidana, perdata, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, persaingan usaha, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Bahwa Perseroan juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri yang berdampak material serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dananya.
 - b. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik perkara pidana, perdata, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, persaingan usaha, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apa pun klaim dari pihak mana pun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apa pun di luar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang bersifat material dan rencana penggunaan dananya.

C. ENTITAS ASOSIASI

1. DKN telah sah didirikan sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian No. 32 tertanggal 28 September 2021 yang dibuat di hadapan Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0066696.AH.01.01.TAHUN 2021 tertanggal 22 Oktober 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0183991.AH.01.11. Tahun 2021

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

No. Ref.: 341/EKW/II/23

Halaman - 20 -

tertanggal 22 Oktober 2021 serta diumumkan dalam BNRI No. 14 tertanggal 18 Februari 2022 serta TBNRI No. 006564 tertanggal 18 Februari 2022 (“**Akta Pendirian DKN**”) telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 18 tertanggal 5 April 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0024426.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 5 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Data Perseroan No. AHU-0067233.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 5 April 2022; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0001458 tertanggal 5 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067233.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 5 April 2022 (“**Akta DKN No. 18/2022**”) yang untuk selanjutnya disebut (“**Anggaran Dasar DKN**”).

Anggaran Dasar DKN sebagaimana termaktub Akta DKN No. 18/2022, telah sesuai dengan UUPT, **kecuali** atas pengumuman Akta DKN No. 18/2022 tersebut dalam BNRI dan Tambahan BNRI.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUPT kewajiban pengumuman dalam Tambahan BNRI merupakan kewajiban Menkumham yang dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya persetujuan Menkumham atas akta sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu, tidak ada sanksi yang berlaku bagi Perseroan dengan ketiadaan atau keterlambatan pengumuman pada BNRI dan TBNRI tersebut kecuali atas konsekuensi tidak terpenuhinya asas publisitas yang dimanifestasikan melalui pengumuman BNRI dan TBNRI.

2. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap DKN, pengungkapan maksud dan kegiatan usaha DKN dalam Akta DKN No. 18/2022, telah sesuai dengan KBLI Tahun 2020.
3. Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sesuai dan peralihan kepemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **kecuali** sehubungan dengan:

a. **terlampauinya batas waktu penyeteroran modal pada saat pendirian yang baru dilakukan pada tahun 2022;**

Kami mencatat bahwa penyeteroran modal saat pendirian Perseroan baru dilakukan pada tanggal 26 Juli 2022 dan melewati tanggal pendirian yakni 28 September 2021.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (“**PP No. 8/2021**”), sebagai peraturan yang berlaku pada saat setoran pendirian DKN pertama kali dilakukan, modal dasar suatu perseroan harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah dan bukti setor tersebut wajib disampaikan secara elektronik kepada Menkumham dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian perseroan terbatas ditandatangani. Meskipun UUPT

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

No. Ref.: 341/EKW/II/23

Halaman - 21 -

maupun PP No. 8/2021 tidak mengatur terkait sanksi terlampauinya batas waktu penyeteroran modal pada saat pendirian sebagaimana dimaksud di atas, terdapat resiko adanya teguran dan/atau gugatan, baik dari instansi maupun pihak ketiga manapun terkait dengan keabsahan kepemilikan saham pemegang saham perseroan terkait.

Namun demikian, DKN tidak pernah menerima teguran dan/atau gugatan, baik dari instansi maupun pihak ketiga manapun terkait dengan keabsahan kepemilikan saham pemegang saham dalam DKN pada Akta Pendirian DKN.

Lebih lanjut, sehubungan dengan pengalihan saham yang dilakukan sejak tahun didirikannya DKN hingga tahun 2022, dengan telah dilakukannya pengalihan saham melalui akta jual beli saham, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta di bawah tangan, serta dengan telah dicatatkannya perubahan-perubahan pemegang saham sejak pendirian hingga tahun 2022 pada daftar perseroan oleh Menkumham, maka pengalihan saham telah sah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. **belum dilakukannya pengumuman pasca pengambilalihan yang sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 110 tertanggal 29 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0038557 tertanggal 29 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147312.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 29 Juli 2022 ("Akta DKN No. 110/2022") yang mana merupakan kewajiban berdasarkan Pasal 133 UUPT;**

Terkait dengan belum dilakukannya pengumuman pasca pengambilalihan sebagaimana tertuang dalam Akta DKN No. 110/2022 yang mana merupakan kewajiban berdasarkan Pasal 133 UUPT, yang mengatur sebagai berikut:

- a. Direksi perseroan yang menerima penggabungan atau direksi perseroan hasil peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan atau peleburan.
- b. Ketentuan di atas berlaku juga terhadap direksi dari perseroan yang sahamnya diambil alih.

Lebih lanjut, pengertian dari surat kabar menurut Pasal 1 angka 14 UUPT adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

Namun demikian, UUPT tidak mengatur lebih lanjut terkait akibat dari tidak diumumkannya pengambilalihan ke dalam surat kabar.

Sehubungan dengan hal di atas, berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat gugatan-gugatan dan/atau keberatan dari kreditur, karyawan dan/atau pihak ketiga

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

No. Ref.: 341/EKW/II/23

Halaman - 22 -

mana pun terkait pengambilalihan saham sebagaimana terdapat dalam Akta DKN No. 110/2022.

c. **belum disisihkannya cadangan wajib sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor DKN.**

DKN belum melakukan pencadangan wajib DKN sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 70 UUPT. Hal tersebut dikarenakan DKN belum memiliki laba positif sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor saat ini.

Pasal 70 ayat (1) ayat (3) UUPT, mengatur bahwa suatu perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk menjadi cadangan sampai dengan cadangan wajib tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor. Namun demikian, UUPT tidak mengatur terkait dengan jangka waktu pasti terkait waktu harus dipenuhinya angsuran cadangan wajib sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor. Lebih lanjut, UUPT tidak mengatur adanya sanksi ataupun konsekuensi atas belum disisihkannya cadangan wajib sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT.

4. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT.
5. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang telah dijalankan sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan masing-masing unit bisnisnya dan menjalankan kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum, kecuali sehubungan dengan:

a. **Izin Penyedia Jasa Pembayaran**

Berdasarkan pemeriksaan hukum kami sebagaimana diperkuat oleh konfirmasi DKN, DKN masih dalam tahap pengajuan izin sebagai Penyedia Jasa Pembayaran ("PJP") di Bank Indonesia ("BI") dan sedang mengajukan *Penetration Test* sebelum melanjutkan untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan BI. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan BI No. 23/6/PBI/2021 tentang PJP ("PBI No. 23/2021"), setiap pihak yang bertindak sebagai PJP harus memperoleh izin dari Bank Indonesia.

DKN belum menjalankan kegiatan sebagai PJP dikarenakan masih dalam proses permohonan perizinan. Namun, apabila DKN terdapat menjalankan kegiatan sebagai PJP selama masih dalam proses perizinan, maka berdasarkan Pasal 163 ayat (1) jo. Pasal 179 ayat (1) PBI No. 23/2021, DKN dapat dikenakan sanksi berupa:

- i. teguran; atau

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

No. Ref.: 341/EKW/II/23

Halaman - 23 -

- ii. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama.

b. Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik

DKN masih dalam tahap pengajuan pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik ("**PSE**") di Kementerian Komunikasi dan Informatika ("**Kominfo**").

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kominfo ("**Permenkominfo**") No. 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat sebagaimana diubah dengan Permenkominfo No. 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat ("**Permenkominfo No. 5/2020**"), setiap PSE Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran.

Apabila PSE Lingkup Privat tidak melakukan pendaftaran untuk sistem elektronik miliknya, maka Menteri Kominfo dapat memberikan sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik (access blocking) sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Permenkominfo No. 5/2020.

Berdasarkan pemeriksaan hukum kami dan konfirmasi DKN, hingga Tanggal Pendapat Hukum ini, sistem elektronik DKN masih dalam proses pengembangan dan belum beroperasi.

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

No. Ref.: 341/EKW/II/23

Halaman - 24 -

Demikian Pendapat Segi Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Segi Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Untuk dan atas nama

Hanafiah Ponggawa & Partners



Erwin K. Winenda, S.H., M.B.A.

STTD No. STTD.KH-97/PM.2/2018

HKHPM No. 201313



XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk

**LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 JULI 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
*FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIODS ENDED
JULY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
AND
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

**PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2022
DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

***PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIODS
ENDED JULY 31, 2022
AND 2021 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

	<u>Halaman/ Pages</u>	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit) dan untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019		<i>Financial Statements for the Seven-Month Periods Ended July 31, 2022 and 2021 (Unaudited) and for the Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019</i>
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	1 – 3	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	4 – 5	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	6 – 7	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	8 – 9	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	10 – 119	<i>Notes to the Financial Statements</i>



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2022
(DENGAN ANGKA KOMPARATIF UNTUK
PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 JULI 2021) DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD
ENDED JULY 31, 2022
(WITH COMPARATIVE FIGURES
FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD
ENDED JULY 31, 2021)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : David Santoso
Alamat Kantor : Mini Office Central 88 Blok
G1 No. 826, Jl Trembesi
Pademangan Timur,
Pademangan, Jakarta Utara
No. Telepon : 021-65867225
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Rudy Budiman Setiawan
Alamat Kantor : Mini Office Central 88 Blok
G1 No. 826, Jl Trembesi
Pademangan Timur,
Pademangan, Jakarta Utara
No. Telepon : 021-65867225
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (Entitas).
2. Laporan keuangan Entitas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Entitas telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan Entitas tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Entitas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned:

Name : David Santoso
Office address : Mini Office Central 88 Blok
G1 No. 826, Jl Trembesi
Pademangan Timur,
Pademangan, Jakarta Utara
Phone Number : 021-65867225
Position : President Director

Name : Rudy Budiman Setiawan
Office address : Mini Office Central 88 Blok
G1 No. 826, Jl Trembesi
Pademangan Timur,
Pademangan, Jakarta Utara
Phone Number : 021-65867225
Position : Director

State that:

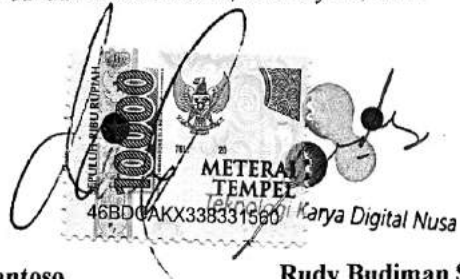
1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (The Entity).
2. The financial statements of the Entity have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information contained in the financial statements of the Entity are complete and correct.
b. The financial statements of the Entity do not contain misleading material information or facts and do not omit material information or facts.
4. We are responsible for the internal control system of the Entity.

This statement letter is made truthfully.



Teknologi Karya Digital Nusa

Jakarta, 25 Januari 2023/Jakarta, January 25, 2023



David Santoso
Direktur Utama/President Director

Rudy Budiman Setiawan
Direktur/Director

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00007/3.0428/AU.1/05/1725-2/1/I/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (Entitas) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas hal tersebut, dan kami tidak memberikan opini terpisah atas hal audit utama.

www.hlbindonesia.id

Certified Public Accountants, License Number: KEP-476/KM.1/2020

World Capital Tower 12th Floor, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot D, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950-Indonesia

Tel: +62 21 50917957 Fax: +62 21 50917955 EMAIL: info@hlbindonesia.id

HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan is an independent member of HLB the global advisory and accounting network

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report No. 00007/3.0428/AU.1/05/1725-2/1/I/2023

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors
PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

Report on the Audits of the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (the Entity), which comprise the statements of financial position as of July 31, 2022 and December 31, 2021, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the seven month period ended July 31, 2022 and for the year ended December 31, 2021, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Entity as of July 31, 2022 and December 31, 2021 and its financial performance and cash flows for the seven-month period ended July 31, 2022 and for the year ended December 31, 2021, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Entity in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audits of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.



Pengakuan dan Pengukuran Aset Takberwujud

Sehubungan untuk menghasilkan pendapatan dari kegiatan usaha utamanya Entitas membeli perangkat lunak. Oleh karena itu, pengakuan dan pengukuran terhadap saldo perangkat lunak tersebut adalah signifikan bagi audit kami. Area yang menjadi perhatian utama kami meliputi: kebijakan kapitalisasi harga perolehan aset, kebijakan penentuan umur ekonomis aset takberwujud, dan penentuan nilai wajar aset untuk menentukan apakah diperlukan penyesuaian penurunan nilai.

Bagaimana hal tersebut ditangani dalam audit kami

Prosedur audit kami untuk mengatasi risiko salah saji material yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran aset takberwujud, yang dianggap sebagai risiko signifikan, meliputi:

- memverifikasi rincian pembelian dengan faktur pembelian dan kontrak;
- memeriksa bahwa pengeluaran telah dikapitalisasi dengan benar dan konsisten sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku sesuai dengan PSAK No. 19, mengenai "Aset Takberwujud";
- memastikan bahwa perpajakan atas perolehan aset takberwujud sudah diakui dan dilaporkan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku;
- menentukan apakah estimasi masa manfaat aset takberwujud adalah wajar dan mencerminkan penggunaan dan pola yang diharapkan dari manfaat ekonomi masa depan yang akan diperoleh;
- reviu pengukuran kewajaran aset takberwujud dan konsistensi dengan tahun-tahun sebelumnya;
- memperoleh laporan penilaian atas nilai wajar aset takberwujud yang disiapkan oleh penilai independen dan menelaah kewajaran asumsi dan metodologi yang digunakan; dan
- menilai apakah terdapat indikator penurunan nilai dengan membandingkan nilai buku dan jumlah terpulihkan dari aset takberwujud.

Pengakuan Pendapatan

Entitas mengakui pendapatannya sebagai berikut:

- Pendapatan dari kontrak atas penyediaan jasa diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian berdasarkan kontrak.
- Pendapatan dari penjualan produk diakui pada saat penguasaan aset dialihkan kepada pelanggan, biasanya pada saat penyerahan barang. Entitas telah menyimpulkan bahwa itu adalah prinsipal dalam pengaturan pendapatannya karena ia mengendalikan barang sebelum mengalihkannya ke pelanggan.

Recognition and Measurement of Intangible Assets

In order to generate income from its main business activities, the Entity purchased software. Therefore, the recognition and measurement of the software balance is significant to our audit. Our key areas of concern include: capitalization policy of intangible assets, policy on determining the economic life of the intangible assets, and determining whether there are indicators of impairment on the intangible assets.

How the matter was addressed in our audit

Our audit procedures to address the risk of material misstatement relating to the recognition and measurement of intangible assets, which was considered to be a significant risk, included:

- *verifying the details of purchases with purchases' invoices and contracts;*
- *checking that the expenditures had been properly and consistently capitalized in accordance with the applied accounting policies which conform with PSAK No. 19 regarding, "Intangible Assets";*
- *ensuring that the taxation on the acquisition of intangible assets had been recognized and reported in accordance with the applicable tax regulations;*
- *determining whether the estimated useful lives of the intangible assets are reasonable and reflect the expected usage and pattern in which future economic benefits will be consumed;*
- *reviewing the measurement of intangible assets for reasonableness and consistency with previous years;*
- *obtaining appraisal report for the fair value of intangible assets prepared by an independent appraiser and reviewed the reasonableness of the assumptions and methodology used; and*
- *assessing whether there are indicators of impairment by comparing the book value and recoverable amount of the intangible assets.*

Revenue Recognition

The Entity recognizes revenues as follows:

- *Revenue from contract to provide services is recognized by reference to the percentage of completion of the contract.*
- *Revenue from the sale of products is recognized at a point in time when control of the asset is transferred to the customer, generally upon delivery of the goods. The Entity has concluded that it is the principal in its revenue arrangements because it controls the goods before transferring them to the customer.*



HADORI SUGIARTO ADI & REKAN

Atas pendapatan, terdapat risiko yang melekat berkaitan dengan waktu pengakuan pendapatan.

Bagaimana hal tersebut ditangani dalam audit kami

Kami memperoleh pemahaman tentang sifat aliran pendapatan beserta proses, sistem, dan kontrol pencatatan pendapatan terkait. Kami juga telah memastikan bahwa pendapatan telah diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Pendekatan audit kami termasuk pengujian kontrol serta prosedur substantif.

Secara khusus, prosedur kami termasuk:

- Memperoleh pemahaman tentang sifat berbagai aliran pendapatan dan terkait proses pencatatan pendapatan, sistem dan kontrol.
- Pengujian desain, implementasi dan efektivitas operasi dari kontrol manual atas inisiasi, otorisasi, pencatatan, dan pemrosesan transaksi pendapatan.
- Menilai kesesuaian kebijakan pengakuan pendapatan produk dalam penerapan PSAK No. 72, mengenai "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang meliputi sebagai berikut:
 - meninjau kontrak yang signifikan, termasuk syarat dan ketentuan kontrak untuk memastikan kontrak ini diperhitungkan dengan tepat; dan
 - memperoleh berita acara verifikasi pekerjaan dan revidi perhitungan progres pekerjaan dengan membandingkan detail pekerjaan dan tarif yang ada pada kontrak.
- Pengujian entri jurnal manual yang dicatat dalam buku besar yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan.
- Menjalankan prosedur pisah batas untuk menguji waktu pengakuan pendapatan.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

For the revenue, there is an inherent risk around the timing of revenue recognition.

How the matter was addressed in our audit

We obtained an understanding of the nature of the revenue streams and the related revenue recording process, systems, and controls. We have also ascertained that revenue was recognized in accordance with the adopted accounting policies. Our audit approach included controls testing as well as substantive procedures.

Our specific procedures included:

- *Obtaining an understanding of the nature of the various revenue streams and the related revenue recording process, systems and controls.*
- *Testing of the design, implementation and operating effectiveness of manual controls over the initiation, authorization, recording, and processing of revenue transactions.*
- *Assessing the appropriateness of the revenue recognition policies for the products in applying PSAK No. 72, regarding "Revenue from Contracts with Customers", which included the following:*
 - *reviewed significant contracts, including contractual terms and conditions to ensure these contracts are appropriately accounted; and*
 - *obtained job verification reports and reviewed work progress calculations by comparing work details and rates in the contract.*
- *Testing manual journal entries recorded in the general ledger relating to revenue recognition.*
- *Performing cut-off procedures to test the timing of revenue recognition.*

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Entity to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.



Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Entity's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Entity's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan Entitas atau aktivitas bisnis dalam Entitas untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit Entitas. Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Entity's abilities to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Entity to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the Entity or its business activities to express an opinion on the financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audits. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audits.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Hal Lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, yang disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, tidak diaudit atau direviu. Kami tidak mengaudit atau mereviu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas tersebut.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00155/3.0428/AU.1/05/1725-2/1/X/2022, tanggal 3 Oktober 2022, No. 00158/3.0428/AU.1/05/1725-2/1/XI/2022, tanggal 2 November 2022, No. 00163/3.0428/AU.1/05/1725-2/1/XI/2022, tanggal 10 November 2022, No. 00170/3.0428/AU.1/05/1725-2/1/XII/2022, tanggal 9 Desember 2022 dan No. 00172/3.0428/AU.1/05/1725-2/1/XII/2022, tanggal 26 Desember 2022 atas laporan keuangan Entitas untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan opini tanpa modifikasian. Sehubungan dengan rencana Entitas untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Entitas telah menerbitkan kembali laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

The statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows of PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk for the seven-month period ended July 31, 2021, which are presented as comparative figures to the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the seven-month period ended July 31, 2022, were neither audited nor reviewed. We have not audited or reviewed the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the seven-month period ended July 31, 2021, and therefore, we do not express an opinion or any other form of assurance on such statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows.

Prior to this report, we had issued an independent auditor's report No. 00155/3.0428/AU.1/05/1725-2/1/X/2022, dated October 3, 2022, No. 00158/3.0428/AU.1/05/1725-2/1/XI/2022, dated November 2, 2022, No. 00163/3.0428/AU.1/05/1725-2/1/XI/2022, dated November 10, 2022, No. 00170/3.0428/AU.1/05/1725-2/1/XII/2022, dated December 9, 2022 and No. 00172/3.0428/AU.1/05/1725-2/1/XII/2022, dated December 26, 2022 for the financial statements of the Entity as of July 31, 2022 and for the seven-month period then ended and as of December 31, 2021 and for the year then ended expressed an unmodified opinion. In relation with the Entity's proposed Initial Public Offering of Shares, the Entity has reissued an independent auditor's report on the financial statements as of July 31, 2022 and for the seven-month period then ended and as of December 31, 2021 and for the year then ended to comply with capital market regulations.



**HADORI SUGIARTO
ADI & REKAN**

Laporan keuangan PT Teknologi Karya Digital Nusa tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut masing-masing No. 00062/3.0291/AU.1/05/0824-1/1/V/2021 dan No. 00010/2.1222/AU.1/05/1577-1/1/I/2021 pada tanggal 7 Mei 2021 dan 29 Januari 2021.

Seperti yang dibahas pada Catatan 1c dalam laporan keuangan, tanggal 29 Juli 2022, Entitas kehilangan pengendalian atas PT Digital Karyaloka Nusantara ("DKN"). Pada tanggal tersebut Entitas sudah tidak mengonsolidasi laporan keuangan DKN.

Financial statements of PT Teknologi Karya Digital Nusa as of December 31, 2020 and 2019 and for the years then ended, which are presented as comparative figures to the financial statements as of July 31, 2022 and for the seven-month period then ended and as of December 31, 2021 and for the year then ended were audited by another independent auditor which expressed an unmodified opinion on the financial statements No. 00062/3.0291/AU.1/05/0824-1/1/V/2021 and No. 00010/2.1222/AU.1/05/1577-1/1/I/2021 dated May 7, 2021 and January 29, 2021, respectively.

As discussed in Note 1c to the financial statements, on July 29, 2022, the Entity lost control over PT Digital Karyaloka Nusantara ("DKN"). On that date, the Entity deconsolidated the financial statements of DKN.

HADORI SUGIARTO ADI & REKAN

Deassy Roosiana Tresna Handayani
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP. 1725/*Public Accountant Registered Number AP. 1725*
25 Januari 2023/*January 25, 2023*



PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Juli 2022/ July 31, 2022	31 Desember 2021*)/ December 31, 2021*)	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019*)/ December 31, 2019*)	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2, 4	3.243.910.019	6.544.397.027	9.657.303.253	1.766.051.113	Cash on hand and in banks
Piutang usaha						Trade receivables
Pihak berelasi – neto	2, 5, 35	3.276.731.659	-	2.639.597.477	-	Related parties – net
Pihak ketiga – neto	2, 5	7.790.516.271	13.493.042.361	466.539.750	190.795.000	Third parties – net
Aset kontrak	2, 6	3.935.551.534	-	-	-	Contract assets
Piutang lain-lain						Other receivables
Pihak berelasi – neto	2, 7, 35	248.299.204	9.477.158.865	1.930.393.427	4.244.811.799	Related parties – net
Pihak ketiga – neto	2, 7	4.095.085.016	7.463.145.870	-	89.903.500	Third parties – net
Persediaan	2, 8	11.048.784.140	3.354.466.500	2.471.723.810	60.125.193	Inventories
Biaya dibayar di muka	2, 9	-	-	172.303.000	-	Prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	2, 36	1.781.544.391	-	-	-	Prepaid tax
Uang muka	10	-	99.108.400	329.306.617	-	Advances
Aset lancar lainnya	2, 11	1.452.510.000	50.000.000	-	-	Other current assets
Jumlah Aset Lancar		<u>36.872.932.234</u>	<u>40.481.319.023</u>	<u>17.667.167.334</u>	<u>6.351.686.605</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan	2, 36	612.493.938	226.463.110	44.405.723	103.337.432	Deferred tax assets
Uang muka	10	6.151.941.961	-	-	-	Advances
Investasi saham	2, 12	3.747.937.080	-	-	-	Investment in shares
Aset hak-guna – neto	2, 13	75.350.000	51.700.000	55.000.000	-	Right-of-use assets – net
Aset takberwujud – neto	2, 14	20.485.166.673	10.334.375.004	13.128.125.000	-	Intangible assets – net
Aset tetap – neto	2, 15	1.174.485.574	1.100.126.548	75.763.825	19.380.542	Fixed assets – net
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>32.247.375.226</u>	<u>11.712.664.662</u>	<u>13.303.294.548</u>	<u>122.717.974</u>	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		<u><u>69.120.307.460</u></u>	<u><u>52.193.983.685</u></u>	<u><u>30.970.461.882</u></u>	<u><u>6.474.404.579</u></u>	TOTAL ASSETS

*) Entitas menyajikan laporan keuangan konsolidasian/The Entity presented consolidated financial statements

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Juli 2022/ July 31, 2022	31 Desember 2021*)/ December 31, 2021*)	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019*)/ December 31, 2019*)	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	2, 16	7.222.399.388	999.586.075	7.400.000.000	-	Short-term bank loans
Utang usaha						Trade payables
Pihak berelasi	2, 17, 35	-	1.898.763.900	-	-	Related parties
Pihak ketiga	2, 17	1.708.668.293	13.221.608.036	710.996.503	-	Third parties
Utang lain-lain						Other payables
Pihak berelasi	2, 18, 35	273.852.135	2.603.825.127	1.560.000.000	176.837.044	Related parties
Pihak ketiga	2, 18	304.667.263	1.772.343.969	600.000.000	9.300.000	Third parties
Beban masih harus dibayar	2, 19	486.321.306	4.030.428	630.611.352	142.606.407	Accrued expenses
Utang pajak	2, 36	3.692.755.455	1.920.243.118	755.091.320	15.469.977	Taxes payable
Bagian jangka pendek utang lembaga keuangan	2, 20	201.210.614	178.199.201	-	-	Current portion of financial institution loan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>13.889.874.454</u>	<u>22.598.599.854</u>	<u>11.656.699.175</u>	<u>344.213.428</u>	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Bagian jangka panjang utang lembaga keuangan	2, 20	180.920.123	303.350.164	-	-	Non-current portion of financial institution loan
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	2, 21	<u>2.445.926.846</u>	<u>707.342.966</u>	<u>145.478.321</u>	<u>413.349.726</u>	Estimated liabilities for employee benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>2.626.846.969</u>	<u>1.010.693.130</u>	<u>145.478.321</u>	<u>413.349.726</u>	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>16.516.721.423</u>	<u>23.609.292.984</u>	<u>11.802.177.496</u>	<u>757.563.154</u>	TOTAL LIABILITIES

*) Entitas menyajikan laporan keuangan konsolidasian/*The Entity presented consolidated financial statements*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Juli 2022/ July 31, 2022	31 Desember 2021*)/ December 31, 2021*)	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019*)/ December 31, 2019*)	
EKUITAS						EQUITY
Modal saham – nilai nominal Rp 20 per saham pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 dan Rp 100.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2019						Capital stock – par value Rp 20 per share as of July 31, 2022, December 31, 2021 and 2020 and Rp 100,000 per share as of December 31, 2019
Modal dasar – 3.000.000.000 lembar saham pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 dan 12.500 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2019						Authorized capital – 3,000,000,000 shares as of July 31, 2022, December 31, 2021 and 2020 and 12,500 shares as of December 31, 2019
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.200.000.000 lembar saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan 750.000.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan 12.500 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2019						Issued and fully paid capital – 2,200,000,000 shares as of July 31, 2022 and 750,000,000 shares as of December 31, 2021 and 2020 and 12,500 shares as of December 31, 2019
Tambahan modal disetor	22	44.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	1.250.000.000	- Additional paid-in capital
Saldo laba	2, 23	-	3.000.000.000	-	-	Retained earnings
Penghasilan komprehensif lain		9.233.682.967	10.573.035.038	3.895.191.127	3.958.297.388	Other comprehensive income
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali imbalan kerja – neto	2, 25	(630.096.930)	11.655.663	273.093.259	(26.958.760)	Gain (loss) remeasurement of employee benefits – net
Sub-jumlah		52.603.586.037	28.584.690.701	19.168.284.386	5.181.338.628	Sub-total
Kepentingan nonpengendali	26	-	-	-	535.502.797	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		52.603.586.037	28.584.690.701	19.168.284.386	5.716.841.425	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		69.120.307.460	52.193.983.685	30.970.461.882	6.474.404.579	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Entitas menyajikan laporan keuangan konsolidasian/*The Entity presented consolidated financial statements*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 JULI 2022
DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE SEVEN-MONTH PERIODS
ENDED JULY 31, 2022
AND 2021 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Juli 2022/ July 31, 2022 (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Juli 2021 (Tidak Diaudit/ July 31, 2021 (Unaudited) (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Desember 2021*)/ December 31, 2021*) (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2020/ December 31, 2020 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2019*)/ December 31, 2019*) (Satu Tahun/ One Year)	
PENDAPATAN	2, 27	52.413.120.425	18.213.023.663	45.628.035.297	32.702.545.336	6.717.872.001	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2, 28	(34.636.529.402)	(10.101.977.458)	(30.375.129.962)	(25.134.645.210)	(3.741.380.143)	COST OF REVENUES
LABA KOTOR		<u>17.776.591.023</u>	<u>8.111.046.205</u>	<u>15.252.905.335</u>	<u>7.567.900.126</u>	<u>2.976.491.858</u>	GROSS PROFIT
Pendapatan lain-lain	2, 29	88.666.372	20.444.037	22.003.164	18.641.948	9.431.933	<i>Other income</i>
Beban penjualan	2, 30	(794.268.398)	(186.873.392)	(259.419.344)	(757.483.981)	(71.798.165)	<i>Selling expenses General and administrative expenses</i>
Beban umum dan administrasi	2, 31	(9.270.226.190)	(2.295.175.507)	(5.077.807.090)	(3.530.037.155)	(2.741.027.200)	<i>Finance charges</i>
Beban keuangan	2, 32	(370.044.070)	(693.893.821)	(983.426.035)	(1.336.133.261)	-	<i>Other expenses</i>
Beban lain-lain	2, 33	(106.317.675)	(11.504.361)	(394.810.081)	(36.819.300)	(6.879.433)	
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		<u>7.324.401.062</u>	<u>4.944.043.161</u>	<u>8.559.445.949</u>	<u>1.926.068.377</u>	<u>166.218.993</u>	INCOME BEFORE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN							INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	2, 36	(1.903.776.820)	(1.007.504.070)	(1.991.303.116)	(500.375.783)	(47.441.589)	<i>Current</i>
Tangguhan	2, 36	205.023.687	63.992.296	109.701.078	25.698.348	24.505.471	<i>Deferred</i>
Jumlah Beban Pajak Penghasilan		<u>(1.698.753.133)</u>	<u>(943.511.774)</u>	<u>(1.881.602.038)</u>	<u>(474.677.435)</u>	<u>(22.936.118)</u>	<i>Total Income Tax Expense</i>
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA		<u>5.625.647.929</u>	<u>4.000.531.387</u>	<u>6.677.843.911</u>	<u>1.451.390.942</u>	<u>143.282.875</u>	INCOME FOR THE PERIOD/YEAR BEFORE PROFORMA ADJUSTMENT
Proforma laba rugi	1c	(160.701.511)	-	-	-	-	<i>Proforma of profit or loss</i>
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN		<u>5.464.946.418</u>	<u>4.000.531.387</u>	<u>6.677.843.911</u>	<u>1.451.390.942</u>	<u>143.282.875</u>	INCOME FOR THE PERIOD/YEAR

*) Entitas menyajikan laporan keuangan konsolidasian/The Entity presented consolidated financial statements

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which
are an integral part of the financial statements.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
(Lanjutan)
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 JULI 2022
DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
(Continued)
FOR THE SEVEN-MONTH PERIODS
ENDED JULY 31, 2022
AND 2021 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Juli 2022/ July 31, 2022 (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Juli 2021 (Tidak Diaudit/ July 31, 2021 (Unaudited) (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Desember 2021*)/ December 31, 2021*) (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2020/ December 31, 2020 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2019*)/ December 31, 2019*) (Satu Tahun/ One Year)	
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI							ITEM NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti	2, 21, 25	(822.759.734)	(194.713.111)	(333.793.905)	384.682.076	(35.945.013)	Remeasurement on defined benefit program
Pajak penghasilan terkait	2, 25, 36	181.007.141	42.207.847	72.356.309	(84.630.057)	8.986.253	Related income tax
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak		(641.752.593)	152.505.264	(261.437.596)	300.052.019	(26.958.760)	Total other Comprehensive income (loss) net of tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		4.823.193.825	3.848.026.123	6.416.406.315	1.751.442.961	116.324.115	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR
Jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:							Total income for the year that can be attributed to:
Pemilik entitas induk	2	5.464.946.418	4.000.531.387	6.677.843.911	1.451.390.942	157.780.078	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	2, 26	-	-	-	-	(14.497.203)	Non-controlling interest
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN		5.464.946.418	4.000.531.387	6.677.843.911	1.451.390.942	143.282.875	INCOME FOR THE PERIOD/YEAR
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:							Total comprehensive income for the year that can be attributed to:
Pemilik entitas induk	2	4.823.193.825	3.848.026.123	6.416.406.315	1.751.442.961	130.821.318	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	2, 26	-	-	-	-	(14.497.203)	Non-controlling interest
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		4.823.193.825	3.848.026.123	6.416.406.315	1.751.442.961	116.324.115	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR
LABA PER SAHAM DASAR	2, 34	6,82	5,33	8,90	176,32	12.622,41	BASIC EARNINGS PER SHARE

*) Entitas menyajikan laporan keuangan konsolidasian/The Entity presented consolidated financial statements

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 JULI 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SEVEN-MONTH PERIODS ENDED
JULY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital	Proforma Ekuitas/ Proforma Equity	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Saldo Laba/ Retained Earnings	Penghasilan Komprehensif Lain/Other Comprehensive Income (Loss)	Jumlah/ Total	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
Saldo 1 Januari 2019		1.250.000.000	-	-	3.800.517.310	-	5.050.517.310	-	5.050.517.310	Balance as of January 1, 2019
Entitas Anak yang dikonsolidasi pada tahun berjalan	26	-	-	-	-	-	-	550.000.000	550.000.000	Consolidated Subsidiary for the year
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan		-	-	-	157.780.078	(26.958.760)	130.821.318	(14.497.203)	116.324.115	Comprehensive income (loss) for the year
Saldo 31 Desember 2019*)		1.250.000.000	-	-	3.958.297.388	(26.958.760)	5.181.338.628	535.502.797	5.716.841.425	Balance as of December 31, 2019*)
Setoran modal	22	13.750.000.000	-	-	-	-	13.750.000.000	-	13.750.000.000	Paid-up capital
Dividen tunai	24	-	-	-	(1.500.000.000)	-	(1.500.000.000)	-	(1.500.000.000)	Cash dividends
Pelepasan Entitas Anak	26	-	-	-	(14.497.203)	-	(14.497.203)	(535.502.797)	(550.000.000)	Disposal of Subsidiary
Laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	1.451.390.942	300.052.019	1.751.442.961	-	1.751.442.961	Comprehensive Income for the year
Saldo 31 Desember 2020		15.000.000.000	-	-	3.895.191.127	273.093.259	19.168.284.386	-	19.168.284.386	Balance as of December 31, 2020
Laba (rugi) komprehensif periode berjalan (Tidak Diaudit)		-	-	-	4.000.531.387	(152.505.264)	3.848.026.123	-	3.848.026.123	Comprehensive income (loss) for the period (Unaudited)
Saldo 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit)		15.000.000.000	-	-	7.895.722.514	120.587.995	23.016.310.509	-	23.016.310.509	Balance as of July 31, 2021 (Unaudited)

*) Entitas menyajikan laporan keuangan konsolidasian/*The Entity presented consolidated financial statements*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 JULI 2022 DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (Continued)
FOR THE SEVEN-MONTH PERIODS ENDED
JULY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital	Proforma Ekuitas/ Proforma Equity	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Saldo Laba/ Retained Earnings	Penghasilan Kprehensif Lain/Other Comprehensive Income	Jumlah/ Total	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
Saldo 1 Januari 2021		15.000.000.000	-	-	3.895.191.127	273.093.259	19.168.284.386	-	19.168.284.386	Balance as of January 1, 2021
Penerapan PSAK No. 38	23	-	-	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	-	3.000.000.000	Implementation of PSAK No. 38
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan		-	-	-	6.677.843.911	(261.437.596)	6.416.406.315	-	6.416.406.315	Comprehensive income (loss) for the year
Saldo 31 Desember 2021*)		15.000.000.000	-	3.000.000.000	10.573.035.038	11.655.663	28.584.690.701	-	28.584.690.701	Balance as of December 31, 2021*)
Penurunan modal	22	(14.940.000.000)	-	-	-	-	(14.940.000.000)	-	(14.940.000.000)	Decrease-in capital
Setoran modal	22	36.940.000.000	-	-	-	-	36.940.000.000	-	36.940.000.000	Paid-up capital
Pelepasan Entitas Anak	1c, 23	-	160.701.511	(3.000.000.000)	35.000.000	-	(2.804.298.489)	-	(2.804.298.489)	Disposal of subsidiary
Dividen saham	22, 24	7.000.000.000	-	-	(7.000.000.000)	-	-	-	-	Stocks dividend
Laba (rugi) komprehensif periode berjalan		-	(160.701.511)	-	5.625.647.929	(641.752.593)	4.823.193.825	-	4.823.193.825	Comprehensive income (loss) for the period
Saldo 31 Juli 2022		44.000.000.000	-	-	9.233.682.967	(630.096.930)	52.603.586.037	-	52.603.586.037	Balance as of July 31, 2022

*) Entitas menyajikan laporan keuangan konsolidasian/*The Entity presented consolidated financial statements*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2022 DAN 2021
(TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE SEVEN-MONTH PERIODS
ENDED JULY 31, 2022
AND 2021 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Juli 2022/ July 31, 2022 (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Juli 2021 (Tidak Diaudit)/ July 31, 2021 (Unaudited) (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Desember 2021*/ December 31, 2021* (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2020/ December 31, 2020 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2019*/ December 31, 2019* (Satu Tahun/ One Year)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan		50.806.951.322	16.772.826.176	35.050.119.286	29.787.203.109	8.130.789.201	Cash received from customers
Pembayaran kas untuk operasional		(61.121.000.513)	(18.490.515.254)	(24.329.487.489)	(26.597.589.155)	(5.722.190.882)	Cash paid for operations
Kas yang Dihasilkan dari (Digunakan untuk) Operasi		(10.314.049.191)	(1.717.689.078)	10.720.631.797	3.189.613.954	2.408.598.319	Cash Generated by (Used in) Operations
Penerimaan dari pendapatan bunga	29	8.356.073	20.444.037	22.003.164	18.641.948	9.431.933	Receipt from interest income
Pembayaran beban keuangan	32	(344.309.838)	(693.893.821)	(983.426.035)	(1.336.133.261)	-	Payment of finance charges
Pembayaran pajak penghasilan badan		(272.488.505)	(315.595.236)	(622.102.669)	(229.859.873)	(47.441.589)	Payment of corporate income taxes
Pembayaran kas lainnya		(7.842.754)	(11.504.361)	(72.775.272)	(36.819.300)	(6.879.433)	Other cash payments
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(10.930.334.215)	(2.718.238.459)	9.064.330.985	1.605.443.468	2.363.709.230	Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penjualan investasi saham	1c, 12	8.250.000.000	-	-	-	-	Sale of investment in shares
Perolehan aset hak-guna	13	(66.000.000)	-	(66.000.000)	(66.000.000)	-	Acquisition of right-of-use asset
Perolehan aset takberwujud	14	(12.856.000.000)	-	(1.500.000.000)	(17.050.000.000)	-	Addition of intangible assets
Perolehan aset tetap	15, 40	(204.829.530)	(324.859.400)	(557.384.200)	(80.607.627)	(8.000.000)	Acquisition of fixed assets
Pembayaran uang muka aset tetap	10	(6.151.941.961)	-	-	-	-	Payment of advances for fixed assets
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(11.028.771.491)	(324.859.400)	(2.123.384.200)	(17.196.607.627)	(8.000.000)	Net Cash Flows Used in Investing Activities

*) Entitas menyajikan laporan keuangan konsolidasian/The Entity presented consolidated financial statements

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2022 DAN 2021
(TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)
FOR THE SEVEN-MONTH PERIODS
ENDED JULY 31, 2022 AND 2021
(UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Juli 2022/ July 31, 2022 (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Juli 2021 (Tidak Diaudit/ July 31, 2021 (Unaudited) (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Desember 2021*/ December 31, 2021* (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2020/ December 31, 2020 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2019*/ December 31, 2019* (Satu Tahun/ One Year)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran utang lain-lain – pihak berelasi		(14.329.972.992)	-	-	(82.702.073)	-	Payment of other payables – related parties
Penambahan utang lain-lain – pihak berelasi		-	597.210.763	1.043.825.127	60.000.000	176.837.044	Addition of other payables – related parties
Penambahan utang lain-lain – pihak ketiga		-	-	-	600.000.000	9.300.000	Addition of other payables – third parties
Pembayaran utang lembaga keuangan	20	(99.418.628)	(45.977.313)	(109.950.635)	-	-	Payment of financial institution loan
Penambahan piutang lain-lain – pihak berelasi		-	(6.177.935.679)	(10.556.299.592)	-	(2.994.811.799)	Addition of other receivables – related parties
Penerimaan piutang lain-lain – pihak berelasi		6.267.707.005	1.473.385.454	5.968.986.014	1.755.118.372	-	Receipt of other receivables – related parties
Pembayaran utang bank	16	(1.450.766.147)	(8.423.986.156)	(13.400.413.925)	-	-	Payment of bank loans
Penambahan utang bank	16	7.673.579.460	7.000.000.000	7.000.000.000	7.400.000.000	-	Addition of bank loans
Penurunan modal	22	(14.940.000.000)	-	-	-	-	Decrease-in capital
Penambahan modal disetor	22	36.940.000.000	-	-	13.750.000.000	-	Additional paid-in capital
Pembayaran biaya emisi saham	11	(1.402.510.000)	-	-	-	-	Payment of shares issuance cost
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		18.658.618.698	(5.577.302.931)	(10.053.853.011)	23.482.416.299	(2.808.674.755)	Net Cash Flows Provided by (Used In) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK		(3.300.487.008)	(8.620.400.790)	(3.112.906.226)	7.891.252.140	(452.965.525)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN		6.544.397.027	9.657.303.253	9.657.303.253	1.766.051.113	2.219.016.638	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN		3.243.910.019	1.036.902.463	6.544.397.027	9.657.303.253	1.766.051.113	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF THE PERIOD/YEAR

*) Entitas menyajikan laporan keuangan konsolidasian/The Entity presented consolidated financial statements

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statement which are an integral part of the financial statements.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Entitas dan Informasi Umum

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (dahulu PT Damai Harapan Sentosa) (Entitas) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 25 tanggal 7 Januari 2011 dari Tjoa Karina Juwita SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-19005.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 15 April 2011.

Anggaran Dasar Entitas telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn., No. 108, tanggal 28 Juli 2022. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0053277.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 29 Juli 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Entitas bergerak dalam bidang usaha perdagangan, aktivitas pengolahan data, aktivitas konsultasi, aktivitas manajemen, pemrograman komputer dan *platform* digital serta periklanan. Entitas berkedudukan di Jakarta Utara.

Saat ini, bisnis utama Entitas adalah di bidang pemrograman komputer lainnya, konsultasi dan perancangan *internet of things* dan komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya.

Entitas mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2015. PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk merupakan entitas induk, dimana David Santoso merupakan pemilik manfaat utama mulai tahun 2020.

b. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Audit, Internal Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan

Manajemen kunci Entitas meliputi seluruh anggota Komisaris dan Direksi.

1. GENERAL

a. The Entity's Establishment and General Information

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (formerly PT Damai Harapan Sentosa) (the Entity) was established based on Notarial Deed No. 25 dated January 7, 2011 of Tjoa Karina Juwita SH., Notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decision Letter No. AHU-19005.AH.01.01.Tahun 2011, dated April 15, 2011.

The Entity's Articles of Association have been amended, most recently based on Notarial Deed Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn., No. 108, dated July 28, 2022. The Deed had been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU-0053277.AH.01.02.Tahun 2022, dated July 29, 2022.

In accordance with Article 3 of its Articles of Association, the Entity's scope of trading, data processing activities, consulting activities, management activities, computer programming and digital platforms and advertising. The Entity is domiciled in North Jakarta.

Currently, the main business of the Entity are in the scope of other computer programming, consulting and designing the internet of things and computers and other computer facilities management.

The Entity started its commercial operations in 2015. PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk is the parent entity, whereas David Santoso is the ultimate beneficial owner starting from 2020.

b. Board of Commissioners and Directors, Nomination and Remuneration Committee, Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Employees

The Entity's key management includes all members of the Board of Commissioners and Directors.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Directors

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebagai berikut (lihat Catatan 43):

The Entity's Board of Commissioners and Directors as of July 31, 2022 are as follows (see Note 43):

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Komisaris Utama	:	Budi Setiyadi	:	President Commissioner
Komisaris Independen	:	Ir. Resdiansyah	:	Independent Commissioner

Direksi

Directors

Direktur Utama	:	David Santoso	:	President Director
Direktur	:	Rudy Budiman Setiawan	:	Director
	:	Yudhi Haryadi	:	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The Entity's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Komisaris Utama	:	David Santoso	:	President Commissioner
Komisaris	:	Shafruhan Sinungan	:	Commissioner

Direksi

Directors

Direktur Utama	:	Rudy Budiman Setiawan	:	President Director
Direktur	:	Drs. Herwan Gozali	:	Director

Susunan Komisaris dan Direksi Entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The Entity's Commissioner and Director as of December 31, 2019 are as follows:

Komisaris	:	Nony Kusuma	:	Commissioner
------------------	---	-------------	---	---------------------

Direktur	:	Herry	:	Director
-----------------	---	-------	---	-----------------

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 128/TKDN/XI/2022, tanggal 1 November 2022, Entitas telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai berikut (lihat Catatan 43):

Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. 128/TKDN/XI/2022, dated November 1, 2022, the Entity had established a Nomination and Remuneration Committee, as follows (see Note 43):

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Head of Nomination and Remuneration Committee

	:	Dr. Ir. Resdiansyah	:	
--	---	---------------------	---	--

Anggota Komite	:	Drs. Herwan Gozali	:	Committee Members
	:	Luluk Sri Utami	:	

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 107/TKDN/IX/2022 tanggal 28 September 2022, Entitas telah membentuk Komite Audit, sebagai berikut (lihat Catatan 43):

Ketua Komite Audit	:	Dr. Ir. Resdiansyah	:	Head of Audit Committee
Anggota	:	Dwi Afrilianto	:	Members
	:	Muhammad Arif Hartono	:	

Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 108/TKDN/IX/2022 tanggal 28 September 2022, Entitas telah membentuk Audit Internal, sebagai berikut (lihat Catatan 43):

Ketua Audit Internal	:	Citra Dewi	:	Head of Internal Audit
Anggota	:	Ibnu Sina Azly	:	Members
	:	Dini Afrilyan	:	

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 109/TKDN/IX/2022 tanggal 28 September 2022, Entitas telah mengangkat Wendy Jolanda Waas sebagai Sekretaris Perusahaan, (lihat Catatan 43).

Audit Committee

Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. 107/TKDN/IX/2022 dated September 28, 2022, the Entity had established an Audit Committee, as follows (see Note 43):

Internal Audit

Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. 108/TKDN/IX/2022 dated September 28, 2022, the Entity had established an Internal Audit, as follows (see Note 43):

Corporate Secretary

Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. 109/TKDN/IX/2022 dated September 28, 2022, the Entity had appointed Wendy Jolanda Waas as Corporate Secretary, (see Note 43).

Karyawan

Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 jumlah karyawan tetap Entitas masing-masing sebanyak 61, 32, 25, dan 17 orang.

Employees

As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 the number of permanent employees of the Entity are 61, 32, 25, and 17 employees, respectively.

c. Struktur Entitas

Pada tanggal 31 Desember 2021, Entitas mengkonsolidasikan Entitas Anak di bawah ini karena adanya pengendalian.

c. The Entity's Structure

As of December 31, 2021 the Entity consolidated the following Subsidiary due to the existence of control.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Entitas Anak/ Subsidiary	Domisili/ Domicile	Aktivitas Bisnis Utama/ Main Business Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Tahun Pendirian/ Year of Establishment	Tahun Beroperasi/ Year of Operation	Jumlah Aset/ Total Assets
						31 Desember 2021/ December 31, 2021
Kepemilikan Langsung/ Direct Ownership						
PT Digital Karyaloka Nusantara	Banten	Informasi dan komunikasi/ Information and communication	80%	2021	-	15.000.000.000

PT Digital Karyaloka Nusantara (DKN)

PT Digital Karyaloka Nusantara (DKN) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 32, tanggal 28 September 2021 dari Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0066696.AH.01.01.Tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021.

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, Entitas tidak memiliki pengendalian atas DKN karena menjual kepemilikan sahamnya kepada pihak ketiga, sehingga Entitas tidak mengkonsolidasikan laporan keuangan DKN, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Juli 2022/ Juli 31, 2022
Nilai jual	8.250.000.000
Dikurangi nilai buku investasi	8.054.298.489
Laba pelepasan investasi	195.701.511

Berdasarkan Akta Notaris No. 18, tanggal 5 April 2022 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, Entitas menjual kepemilikan saham DKN sebesar 10% atau setara dengan Rp 1.500.000.000 (15.000 lembar saham). Sehingga Entitas memiliki DKN sebesar 70% atau setara dengan Rp 10.500.000.000 (105.000 lembar saham).

Berdasarkan Akta Notaris No. 110, tanggal 29 Juli 2022 dari Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, Entitas menjual saham kepemilikan saham DKN sebesar 45% atau setara dengan Rp 6.750.000.000 (67.500 lembar saham). Sehingga Entitas memiliki DKN sebesar 25% atau setara dengan Rp 3.750.000.000 (37.500 lembar saham).

PT Digital Karyaloka Nusantara (DKN)

PT Digital Karyaloka Nusantara (DKN) was established based on Notarial Deed No. 32, dated September 28, 2021 of Mutiara Hartanto, S.H., Notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0066696.AH.01.01.Tahun 2021, dated October 22, 2021.

For the seven-month period ended July 31, 2022, the Entity did not have control over DKN because it sold its share ownership to third parties, therefore the Entity does not consolidate the financial statements of DKN, with details as follows:

	31 Juli 2022/ Juli 31, 2022	
Nilai jual	8.250.000.000	Selling price
Dikurangi nilai buku investasi	8.054.298.489	Less book value of investment
Laba pelepasan investasi	195.701.511	Gain on disposal of investment

Based on Notarial Deed No. 18, dated April 5, 2022 of Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the Entity sold ownership shares of DKN of 10% or equivalent to Rp 1,500,000,000 (15,000 shares). Therefore, the Entity has a 70% ownership in DKN or equivalent to Rp 10,500,000,000 (105,000 shares).

Based on Notarial Deed No. 110, dated July 29, 2022 of Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the Entity sold ownership shares ownership of DKN of 45% or equivalent to Rp 6,750,000,000 (67,500 shares). Therefore, the Entity has a 25% ownership in DKN or equivalent to Rp 3,750,000,000 (37,500 shares).

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, DKN telah menjadi Entitas Asosiasi (lihat Catatan 12).

For the period ended on July 31, 2022, DKN has become an Associated Entity (see Note 12).

Ringkasan informasi keuangan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Subsidiary's summary of financial information are as follows:

Ringkasan laporan posisi keuangan (neraca):

Summary of statement of financial position:

	2021
<u>PT Digital Karyaloka Nusantara</u>	
Jumlah aset lancar	15.000.000.000
Jumlah liabilitas jangka pendek	35.000.000
Jumlah ekuitas	14.965.000.000

<u>PT Digital Karyaloka Nusantara</u>
Total current assets
Total current liabilities
Total equity

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

Summary of statement of profit or loss and other comprehensive income:

	2021
<u>PT Digital Karyaloka Nusantara</u>	
Rugi sebelum pajak	(35.000.000)
Rugi tahun berjalan	(35.000.000)
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan	(35.000.000)

<u>PT Digital Karyaloka Nusantara</u>
Loss before tax
Loss for the year
Total comprehensive loss for the year

Pada tanggal 31 Desember 2019, Entitas mengkonsolidasikan Entitas Anak di bawah ini karena adanya pengendalian.

On December 31, 2019, the Entity consolidated the following Subsidiary due to the existence of control.

Entitas Anak/ Subsidiary	Domisili/ Domicile	Aktivitas Bisnis Utama/ Main Business Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Tahun Pendirian/ Year of Establishment	Tahun Beroperasi/ Year of Operation	Jumlah Aset/ Total Assets 31 Desember 2019/ December 31, 2019
Kepemilikan Langsung/ Direct Ownership						
PT Trans Mega Selaras	Banten	Perdagangan Besar dan Eceran / Wholesale and Retail Trade	90%	2015	-	5.603.434.971

PT Trans Mega Selaras (TMS)

PT Trans Mega Selaras (TMS)

PT Trans Mega Selaras didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1, tanggal 12 Desember 2015 dari Bisrianto S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-2456802.AH.01.01 Tahun 2015, tanggal 18 September 2015.

PT Trans Mega Selaras was established based on Notarial Deed No. 1, dated December 12, 2015 from Bisrianto S.H., M.Kn, Notary in Tangerang. This deed of establishment has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decision Letter No. AHU-2456802.AH.01.01 of 2015, September 18, 2015.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan Akta Notaris No. 4, tanggal 10 Desember 2020 dari Edi Suryajaya, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, terdapat perubahan kepemilikan pemegang saham PT Trans Mega Selaras (TMS), perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0209276.AH.01.11 Tahun 2020, tanggal 11 Desember 2020. Pada tahun 2020, Entitas tidak lagi mengkonsolidasi TMS, sehingga kepentingan nonpengendali dihapuskan. Rincian pelepasan saham TMS, sebagai berikut:

Based on Deed No. 4, dated December 10, 2020 by Notary Edi Suryajaya, S.H., M.Kn., domiciled in Kabupaten Tangerang, there is a change in stockholder ownership of PT Trans Mega Selaras (TMS), the change has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a Letter Decision No. AHU-0209276.AH.01.11 Tahun 2020, December 11, 2020. In 2020, the Entity no longer consolidates TMS, so that non-controlling interests are disposed. The details on the disposal of TMS shares are as follows:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Nilai jual	4.950.000.000	Selling price
Dikurangi nilai buku investasi	4.950.000.000	Less book value of investment
Laba (rugi) pelepasan investasi	-	Gain (loss) on disposal of investment

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN **2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

a. Pernyataan Kepatuhan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan No. VIII.G.7, mengenai "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik". Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

a. Statement of Compliance

Management is responsible for the preparation and presentation of the financial statements. The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) which include Statements and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Accountant Institute and Regulation No. VIII.G.7, regarding "the Presentation and Disclosures of Financial Statements of Listed Entity". The accounting policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan pada saat terjadinya (*accrual basis*) dengan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements except for the statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung (*direct method*) yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The statements of cash flows are presented using the direct method, where cash flows are classified into operating, investing, and financing activities.

Mata uang fungsional dan pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah (Rp).

The functional and reporting currency used in the financial statements is Indonesian Rupiah (Rp).

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Standar tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Entitas. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Entity's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

Penerapan dari amendemen, penyesuaian dan interpretasi standar berikut yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2022, tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Entitas dan efek material terhadap laporan keuangan:

The implementation of the amendment, improvement and interpretations standards which are effective on January 1, 2022 did not result in significant changes to the accounting policies of the Entity and no material effect on the financial statements:

- PSAK No. 22 (Amendemen 2020), mengenai “Kombinasi Bisnis terhadap referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan”.

- *PSAK No. 22 (Amendment 2020), regarding “Business Combinations against references to the Financial Reporting Conceptual Framework”.*

Amandemen PSAK No. 22 ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK No. 22, PSAK No. 57, ISAK No. 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Amendments to PSAK No. 22 clarifies the interaction between PSAK No. 22, PSAK No. 57, ISAK No. 30 and the Conceptual Framework of Financial Reporting.

Amendemen ini menambahkan deskripsi mengenai liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK No. 57 atau ISAK No. 30, serta mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang diakui pada tanggal akuisisi, dan terkait definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

This amendment adds a description of the liabilities and contingent liabilities within the scope of PSAK No. 57 or ISAK No. 30, and clarify the contingent liabilities recognized at the acquisition date, and in relation to the definition of a contingent asset and its accounting treatment.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- PSAK No. 57 (Amendemen 2019), mengenai “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi mengenai Kontrak yang Merugi – Biaya Memenuhi Kontrak”.

Amendemen ini mengklasifikasikan biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan. Amendemen ini mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung terdiri dari: biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut dan alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

- PSAK No. 69 (Penyesuaian 2020), mengenai “Agrikultur”.

Penyesuaian ini mengklarifikasi pengakuan dan pengukuran yang sebelumnya “entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, perpajakan atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen”, menjadi “entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen”.

- PSAK No. 71 (Penyesuaian 2020), mengenai “Instrumen Keuangan”.

PSAK No. 71 (Penyesuaian 2020) mengklarifikasi *fee* (imbalan) yang diakui oleh peminjam terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Dalam menentukan *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi *fee* (imbalan) yang diterima, peminjam hanya memasukkan *fee* (imbalan) yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk *fee* (imbalan) yang dibayar atau diterima baik peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

- PSAK No. 73 (Penyesuaian Tahunan 2020), mengenai “Sewa”.

PSAK No. 73 (Penyesuaian 2020) mengklarifikasi pengukuran oleh penyewa dan pencatatan perubahan masa sewa terkait “perbaikan properti sewaan”

- PSAK No. 57 (Amendment 2019), regarding “Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Contract Loss – Contract Fulfillment Costs”.

This amendment classifies the cost of fulfilling a contract in relation to determining whether a contract is an onerous contract. This amendment provides that the cost of fulfilling the contract consists of costs that are directly related to the contract. Directly related costs consist of: incremental costs to fulfill the contract and allocations of other costs that are directly related to fulfilling the contract.

- PSAK No. 69 (Improvement 2020), regarding “Agriculture”.

This improvement clarifies the recognition and measurement that previously “the entity does not take into account cash flows for financing assets, taxation or regeneration of biological assets after harvest”, to “the entity does not account for cash flows for financing assets, or regrowth of biological assets after harvest”.

- PSAK No. 71 (Improvement 2020), regarding “Financial Instruments”.

PSAK No. 71 (Improvement 2020) clarifies fees (benefits) recognized by borrowers in relation to derecognition of financial liabilities. In determining the fee (return) to be paid after deducting the fee (return) received, the borrower only includes the fees (benefits) paid or received between the borrower and the lender, including fees (benefits) paid or received by either the borrower or the lender on behalf of other parties.

- PSAK No. 73 (Annual Improvement 2020), regarding “Leases”.

PSAK No. 73 (Improvement 2020) clarifies the measurement by tenants and records changes in lease term related to “improvements to rental property”.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

c. Instrumen Keuangan

Entitas melakukan penerapan PSAK No. 71, mengenai “Instrumen Keuangan”.

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

Aset Keuangan

Pengakuan Awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual – apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

1. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
3. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Entitas menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Entitas menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

c. Financial Instruments

The Entity has applied PSAK No. 71, regarding “Financial Instruments”.

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Initial Recognition

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows – whether from solely payment of principal and interest (SPPI).

Financial assets are classified in the three categories as follows:

1. *Financial assets measured at amortized cost;*
2. *Financial assets measured at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL); and*
3. *Financial assets measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVOCI).*

SPPI Test

As a first step of its classification process, the Entity assesses the contractual terms of financial to identify whether they meet the SPPI test.

Principal for the purpose of this test is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and may change over the life of the financial asset (for example, if there are repayments of principal or amortization of the premium/discount).

The most significant elements of interest within an arrangement are typically the consideration for the time value of money and credit risk. To make the SPPI assessment, the Entity applies judgment and considers relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated, and the period for which the interest rate is set.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian Model Bisnis

Entitas menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Entitas mengelola aset keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Entitas tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Entitas.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diekspektasikan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario “*worst case*” atau “*stress case*”. Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diekspektasikan, Entitas tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

In contrast, contractual terms that introduce more than de minimis exposure to risks or volatility in the contractual cash flows that are unrelated to a basic lending arrangement, do not give rise to contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the amount outstanding. In such cases, the financial asset is required to be measured as FVTPL.

Business Model Assessment

The Entity determines its business model at the level that best reflects how it manages the Entity's financial assets to achieve its business objective.

The Entity's business model is not assessed on an instrument-by-instrument basis, but at a higher level of aggregated portfolios and is based on observable factors such as:

- *How the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the entity's key management personnel;*
- *The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular the way those risks are managed;*
- *The expected frequency, value, and timing of sales are also important aspects of the Entity's assessment.*

The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking “worst case” or “stress case” scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realized in a way that is different from original expectations, the Entity does not change the classification of the remaining financial assets held in that business model, but incorporates such information when assessing newly originated or newly purchased financial assets going forward.

Financial assets are measured at amortized cost if the financial asset is managed in a business model aimed at owning a financial asset in order to obtain a contractual cash flow and the contractual requirements of a financial asset that on a given date increases the cash flow solely from the principal and interest payments (SPPI) of the amount owed.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

At initial recognition, the financial assets measured at amortized cost are recognized at the fair value plus the transaction fee and subsequently measured at amortized cost by using the effective interest rate.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "Pendapatan Keuangan". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan keuangan sebagai "Kerugian Penurunan Nilai".

Interest income from financial assets measured at amortized cost is recorded in the statement of profit and loss and other comprehensive income and is recognized as "Finance Income". When a decline in value occurs, the impairment loss is recognized as a deduction of the recorded value of the financial asset and is recognized in the financial statements as "Impairment Loss".

Kecuali piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau yang diterapkan oleh Entitas secara praktis. Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

With the exception of trade receivables that do not contain a significant financing component or for which the Entity has applied the practical expedient. All financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets which are recorded at fair value through profit or loss.

Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau dimana Entitas menerapkan kebijaksanaan praktisnya diukur pada harga transaksi sebagaimana diungkapkan dalam "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".

Trade receivables that do not contain a significant financing component or for which the Entity has applied the practical expedient are measured at the transaction price as disclosed in "Revenue from Contracts with Customers".

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dari akhir periode pelaporan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months from the end of the reporting period, otherwise they are classified as non-current.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Subsequent Measurement

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

- (i) *Financial assets measured at amortized cost*

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat

Financial assets measured at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method less allowance for impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in the statements of profit or loss and other comprehensive

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi kas dan bank, piutang usaha, aset kontrak piutang lain-lain dan aset lancar lainnya.

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Dividen atas investasi diakui sebagai "Pendapatan Operasional Lain-lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika hak pembayaran telah ditetapkan.

income. The losses arising from impairment are also recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Effective interest rate method

The effective interest rate method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than those financial instruments measured at FVTPL.

As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, financial assets measured at amortized cost consists of cash on hand and in banks, trade receivables, contract assets, other receivables and other current assets.

- (ii) Financial assets measured at FVTPL

Financial assets measured at FVTPL are subsequently carried in the statements of financial position at fair value, with changes in fair value recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Dividends on investments are recognized as "Other Operating Income" in the statements of profit or loss and other comprehensive income when the right of payment has been established.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Entitas tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Entity has no financial assets measured at FVTPL.

(iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

(iii) Financial assets measured at FVOCI

Keuntungan dan kerugian dari nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Pendapatan bunga, kerugian penurunan nilai atau pembalikan, dan keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dari investasi dihitung menggunakan metode EIR. Ketika instrumen hutang dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Fair value gains and losses are recognized in other comprehensive income. Interest income, impairment losses or reversals, and foreign exchange gains and losses are recognized in profit or loss. Interest earned on investments is calculated using the EIR method. When debt instrument is derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Entitas tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Entity has no financial assets measured at FVOCI.

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Pengakuan Awal

Initial Recognition

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 71 are classified as follows:

1. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
2. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

1. *Financial liabilities measured at amortized cost; and*
2. *Financial liabilities measured at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL).*

Entitas menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

The Entity determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan setelah periode pelaporan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months after the reporting period, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Subsequent Measurement

Pengukuran liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

- (i) Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

- (i) *Financial liabilities measured at amortized cost*

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode EIR. Amortisasi EIR termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Financial liabilities measured at amortized cost are subsequently measured using the EIR method. The EIR amortization is included in finance costs in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi EIR.

Gains or losses are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar dan utang lembaga keuangan.

As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, financial liabilities measured at amortized cost consists of short-term bank loans, trade payables, other payables, accrued expenses and financial institution loan.

- (ii) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

- (ii) *Financial liabilities measured at FVTPL*

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition measured at fair value through profit or loss.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok untuk diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini termasuk instrumen keuangan derivatif yang diambil Entitas yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai

Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. This category includes derivative financial instruments entered into by the Entity that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

PSAK No. 71. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Entitas tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Entity has no financial liabilities measured at FVTPL.

Saling Hapus Antar Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersih disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum tersebut tidak harus bergantung pada kejadian masa depan dan harus dapat dilaksanakan dalam kegiatan usaha normal dan dalam hal gagal bayar, pailit atau kebangkrutan dari Entitas atau pihak lawan.

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Entity or the counterparty.

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Entitas menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Entitas menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Entitas membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Entity assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Entity uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Entity compares the risk of a default occurring on the financial instrument as of the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Untuk piutang usaha, Entitas menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Entitas mengakui penyisihan kerugian berdasarkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya pada setiap akhir periode pelaporan. Kerugian kredit ekspektasian dari aset keuangan ini diperkirakan menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Entitas, disesuaikan dengan faktor masa depan yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi, termasuk nilai waktu dari uang jika diperlukan.

For trade receivables, the Entity applies a simplified approach in calculating expected credit losses. The Entity recognizes a loss allowance based on lifetime expected credit losses at the end of each reporting period. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Entity's historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment, including time value of money where appropriate.

Ketika risiko kredit pada instrumen keuangan yang mana kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya telah diakui kemudian membaik, dan persyaratan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya tidak lagi terpenuhi, maka cadangan kerugian diukur pada jumlah yang sama dengan 12 bulan dari kerugian kredit ekspektasian pada periode pelaporan saat ini, kecuali untuk aset yang menggunakan pendekatan yang disederhanakan.

When the credit risks on financial instruments for which lifetime expected credit losses have been recognized subsequently improves, and the requirement for recognizing lifetime expected credit losses is no longer met, the loss allowance is measured at an amount equal to 12 months expected credit losses at the current reporting period, except for assets for which simplified approach was used.

Entitas mengakui rugi penurunan nilai (pemulihan) dalam laba rugi untuk semua aset keuangan dengan penyesuaian yang sesuai dengan jumlah tercatatnya melalui akun penyisihan kerugian, kecuali untuk investasi dalam instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, di mana penyisihan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan posisi keuangan.

The Entity recognizes impairment loss (reversals) in profit or loss for all financial assets with corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance account, except for investment in debt instruments that are measured at FVOCI, for which the loss allowance is recognized in other comprehensive income and does not reduce the carrying amount of the financial asset in the statements of financial position.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Derecognition of Financial Assets and Financial Liabilities

Aset Keuangan

Financial Assets

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Entitas telah mengalihkan hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "pass-through"; dan baik (a) Entitas telah

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Entity has transferred its rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; and either (a) the Entity has transferred substantially all the

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

secara substansial, mengalihkan seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Entitas secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mengalihkan kendali atas aset tersebut.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada, pertukaran atau penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Entitas menilai instrumen keuangan, termasuk derivatif, sebesar nilai wajar pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Entitas harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar utamanya bertindak untuk kepentingan ekonomi terbaik mereka.

risks and rewards of the asset, or (b) the Entity has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Financial Liability

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or canceled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Fair Value of Financial Instruments

The Entity measures financial instruments, including derivatives, at fair value at each statement of financial position date.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *In the principal market for the asset and liability, or*
- *In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Entity.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pengukuran nilai wajar atas aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan manfaat ekonomi tertinggi dalam penggunaan aset atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut secara maksimal.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

Entitas menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan dimana data memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input relevan yang tidak dapat diobservasi.

The Entity uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan *input* terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1- Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 – Teknik penilaian dimana *input* level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
- Level 3 – Teknik penilaian dimana *input* level terendah yang signifikan terhadap pengukuran yang tidak dapat diobservasi.

- *Level 1 – Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2 – Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;*
- *Level 3 – Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

Untuk aset dan liabilitas yang diakui sebesar nilai wajar dalam laporan keuangan secara berulang, Entitas menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan *input* level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada setiap akhir periode pelaporan.

For assets and liabilities that are recognized at fair value in the financial statements on recurring basis, the Entity determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting year.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Entitas telah menentukan kategori aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko dari aset atau liabilitas tersebut, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

For the purpose of fair value disclosures, the Entity has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Penyesuaian Risiko Kredit

Entitas melakukan penyesuaian harga dalam kondisi pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit di pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang sedang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar liabilitas keuangan, risiko kredit Entitas terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Berelasi

Entitas melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang dinyatakan dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

Credit Risk Adjustment

The Entity adjusts the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the ones being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liability positions, the Entity's own credit risk associated with the instrument is taken into account.

d. Transactions with Related Parties

The Entity has transactions with entities that are regarded as having special relationships as defined by PSAK No. 7 (Improvement 2015), regarding "Related Parties Disclosures".

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

- (a) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
 - (i) has control or joint control over the reporting entity;
 - (ii) has significant influence over the reporting entity; or
 - (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- (b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
 - (i) the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - (iii) both entities are joint ventures of the same third party.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- (viii) entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Kas dan Bank

Kas dan bank terdiri dari kas dan bank yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

f. Persediaan

Sesuai dengan PSAK No. 14, mengenai "Persediaan", persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan atau nilai realisasi neto (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan ditentukan dengan metode FIFO (*First-In-First-Out*).

Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

- (iv) *one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.*
- (v) *the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.*
- (vi) *the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).*
- (vii) *a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).*
- (viii) *the entity, or many members of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.*

All significant balances and transactions with related parties, whether done or not conducted under the normal terms and conditions similar to those with third parties, are disclosed in the notes to the financial statements.

e. Cash on Hand and in Bank

Cash on hand and in banks are not pledged as collateral and not restricted.

f. Inventories

According to PSAK No. 14, regarding "Inventories", inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the FIFO (First-In-First-Out).

Net realizable value represents the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

g. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka dibebankan pada laba rugi tahun berjalan sesuai masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

h. Investasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana Entitas dan Entitas Anak mempunyai pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional suatu aktivitas ekonomi, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Investasi saham di mana Entitas dan/atau Entitas Anak mempunyai kepemilikan saham sebesar 20% sampai dengan 50% dicatat berdasarkan metode ekuitas. Dengan metode ini, investasi dicatat pada biaya perolehan, disesuaikan dengan bagian Entitas atau Entitas Anak atas laba atau rugi bersih dari Entitas Asosiasi sejak tanggal perolehan, dikurangi dividen yang diterima.

i. Aset Takberwujud

Aset takberwujud dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada. Aset takberwujud diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat selama 4 (empat) tahun. Entitas dapat mengestimasi nilai yang dapat dipulihkan kembali dari aset takberwujud. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat dipulihkan kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat dipulihkan kembali.

j. Aset Tetap

Sesuai dengan PSAK No. 16, mengenai "Aset Tetap", aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

g. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods by using the straight-line method.

h. Investments

An associate is an entity in which the Entity and Subsidiaries have significant influence. The power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but has no control or joint control of those policies.

Investments in shares of stock wherein the Entity and/or Subsidiaries have an ownership interest of 20% to 50% which are accounted for using the equity method. Under this method, investments are stated at acquisition cost, adjusted for the Entity's or Subsidiaries' shares in net earnings or losses of the Associates since acquisition date and reduced by dividends received.

i. Intangible Assets

Intangible assets are recorded at cost less accumulated amortization and impairment, if any. Intangible assets are amortized based on estimated useful lives of 4 (four) years. The Entity shall estimate the recoverable value of intangible assets. If the carrying value of intangible assets exceeds the estimated recoverable amount, the carrying value of these assets is reduced to recoverable amount.

j. Fixed Assets

According with PSAK No. 16, regarding "Fixed Assets", fixed assets held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*). Umur ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut:

Depreciation is computed using the straight-line method. The useful lives of the fixed assets are as follows:

	<u>Umur Ekonomis/Useful Lives</u>	
Inventaris kantor	4	<i>Office equipment</i>
Kendaraan	8	<i>Vehicles</i>

Biaya perbaikan dan perawatan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut. Sedangkan biaya-biaya yang berjumlah besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi.

Cost of repairs and maintenance is charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred, significant renewals and betterments are capitalized.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutan dan amortisasi dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun yang bersangkutan.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying value and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gain or loss is credited or charged to current statements of profit or loss and other comprehensive income.

k. Sewa

Pada tanggal 1 Januari 2020, Entitas melakukan penerapan PSAK No. 73, mengenai "Sewa", yang mensyaratkan pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'.

k. Leases

On January 1, 2020, the Entity has applied PSAK No. 73, regarding "Leases", which set the requirements for the recognition of right-of-use asset and lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as 'operating lease'.

Sebagai Penyewa

As a Lessee

Pada tanggal permulaan kontrak, Entitas menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

At the inception of a contract, the Entity assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Entitas harus menilai apakah:

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Entity shall assess whether:

- Entitas memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan

- *The Entity has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- Entitas memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Entitas memiliki hak ini ketika mereka memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Entitas memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 2. Entitas telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal insepri atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Entitas mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana Entitas bertindak sebagai penyewa, Entitas memutuskan untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

i) Aset hak-guna

Pada tanggal permulaan sewa, Entitas mengakui aset hak-guna. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus. Umur ekonomis aset hak-guna adalah 1 tahun.

- *The Entity has the right to direct the use of the asset. The Entity has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined and:*

- 1. The Entity has the right to operate the asset;*
- 2. The Entity has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.*

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Entity allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components. However, for the leases of improvements in which the Entity is a lessee, the Entity has elected not to separate non-lease components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.

i) *Right-of-use assets*

The Entity recognizes a right-of-use asset at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial measurement of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to be incurred in dismantling and removing the underlying asset or to restore the underlying asset to the conditions required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Right-of-use assets are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method. The useful life of right-of-use asset is 1 year.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Entitas pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Entitas akan mengeksekusi opsi beli, maka Entitas menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Entitas menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Entitas menerapkan PSAK No. 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Ketika suatu kontrak mencakup komponen sewa dan non-sewa, Entitas menerapkan PSAK No. 72 untuk mengalokasikan imbalan berdasarkan kontrak bagi setiap komponen.

ii) Liabilitas sewa

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Entitas menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Entitas dan Entitas Anak cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Entity by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Entity will exercise a purchase option, the Entity depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Entity depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The Entity applies PSAK No. 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

When a contract includes lease and non-lease components, the Entity applies PSAK No. 72 to allocate the consideration under the contract for each component.

ii) Lease liability

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Entity uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- fixed payments (including in-substance fixed payments) less any lease incentives receivable;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- the exercise price of a purchase option if the Entity is reasonably certain to exercise that option; and

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode menggunakan metode suku bunga efektif.

Sewa Jangka Pendek

Entitas memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Entitas mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

1. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan, Kecuali Goodwill

Sesuai dengan PSAK No. 48, mengenai "Penurunan Nilai Aset", pada tanggal laporan posisi keuangan, Entitas menelaah nilai tercatat aset non-keuangan kecuali *goodwill* untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat dipulihkan kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat dipulihkan kembali atas suatu aset individu, Entitas mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat dipulihkan kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat dipulihkan kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat dipulihkan kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

- *payment of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising an option to terminate the lease.*

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period using the effective interest method.

Short-term Lease

The Entity has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low value assets. The Entity recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

1. Impairment of Non-Financial Assets, Except Goodwill

According to PSAK No. 48, regarding "Impairment of Assets", at the statement of financial position dates, the Entity reviews the carrying amount of non-financial assets except goodwill to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Entity estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell or value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

m. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja

Entitas mengakui liabilitas atas imbalan kerja karyawan yang tidak didanai sesuai dengan PSAK No. 24, mengenai “Imbalan Kerja”, dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021).

PP 35/2021 menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan PP 35/2021 adalah program imbalan pasti.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Entitas mengakui seluruh keuntungan atau kerugian aktuarial melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian aktuarial pada periode dimana keuntungan dan kerugian aktuarial terjadi, diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mengharuskan karyawan tersebut tetap bekerja selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan hak tersebut (*vesting period*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode *vesting*. Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

n. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Sesuai dengan PSAK No. 38, mengenai “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”.

m. Estimated Liabilities for Employee Benefits

The Entity recognizes an unfunded employee benefits liability in accordance with PSAK No. 24, regarding “Employee Benefits”, and Government Regulation No. 35 Year 2021 (PP 35/2021).

PP 35/2021 sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the PP 35/2021 represent defined benefit plans.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method.

The Entity recognizes all actuarial gains or losses through other comprehensive income. Actuarial gains or losses in the period where that actuarial gains or losses happen, are recognized as other comprehensive income and presented in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Past-service costs are recognized immediately in the statements of profit or loss and other comprehensive income, unless the changes to the pension plan are conditional on the employees remaining in service for a specified period of time (the vesting period). In this case, the past-service costs are amortized on a straight-line basis over the vesting period. The current service cost is recorded as an expense in the prevailing period.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

n. Business Combination of Entities under Common Control

According to PSAK No. 38, regarding “Business Combination of Entities under Common Control”.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dialihkan dan tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam grup tersebut. Karena pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi, bisnis yang dipertukarkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Jumlah tercatat dari unsur-unsur laporan keuangan tersebut merupakan jumlah tercatat dari entitas yang bergabung dalam kombinasi entitas sepengendali.

Kebijakan akuntansi yang seragam diterapkan pada entitas yang berkombinasi tersebut. Oleh karena itu, entitas hasil kombinasi mengakui aset dan liabilitas dari masing-masing entitas yang berkombinasi berdasarkan pada jumlah tercatatnya. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat hanya dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan akuntansi entitas yang berkombinasi dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas hasil kombinasi serta menerapkannya pada semua periode sajian. Pengaruh yang timbul sebagai akibat dari transaksi intra-entitas yang berkombinasi, yang timbul sejak awal terjadinya sepengendalian, dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan entitas hasil kombinasi.

Selisih antara imbalan dalam transaksi kombinasi bisnis dengan jumlah tercatat bisnis yang dilepas dalam setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dan menyajikannya dalam akun "Tambahkan Modal Disetor".

Transfer of business within entities under common control does not result in a change of the economic substance of ownership of business being transferred and does not result in a gain or loss to the group to the individual entities within the group. Since the transfer of business of entities under common control does not lead in a change of the economic substance, the business being exchanged is recorded at the book value using the pooling-of-interest method.

In applying the pooling of interest method, the components of the merged entity's financial statements are joined, for the period in which the business combination occurs and for other comparative periods presented, are presented as if the merger had occurred since the beginning of the earliest comparative period. The book value of the items in the financial statements represent the book value of the entities that are combined under the business combination of entities under common control.

A uniformity of accounting policy is applied to the combined entity. Accordingly, the combined entity recognizes the assets and liabilities of each combined entity based on the carrying amount. Adjustments to the carrying amount are only made to adjust the entity's accounting policies in combination with the accounting policies adopted by the combined entity and apply it to all periods of presentation. The effects arising as a result of combined intra-entity transactions, from the beginning of the common control are eliminated in the preparation of the combined entity's financial statements.

The difference between the benefits in a business combination transaction and the carrying amount of the business released in each business combination transaction of entities under common control in equity and presents it in the "Additional Paid-in Capital" account.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

o. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Beban

Pada tanggal 1 Januari 2020, Entitas telah menerapkan PSAK No. 72 yang membutuhkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Entitas membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Aset kontrak

Aset kontrak adalah hak untuk mendapatkan imbalan dalam pertukaran barang atau jasa yang dialihkan kepada pelanggan. Jika Entitas melaksanakan dengan mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan sebelum pelanggan membayar imbalan atau sebelum pembayaran jatuh tempo, aset kontrak diakui untuk memperoleh imbalan yang bersyarat.

o. Revenue and Expense Recognition

On January 1, 2020, the Entity has applied PSAK No. 72 which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract that transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Entity estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost-plus margin.*
5. *Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).*

Contract asset

Contract asset is the right to consideration in exchange for goods or services transferred to the customer. If the Entity performs by transferring of goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, a contract asset is recognized for earned consideration that is conditional.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Penjualan Produk

Pendapatan dari penjualan produk diakui pada saat penguasaan aset dialihkan kepada pelanggan, biasanya pada saat penyerahan barang. Entitas telah menyimpulkan bahwa itu adalah prinsipal dalam pengaturan pendapatannya karena ia mengendalikan barang sebelum mengalihkannya ke pelanggan.

Penjualan Jasa

Pendapatan dari kontrak atas penyediaan jasa diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian berdasarkan kontrak.

Dalam kontrak dengan pembayaran kapasitas tetap yang ditentukan pada awal kontrak, pembayaran kapasitas tetap untuk seluruh periode kontrak ditentukan pada hari ke-1 dan diakui sepanjang waktu. Secara khusus, pada kontrak di mana pembayaran kapasitas tetap tetapi meningkat selama periode kontrak tanpa referensi ke indeks pasar, eskalasi tetap tersebut diakui dengan dasar garis lurus selama periode kontrak.

Beban

Biaya dan beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas. Beban diakui pada saat terjadinya.

p. Pajak Penghasilan

Entitas menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2018), mengenai "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Entitas untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan, dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan yang diakui dalam laporan keuangan.

Sales of Product

Revenue from the sales of products is recognized at a point in time when control of the asset is transferred to the customer, generally on delivery of the goods. The Entity has concluded that it is the principal in its revenue arrangements because it controls the goods before transferring them to the customer.

Rendering of Services

Revenue from contract to provide services was recognized by reference to the percentage of completion of the contract.

In contracts with fixed capacity payments which are determined at the contract inception, the fixed capacity payments for the entire contract period is determined at day 1 and is recognized over time. Specifically, on contracts where capacity payments are fixed but escalate throughout the contract period without any reference to market indices, the fixed escalation is recognized on a straight-line basis over the contract period.

Expenses

Costs and expenses are decreases in economic benefits during the accounting period in the form of outflows or decrease of assets or incurrence of liabilities that result in decreases in equity, other than those relating to distributions to equity participants. Expenses are recognized when incurred.

p. Income Taxes

The Entity adopted PSAK No. 46 (Revised 2018), regarding "Income Taxes", which requires the Entity to account for the tax consequences of current and future taxes over the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) recognized in the statement of financial position and transactions as well as other events that occurred in the current year are recognized in the financial statements.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti nilai terbawa atas saldo rugi fiskal yang belum digunakan, jika ada, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between commercial and tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefit, such as the carry-forward of unused tax losses, if any, is also recognized to the extent that realization of such tax benefit is probable.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada tahun ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the statements of financial position date.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Change in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates is charged to current year operations, except to the extent that it relates to items previously charged or credited to equity.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Entitas mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

Changes to tax liabilities are recognized when the tax assessment is received or if the Entity appealed against, when the results of objection has been set.

q. Segmen Operasi

q. Operating Segments

PSAK No. 5 (Revisi 2015) mengharuskan segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Entitas yang secara regular direviu oleh “pengambil keputusan operasional” dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Kebalikan dengan standar sebelumnya yang mengharuskan Entitas mengidentifikasi dua segmen (bisnis dan geografis), menggunakan pendekatan risiko dan pengembalian.

PSAK No. 5 (Revised 2015) requires operating segments to be identified on the basis of internal reports about components of the Entity that are regularly reviewed by the “chief operating decision maker” in order to allocate resources and assesses performance of the operating segments. Contrary to the previous standard that requires the Entity identified two segments (business and geographical), using a risks and returns approach.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari Entitas:

Operating segments is a component of the Entity:

- Yang melibatkan dalam aktivitas bisnis memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- Hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan kinerjanya; dan
- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

- *Involving in business activities which earn income and create a load (including revenues and expenses related to transactions with other components of the same entity);*
- *The results of operations are reviewed regularly by decision maker about the resources allocated to the segment and its performance; and*
- *Available financial information which can be separated.*

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Entitas dieliminasi sebagai bagian dari proses.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before the Entity's balances and transactions are eliminated.

r. Laba Per Saham Dasar

Sesuai dengan PSAK No. 56, mengenai "Laba per Saham", laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode/tahun (setelah dikurangi dengan modal saham dibeli kembali).

r. Basic Earnings Per Share

In accordance with PSAK No. 56, regarding "Earnings Per Share", basic earnings per share is computed by dividing profit or loss attributable to Entity's ordinary stockholders by the weighted average number of shares outstanding during the period/year (less treasury stock).

s. Biaya Emisi Saham

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum saham kepada masyarakat, seperti biaya jasa penjamin emisi efek, jasa lembaga dan profesi penunjang emisi efek, percetakan dokumen dan promosi, serta biaya pencatatan awal efek di bursa efek, ditangguhkan. Biaya-biaya tersebut nantinya dicatat sebagai pengurang tambahan modal disetor, yang merupakan selisih antara nilai yang diterima dari pemegang saham dengan nilai nominal saham pada saat penawaran saham kepada masyarakat dilakukan.

s. Shares Issuance Cost

The costs incurred in connection with the public offering of shares to the public, such as fees for underwriting services, services for institutions and professions supporting securities issuance, document printing and promotion, as well as costs for initial listing of securities on the stock exchange, are deferred. These costs will later be recorded as a deduction from additional paid-in capital, which is the difference between the value received from the stockholders and the nominal value of the shares at the time the shares are offered to the public.

t. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa akhir tahun yang memberikan informasi tambahan tentang kondisi Entitas pada periode pelaporan (penyesuaian peristiwa) dicerminkan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun yang tidak menyesuaikan peristiwa diungkapkan dalam laporan keuangan yang material.

t. Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Entity's position at the reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the financial statements when material.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran tersebut.

3. USE OF SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of financial statements requires management to make estimations and assumptions that affect assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could be different from these estimations.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Estimasi dan Asumsi

Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Estimasi provisi kerugian kredit ekspektasian dari piutang usaha, aset kontrak dan piutang lain-lain

Tingkat provisi yang spesifik dievaluasi oleh manajemen dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut. Dalam kasus ini, Entitas menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan kondisi terbaik yang tersedia meliputi tetapi tidak terbatas pada jangka waktu hubungan Entitas dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat pencadangan spesifik untuk pelanggan terhadap jumlah jatuh tempo untuk mengurangi piutang Entitas menjadi jumlah yang diharapkan tertagih.

Pencadangan secara spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Selain provisi khusus terhadap piutang yang signifikan secara individual, Entitas juga mengakui provisi penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, dan meskipun tidak secara spesifik diidentifikasi membutuhkan provisi khusus, memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi daripada kembali piutang pada awalnya diberikan kepada debitur.

Entitas menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya untuk seluruh piutang usaha. Dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian, manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Pertimbangan diaplikasikan dalam menentukan periode sepanjang umurnya dan titik pengakuan awal piutang.

The Estimates and Assumptions

The estimates and assumptions that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are as follows:

- a. Estimating provision for expected credit losses of trade receivables, contract assets and other receivables

The level of a specific provision is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectability of the accounts. In these cases, the Entity uses judgment based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of the Entity's relationship with the customers and customers' credits status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in order to reduce the Entity's receivables to amounts that they expect to collect.

These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated. In addition to specific provision against individually significant receivables, the Entity also recognizes a collective impairment provision against credit exposure of its debtors which are grouped based on common credit characteristics, and although not specifically identified as requiring a specific provision, have a greater risk of default than when the receivables were originally granted to the debtors.

The Entity applies simplified approach to measure expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all account receivables. In determining expected credit losses, management is required to exercise judgment in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgment has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

b. Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan

Penyisihan atas persediaan usang, jika ada, diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada kondisi fisik persediaan tersebut. Entitas memiliki pengalaman dalam mengevaluasi persediaan dengan mempertimbangkan kegunaan dari persediaan tersebut. Entitas akan mengevaluasi dan menilai kondisi tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

c. Amortisasi Aset Takberwujud

Manajemen Entitas melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat aset takberwujud berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan.

Biaya perolehan aset takberwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap selama 4 (empat) tahun. Umur masa manfaat ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Entitas menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya amortisasi masa depan mungkin direvisi.

d. Penyusutan Aset Tetap dan Aset Hak-Guna

Manajemen Entitas melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat aset tetap dan aset hak-guna berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan.

Manajemen akan menyesuaikan beban penyusutan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau akan menghapus bukukan atau melakukan penurunan nilai atas aset yang secara teknis telah usang atau aset non-strategis yang dihentikan penggunaannya atau dijual.

b. Allowance for Inventories Obsolescence

Allowance for inventories obsolescence, if any, is estimated based on fact and situation, including but not limited on, physical condition of inventories. The Entity has experiences in evaluating inventories with considering benefits from inventories. The Entity will evaluate and measure that condition at every reporting date.

c. Amortization of Intangible Assets

The Entity's management reviews periodically the estimated useful lives of intangible assets based on factors such as technical specification and future technological developments.

Costs of acquisition of intangible assets are amortized using the straight-line method based on estimated future economic benefits. Management estimates the useful lives of the assets to be 4 (four) years. The useful life of these assets is generally expected in the industry in which the Entity does business. Changes in the level of usage and technological developments could impact the economic useful lives and residual values of assets, and therefore future amortization charges may be revised.

d. Depreciation of Fixed Assets and Right-of-Use Assets

The Entity's management reviews periodically the estimated useful lives of fixed assets and right-of-use assets based on factors such as technical specification and future technological developments.

Management will revise the depreciation expenses where useful lives are different to those previously estimated, or it will write-off or impair of assets which are technically obsolete or non-strategic assets that have been abandoned or sold.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Biaya perolehan aset tetap dan aset hak-guna disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset hak-guna adalah 1-8 tahun. Umur masa manfaat ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Entitas menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

The costs of fixed assets and right-of-use assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets and right-of-use assets are 1-8 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Entity conduct their businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

e. Imbalan Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuaria. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya neto untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas aset program dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan kerja.

e. *Employee Benefits*

The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost for pensions include the expected long-term rate of return on the relevant plan assets and the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefits obligation.

Asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program ditentukan secara seragam, dengan mempertimbangkan pengembalian historis jangka panjang, alokasi aset dan perkiraan masa depan atas pengembalian investasi jangka panjang.

The expected return on plan assets assumption is determined on a uniform basis, taking into consideration long-term historical returns, asset allocation and future estimates of long-term investment returns.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

Other key assumptions for employee benefits obligation are based in part on current market conditions.

f. Instrumen Keuangan

Ketika nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model *discounted cash flow*. Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti rasio likuiditas, resiko kredit, dan volatilitas. Perubahan dalam asumsi mengenai efek faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan.

f. *Financial Instruments*

When the fair value of financial assets and liabilities recorded in the statements of financial position could not be derived from active markets, their fair value is determined using valuation techniques including the discounted cash flow model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

g. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan kecuali *Goodwill*

Pada setiap akhir periode pelaporan, Entitas menelaah nilai tercatat aset non-keuangan kecuali *goodwill* untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Entitas mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

h. Pengukuran Nilai Wajar

Sejumlah aset dan liabilitas yang termasuk ke dalam laporan keuangan Entitas memerlukan pengukuran, dan/atau pengungkapan atas nilai wajar.

Pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dan non-keuangan Entitas memanfaatkan pasar *input* dan data yang dapat diobservasi sedapat mungkin. *Input* yang digunakan dalam menentukan pengukuran nilai wajar dikategorikan ke dalam level yang berbeda berdasarkan pada bagaimana *input* dapat diobservasi yang digunakan dalam teknik penilaian yang digunakan (hirarki nilai wajar):

- Level 1: Harga kuotasi di pasar aktif untuk *item* yang serupa (tidak disesuaikan).
- Level 2: Teknik penilaian untuk *input* yang dapat diamati langsung atau tidak langsung selain *input* level 1.

g. *Impairment of Non-Financial Assets except Goodwill*

At the end of each reporting period, the Entity reviews the carrying amount of non-financial assets except goodwill to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Entity estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

h. *Fair Value Measurement*

A number of assets and liabilities included in the Entity's financial statements require measurement at, and/or disclosure of fair value.

The fair value measurement of the Entity's financial and non-financial assets and liabilities utilize market observable inputs and data as far as possible. Inputs used in determining fair value measurements are categorized into different levels based on how observable the inputs used in the valuation technique utilized are (the fair value hierarchy):

- *Level 1: Quoted prices in active markets for identical items (unadjusted).*
- *Level 2: Valuation techniques for observable direct or indirect inputs other than level 1 inputs.*

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- Level 3: Teknik penilaian untuk *input* yang tidak dapat diobservasi (yaitu tidak berasal dari data pasar).

Klasifikasi item menjadi level di atas didasarkan pada tingkat terendah dari *input* yang digunakan yang memiliki efek signifikan pada pengukuran nilai wajar *item* tersebut. Transfer *item* antar level diakui pada periode saat terjadinya.

Jika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diukur berdasarkan harga kuotasian di pasar aktif, maka nilai wajarnya diukur dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model arus kas yang didiskontokan. Masukan untuk model ini diambil dari pasar yang dapat diobservasi jika memungkinkan, tetapi jika tidak memungkinkan, diperlukan tingkat pertimbangan dalam menetapkan nilai wajar. Pertimbangan termasuk pertimbangan *input* seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan asumsi terkait faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar instrumen keuangan yang dilaporkan.

i. Pemulihan dari Aset Pajak Tangguhan

Entitas melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai tidak lagi memungkinkan di mana penghasilan kena pajak akan tersedia untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Entitas atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya. Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian Entitas di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Namun, tidak terdapat kepastian bahwa Entitas dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

- Level 3: Valuation techniques for unobservable inputs (i.e. not derived from market data).

The classification of an item into the above levels is based on the lowest level of the inputs used that has a significant effect on the fair value measurement of the item. Transfers of items between levels are recognized in the period they occur.

When the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the statements of financial position cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including discounted cash flow model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgement is required in establishing fair value. Judgement includes considerations of inputs such as liquidity risks, credit risks and volatility. Changes in assumptions relating to these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

i. Recoverability of Deferred Tax Assets

The Entity reviews the carrying amounts of deferred tax assets at the end of each reporting period and reduces these to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. The Entity's assessment on the recognition of deferred tax assets on deductible temporary differences and tax loss carried forward are based on the level and timing of forecasted taxable income of the subsequent reporting period. This forecast is based on the Entity's past results and future expectations on revenues and expenses as well as future tax planning strategies. However, there is no assurance that the Entity will generate sufficient taxable income to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

j. Ketidakpastian Kewajiban Perpajakan

Dalam situasi tertentu, Entitas tidak dapat menentukan secara pasti jumlah utang pajak kini atau masa mendatang atau jumlah klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan karena proses pemeriksaan yang masih berlangsung atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan utang pajak yang tidak pasti atau klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan terkait dengan ketidakpastian posisi perpajakan, Entitas menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah provisi yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57, mengenai "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" dan PSAK No. 46, mengenai "Pajak Penghasilan". Entitas membuat analisa untuk semua ketidakpastian posisi perpajakan untuk menentukan jika utang pajak atas manfaat pajak yang tidak pasti atau cadangan atas klaim restitusi pajak yang tidak dapat terpulihkan harus diakui.

Entitas mencatat bunga dan denda atas pajak penghasilan kurang bayar, jika ada, pada beban pajak penghasilan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pertimbangan Akuntansi Penting dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi Entitas

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Entitas, manajemen telah membuat pertimbangan yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan:

a. Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan tergantung pada hasil model bisnis dan hanya untuk pembayaran pokok dan bunga. Entitas menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan

j. *Uncertain Tax Exposure*

In certain circumstances, the Entity may not be able to determine the exact amount of their current or future tax liabilities or recoverable amount of the claim for tax refund due to ongoing investigation by, or negotiation with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability or the recoverable amount of the claim for tax refund related to uncertain tax positions, the Entity applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK No. 57, regarding "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and PSAK No. 46, regarding "Income Taxes". The Entity makes an analysis of all uncertain tax positions to determine if a tax liability for uncertain tax benefit or a provision for unrecoverable claim for tax refund should be recognized.

The Entity presents interest and penalties for the underpayment of income tax, if any, in income tax expense in the statement profit or loss and other comprehensive income.

Significant Accounting Judgments in Applying the Entity's Accounting Policies

In the process of applying the Entity's accounting policies, management has made the following judgment, apart from those involving estimations and assumptions, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

a. *Business Model Assessment*

Classification and measurement of financial assets depends on the result of the business model solely for payments of principal and interest (SPPI) test. The Entity determines the business model at a level that reflects how the group of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerja mereka diukur, risiko yang mempengaruhi kinerja aset dan bagaimana ini dikelola dan bagaimana manajer aset dikompensasi. Entitas memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasannya konsisten dengan tujuan bisnis tempat aset itu dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Entitas mengenai apakah model bisnis yang dimiliki oleh aset keuangan yang tersisa terus sesuai dan jika tidak tepat apakah telah ada perubahan dalam model bisnis dan perubahan prospektif ke arah itu. Klasifikasi aset tersebut. Tidak ada perubahan yang diperlukan selama periode yang disajikan.

b. Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan

Kerugian kredit ekspektasian (KKE) diukur sebagai penyisihan yang setara dengan KKE 12 bulan untuk aset tahap 1, atau KKE sepanjang umurnya untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Sebuah aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. PSAK No. 71 tidak menjelaskan apa yang merupakan peningkatan risiko kredit yang signifikan. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Entitas memperhitungkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif. Manajemen menilai tidak terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan atas aset keuangan Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

c. Menentukan Masa Sewa Kontrak dengan Opsi Pembaruan dan Penghentian – *Lessee*

Entitas menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika dipastikan secara wajar akan dilaksanakan, atau setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk mengakhiri sewa, jika dipastikan tidak akan dilakukan secara wajar

relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed and how the managers of the assets are compensated. The Entity monitors financial assets measured at amortized cost or FVOCI that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in the business model and so a prospective change to the classification of those assets. No such changes were required during the periods presented.

b. Significant Increase in Credit Risk

Expected credit losses (“ECL”) are measured as an allowance equal to 12-month ECL for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when credit risks had increased significantly since initial recognition. PSAK No. 71 does not define what constitutes a significant increase in credit risk. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased, the Entity takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward-looking information. Management assessed that there has no significant increase in credit risk on the Entity’s financial assets for the period ended July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019.

c. Determining the Lease Term of Contract with Renewal and Termination Option – *Lessee*

The Entity determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Entitas memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian. Entitas menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah cukup yakin apakah akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa atau tidak. Artinya, ia mempertimbangkan semua faktor relevan yang menciptakan insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Entitas menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendalinya dan mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan opsi untuk memperbarui atau menghentikan (misalnya, konstruksi kontrak perbaikan hak milik yang signifikan atau penyesuaian yang signifikan pada aset yang disewakan).

The Entity has several lease contracts that include extension and termination options. The Entity applies judgment in evaluating whether it is reasonably certain whether or not to exercise the option to renew or terminate lease. That is, it considers all relevant factors that create an economic incentive for it to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Entity reassess the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate (e.g., construction of significant lease hold improvements or significant customization to the leased asset).

4. KAS DAN BANK

4. CASH ON HAND AND IN BANKS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Kas	10.000.000	10.000.000	1.927.541	33.560.926	Cash on hand
Bank					Cash in banks
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.933.622.915	146.987.955	248.725.633	528.448.460	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	137.587.012	3.982.425.594	500.195.537	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	128.535.055	-	813.864.118	906.038.845	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Capital Indonesia Tbk	19.317.118	19.606.252	13.257.164	181.186.223	PT Bank Capital Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.250.650	1.009.426.671	7.987.142.858	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	6.017.269	1.375.265.555	91.315.402	116.816.659	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank DKI	580.000	685.000	875.000	-	PT Bank DKI
Sub-jumlah	<u>3.233.910.019</u>	<u>6.534.397.027</u>	<u>9.655.375.712</u>	<u>1.732.490.187</u>	Sub-total
Jumlah	<u><u>3.243.910.019</u></u>	<u><u>6.544.397.027</u></u>	<u><u>9.657.303.253</u></u>	<u><u>1.766.051.113</u></u>	Total

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, tingkat suku bunga kontraktual atas bank sebesar 0,25% – 2,00%.

As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the contractual interest rate on the cash in banks are 0.25% – 2.00%.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Tidak ada saldo kas dan bank kepada pihak berelasi.

There are no cash on hand and in banks to related parties.

Tidak terdapat saldo kas dan bank yang dibatasi penggunaannya.

There are no cash on hand and in banks balances which are restricted for use.

5. PIUTANG USAHA

5. TRADE RECEIVABLES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
<u>Pihak Berelasi</u> (lihat Catatan 35):					<u>Related Parties</u> (see Note 35):
PT Anugrah Damai Yaksa Teknologi	3.402.170.802	-	-	-	PT Anugrah Damai Yaksa Teknologi
PT Gumrining Sentosa	-	-	2.639.597.477	-	PT Gumrining Sentosa
Sub-jumlah	3.402.170.802	-	2.639.597.477	-	Sub-total
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	(125.439.143)	-	-	-	Less allowance for impairment loss on trade receivables
Sub-jumlah – neto	3.276.731.659	-	2.639.597.477	-	Sub-total – net
<u>Pihak Ketiga:</u>					<u>Third Parties:</u>
PT Tron Bandung Raya	1.922.068.882	3.246.951.000	290.140.000	-	PT Tron Bandung Raya
PT Galaksak Brilliant Solusi	1.833.823.313	1.718.945.533	-	-	PT Galaksak Brilliant Solusi
PT Galang Suar Teknologi	1.868.063.943	-	-	-	PT Galang Suar Teknologi
PT Trans Mega Selaras	807.440.692	171.019.750	171.019.750	-	PT Trans Mega Selaras
PT Tron Distribusi Nusantara	562.943.160	-	-	-	PT Tron Distribusi Nusantara
PT Teknologi Rancang Olah Nusantara	331.818.300	-	-	-	PT Teknologi Rancang Olah Nusantara
PT Trans Mikro Bersama	234.521.645	-	-	-	PT Trans Mikro Bersama
PT Gumrining Sentosa	192.144.144	8.541.756.955	-	-	PT Gumrining Sentosa
PT Lie Ling Indonesia	112.230.006	-	-	-	PT Lie Ling Indonesia
PT Adiputro Wirasejati	77.855.520	-	-	-	PT Adiputro Wirasejati
PT Megah Lancar Bersama	-	-	-	166.980.000	PT Megah Lancar Bersama
Lain-lain	9.590.400	5.380.000	5.380.000	23.815.000	Others
Sub-jumlah	7.952.500.005	13.684.053.238	466.539.750	190.795.000	Sub-total
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	(161.983.734)	(191.010.877)	-	-	Less allowance for impairment loss on trade receivables
Sub-jumlah – neto	7.790.516.271	13.493.042.361	466.539.750	190.795.000	Sub-total – net
Jumlah	11.067.247.930	13.493.042.361	3.106.137.227	190.795.000	Total

PT Gumrining Sentosa bukan lagi pihak berelasi sejak 30 April 2021.

PT Gumrining Sentosa is no longer a related party since April 30, 2021.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

PT Teknologi Rancang Olah Nusantara bukan lagi pihak berelasi sejak 14 Juli 2022.

PT Teknologi Rancang Olah Nusantara is no longer a related party since July 14, 2022.

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

Analysis of aging schedule of trade receivables were as follows:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Belum jatuh tempo	2.911.642.503	-	-	-	<i>Not yet due</i>
Telah jatuh tempo					<i>Has matured</i>
30 hari	3.036.997.040	13.217.513.488	924.959.750	49.500.000	<i>30 days</i>
31-60 hari	1.464.019.908	-	167.200.000	26.015.000	<i>31-60 days</i>
61-90 hari	634.457.796	-	779.347.477	24.090.000	<i>61-90 days</i>
> 90 hari	3.307.553.560	466.539.750	1.234.630.000	91.190.000	<i>>90 days</i>
Sub-jumlah	11.354.670.807	13.684.053.238	3.106.137.227	190.795.000	<i>Sub-total</i>
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	(287.422.877)	(191.010.877)	-	-	<i>Less allowance for impairment loss on trade receivable</i>
Jumlah	11.067.247.930	13.493.042.361	3.106.137.227	190.795.000	<i>Total</i>

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment loss of trade receivables are as follows:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022 (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Desember 2021/ December 31, 2021 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2020/ December 31, 2020 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2019/ December 31, 2019 (Satu Tahun/ One Year)	
Saldo awal tahun	191.010.877	-	-	-	<i>Balance at beginning of year</i>
Penambahan periode/tahun berjalan (lihat Catatan 33)	96.412.000	191.010.877	-	-	<i>Additions of during the period/year (see Note 33)</i>
Saldo akhir periode/tahun	287.422.877	191.010.877	-	-	<i>Balance at end of period/year</i>

Pada tanggal 31 Juli 2022, piutang usaha dijaminkan untuk fasilitas kredit yang diterima dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lihat Catatan 16).

As of July 31, 2022, trade receivables are pledged as collateral for the credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (see Note 16).

Entitas menerapkan cadangan kerugian ekspektasian untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

The Entity applies the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang usaha pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagih piutang usaha.

Based on a review of the trade receivables as of July 31, 2022 and December 31, 2021, management believed that the allowance for impairment loss on trade receivables is enough to cover possible losses from uncollectible accounts.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan tidak terdapat bukti objektif saldo piutang usaha tidak dapat ditagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai piutang usaha.

Based on a review of the trade receivables as of December 31, 2020 and 2019, management believed that there was no objective evidence on trade receivables which cannot be collected, so allowance for impairment loss of trade receivables was not necessary.

6. ASET KONTRAK

Akun ini merupakan piutang usaha kepada pihak ketiga yang belum ditagihkan sebesar Rp 3.935.551.534 pada tanggal 31 Juli 2022.

Aset kontrak ini sehubungan dengan perjanjian Kerjasama Entitas dengan Satuan Kerja Direktorat Angkutan Jalan (lihat Catatan 42).

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun aset kontrak pada tanggal 31 Juli 2022, manajemen berkeyakinan tidak terdapat bukti objektif saldo aset kontrak tidak dapat ditagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai aset kontrak.

6. CONTRACT ASSETS

This account represents trade receivables to third parties that have not been billed amounting to Rp 3,935,551,534 as of July 31, 2022.

This contract asset is related to the Entity's Cooperation agreement with Satuan Kerja Direktorat Angkutan Jalan (see Note 42).

Based on a review of the contract assets as of July 31, 2022, management believed that there was no objective evidence on contract assets which cannot be collected, so allowance for impairment loss of contract assets was not necessary.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
<u>Pihak Berelasi</u>					<u>Related Parties</u>
<u>(lihat Catatan 35):</u>					<u>(see Note 35):</u>
David Santoso	250.000.000	3.000.000.000	260.000.000	1.800.000.000	David Santoso
PT Teknologi Rancang Olah Nusantara	-	6.511.707.005	-	-	PT Teknologi Rancang Olah Nusantara
PT Teknologi Unggul Nusantara	-	6.000.000	-	-	PT Teknologi Unggul Nusantara
PT Gumrining Sentosa	-	-	1.670.393.427	2.444.811.799	PT Gumrining Sentosa
Sub-jumlah	250.000.000	9.517.707.005	1.930.393.427	4.244.811.799	Sub-total
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	(1.700.796)	(40.548.140)	-	-	Less allowance for impairment loss on other receivables
Sub-jumlah – neto	248.299.204	9.477.158.865	1.930.393.427	4.244.811.799	Sub-total – net
<u>Pihak Ketiga:</u>					<u>Third Parties:</u>
PT Gumrining Sentosa	2.795.956.040	2.293.140.931	-	-	PT Gumrining Sentosa
PT Galang Suar Teknologi	1.156.190.033	4.982.778.322	-	-	PT Galang Suar Teknologi

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Juli 2022/ July 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
PT Trans Mega Selaras	136.163.981	-	-	-	PT Trans Mega Selaras
PT Galaksak Brilliant Solusi	-	266.411.542	-	-	PT Galaksak Brilliant Solusi
PT Teknologi Rancang Olah Nusantara	-	-	-	89.903.500	PT Teknologi Rancang Olah Nusantara
Karyawan	55.787.800	11.290.868	-	-	Employees
Sub-jumlah	4.144.097.854	7.553.621.663	-	89.903.500	Sub-total
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	(49.012.838)	(90.475.793)	-	-	Less allowance for impairment loss on other receivables
Sub-jumlah – neto	4.095.085.016	7.463.145.870	-	89.903.500	Sub-total – net
Jumlah	4.343.384.220	16.940.304.735	1.930.393.427	4.334.715.299	Total

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment loss on other receivables are as follows:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022 (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Desember 2021/ December 31, 2021 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2020/ December 31, 2020 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2019/ December 31, 2019 (Satu Tahun/ One Year)	
Saldo awal tahun	131.023.933	-	-	-	Balance at beginning of year
Pemulihan periode/tahun berjalan (lihat Catatan 29)	(80.310.299)	-	-	-	Reversal during the period/year (see Note 29)
Penambahan periode/tahun berjalan (lihat Catatan 33)	-	131.023.933	-	-	Additions of during the period/year (see Note 33)
Saldo akhir periode/tahun	50.713.634	131.023.933	-	-	Balance at end of period/year

PT Gumrining Sentosa sudah bukan lagi pihak berelasi sejak 30 April 2021.

PT Gumrining Sentosa is no longer a related party since April 30, 2021.

PT Teknologi Rancang Olah Nusantara sudah bukan lagi pihak berelasi sejak 14 Juli 2022.

PT Teknologi Rancang Olah Nusantara is no longer a related party since July 14, 2022.

Seluruh piutang lain-lain belum jatuh tempo.

All other receivables are not yet matured.

Tidak terdapat piutang lain-lain yang dijaminkan.

There are no other receivables pledged as collateral.

Pada tanggal 31 Juli 2022, pengurangan piutang lain-lain – pihak berelasi sebesar Rp 3.000.000.000 merupakan pengurangan yang berkaitan dengan, Entitas Anak yang sudah tidak dikonsolidasi pada periode berjalan.

As of July 31, 2022, the deduction of other receivables – related parties amounting to Rp 3,000,000,000 represents deductions related to the Subsidiary, which are not consolidated in the current period.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap akun piutang lain-lain pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagih piutang lain-lain.

Based on the review of the other receivables as of July 31, 2022 and December 31, 2021, management believes that the allowance for impairment loss on other receivables is enough to cover possible losses from uncollectible other receivables.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan tidak terdapat bukti objektif saldo piutang lain-lain tidak dapat ditagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain.

Based on a review of the other receivables as of December 31, 2020 and 2019, management believed that there was no objective evidence on other receivables which cannot be collected, so allowance for impairment loss on other receivables is not necessary.

8. PERSEDIAAN

8. INVENTORIES

Akun ini merupakan persediaan berupa peralatan Telematika sebesar Rp 11.048.784.140, Rp 3.354.466.500, Rp 2.471.723.810 dan Rp 60.125.193 masing-masing pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

This account represents inventories of Telematic equipment amounting to Rp 11,048,784,140, Rp 3,354,466,500, Rp 2,471,723,810 and Rp 60,125,193 as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively.

Persediaan Entitas digunakan untuk kegiatan operasional bisnis dan tidak dijaminkan kepada pihak manapun.

The Entity's inventories are used for business operations and are not pledged as collateral to any party.

Entitas tidak mengasuransikan persediaan karena manajemen berkeyakinan bahwa risiko kerusakan, kebakaran, pencurian dan lain-lain adalah kecil.

The Entity did not insured its inventories since management believes that the risks of damage, fire, theft and other risks are low.

Berdasarkan evaluasi manajemen Entitas berpendapat bahwa tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Based on the Entity's management evaluation, there are no events or changes in the circumstances, which might indicate decline in value of inventories as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019.

9. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

9. PREPAID EXPENSES

Akun ini merupakan biaya dibayar di muka atas beban operasional sebesar Rp 172.303.000 pada tanggal 31 Desember 2020.

This account represented prepaid expenses for operating expenses amounting to Rp 172,303,000 as of December 31, 2020.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. UANG MUKA

10. ADVANCES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Juli 2022/ <i>July 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	31 Desember 2019/ <i>December 31, 2019</i>	
Lancar					Current
Operasional	-	99.108.400	329.306.617	-	Operational
Tidak Lancar					Non-Current
<u>Pihak Berelasi</u>					<u>Related Party</u>
<u>(lihat Catatan 35):</u>					<u>(see Note 35):</u>
David Santoso	5.500.000.000	-	-	-	David Santoso
<u>Pihak Ketiga:</u>					<u>Third party:</u>
Pembelian tanah dan bangunan	651.941.961	-	-	-	Purchase land and building
Sub-jumlah	6.151.941.961	-	-	-	Sub-total
Jumlah	6.151.941.961	99.108.400	329.306.617	-	Total

Uang muka dengan David Santoso untuk pembelian bangunan kantor di Komplek Perumahan Batu Ceper Permai Blok V No. 17-18, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang (lihat Catatan 35, 42 dan 43).

Advance to David Santoso for the purchase of office buildings at the Batu Ceper Permai Housing Complex Block V No. 17-18, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang (see Notes 35, 42 and 43).

Uang muka dengan pihak ketiga untuk pembelian tanah dan bangunan (lihat Catatan 42).

Advances with third parties for the purchase of land and buildings (see Note 42).

11. ASET LANCAR LAINNYA

11. OTHER CURRENT ASSETS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Juli 2022/ <i>July 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	31 Desember 2019/ <i>December 31, 2019</i>	
Biaya emisi saham	1.402.510.000	-	-	-	Share issuance costs
Deposit	50.000.000	50.000.000	-	-	Deposit
Jumlah	1.452.510.000	50.000.000	-	-	Total

12. INVESTASI SAHAM

12. INVESTMENT IN SHARES

Akun ini merupakan penyertaan saham pada Entitas Asosiasi pada tanggal 31 Juli 2022, dengan rincian sebagai berikut:

This account represents investment in Associate as of July 31, 2022, with details as follows:

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nilai Tercatat Awal Tahun/Carrying Value at Beginning of the Year	Penambahan (Pengurangan)/ Additions (Deductions)	Bagian atas Laba (Rugi) Bersih (lihat Catatan 33)/Portion of Net Profit (Loss) (see Note 33)	Penghasilan Komprehensif Lain/Other Comprehensive Income – Net Tax	Nilai Tercatat Akhir Tahun/Carrying Value at Ending of the Year	
PT Digital Karyaloka Nusantara	25%	12.000.000.000	(8.250.000.000)	(2.062.920)	-	3.747.937.080	PT Digital Karyaloka Nusantara

PT Digital Karyaloka Nusantara

PT Digital Karyaloka Nusantara (“DKN”) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 32, tanggal 28 September 2021 dari Mutiara Hartanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0066696.AH.01.01.Tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021. Kepemilikan saham Entitas pada DKN sebesar 80% atau setara dengan Rp 12.000.000.000 (120.000 lembar saham), sehingga Entitas mengkonsolidasi laporan keuangan DKN (lihat Catatan 1c).

Berdasarkan Akta Notaris No. 110, tanggal 29 Juli 2022 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, Entitas memiliki investasi sebanyak 37.500 lembar saham yang nilai nominal sebesar Rp 100.000 per lembar saham atau setara dengan Rp 3.750.000.000 pada PT Digital Karyaloka Nusantara. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0038557, tanggal 29 Juli 2022.

Pada tahun 2021, DKN dikonsolidasi oleh Entitas atas kepemilikan saham sebesar 80% (lihat Catatan 1c).

Ringkasan informasi keuangan Entitas Asosiasi adalah sebagai berikut:

Ringkasan laporan posisi keuangan (neraca):

	31 Juli 2022/ July 31, 2022
<u>PT Digital Karyaloka Nusantara</u>	
Jumlah aset	14.834.582.592
Jumlah liabilitas	55.245.441
Jumlah ekuitas	14.779.337.151

PT Digital Karyaloka Nusantara

PT Digital Karyaloka Nusantara (“DKN”) was established based on Notarial Deed No. 32, dated September 28, 2021 of Mutiara Hartanto, S.H., Notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0066696.AH.01.01.Tahun 2021, dated October 22, 2021. The Entity’s share ownership in DKN of 80% or equivalent to Rp 12,000,000,000 (120,000 shares), therefore, the Entity consolidated DKN’s financial statements (see Note 1c).

Based on Notarial Deed No. 110 dated July 29, 2022 of Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the Entity has owned 37,500 shares, which has a par value of Rp 100,000 per share or total amounting to Rp 3,750,000,000 in PT Digital Karyaloka Nusantara. This Deed had been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0038557, dated July 29, 2022.

In 2021, DKN was consolidated by the Entity with share ownership of 80% (see Note 1c).

The summary of the financial information of the Associates are as follows:

Summary of statement of financial position:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022
<u>PT Digital Karyaloka Nusantara</u>	
Total assets	14.834.582.592
Total liabilities	55.245.441
Total equity	14.779.337.151

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain:

Summary of statement of profit or loss and other
comprehensive income:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022 (Tujuh Bulan/ Seven Months)	
<u>PT Digital Karyaloka Nusantara</u>		<u>PT Digital Karyaloka Nusantara</u>
Rugi sebelum pajak	(185.662.849)	Loss before tax
Rugi tahun berjalan	(185.662.849)	Loss for the year
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan	(185.662.849)	Total comprehensive loss for the year

13. ASET HAK-GUNA

13. RIGHT-OF-USE ASSETS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Juli 2022/July 31, 2022 (Tujuh Bulan/Seven Months)				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan					Acquisition Cost
Ruko	132.000.000	66.000.000	-	198.000.000	Shophouse
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Ruko	80.300.000	42.350.000	-	122.650.000	Shophouse
Nilai Buku	<u>51.700.000</u>			<u>75.350.000</u>	Book Value
	31 Desember 2021/December 31, 2021 (Satu Tahun/One Year)				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan					Acquisition Cost
Ruko	66.000.000	66.000.000	-	132.000.000	Shophouse
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Ruko	11.000.000	69.300.000	-	80.300.000	Shophouse
Nilai Buku	<u>55.000.000</u>			<u>51.700.000</u>	Book Value
	31 Desember 2020/December 31, 2020 (Satu Tahun/One Year)				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan					Acquisition Cost
Ruko	-	66.000.000	-	66.000.000	Shophouse

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2020/December 31, 2020 (Satu Tahun/One Year)				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Akumulasi Penyusutan Ruko	-	11.000.000	-	11.000.000	Accumulated Depreciation Shophouse
Nilai Buku	-			55.000.000	Book Value

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sewa ruko beralamat di Jalan Trembesi Blok G1 No. 826, Mini Office Central 88, Jakarta Utara.

As of December 31, 2021 and 2020, the shophouse is located at Jalan Trembesi Blok G1 No. 826, Mini Office Central 88, Jakarta Utara.

Beban penyusutan dialokasikan sebagai beban umum dan administrasi (lihat Catatan 31).

Depreciation expenses are allocated as general and administrative expenses (see Note 31).

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, manajemen Entitas berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset hak-guna.

As of July 31, 2022, December 31, 2021 and 2020, the Entity's management believes that there were no indication of impairment on right-of-use-assets.

14. ASET TAKBERWUJUD

14. INTANGIBLE ASSETS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Juli 2022/July 31, 2022 (Tujuh Bulan/Seven Months)				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan Perangkat lunak	18.550.000.000	12.856.000.000	-	31.406.000.000	Acquisition Costs Software
Akumulasi Amortisasi Perangkat lunak	8.215.624.996	2.705.208.331	-	10.920.833.327	Accumulated Amortization Software
Nilai Buku	10.334.375.004			20.485.166.673	Book Value

	31 Desember 2021/December 31, 2021 (Satu Tahun/One Year)				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan Perangkat lunak	17.050.000.000	1.500.000.000	-	18.550.000.000	Acquisition Cost Software
Akumulasi Amortisasi Perangkat lunak	3.921.875.000	4.293.749.996	-	8.215.624.996	Accumulated Amortization Software
Nilai Buku	13.128.125.000			10.334.375.004	Book Value

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2020/December 31, 2020 (Satu Tahun/One Year)				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan					Acquisition Costs
Perangkat lunak	-	17.050.000.000	-	17.050.000.000	Software
Akumulasi Amortisasi					Accumulated Amortization
Perangkat lunak	-	3.921.875.000	-	3.921.875.000	Software
Nilai Buku	-			13.128.125.000	Book Value

Perangkat lunak yang dimiliki Entitas adalah *platform* atau sekumpulan program teknologi informasi yang digunakan untuk proses berfungsinya aplikasi secara digital yang memiliki dasar untuk kegiatan pengembangan. Perangkat lunak digunakan pelanggan untuk kegiatannya dan sebagai kontrak pekerjaan bagi Entitas.

The software owned by the Entity is a platform or set of information technology programs that are used to process digital functional applications that have a basis for development activities. The software is used by customers for its activities and is used as employment contracts for the Entity.

Pembelian atas aset perangkat lunak dibeli dari PT Teknologi Rancang Olah Nusantara yang merupakan pihak berelasi sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 (lihat Catatan 35 dan 42).

Purchases of software acquired from PT Teknologi Rancang Olah Nusantara which is a related party until July 14, 2022 (see Notes 35 and 42).

Aset takberwujud Entitas tidak diasuransikan karena manajemen melakukan penyimpanan program pada *cloud*.

The Entity's intangible assets are not insured because management performs program storage in the cloud.

Beban amortisasi dialokasikan pada beban pokok pendapatan (lihat Catatan 28).

Amortization expense is allocated as part of cost of revenues (see Note 28).

Berdasarkan laporan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan No. 00364/2.0118-00/BS/06/0596/1/IX/2022, tanggal 30 September 2022, tidak terdapat indikasi penurunan nilai. Dasar penilaian yang diterapkan adalah *Replacement Cost New (RCN)*, dimana nilai wajar atas aset takberwujud adalah sebesar Rp 21.555.000.000 pada tanggal 31 Juli 2022.

Based on the assessment report from the Public Appraisal Service Office of Iskandar and Partners No. 00364/2.0118-00/BS/06/0596/1/IX/2022, dated September 30, 2022, there is no indication of impairment. Valuation basis applied is the *Replacement Cost New (RCN)*, where the fair value of intangible assets amounting to Rp 21,555,000,000 as of July 31, 2022.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen Entitas berpendapat bahwa tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

Based on the evaluation performed, the Entity's management believes that there are no events or changes in circumstances which indicate an impairment on the intangible assets as of July 31, 2022, December 31, 2021 and 2020.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. ASET TETAP

15. FIXED ASSETS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Juli 2022/July 31, 2022 (Tujuh Bulan/Seven Months)				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan					Acquisition Costs
Inventaris kantor	458.108.327	204.829.530	-	662.937.857	Office equipment
Kendaraan	861.427.000	-	-	861.427.000	Vehicles
Jumlah	1.319.535.327	204.829.530	-	1.524.364.857	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Inventaris kantor	147.623.196	66.460.312	-	214.083.508	Office equipment
Kendaraan	71.785.583	64.010.192	-	135.795.775	Vehicles
Jumlah	219.408.779	130.470.504	-	349.879.283	Total
Nilai Buku	1.100.126.548			1.174.485.574	Book Value
	31 Desember 2021/December 31, 2021 (Satu Tahun/One Year)				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan					Acquisition Cost
Inventaris kantor	170.651.127	287.457.200	-	458.108.327	Office equipment
Kendaraan	-	861.427.000	-	861.427.000	Vehicles
Jumlah	170.651.127	1.148.884.200	-	1.319.535.327	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Inventaris kantor	94.887.302	52.735.894	-	147.623.196	Office equipment
Kendaraan	-	71.785.583	-	71.785.583	Vehicles
Jumlah	94.887.302	124.521.477	-	219.408.779	Total
Nilai Buku	75.763.825			1.100.126.548	Book Value
	31 Desember 2020/December 31, 2020 (Satu Tahun/One Year)				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan					Acquisition Costs
Inventaris kantor	90.043.500	80.607.627	-	170.651.127	Office equipment
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Inventaris kantor	70.662.958	24.224.344	-	94.887.302	Office equipment
Nilai Buku	19.380.542			75.763.825	Book Value

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2019/December 31, 2019 (Satu Tahun/One Year)				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan					Acquisition Costs
Inventaris kantor	82.043.500	8.000.000	-	90.043.500	Office equipment
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Inventaris kantor	29.728.229	40.934.729	-	70.662.958	Office equipment
Nilai Buku	<u>52.315.271</u>			<u>19.380.542</u>	Book Value

Beban penyusutan dialokasikan sebagai beban umum dan administrasi (lihat Catatan 31).

Depreciation expenses are allocated as general and administrative expenses (see Note 31).

Terdapat aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan oleh Entitas dengan nilai perolehan sebesar Rp 90.043.500.

There are fixed assets which have been fully depreciated and are still being used by the Entity with an acquisition cost amounting to Rp 90,043,500.

Kendaraan milik Entitas digunakan sebagai jaminan utang lembaga keuangan kepada PT CIMB Niaga Auto Finance (lihat Catatan 20). Kendaraan tersebut diasuransikan terhadap kerugian total kepada PT Sampo Insurance Indonesia dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 718.250.000 dan Rp 845.000.000 pada 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

Vehicles are used as collateral for financial institutions' loan to PT CIMB Niaga Auto Finance (see Note 20). The vehicle was insured against total loss to PT Sampo Insurance Indonesia with insurance coverage amounting to Rp 718,250,000 and Rp 845,000,000 and as of July 31, 2022 and December 31, 2021, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen Entitas berpendapat bahwa tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Based on the evaluation performed, the Entity's management believes that there are no events or changes in circumstances which indicate an impairment of fixed assets as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019.

16. UTANG BANK JANGKA PENDEK

16. SHORT-TERM BANK LOANS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.195.830.405	999.586.075	1.000.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.026.568.983	-	-	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	6.400.000.000	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah	<u>7.222.399.388</u>	<u>999.586.075</u>	<u>7.400.000.000</u>	<u>-</u>	Total

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”)

Berdasarkan Perjanjian antara Entitas dengan BRI No. 3028/KC-V/ADK/11/2020, tanggal 16 November 2020, Entitas memperoleh fasilitas:

- a. Kredit Modal Kerja *Withdrawal Approval (W/A)* sebesar Rp 4.000.000.000.
- b. Kredit Modal Kerja *Credit Overeenkomst (CO)* Tetap sebesar Rp 1.000.000.000.

Tingkat suku bunga fasilitas kredit ini sebesar 9,95% sampai dengan 13% per tahun. Jangka waktu fasilitas berlaku sampai dengan tanggal 16 November 2021.

Pinjaman dijaminan dengan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1713 atas nama Rode Rosita Sari yang akan dilakukan balik nama waris ke ahli waris (David Santoso, Kezia Natania Santoso dan Nicholas Natanael Santoso).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 64 dan No. 65, tanggal 24 Desember 2021, pinjaman dengan BRI telah diperpanjang sampai dengan tanggal 16 November 2022. Tingkat suku bunga fasilitas kredit sebesar 9,95% sampai dengan 13% per tahun.

Jaminan fasilitas kredit atas tanah dan bangunan telah dibalik nama sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3600 atas nama David Santoso, Kezia Natania Santoso dan Nicholas Natanael Santoso pada tanggal 4 Januari 2021 (lihat Catatan 35).

Selama periode pinjaman, Entitas tanpa persetujuan tertulis dari BRI tidak diperkenankan untuk:

- Melakukan *merger*, akuisisi, penjualan aset perusahaan, *go public*.
- Mengikatkan diri sebagai peminjam terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada pada saat ini.
- Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, dan atau perubahan pemilikan saham, dan komposisi permodalan.
- Memberikan piutang kepada pemegang saham dengan alasan apapun.
- Melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan.
- Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”)

Based on the Agreement between the Entity and BRI No. 3028/KC-V/ADK/11/2020, dated November 16, 2020, the Entity obtained:

- a) Withdrawal Approval (W/A) Working Capital Credit Facility amounting to Rp 4,000,000,000.*
- b) Credit Overeenkomst (CO) Working Capital Credit Facility amounting to Rp 1,000,000,000.*

Annual interest rate of these facilities is 9.95% until 13%. The term of these facilities was up to November 16, 2021.

These loan facilities are guaranteed by land and building Certificate of Ownership No. 1713 in the name of Rode Rosita Sari, the name of the inheritance will be transferred to the heirs (David Santoso, Kezia Natania Santoso and Nicholas Natanael Santoso).

Based on the Deed of Credit Agreement No. 64 and No. 65, dated December 24, 2021, the loan with BRI have been extended until November 16, 2022. Annual interest of these facilities is 9.95% until 13% per annum.

The collateral for the credit facilities on the land and buildings had been reversed in accordance with the Certificate of Ownership No. 3600 under the name of David Santoso, Kezia Natania Santoso and Nicholas Nathanael Santoso dated January 4, 2021 (see Note 35).

During the period of agreement, the Entity without any consent letter from BRI is not allowed to:

- Conduct merger, acquisition, sell company assets, go public.*
- Bind as the guarantor of other parties and/or pledge the assets to other parties except those that already exist.*
- Change the articles of association, change the structure of board members and/or change the stockholders, and capital structure.*
- Provide receivables to stockholders for any reason.*
- Distribute dividends to stockholders, unless they are reused as additional paid-in capital for the company.*
- Receive loans from other banks or other financial institutions.*

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset perusahaan dengan nilai yang menurut pendapat pejabat bank dapat mengganggu *cash flow* usaha debitur dalam jangka waktu 1 tahun.
- Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang *cash flow* tidak terganggu serta *Net Working (NWC)* masih positif.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri debitur sendiri.
- Melunasi utang kepada pemegang saham sebelum hutang di BRI dilunasi terlebih dahulu.

Berdasarkan Surat No. B.99.e-RO-JKS/RLG/08/2022, tanggal 29 Agustus 2022, Entitas telah mendapat persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Mengenai pelaksanaan *Initial Public Offering (IPO)* (lihat Catatan 42).

Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 4.195.830.405, Rp 999.586.075, dan Rp 1.000.000.000.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 64 pada tanggal 26 April 2022, Entitas memperoleh fasilitas kredit dari Mandiri berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional (M71) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bersifat *Revolving*. Jumlah fasilitas maksimal adalah sebesar Rp 10.000.000.000, termasuk Sublimit Fasilitas *Non-Cash Loan Bank Garansi* sebesar Rp 2.000.000.000 dengan suku bunga 9,50% per tahun. Kredit bertujuan dalam rangka tambahan modal kerja untuk pekerjaan atas dasar kontrak dengan Kementerian. Jangka waktu fasilitas ini sampai dengan tanggal 25 April 2023.

Fasilitas kredit ini dijaminkan dengan:

- a. Tanah dan Bangunan Ruko 3 lantai, yang berlokasi di Komplek Ruko Batu Ceper Permai, Jalan Batu Ceper Permai Blok V No. 18, Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang dengan Sertifikat Hak Milik No. 2860 atas nama David Santoso (lihat Catatan 35).
- b. Fidusia atas piutang senilai Rp 12.500.000.000 (lihat Catatan 5).

- *Invest, expand business and sell company assets at a value which in the opinion of bank officials can disrupt the cash flow of the debtor's business within a period of 1 year.*
- *Invest in shares, except for existing ones and as long as cash flow is not disrupted and Net Working (NWC) is still positive.*
- *Submit a petition for a declaration of bankruptcy to the Commercial Court to declare the debtor's own bankruptcy.*
- *Pay off debt to stockholders before the debt at BRI is paid off first.*

Based on Letter No. B.99.e-RO-JKS/RLG/08/2022, dated August 29, 2022, the Entity had received approval from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regarding the conducting of the Initial Public Offering (IPO) (see Note 42).

The outstanding short-term bank loan as of July 31, 2022, December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp 4,195,830,405, Rp 999,586,075, and Rp 1,000,000,000, respectively.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 64, dated April 26, 2022, the Entity obtained a credit facility from Mandiri in the form of a Transactional Working Capital Credit Facility (M71) from the State Budget (APBN), which is Revolving in nature. The maximum amount is Rp 10,000,000,000, including Sub limit Non-Cash Loan Bank Guarantee Facility amounting to Rp 2,000,000,000 with an interest rate of 9.50% per annum. This credit aimed to provide additional working capital for work on a contract basis with the Ministry. The term of this facility is up to April 25, 2023.

This facility is collateralized with:

- a. *Land and Building 3 storey building shophouse, located in Batu Ceper Permai Ruko Complex, Jalan Batu Ceper Permai Blok V No. 18, Batu Ceper Village, Batu Ceper Street, Tangerang City, with Certificate of Ownership No. 2860 under the name of David Santoso (see Note 35).*
- b. *Fiduciary on the receivables amounting to Rp 12,500,000,000 (see Note 5).*

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Selama periode perjanjian, tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri, Entitas tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan anggaran dasar.
- b. Memindahtangankan barang agunan aset tetap.
- c. Menerima pinjaman baru dari pihak lain
- d. Mengikat diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain.
- e. Menyewakan objek agunan aset tetap.
- f. Mengambil bagian dividen atau modal.
- g. Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit.
- h. Mengalihkan kepemilikan saham atau membubarkan Entitas.
- i. Berpindah lokasi kantor atau mengganti nomor telepon.
- j. Mengajukan restrukturisasi Covid-19 atas fasilitas kredit produktif.

Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp 3.026.568.983.

Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 17 Oktober 2022 (lihat Catatan 43).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)

Berdasarkan Perjanjian No. 098/TAC/PK-KMK/2020, tanggal 27 Februari 2020, antara Entitas dengan BNI, Entitas memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp 7.500.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 12% per tahun. Fasilitas kredit ini telah dilunasi pada tanggal 21 Agustus 2021.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan tanah dan bangunan yang berlokasi di Tangerang, Banten dengan Sertifikat Hak Milik No. 2860 atas nama David Santoso (lihat Catatan 35).

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 6.400.000.000.

Pinjaman ini telah dilunasi pada bulan September 2021.

During the period of agreement, without any written consent from Mandiri, the Entity is not allowed to perform the following matters:

- a. Change the articles of association.
- b. Transfer fixed assets as collateral.
- c. Obtain new loans from other parties
- d. Bind oneself as a guarantor of a debt or secure property to another party.
- e. Lease out fixed assets pledged as collateral.
- f. Take a share of dividends or capital.
- g. Transfer or assign to another party the rights and obligations that arise in connection with the credit facility.
- h. Transfer share ownership or dissolve the Entity.
- i. Change office locations or changing phone numbers.
- j. Propose Covid-19 restructuring of productive credit facilities.

The outstanding short-term bank loan as of July 31, 2022 amounted to Rp 3,026,568,983.

This loan was fully paid on October 17, 2022 (see Note 43).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)

Based on the Agreement No. 098/TAC/PK-KMK/2020, dated February 27, 2020, between the Entity and BNI, the Entity obtained a Working Capital Credit facility of Rp 7,500,000,000 with an interest rate of 12% per annum. This credit facility has been paid on August 21, 2021.

This credit facility is guaranteed with land and building located in Tangerang, Banten with Certificate of Building Rights No. 2860 under the name of David Santoso (see Note 35).

The outstanding balance as of December 31, 2020 amounted to Rp 6,400,000,000.

This loan facility was fully paid in September 2021.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
<u>Pihak Berelasi</u>					<u>Related Parties</u>
<u>(lihat Catatan 35):</u>					<u>(see Note 35):</u>
PT Teknologi Rancang Olah Nusantara	-	1.650.000.000	-	-	PT Teknologi Rancang Olah Nusantara
PT Anugrah Damai Yaksa Teknologi	-	248.763.900	-	-	PT Anugrah Damai Yaksa Teknologi
Sub-jumlah	-	1.898.763.900	-	-	Sub-total
<u>Pihak Ketiga</u>					<u>Third Parties</u>
PT Teknologi Rancang Olah Nusantara	981.427.533	-	-	-	PT Teknologi Rancang Olah Nusantara
PT Asaba	637.710.387	-	-	-	PT Asaba
PT Softorb Technology Indonesia	55.500.000	-	-	-	PT Softorb Technology Indonesia
Kristo Hananto	33.300.000	-	-	-	Kristo Hananto
PT Easy Go Indonesia	382.950	-	4.174.500	-	PT Easy Go Indonesia
B Smart Technology	347.423	146.747.425	546.550.000	-	B Smart Technology
PT Galang Suar Teknologi	-	13.073.160.611	123.200.000	-	PT Galang Suar Teknologi
PT Sosial Teknologi Indonesia	-	-	37.072.003	-	PT Sosial Teknologi Indonesia
Lain-lain	-	1.700.000	-	-	Other
Sub-jumlah	1.708.668.293	13.221.608.036	710.996.503	-	Sub-total
Jumlah	1.708.668.293	15.120.371.936	710.996.503	-	Total

Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Belum jatuh tempo	1.708.668.293	15.120.371.936	710.996.503	-	Not yet due
Telah jatuh tempo	-	-	-	-	Has matured
Jumlah	1.708.668.293	15.120.371.936	710.996.503	-	Total

PT Teknologi Rancang Olah Nusantara bukan lagi pihak berelasi sejak 14 Juli 2022.

PT Teknologi Rancang Olah Nusantara is no longer a related party since July 14, 2022.

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha kepada pihak ketiga tersebut.

There is no collateral given for the trade payables to third parties.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Pihak Berelasi					<u>Related parties</u>
(lihat Catatan 35):					(see Note 35):
PT Anugrah Damai					PT Anugrah Damai
Yaksa					Yaksa Teknologi
Teknologi	273.852.135	692.153.127	-	-	David Santoso
David Santoso	-	1.491.672.000	1.140.000.000	-	Rudy Budiman
Rudy Budiman					Setiawan
Setiawan	-	420.000.000	420.000.000	-	PT Gumrining
PT Gumrining					Sentosa
Sentosa	-	-	-	176.837.044	
Sub-jumlah	<u>273.852.135</u>	<u>2.603.825.127</u>	<u>1.560.000.000</u>	<u>176.837.044</u>	Sub-total
Pihak Ketiga:					<u>Third Parties:</u>
PT Teknologi					PT Teknologi
Rancang Olah					Rancang Olah
Nusantara	193.540.509	-	-	-	Nusantara
PT Galaksak					PT Galaksak
Brilliant Solusi	101.086.570	-	-	-	Brilliant Solusi
PT Tron Bandung					PT Tron Bandung
Raya	6.015.180	656.125.275	-	-	Raya
PT Trans Mega					PT Trans Mega
Selaras	-	1.081.218.694	-	-	Selaras
PT Tri Digifin	-	-	600.000.000	-	PT Tri Digifin
PT Teknologi					PT Teknologi
Rancang Olah					Rancang Olah
Nusantara	-	-	-	9.300.000	Nusantara
Lain-lain	4.025.004	35.000.000	-	-	Others
Sub-jumlah	<u>304.667.263</u>	<u>1.772.343.969</u>	<u>600.000.000</u>	<u>9.300.000</u>	Sub-total
Jumlah	<u><u>578.519.398</u></u>	<u><u>4.376.169.096</u></u>	<u><u>2.160.000.000</u></u>	<u><u>186.137.044</u></u>	Total

PT Teknologi Rancang Olah Nusantara bukan lagi pihak berelasi sejak 14 Juli 2022.

PT Teknologi Rancang Olah Nusantara is no longer a related party since July 14, 2022.

Seluruh utang lain-lain Entitas belum jatuh tempo.

All other payables of the Entity are not yet matured.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, utang lain-lain – pihak berelasi terdapat bagian atas utang dividen kepada pemegang saham sebesar Rp 1.500.000.000 masing-masing sebesar Rp 1.080.000.000 dan Rp 420.000.000 untuk David Santoso dan Rudy Budiman Setiawan (lihat Catatan 24 dan 35). Pada tahun 2022, utang dividen ini telah dibayarkan.

As of December 31, 2021 and 2020, other payables – related parties, there is a dividend payable to stockholders amounting to Rp 1,500,000,000 in the amount of Rp 1,080,000,000 and Rp 420,000,000 for David Santoso and Rudy Budiman Setiawan, respectively (see Notes 24 and 35). In 2022, this dividend payable has been paid.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Jasa konsultan	303.750.000	-	73.000.000	60.000.000	Consultant services
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	150.981.403	4.030.428	5.578.970	-	Social Insurance Administration Organization
Bunga Operasional	31.589.903	-	-	-	Interest Operations
Gaji	-	-	-	82.606.407	Salaries
Jumlah	486.321.306	4.030.428	630.611.352	142.606.407	Total

19. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

20. UTANG LEMBAGA KEUANGAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
PT CIMB Niaga Auto Finance	382.130.737	481.549.365	-	-	PT CIMB Niaga Auto Finance
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	201.210.614	178.199.201	-	-	Less current portion
Bagian jangka panjang	180.920.123	303.350.164	-	-	Long-term portion

20. FINANCIAL INSTITUTION LOAN

This account consists of:

PT CIMB Niaga Auto Finance

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 453102100116, tanggal 7 Mei 2021, Entitas memperoleh fasilitas pembiayaan multiguna dari PT CIMB Niaga Auto Finance sebesar Rp 591.500.000 dengan jangka waktu selama 3 tahun, suku bunga sebesar 11,10% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan unit kendaraan milik Entitas (lihat Catatan 15).

PT CIMB Niaga Auto Finance

Based on the Financing Agreement No. 453102100116, dated May 7, 2021, the Entity obtained a multi-purpose financing facility from PT CIMB Niaga Auto Finance amounting to Rp 591,500,000 with a term of 3 years, interest rate of 11.10% per annum. This loan is collateralized by the Entity's vehicle unit (see Note 15).

21. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA

Berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, aktuaris independen, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dalam laporannya masing-masing No. 581/IPK/KKA-TBA/IX-2022, tanggal 6 September 2022, No. 432/IPK/KKA-TBA/VI-2022, tanggal 19 April 2022, No. 196/IPK/KKA-TBA/II-2021, tanggal 25 Februari 2021 dan No. 574/IPK/KKA-TBA/XII-2020, tanggal 21 Desember 2021 untuk tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Entitas mencatat imbalan pasti atas uang pesangon, uang

21. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS

Based on the actuarial valuation performed by KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, an independent actuary, used the "Projected Unit Credit" method on its report No. 581/IPK/KKA-TBA/IX-2022, dated September 6, 2022, No. 432/IPK/KKA-TBA/VI-2022, dated April 19, 2022, No. 196/IPK/KKA-TBA/II-2021, dated Februari 25, 2021 and No. 574/IPK/KKA-TBA/XII-2020, dated Desember 21, 2021, respectively as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Entity recorded a defined benefit to severance pay,

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan masing-masing sebesar Rp 2.445.926.846, Rp 707.342.966, Rp 145.478.321 dan Rp 413.349.726 pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang disajikan sebagai akun "Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja" dalam laporan posisi keuangan.

gratuity and compensation benefits to employees amounting to Rp 2,445,926,846, Rp 707,342,966, Rp 145,478,321 and Rp 413,349,726 as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively, is presented as "Estimated Liabilities for Employee Benefits" in the statements of financial position.

Jumlah karyawan yang berhak diperhitungkan untuk imbalan pascakerja tersebut pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah 61, 32, 25 dan 17 karyawan.

The number of employees entitled to the employee benefits as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 are 61, 32, 25 and 17 employees, respectively.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program, namun sebagian akan di-offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability, however this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Longevity Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Risiko Gaji

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Beberapa asumsi yang digunakan untuk perhitungan aktuarial tersebut adalah sebagai berikut:

The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Usia pensiun normal	56 Tahun/Year	56 Tahun/Year	56 Tahun/Year	56 Tahun/Year	Normal retirement age
Tingkat kenaikan gaji	8% per Tahun/ per Annum	8% per Tahun/ per Annum	8% per Tahun/ per Annum	8% per Tahun/ per Annum	Salary increment rate
Tingkat mortalitas	Tabel Mortalitas Indonesia (TMI) IV – 2019/Table of Mortality in Indonesia (TMI)- IV 2019	Tabel Mortalitas Indonesia (TMI) IV – 2019/Table of Mortality in Indonesia (TMI)- IV 2019	Tabel Mortalitas Indonesia (TMI) IV – 2019/Table of Mortality in Indonesia (TMI)- IV 2019	Tabel Mortalitas Indonesia (TMI) III – 2019/Table of Mortality in Indonesia (TMI)- III 2019	Mortality rate
Tingkat diskonto	7,44%	7,12%	7,01%	7,79%	Discount rate
Metode	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Method

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Besarnya beban yang timbul sehubungan dengan program imbalan karyawan adalah sebagai berikut:

The amount of expenses arising in connection with employee benefit plans are as follows:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022 (Tujuh Bulan/Seven Months)	31 Desember 2021/ December 31, 2021 (Satu Tahun/One Year)	31 Desember 2020/ December 31, 2020 (Satu Tahun/One Year)	31 Desember 2019/ December 31, 2019 (Satu Tahun/One Year)	
Biaya jasa kini	865.461.327	256.669.484	84.610.727	73.715.577	Current service cost
Biaya bunga	50.362.819	7.701.256	32.199.944	24.306.306	Interest cost
Jumlah	915.824.146	264.370.740	116.810.671	98.021.883	Total

Beban imbalan kerja dialokasikan sebagai "Beban Umum dan Administrasi" (lihat Catatan 31).

Employee benefits are allocated as "General and Administrative Expenses" (see Note 31).

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The estimated liabilities for employee benefits in the statements of financial position are as follows:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Nilai kini liabilitas	2.445.926.846	707.342.966	145.478.321	413.349.726	Present value of liabilities

Analisis liabilitas diestimasi atas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Analysis of estimated liabilities for employee benefits are as follows:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022 (Tujuh Bulan/Seven Months)	31 Desember 2021/ December 31, 2021 (Satu Tahun/One Year)	31 Desember 2020/ December 31, 2020 (Satu Tahun/One Year)	31 Desember 2019/ December 31, 2019 (Satu Tahun/One Year)	
Saldo awal	707.342.966	145.478.321	413.349.726	279.382.830	Beginning balance
Beban imbalan kerja karyawan tahun berjalan (lihat Catatan 31)	915.824.146	264.370.740	116.810.671	98.021.883	Employment benefits expense during the year (see Note 31)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja (lihat Catatan 25)	822.759.734	333.793.905	(384.682.076)	35.945.013	Remeasurement of employee benefits obligation (see Note 25)
Pembayaran manfaat	-	(36.300.000)	-	-	Benefits payment
Saldo akhir liabilitas	2.445.926.846	707.342.966	145.478.321	413.349.726	Ending balance of liabilities

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban jasa kini.

The following table summarizes the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the estimated liabilities for employee benefits and current service cost.

	31 Juli 2022/ July 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
<u>Tingkat Diskonto</u>					<u>Discount Rate</u>
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	2.281.314.799	673.287.326	133.905.734	368.814.896	Increase in interest rate in 100 basis points
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	2.633.477.408	747.574.537	159.914.369	466.597.342	Decrease in interest rate in 100 basis points
<u>Tingkat Kenaikan Gaji</u>					<u>Salary Increment Rate</u>
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	2.630.611.794	746.819.898	159.620.622	465.951.374	Increase in interest rate in 100 basis points
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	2.280.680.035	673.252.107	133.904.765	368.514.204	Decrease in interest rate in 100 basis points

Manajemen Entitas berpendapat bahwa jumlah penyisihan tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 11/2020, Peraturan Pemerintah No. 35/2021 dan PSAK No. 24 (Penyesuaian 2018).

The management of the Entity believes that the allowance is adequate to meet the requirements of Law No. 11/2020, Government Regulations No. 35/2021 and PSAK No. 24 (Improvement 2018).

22. MODAL SAHAM

22. CAPITAL STOCK

Susunan pemegang saham dan persentase kepemilikan pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

The composition of stockholders and their percentage of ownership as of July 31, 2022 is as follows:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 20 per Saham/ Par Value Rp 20 per Share			Jumlah dalam Rupiah/ Total in Rupiah	Stockholders
	Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Share Issued and Fully Paid (Lembar/Shares)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)			
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	2.195.600.000	99,80	43.912.000.000		PT Daya Kemilau Nusantara Investama
David Santoso	3.168.000	0,14	63.360.000		David Santoso
Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	0,06	24.640.000		Rudy Budiman Setiawan
Jumlah	2.200.000.000	100,00	44.000.000.000		Total

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan Akta Notaris No. 108, tanggal 28 Juli 2022 oleh Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0053277.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 29 Juli 2022, Pemegang Saham Entitas menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan modal disetor semula sebesar Rp 22.000.000.000 menjadi sebesar Rp 44.000.000.000.
- Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.200.000.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 44.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 170, tanggal 28 April 2022 oleh Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0234184 tanggal 28 April 2022, para pemegang saham menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan modal disetor yang diakibatkan adanya dividen Entitas atas saldo laba yang di konversi menjadi modal disetor sebesar Rp 7.000.000.000 (lihat Catatan 24).
- Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.100.000.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 22.000.000.000, sehingga susunan pemegang saham Entitas adalah sebagai berikut:
 - Modal saham PT Daya Kemilau Nusantara Investama sejumlah 1.095.600.000 lembar saham atau sebesar Rp 21.912.000.000.
 - Modal saham David Santoso sejumlah 3.168.000 lembar saham atau sebesar Rp 63.360.000.
 - Modal saham Rudy Budiman Setiawan sejumlah 1.232.000 lembar saham atau sebesar Rp 24.640.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 154, tanggal 27 April 2022 oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0030934.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, Pemegang saham Entitas menyetujui:

- Peningkatan modal Entitas menjadi Rp 60.000.000.000 terbagi atas 3.000.000.000 lembar saham.

Based on Notarial Deed No. 108, dated July 28, 2022 by Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., Notary in South Jakarta, which had been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in a Decision Letter No. AHU-0053277.AH.01.02.Tahun 2022, dated July 29, 2022, the Stockholders of the Entity agreed to the following matters:

- *Increase in paid-in capital from Rp 22,000,000,000 to Rp 44,000,000,000.*
- *From the authorized capital, 2,200,000,000 shares have been issued and paid-up with a total nominal value of Rp 44,000,000,000.*

Based on Notarial Deed No. 170, dated April 28, 2022 by Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., Notary in South Jakarta, which had been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the Notification Letter No. AHU.AH.01.03-0234184 dated April 28, 2022, the stockholders agreed to the following matters:

- *Increase in paid-in capital due to the Entity's dividend from retained earning which is converted into paid-in capital of Rp 7,000,000,000 (see Note 24).*
- *From the authorized capital 1,100,000,000 shares have been issued and paid-up with a total nominal value of Rp 22,000,000,000, so that the composition of the Entity's stockholders is as follows:*
 - *Capital stock of PT Daya Kemilau Nusantara Investama amounting to 1,095,600,000 shares or Rp 21,912,000,000.*
 - *Capital stock of David Santoso amounting to 3,168,000 shares or Rp 63,360,000.*
 - *Capital stock of Rudy Budiman Setiawan amounting to 1,232,000 shares or Rp 24,640,000.*

Based on Notarial Deed No. 154, dated April 27, 2022 by Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, which had been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in a Decision Letter No. AHU-0030934.AH.01.02.Tahun 2022 dated April 27, 2022, the Stockholders of the Entity agreed:

- *Increase in the Entity's capital to Rp 60,000,000,000 divided into 3,000,000,000 shares.*

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25% atau sejumlah 750.000.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 15.000.000.000, sehingga susunan pemegang saham Entitas adalah sebagai berikut:
 - Modal saham PT Daya Kemilau Nusantara Investama sejumlah 747.000.000 lembar saham atau sebesar Rp 14.940.000.000.
 - Modal saham David Santoso sejumlah 2.160.000 lembar saham atau sebesar Rp 864.000.000.
 - Modal saham Rudy Budiman Setiawan sejumlah 840.000 lembar saham atau sebesar Rp 336.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 103, tanggal 22 Maret 2022 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0030584.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 28 April 2022, Pemegang Saham Entitas menyetujui :

- Pengurangan modal dasar semula sebesar Rp 60.000.000.000 menjadi sebesar Rp 240.000.000, terbagi atas 12.000.000 lembar saham dan pengurangan modal disetor semula sebesar Rp 15.000.000.000 menjadi sebesar Rp 60.000.000 terbagi atas 3.000.000 lembar saham. Susunan pemegang saham Entitas adalah sebagai berikut:
 - Modal saham David Santoso sejumlah 2.160.000 lembar saham atau sebesar Rp 43.200.000.
 - Modal saham Rudy Budiman Setiawan sejumlah 840.000 lembar saham atau sebesar Rp 16.800.000.
- Mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Entitas yaitu menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan dan jasa.

- *The authorized capital have been issued and paid up by 25% or a total of 750,000,000 shares with a total nominal value Rp. 15,000,000,000, so that the composition of the Entity's stockholders is as follows:*

- *Capital stock of PT Daya Kemilau Nusantara Investama amounting to 747,000,000 shares or Rp 14,940,000,000.*
- *Capital stock of David Santoso amounting to 2,160,000 shares or Rp 864,000,000.*
- *Capital stock of Rudy Budiman Setiawan amounting to 840,000 shares or Rp 336,000,000.*

Based on Notarial Deed No. 103, dated March 22, 2022 from Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, which had been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a Decision Letter No. AHU-0030584.AH.01.02.Tahun 2022, dated April 28, 2022, the Stockholders of the Entity agreed to:

- *Deduction of the original authorized capital of Rp 60,000,000,000 to Rp 240,000,000, divided into 12,000,000 shares and a reduction in the original paid-in capital of Rp 15,000,000,000 to Rp 60,000,000 divided into 3,000,000 shares. The composition of the Entity's stockholders are as follows:*
 - *Capital stock of David Santoso amounting to 2,160,000 shares or Rp 43,200,000.*
 - *Capital stock of Rudy Budiman Setiawan share amounting to 840,000 shares or Rp 16,800,000.*
- *Change the purposes and objectives as well as the Entity's business activities, namely carrying out business activities in the field of trade and services.*

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Susunan pemegang saham dan persentase kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of stockholders and their percentage of ownership as of December 31, 2021 and 2020 is as follows:

Pemegang Saham	Nilai nominal Rp 20 per saham/ Par value Rp 20 per share		Jumlah dalam Rupiah/ Total in Rupiah	Stockholders
	Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Share Issued and Fully Paid (Lembar/Share)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)		
David Santoso	540.000.000	72	10.800.000.000	David Santoso
Rudy Budiman Setiawan	210.000.000	28	4.200.000.000	Rudy Budiman Setiawan
Jumlah	750.000.000	100	15.000.000.000	Total

Berdasarkan Akta Notaris No. 44, tanggal 28 Desember 2020 oleh Yunita Ariska, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0086077.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020, Pemegang saham menyetujui:

- Perubahan nilai nominal saham dari Rp 100.000 menjadi Rp 20.
- Peningkatan modal dasar Entitas semula Rp 5.000.000.000 menjadi Rp 60.000.000.000 terbagi atas 3.000.000.000 saham.
- Peningkatan modal disetor semula Rp 1.250.000.000 menjadi Rp 15.000.000.000 terbagi atas 750.000.000 dengan menerbitkan saham baru sebanyak 687.500.000 saham atau sebesar Rp 13.750.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
 - David Santoso sejumlah 495.000.000 lembar saham atau sebesar Rp 9.900.000.000, dan;
 - Rudy Budiman Setiawan sebanyak 192.500.000 atau sejumlah Rp 3.850.000.000

Based on Notarial Deed No. 44, dated December 28, 2020 by Yunita Ariska, SH., M.Kn., Notary in North Jakarta, which had been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in a Decision Letter No. AHU-0086077.AH.01.02.Tahun 2020 dated December 28, 2020, the Stockholders agreed to:

- Change the par value of shares from Rp 100,000 to Rp 20.
- Increase in the Entity's authorized capital of Rp 5,000,000,000 to Rp 60,000,000,000 divided into 3,000,000,000 shares.
- Increase in paid-in-capital of Rp 1,250,000,000 to Rp 15,000,000,000 divided into 750,000,000 shares with issued 687,500,000 new shares or Rp 13,750,000,000, are as follow:
 - David Santoso amounting to 495,000,000 shares or Rp 9,900,000,000, and;
 - Rudy Budiman Setiawan amounting to 192,500,000 shares or Rp 3,850,000,000

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Susunan pemegang saham dan persentase kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of stockholders and their percentage of ownership as of December 31, 2019 is as follows:

Pemegang Saham	Nilai nominal Rp 100.000 per saham/ Par value Rp 100,000 per share		Jumlah dalam Rupiah/ Total in Rupiah	Stockholders
	Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Share Issued and Fully Paid (Lembar/Share)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)		
Nony Kusuma	10.000	80	1.000.000.000	Nony Kusuma
Herry	2.500	20	250.000.000	Herry
Jumlah	12.500	100	1.250.000.000	Total

Berdasarkan Akta Notaris No. 4, tanggal 16 Januari 2018 oleh Nina Kasih Puspita, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU.AH.01.03-0042348 tanggal 29 Januari 2018, Pemegang saham menyetujui pengalihan saham sebanyak 2.500 dari Joko Suyanto kepada Herry. Susunan pemegang saham Entitas adalah sebagai berikut:

Based on Notarial Deed No. 4, dated January 16, 2018 by Nina Kasih Puspita, S.H., M.Kn., Notary in Bogor, which had been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in a Decision Letter No. AHU.AH.01.03-0042348 dated January 29, 2018, the Stockholders agreed to transfer of 2,500 shares from Joko Suyanto to Herry. The composition of the Entity's stockholders are as follows:

- Modal saham Nony Kusuma sejumlah 10.000 lembar saham atau sebesar Rp 1.000.000.000.
- Modal saham Herry sejumlah 2.500 lembar saham atau sebesar Rp 250.000.000.

- Capital stock of Nony Kusuma amounting to 10,000 shares or Rp 1,000,000,000.
- Capital stock of Herry amounting to 2,500 shares or Rp 250,000,000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 1, tanggal 27 Maret 2017 oleh Nina Kasih Puspita, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0007393.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, Pemegang saham menyetujui:

Based on Notarial Deed No. 1, dated March 27, 2017 by Nina Kasih Puspita, S.H., M.Kn., Notary in Bogor, which had been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in a Decision Letter No. AHU-0007393.AH.01.02.Tahun 2017 dated March 29, 2017, the Stockholders agreed to:

- Pengalihan saham sebanyak 2.500 dari Nadri Tanjung kepada Nony Kusuma.
- Peningkatan modal dasar Entitas semula Rp 2.000.000.000 menjadi Rp 5.000.000.000 terbagi atas 50.000 saham.
- Peningkatan modal disetor semula Rp 500.000.000 menjadi Rp 1.250.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
 - Nony Kusuma sejumlah 10.000 lembar saham atau sebesar Rp 1.000.000.000, dan;
 - Joko Suyanto sejumlah 2.500 lembar saham atau sebesar Rp 250.000.000.

- Transfer of 2,500 shares from Nadri Tanjung to Nony Kusuma.
- Increase in the Entity's authorized capital of Rp 2,000,000,000 to 5,000,000,000 divided into 50,000 shares.
- Increase in paid-in-capital of Rp 500,000,000 to Rp 1,250,000,000, are as follows:
 - Nony Kusuma amounting to 10,000 shares or Rp 1,000,000,000, and;
 - Joko Suyanto amounting to 2,500 shares or Rp 250,000,000.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini merupakan tambahan modal disetor yang muncul dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali Entitas Anak sebesar Rp 3.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2021.

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali ini merupakan bagian saham minoritas atas Entitas Anak yang dimiliki oleh David Santoso yang merupakan pemilik manfaat utama.

Pada tanggal 29 Juli 2022, terdapat pelepasan atas DKN, Entitas Anak, sehingga terdapat pengurangan atas tambahan modal disetor dari transaksi kombinasi bisnis.

23. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

This account represents additional paid-in capital arising from business combination transactions of entities under common control of the previous Subsidiary amounting to Rp 3,000,000,000 as of December 31, 2021.

The business combination transaction of entities under common control represented part of the non-controlling interest in the previous Subsidiary owned by David Santoso who is the ultimate beneficial owner.

On July 29, 2022, there was a disposal of DKN, Subsidiary, so that there was a reduction in the additional paid-in capital from the business combination transaction.

24. DIVIDEN

- a. Pada 2020, berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Pemegang Saham tanggal 31 Desember 2020, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 1.500.000.000 atas saldo laba tahun 2018 dan 2019. Keputusan pemegang saham ini diperkuat dengan Akta Notaris No. 10, tanggal 12 Maret 2021 dari Notaris Sri Agustina S.H., Notaris di Cibinong. Dividen masih terutang dan belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2021 (lihat Catatan 18).
- b. Berdasarkan Akta Notaris No. 170, tanggal 28 April 2022 oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0234184, tanggal 28 April 2022, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen saham sebesar Rp 7.000.000.000 (lihat Catatan 22).

24. DIVIDENDS

- a. *In 2020, based on the Decision of the Stockholders in lieu of the Stockholders' Meeting on December 31, 2020, the stockholders approved the distribution of cash dividends of Rp 1,500,000,000 on the retained earnings for the years 2018 and 2019. This stockholder's decision was strengthened, based on Notarial Deed No. 10, dated March 12, 2021 of Sri Agustina S.H., Notary in Cibinong. The dividend was still payable and had not been paid in full as of December 31, 2021 (see Note 18).*
- b. *Based on Notarial Deed No. 170, dated April 28, 2022 by Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, which had been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the Notification Letter No. AHU.AH.01.03-0234184, dated April 28, 2022, the stockholders approved the distribution of stocks dividends of Rp 7,000,000,000 (see Note 22).*

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

25. OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Saldo awal	11.655.663	273.093.259	(26.958.760)	-	<i>Beginning balance</i>
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					<i>Item that will not be reclassified to profit or loss:</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja (lihat Catatan 21)	(822.759.734)	(333.793.905)	384.682.076	(35.945.013)	<i>Remeasurement of employee benefits obligation (see Note 21)</i>
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	181.007.141	72.356.309	(84.630.057)	8.986.253	<i>Income tax relating to item that will not be reclassified to profit or loss</i>
Saldo akhir	<u>(630.096.930)</u>	<u>11.655.663</u>	<u>273.093.259</u>	<u>(26.958.760)</u>	<i>Ending balance</i>

26. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

26. NON-CONTROLLING INTERESTS

Akun kepentingan nonpengendali adalah sebagai berikut:

Non-controlling interests account is as follows:

	31 Desember 2020/December 31, 2020 (Satu Tahun/One Year)						
	Saldo 1 Januari 2020/ Balance January 1, 2020	Penambahan (Pengurangan)/ Addition (Deduction)	Bagian Atas Laba (Rugi) Neto/ Share in Net Profit (Loss)	Bagian Atas Dividen/ Share in Dividends	Bagian Laba Komprehensif Lain/ Share in Other Comprehensive Income (Loss)	Saldo 31 Desember 2020/ Balance December 31, 2020	
PT Trans Mega Selaras	<u>535.502.797</u>	<u>(535.502.797)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>PT Trans Mega Selaras</i>
	31 Desember 2019/December 31, 2019 (Satu Tahun/One Year)						
PT Trans Mega Selaras	<u>-</u>	<u>550.000.000</u>	<u>(14.497.203)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>535.502.797</u>	<i>PT Trans Mega Selaras</i>

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 10 Desember 2020 oleh Notaris Edi Suryajaya, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang, terdapat perubahan kepemilikan pemegang saham PT Trans Mega Selaras (TMS), perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0209276.AH.01.11 Tahun 2020, tanggal 11 Desember 2020. Pada tahun 2020, Entitas tidak lagi mengkonsolidasi TMS, sehingga kepentingan nonpengendali dihapuskan (lihat Catatan 1c).

Based on Deed No. 4 dated December 10, 2020 by Notary Edi Suryajaya, S.H., M.Kn., domiciled in Kabupaten Tangerang, there is a change in stockholder ownership of PT Trans Mega Selaras (TMS), the change has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a Letter Decision No. AHU-0209276.AH.01.11 Tahun 2020, December 11, 2020. In 2020, the Entity no longer consolidated TMS, so that non-controlling interests were disposed (see Note 1c).

27. PENDAPATAN

27. REVENUES

a. Akun ini terdiri dari:

a. This account consists of:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022 (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Juli 2021 (Tidak Diaudit/ July 31, 2021 (Unaudited) (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Desember 2021/ December 31, 2021 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2020/ December 31, 2020 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2019/ December 31, 2019 (Satu Tahun/ One Year)	
Pendapatan jasa	30.315.822.263	16.901.243.441	26.061.108.933	11.148.178.430	4.750.900.000	Services income
Penjualan produk	22.097.298.162	1.311.780.222	19.566.926.364	21.554.366.906	1.966.972.001	Sales of product
Jumlah	<u>52.413.120.425</u>	<u>18.213.023.663</u>	<u>45.628.035.297</u>	<u>32.702.545.336</u>	<u>6.717.872.001</u>	Total

b. Rincian pendapatan berdasarkan sifat hubungan adalah sebagai berikut:

b. The details of revenues based on nature of relationship are as follow:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022 (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Juli 2021 (Tidak Diaudit/ July 31, 2021 (Unaudited) (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Desember 2021/ December 31, 2021 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2020/ December 31, 2020 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2019/ December 31, 2019 (Satu Tahun/ One Year)	
Pihak berelasi (lihat Catatan 35)	3.074.691.920	128.502.000	128.502.000	3.817.700.000	-	Related parties (see Note 35)
Pihak ketiga	49.338.428.505	18.084.521.663	45.499.533.297	28.884.845.336	6.717.872.001	Third parties
Jumlah	<u>52.413.120.425</u>	<u>18.213.023.663</u>	<u>45.628.035.297</u>	<u>32.702.545.336</u>	<u>6.717.872.001</u>	Total

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

c. Pendapatan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan adalah sebagai berikut:

c. Revenues which represent more than of 10% of the total revenues are as follows:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022 (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Juli 2021 (Tidak Diaudit/ July 31, 2021 (Unaudited) (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Desember 2021/ December 31, 2021 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2020/ December 31, 2020 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2019/ December 31, 2019 (Satu Tahun/ One Year)	
PT Gumrining Sentosa	17.253.768.461	-	9.262.812.160	3.817.700.000	-	PT Gumrining Sentosa
Direktorat Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan	13.624.425.291	16.760.531.439	26.061.108.933	8.278.874.806	4.750.900.000	Direktorat Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan
PT Galang Suar Teknologi	6.507.793.809	-	-	-	-	PT Galang Suar Teknologi
PT Trans Mega Selaras	-	-	-	14.147.200.000	-	PT Trans Mega Selaras
Jumlah	<u>37.385.987.561</u>	<u>16.760.531.439</u>	<u>35.323.921.093</u>	<u>26.243.774.806</u>	<u>4.750.900.000</u>	Total

28. BEBAN POKOK PENDAPATAN

28. COST OF REVENUES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022 (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Juli 2021 (Tidak Diaudit/ July 31, 2021 (Unaudited) (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Desember 2021/ December 31, 2021 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2020/ December 31, 2020 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2019/ December 31, 2019 (Satu Tahun/ One Year)	
Persediaan awal Pembelian	3.354.466.500	2.471.723.810	2.471.723.810	60.125.193	170.343.516	Beginning inventories
	<u>37.653.693.073</u>	<u>2.143.389.032</u>	<u>18.184.877.224</u>	<u>21.204.018.300</u>	<u>1.218.915.677</u>	Purchases
Persediaan tersedia untuk dijual	41.008.159.573	4.615.112.842	20.656.601.034	21.264.143.493	1.389.259.193	Goods available for sale
Persediaan akhir	(11.048.784.140)	(2.272.706.349)	(3.354.466.500)	(2.471.723.810)	(60.125.193)	Ending inventories
Sub-jumlah	<u>29.959.375.433</u>	<u>2.342.406.493</u>	<u>17.302.134.534</u>	<u>18.792.419.683</u>	<u>1.329.134.000</u>	Sub-total
Biaya langsung: Amortisasi (lihat Catatan 14)	2.705.208.331	2.486.458.331	4.293.749.996	3.921.875.000	-	Direct cost: Amortization (see Note 14)
Pemasangan alat Koneksi	1.084.538.692	3.708.477.548	6.601.301.923	1.219.235.077	1.675.150.000	Installation Connection
Lain-lain	884.808.946	1.520.467.355	2.051.778.613	1.175.919.336	714.217.599	Others
	<u>2.598.000</u>	<u>44.167.731</u>	<u>126.164.896</u>	<u>25.196.114</u>	<u>22.878.544</u>	
Jumlah biaya langsung	<u>4.677.153.969</u>	<u>7.759.570.965</u>	<u>13.072.995.428</u>	<u>6.342.225.527</u>	<u>2.412.246.143</u>	Total direct cost
Jumlah	<u>34.636.529.402</u>	<u>10.101.977.458</u>	<u>30.375.129.962</u>	<u>25.134.645.210</u>	<u>3.741.380.143</u>	Total

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pembelian yang melebihi 10% dari jumlah pembelian adalah sebagai berikut:

Purchases which represent more than of 10% of the total purchases are as follows:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022 (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Juli 2021 (Tidak Diaudit/ July 31, 2021 (Unaudited) (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Desember 2021/ December 31, 2021 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2020/ December 31, 2020 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2019/ December 31, 2019 (Satu Tahun/ One Year)	
PT Galang Suar Teknologi	15.937.873.850	1.760.200.000	12.656.502.068	13.953.550.000	-	PT Galang Suar Teknologi
PT Gumrining Sentosa	10.325.000.000	-	4.286.933.898	-	-	PT Gumrining Sentosa
Jumlah	26.262.873.850	1.760.200.000	16.943.435.966	13.953.550.000	-	Total

29. PENDAPATAN LAIN-LAIN

29. OTHER INCOME

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022 (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Juli 2021 (Tidak Diaudit/ July 31, 2021 (Unaudited) (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Desember 2021/ December 31, 2021 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2020/ December 31, 2020 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2019/ December 31, 2019 (Satu Tahun/ One Year)	
Bunga	8.356.073	20.444.037	22.003.164	18.641.948	9.431.933	Interest Recovery of receivables (see Note 7)
Pemulihan piutang (lihat dan 7)	80.310.299	-	-	-	-	
Jumlah	88.666.372	20.444.037	22.003.164	18.641.948	9.431.933	Total

30. BEBAN PENJUALAN

30. SELLING EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022 (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Juli 2021 (Tidak Diaudit/ July 31, 2021 (Unaudited) (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Desember 2021/ December 31, 2021 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2020/ December 31, 2020 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2019/ December 31, 2019 (Satu Tahun/ One Year)	
Perjalanan dinas	752.729.576	122.538.801	176.184.092	327.965.299	31.363.041	Business trip
Promosi dan pemasaran	41.538.822	64.334.591	83.235.252	429.518.682	40.435.124	Promotion and marketing
Jumlah	794.268.398	186.873.392	259.419.344	757.483.981	71.798.165	Total

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022 (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Juli 2021 (Tidak Diaudit/ July 31, 2021 (Unaudited) (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Desember 2021/ December 31, 2021 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2020/ December 31, 2020 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2019/ December 31, 2019 (Satu Tahun/ One Year)	
Gaji dan tunjangan	6.328.294.830	1.498.563.658	2.650.360.385	1.884.410.361	1.828.539.826	Salaries and allowance
Imbalan kerja (lihat Catatan 21)	915.824.146	154.216.265	264.370.740	116.810.671	98.021.883	Employee benefits (see Note 21)
Perlengkapan kantor	501.703.416	113.683.717	902.867.000	834.435.313	511.085.774	Office supplies
Pemeliharaan gedung	286.175.000	97.625.000	302.500.022	27.500.000		Building maintenance
Jasa konsultan	270.479.483	-	35.000.000	159.100.000	60.000.000	Consultant fee
Rumah tangga kantor	235.232.976	165.092.684	329.188.833	169.274.001	8.300.872	Office household
Pajak BPJS	217.594.731	-	87.110.584	-	-	Taxes
ketenagakerjaan dan kesehatan	211.389.587	17.334.617	47.436.892	47.161.732	41.477.341	BPJS pension and health
Penyusutan (lihat Catatan 13 dan 15)	172.820.504	85.170.462	193.821.477	35.224.344	40.934.729	Depreciation (see Notes 13 and 15)
Air, listrik dan telepon	102.597.514	80.868.893	150.884.467	100.263.423	91.352.429	Water, electricity and telephone
Transportasi	25.388.003	22.301.135	40.458.796	152.502.510	58.974.346	Transportation
Lain-lain	2.726.000	60.319.076	73.807.894	3.354.800	2.340.000	Others
Jumlah	9.270.226.190	2.295.175.507	5.077.807.090	3.530.037.155	2.741.027.200	Total

32. BEBAN KEUANGAN

32. FINANCE CHARGES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022 (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Juli 2021 (Tidak Diaudit/ July 31, 2021 (Unaudited) (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Desember 2021/ December 31, 2021 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2020/ December 31, 2020 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2019/ December 31, 2019 (Satu Tahun/ One Year)	
Bunga utang bank	281.300.690	673.052.845	820.068.394	1.218.639.679	-	Bank loan interest
Provisi	29.642.573	-	98.092.276	117.493.582	-	Provision
Bunga utang lembaga keuangan	53.895.372	19.728.687	65.265.365	-	-	Financial institution loan interest
Lain-lain	5.205.435	1.112.289	-	-	-	Other
Jumlah	370.044.070	693.893.821	983.426.035	1.336.133.261	-	Total

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. BEBAN LAIN-LAIN

33. OTHER EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022 (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Juli 2021 (Tidak Diaudit/ July 31, 2021 (Unaudited) (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Desember 2021/ December 31, 2021 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2020/ December 31, 2020 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2019/ December 31, 2019 (Satu Tahun/ One Year)	
Penyisihan penurunan nilai piutang (lihat Catatan 5 dan 7)	96.412.000	-	322.034.810	-	-	Provision for impairment loss on receivables (see Notes 5 and 7)
Administrasi bank	7.842.755	11.504.361	27.653.486	36.819.300	6.879.433	Bank charges
Bagian atas rugi bersih Entitas Asosiasi (lihat Catatan 12)	2.062.920	-	-	-	-	Portion of net loss from Associate (see Note 12)
Lain-lain	-	-	45.121.785	-	-	Others
Jumlah	106.317.675	11.504.361	394.810.081	36.819.300	6.879.433	Total

34. LABA PER SAHAM DASAR

34. BASIC EARNINGS PER SHARE

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022 (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Juli 2021 (Tidak Diaudit/ July 31, 2021 (Unaudited) (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Desember 2021/ December 31, 2021 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2020/ December 31, 2020 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2019/ December 31, 2019 (Satu Tahun/ One Year)	
Laba tahun/periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	5.464.946.418	4.000.531.387	6.677.843.911	1.451.390.942	157.780.078	Income for the year/period that can be attributed to owners of the parent entity
Rata-rata tertimbang saham	800.745.283	750.000.000	750.000.000	8.231.541	12.500	Weighted average number of shares
Laba per saham dasar	6,82	5,33	8,90	176,32	12.622,41	Basic earnings per share

35. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

35. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Sifat hubungan dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

Nature of relationship with related parties are as follows:

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

<u>Sifat Hubungan</u>	<u>Pihak Berelasi/Related Parties</u>	<u>Nature of Relationships</u>
Entitas Sepengendali	: PT Anugrah Damai Yaksa Teknologi : PT Gumrining Sentosa : PT Teknologi Rancang Olah Nusantara : PT Teknologi Unggul Nusantara	<i>Entities Under Common Control</i>
Pemegang Saham	: David Santoso : Rudy Budiman Setiawan	<i>The Stockholders</i>
PT Gumrining Sentosa bukan lagi pihak berelasi sejak 30 April 2021.		<i>PT Gumrining Sentosa is no longer related party since April 30, 2021.</i>
PT Teknologi Rancang Olah Nusantara bukan lagi pihak berelasi sejak 14 Juli 2022.		<i>PT Teknologi Rancang Olah Nusantara is no longer a related party since July 14, 2022.</i>
PT Digital Karyaloka Nusantara sudah bukan lagi Entitas Anak sejak 29 Juli 2022.		<i>PT Digital Karyaloka Nusantara is no longer a Subsidiary since July 29, 2022.</i>
Transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:		<i>Significant transactions and balances with a related parties are as follows:</i>
a. Pada tanggal 31 Juli 2022, Entitas melakukan transaksi usaha dengan PT Anugrah Damai Yaksa Teknologi. Saldo yang timbul dari transaksi tersebut disajikan dalam laporan keuangan sebagai “Piutang Usaha – Pihak Berelasi” (lihat Catatan 5).		<i>a. As of July 31, 2022, the Entity had trade transactions with PT Anugrah Damai Yaksa Teknologi. The outstanding balance from the transaction was presented in the financial statements as “Trade Receivables – Related Parties” (see Note 5).</i>
b. Pada tanggal 31 Desember 2020, Entitas melakukan transaksi usaha dengan PT Gumrining Sentosa. Saldo yang timbul dari transaksi tersebut disajikan dalam laporan keuangan sebagai “Piutang Usaha – Pihak Berelasi” (lihat Catatan 5).		<i>b. As of December 31, 2020, the Entity had trade transactions with PT Gumrining Sentosa. The outstanding balance from the transaction was presented in the financial statements as “Trade Receivables – Related Parties” (see Note 5).</i>
c. Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Entitas melakukan transaksi keuangan dengan David Santoso. Saldo yang timbul dari transaksi tersebut disajikan dalam laporan keuangan sebagai “Piutang Lain-lain – Pihak Berelasi” (lihat Catatan 7). Pinjaman ini tidak dikenakan bunga dan tidak ada jangka waktu jatuh tempo.		<i>c. As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Entity had financial transactions with David Santoso. The outstanding balance from the transaction was presented in the financial statements as “Other Receivables – Related Parties” (see Note 7). These loans bear no interest and have no maturity date.</i>
d. Pada tanggal 31 Desember 2021, Entitas melakukan transaksi keuangan dengan PT Teknologi Rancang Olah Nusantara dan PT Teknologi Unggul Nusantara. Saldo yang timbul dari transaksi tersebut disajikan dalam laporan keuangan sebagai “Piutang Lain-lain – Pihak Berelasi” (lihat Catatan 7). Pinjaman ini tidak dikenakan bunga dan tidak ada jangka waktu jatuh tempo.		<i>d. As of December 31, 2021, the Entity had financial transactions with PT Teknologi Rancang Olah Nusantara and PT Teknologi Unggul Nusantara. The outstanding balance from the transaction are presented in the financial statements as “Other Receivables – Related Parties” (see Note 7). These loans bear no interest and have no specified maturity date.</i>

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- e. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Entitas melakukan transaksi keuangan dengan PT Gumrining Sentosa. Saldo yang timbul dari transaksi tersebut disajikan dalam laporan keuangan sebagai "Piutang Lain-lain – Pihak Berelasi" (lihat Catatan 7). Pinjaman ini tidak dikenai bunga dan tidak ditentukan jatuh temponya.
- f. Entitas membeli aset perangkat lunak dari PT Teknologi Rancang Olah Nusantara. Saldo yang timbul dari transaksi tersebut disajikan dalam laporan keuangan sebagai "Aset Takberwujud" (lihat Catatan 14).
- g. Entitas melakukan kerjasama dalam hal pengelolaan dan pemakaian bangunan kantor dengan David Santoso. Entitas memiliki hak untuk melanjutkan kerjasama ini menjadi jual beli bangunan kantor sebesar Rp 5.500.000.000. Entitas memutuskan untuk melakukan opsi jual beli atas bangunan kantor. Sampai dengan tanggal laporan ini, jual beli masih dalam proses. Saldo yang timbul dari transaksi tersebut disajikan dalam laporan keuangan sebagai "Uang Muka" (lihat Catatan 10 dan 42).
- h. Pinjaman pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dijamin dengan aset berupa tanah dan bangunan atas nama David Santoso, Kezia Natania Santoso dan Nicholas Natanael Santoso (lihat Catatan 16).
- i. Pinjaman pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dijamin dengan aset berupa tanah dan bangunan atas nama David Santoso (lihat Catatan 16).
- j. Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, Entitas melakukan transaksi keuangan dengan PT Anugrah Damai Yaksa Teknologi. Saldo yang timbul dari transaksi tersebut disajikan dalam laporan keuangan sebagai "Utang Lain-lain – Pihak Berelasi" (lihat Catatan 18). Pinjaman ini tidak dikenai bunga dan tidak ada jangka waktu jatuh tempo.
- k. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Entitas memiliki utang dividen kepada David Santoso dan Rudy Budiman Setiawan masing-masing sebesar Rp 1.080.000.000 dan Rp 420.000.000 yang disajikan dalam laporan keuangan sebagai "Utang Lain-lain – Pihak Berelasi" (lihat Catatan 18). Pada April 2022, utang tersebut telah dilunasi.
- e. As of December 31, 2020 and 2019, the Entity had financial transactions with PT Gumrining Sentosa. The outstanding balance from the transaction was presented in the financial statements as "Other Receivables – Related Parties" (see Note 7). This loan bears no interest and has no specified maturity date.
- f. The Entity purchases software assets from PT Teknologi Rancang Olah Nusantara. The outstanding balance from the transaction was presented in the financial statements as "Intangible Assets" (see Note 14).
- g. The Entity cooperates in the management and use of office buildings with David Santoso. The Entity has the right to continue this cooperation into a sale and purchase of an office building amounting to Rp 5,500,000,000. The Entity decides to exercise a buy and sell option on an office building. As of the date of this report, the sale and purchase is still on process. The outstanding balance from the transaction was presented in the financial statements as "Advances" (see Notes 10 and 42).
- h. The loans from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk are collateralized with land and building under the name of David Santoso, Kezia Natania Santoso and Nicholas Natanael Santoso (see Note 16).
- i. The loan from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk is collateralized with land and building on behalf of David Santoso (see Note 16).
- j. As of July 31, 2022 and December 31, 2021, the Entity had financial transactions with PT Anugrah Damai Yaksa Teknologi. The outstanding balances from these transactions are presented in the financial statements as "Other Payables – Related Parties" (see Note 18). This loan bears no interest and has no maturity date.
- k. As of December 31, 2021 and 2020, the Entity had dividend payables to David Santoso and Rudy Budiman Setiawan amounted to Rp 1,080,000,000 and Rp 420,000,000, respectively, which presented in the financial statements as "Other Payables – Related Parties" (see Note 18). On April 2022, the payables had been paid.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- l. Pada tanggal 31 Desember 2019, Entitas melakukan transaksi keuangan dengan PT Gumrining Sentosa. Saldo yang timbul dari transaksi tersebut disajikan dalam laporan keuangan sebagai “Utang Lain-lain – Pihak Berelasi” (lihat Catatan 18). Pinjaman ini tidak dikenai bunga dan tidak ada jangka waktu jatuh tempo.
- m. Gaji dan manfaat kesejahteraan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Entitas masing-masing sebesar Rp 1.615.163.233, Rp 550.237.500 dan Rp 56.250.000 pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

- l. As of December 31, 2019, the Entity had financial transactions with PT Gumrining Sentosa. The outstanding balance from the transaction were presented in the financial statements as “Other Payables – Related Parties” (see Note 18). This loan bears no interest and has no maturity date.
- m. Salaries and other benefits for the Board of Commissioners and Directors of the Entity amounted to Rp 1,615,163,233, Rp 550,237,500 and Rp 56,250,000 as of July 31, 2022, December 31, 2021 and 2020.

36. PERPAJAKAN

- a. Pajak dibayar di muka

Akun ini merupakan Pajak Pertambahan Nilai Masukan sebesar Rp 1.781.544.391 pada tanggal 31 Juli 2022.

- b. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Pajak Penghasilan:					Income Tax:
Pasal 21	278.615.156	44.202.598	24.860.350	2.925.958	Article 21
Pasal 23	142.294.277	93.553.057	770.000	-	Article 23
Pasal 29	3.271.846.022	1.640.557.707	271.357.260	851.349	Article 29
Pajak Pertambahan Nilai	-	141.929.756	458.103.710	11.692.670	Value Added Tax
Jumlah	3.692.755.455	1.920.243.118	755.091.320	15.469.977	Total

- c. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

36. TAXATION

- a. Prepaid taxes

This account represents Value Added Tax-In amounting to Rp 1,781,544,391 as of July 31, 2022.

- b. Taxes Payable

This account consists of:

- c. Corporate Income Tax

The reconciliation between income before provision for tax expense according to the statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Juli 2022/ July 31, 2022 (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Juli 2021 (Tidak Diaudit/ July 31, 2021 (Unaudited) (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Desember 2021/ December 31, 2021 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2020/ December 31, 2020 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2019/ December 31, 2019 (Satu Tahun/ One Year)	
Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	7.324.401.062	4.944.043.161	8.559.445.949	1.926.068.377	166.218.993	Income before income tax benefit (expense) as presented in statements of profit or loss and other comprehensive income
Rugi Entitas Anak sebelum taksiran beban pajak penghasilan	-	-	35.000.000	-	-	Loss of Subsidiary before provision for income tax expense
Laba sebelum taksiran beban pajak penghasilan Entitas	7.324.401.062	4.944.043.161	8.594.445.949	1.926.068.377	166.218.993	Income before provision for income tax expense of the Entity
<u>Beda Temporer:</u>						<u>Temporary Differences:</u>
Imbalan kerja	915.824.146	154.216.265	228.070.740	116.810.671	98.021.883	Employee benefits Provision for impairment loss on receivables
Penyisihan penurunan nilai piutang	16.101.701	-	322.034.810	-	-	
<u>Beda Tetap:</u>						<u>Permanent Differences:</u>
Perjalanan dinas dan promosi	190.273.018	64.334.591	83.235.252	-	-	Business trip and promotion
Gaji dan tunjangan	104.728.974	-	14.762.450	-	-	Salaries and allowance
Penyusutan	35.892.792	35.892.792	35.892.792	-	-	Depreciation
Bagian rugi Entitas Asosiasi	2.062.921	-	-	-	-	Portion of net loss from Associate
Beban pajak Rumah tangga kantor	-	-	87.110.584	817.760	-	Taxes expense
Biaya langsung lainnya	-	94.887.895	137.666.929	-	-	Office household Other direct expense
Biaya pemasangan alat	-	261.000	261.000	375.878.716	40.435.124	Installation expense
Pendapatan bunga	(8.296.410)	(20.444.037)	(22.003.164)	(18.641.948)	-	Interest income
Lain-lain	72.543.368	1.429.538	1.429.538	53.639.966	(9.431.933)	Others
Jumlah	1.329.130.510	330.578.044	959.460.931	528.505.165	129.025.074	Total
Taksiran laba kena pajak	8.653.531.572	5.274.621.205	9.553.906.880	2.454.573.542	295.244.067	Estimated taxable income

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Juli 2022/ July 31, 2022 (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Juli 2021 (Tidak Diaudit/ July 31, 2021 (Unaudited) (Tujuh Bulan/ Seven Months)	31 Desember 2021/ December 31, 2021 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2020/ December 31, 2020 (Satu Tahun/ One Year)	31 Desember 2019/ December 31, 2019 (Satu Tahun/ One Year)	
Pembulatan laba fiskal	8.653.531.000	5.274.621.000	9.553.906.000	2.454.573.000	295.244.067	Rounded off – taxable income
Beban pajak kini	1.903.776.820	1.007.504.070	1.991.303.116	500.375.783	47.441.589	Current tax expense
Dikurangi pembayaran Pajak Penghasilan dibayar di muka						Less prepayment of Income Tax:
Pasal 23	272.488.505	309.248.968	615.756.401	229.859.873	47.340.240	Article 23
Utang Pajak	1.631.288.315	698.255.102	1.375.546.715	270.515.910	101.349	Taxes Payable

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Entitas melaporkan/menyetorkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Under the taxation laws in Indonesia, the Entity submits the Annual Tax Returns on the basis of self assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within the statute of limitations under prevailing regulations.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi diatas menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pajak.

The taxable income resulting from the above reconciliation is used as the basis for the preparation of the Annual Tax Return (SPT) submitted to the Tax Office.

d. Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax

Rincian pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax are as follows:

	31 Juli 2022/July 31, 2022 (Tujuh Bulan/Seven Months)				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/Credited (Expenses) on Profit or Loss	Penghasilan Komprehensif Lain/Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Imbalan kerja	158.902.947	201.481.313	-	360.384.260	Employee benefits Allowance for
Penyisihan penurunan nilai piutang	70.847.658	3.542.374	-	74.390.032	impairment losses on receivables
Penghasilan komprehensif lain	(3.287.495)	-	181.007.141	177.719.646	Other comprehensive income
Aset Pajak Tangguhan	226.463.110	205.023.687	181.007.141	612.493.938	Deferred Tax Assets

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember 2021/December 31, 2021 (Satu Tahun/One Year)						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/Credited (Expenses) on Profit or Loss	Penghasilan Komprehensif Lain/Other Comprehensive Income	Penyesuaian Tarif*/Impact of the Changes in Tax Rate	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Imbalan kerja	120.049.527	50.175.563	-	(11.322.143)	158.902.947	Employee benefits
Penyisihan penurunan nilai piutang	-	70.847.658	-	-	70.847.658	Allowance for impairment losses on receivables
Penghasilan komprehensif lain	(75.643.804)	-	73.434.659	(1.078.350)	(3.287.495)	Other comprehensive income
Aset Pajak Tangguhan	44.405.723	121.023.221	73.434.659	(12.400.493)	226.463.110	Deferred Tax Assets
31 Desember 2020/December 31, 2020 (Satu Tahun/One Year)						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/Credited (Expenses) on Profit or Loss	Penghasilan Komprehensif Lain/Other Comprehensive Income	Penyesuaian Tarif*/Impact of the Changes in Tax Rate	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Imbalan kerja	94.351.179	25.698.348	-	-	120.049.527	Employee benefits
Penghasilan komprehensif lain	8.986.253	-	(84.630.057)	-	(75.643.804)	Other comprehensive income
Aset Pajak Tangguhan	103.337.432	25.698.348	(84.630.057)	-	44.405.723	Deferred Tax Assets
31 Desember 2019/December 31, 2019 (Satu Tahun/One Year)						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/Credited (Expenses) on Profit or Loss	Penghasilan Komprehensif Lain/Other Comprehensive Income		Saldo Akhir/ Ending Balance	
Imbalan kerja	69.845.708	24.505.471	-	-	94.351.179	Employee benefits
Penghasilan komprehensif lain	-	-	8.986.253	-	8.986.253	Other comprehensive income
Aset Pajak Tangguhan	69.845.708	24.505.471	8.986.253	-	103.337.432	Deferred Tax Assets

*)Perubahan tarif pajak, lihat Catatan 44

*) Changes in tax rate, see Note 44

37. PENGELOLAAN MODAL

Tujuan pengelolaan modal adalah untuk pengamanan kemampuan Entitas dalam melanjutkan kelangsungan usaha agar dapat memberikan hasil bagi pemegang saham dan manfaat kepada pihak berkepentingan lainnya dan untuk mempertahankan struktur permodalan yang optimum untuk meminimalkan biaya modal.

Secara periodik, Entitas melakukan valuasi utang untuk menentukan kemungkinan pembiayaan kembali utang yang ada dengan utang baru yang lebih efisien yang akan mengarah pada biaya utang yang lebih optimal.

37. CAPITAL MANAGEMENT

The objectives of capital management are to secure the Entity's ability to continue its business in order to deliver results for stockholders and benefits to other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to minimize the cost of capital.

Periodically, the Entity performs the valuation of debt to determine the possible refinancing of existing debt with new loan that is more efficient which will lead to more optimal debt costs.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Rasio utang terhadap ekuitas (*debt to equity*) adalah rasio yang diwajibkan oleh kreditur untuk diawasi oleh manajemen dalam mengevaluasi struktur permodalan Entitas serta mereviu efektivitas pinjaman Entitas.

Debt to equity ratio is the ratio that is required to manage by management to evaluate the capital structure of the Entity and review the effectiveness of the Entity's debt.

Struktur permodalan Entitas dan rasio utang terhadap ekuitas adalah sebagai berikut:

The Entity's capital structure and debt to equity ratio are as follows:

31 Juli 2022/ July 31, 2022			
	Jumlah/Total	Persentase/Percentage	
Liabilitas jangka pendek	13.889.874.454	20,10%	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	2.626.846.969	3,80%	Non-current liabilities
Jumlah liabilitas	16.516.721.423	23,90%	Total liabilities
Jumlah ekuitas	52.603.586.037	76,10%	Total equity
Jumlah	69.120.307.460	100,00%	Total
Rasio utang terhadap ekuitas		0,31	Debt to equity ratio
31 Desember 2021/ December 31, 2021			
	Jumlah/Total	Persentase/Percentage	
Liabilitas jangka pendek	22.598.599.854	43,30%	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	1.010.693.130	1,93%	Non-current liabilities
Jumlah liabilitas	23.609.292.984	45,23%	Total liabilities
Jumlah ekuitas	28.584.690.701	54,77%	Total equity
Jumlah	52.193.983.685	100,00%	Total
Rasio utang terhadap ekuitas		0,83	Debt to equity ratio
31 Desember 2020/ December 31, 2020			
	Jumlah/Total	Persentase/Percentage	
Liabilitas jangka pendek	11.656.699.175	37,64%	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	145.478.321	0,47%	Non-current liabilities
Jumlah liabilitas	11.802.177.496	38,11%	Total liabilities
Jumlah ekuitas	19.168.284.386	61,89%	Total equity
Jumlah	30.970.461.882	100,00%	Total
Rasio utang terhadap ekuitas		0,62	Debt to equity ratio
31 Desember 2019/ December 31, 2019			
	Jumlah/Total	Persentase/Percentage	
Liabilitas jangka pendek	344.213.428	5,32%	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	413.349.726	6,38%	Non-current liabilities
Jumlah liabilitas	757.563.154	11,70%	Total liabilities
Jumlah ekuitas	5.716.841.425	88,30%	Total equity
Jumlah	6.474.404.579	100,00%	Total
Rasio utang terhadap ekuitas		0,13	Debt to equity ratio

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Entitas menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

- Risiko kredit: kemungkinan bahwa pelanggan tidak membayar sebagian atau seluruh piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Entitas.
- Risiko likuiditas: Entitas menetapkan risiko likuiditas atas kolektibilitas dari piutang usaha seperti yang dijelaskan di atas, yang dapat menimbulkan kesulitan Entitas dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan liabilitas keuangan.
- Risiko pasar: pada saat ini tidak terdapat risiko pasar, selain risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing karena Entitas tidak berinvestasi di instrumen keuangan dalam aktivitas normal.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi telah menyetujui strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Entitas.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko Entitas terjadinya kerugian keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan counterparty untuk memenuhi liabilitas kontraktualnya. Untuk meyakinkan bahwa penurunan nilai terdeteksi secara dini, portofolio kredit dimonitor secara aktif pada setiap tingkatan struktur risiko dan akan dikurangi melalui pelaksanaan strategi pemulihan.

Entitas mengantisipasi risiko kredit dengan penuh kehati-hatian dengan menerapkan kebijakan manajemen risiko kredit. Selain penilaian kredit dengan penuh kehati-hatian, manajemen penagihan yang baik dan secara berkala melakukan pemantauan dan analisa terhadap kondisi usaha debitur dan obyek pembiayaan sepanjang kontrak berjalan.

38. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a. *Financial Risk Management Factors and Policies*

In its operating, investing and financing activities, the Entity is exposed to the following financial risks: credit risk, liquidity risk and market risk and define those risks as follows:

- *Credit risk: possibility that a customer will not pay the part or all of a receivable or will not pay in timely manner and hence, the Entity will incur loss.*
- *Liquidity risk: the Entity defined liquidity risk from the collectability of the accounts receivable as mentioned above, which may cause difficulty in meeting the obligations of the Entity relating to financial liabilities.*
- *Market risk: currently, there are no market risk other than interest rate risk and foreign currency exchange rate risk as the Entity does not invest in any financial instruments in its normal activities.*

In order to effectively manage those risks, the Directors have approved strategies for the management of financial risks, which is in line with the Entity's objectives.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Entity will incur a loss arising from the customers or counterparties who failed to fulfill their contractual obligations. To ensure that the impairment is detected early, the receivables are monitored actively at every level and will be reduced through the implementation of recovery strategies.

The Entity is prudent in anticipating the credit risk by applying policy in credit risk management. Besides providing prudent credit assessment, well collection management and continuously perform tight monitoring and analysis of the condition of the debtor's business and financed asset during the term of the contract.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Risiko Likuiditas

Melalui kegiatan operasi dan sumber dana yang ada, Entitas dapat memenuhi seluruh liabilitas keuangannya pada saat jatuh tempo, karena Entitas memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Dalam mengelola risiko likuiditas Entitas melakukan pengawasan yang ketat atas proyeksi dan realisasi dari arus kas secara terus menerus baik kolektibilitas piutang maupun pemenuhan kewajiban dan tanggal jatuh temponya.

Tabel berikut menyajikan jumlah liabilitas keuangan pada 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 berdasarkan jatuh temponya:

Liquidity Risk

Through its operations and existing funding sources, the Entity can meet all its financial liabilities as they mature, because the Entity has the financial assets which are liquid and available to meet liquidity needs.

In managing the liquidity risk, the Entity observe strict control on the forecast and continuous realization of actual cash flows from both collectibility of receivables as well as the fulfillment of obligations and due dates.

The following table presents the amount of financial liabilities on July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 based on their maturity:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022			Jumlah/Total	
	Kurang dari 1 Tahun/Less than 1 Year	Lebih dari 1 Tahun/More than Year	Lebih dari 2 Tahun/More than 2 Years		
<u>Liabilitas Keuangan yang</u>					<u>Financial Liabilities</u>
<u>Diukur pada Biaya</u>					<u>Measured at</u>
<u>Perolehan Diamortisasi</u>					<u>Amortized Cost</u>
Utang bank jangka pendek	7.222.399.388	-	-	7.222.399.388	Short-term bank loans
Utang usaha	1.708.668.293	-	-	1.708.668.293	Trade payables
Utang lain-lain	578.519.398	-	-	578.519.398	Other payables
Beban masih harus dibayar	486.321.306	-	-	486.321.306	Accrued expenses
Utang lembaga keuangan	201.210.614	180.920.123	-	382.130.737	Financial institution loan
Jumlah	10.197.118.999	180.920.123	-	10.378.039.122	Total
	31 Desember 2021/ December 31, 2021				
	Kurang dari 1 Tahun/Less than 1 Year	Lebih dari 1 Tahun/More than Year	Lebih dari 2 Tahun/More than 2 Years	Jumlah/Total	
<u>Liabilitas Keuangan yang</u>					<u>Financial Liabilities</u>
<u>Diukur pada Biaya</u>					<u>Measured at</u>
<u>Perolehan Diamortisasi</u>					<u>Amortized Cost</u>
Utang bank jangka pendek	999.586.075	-	-	999.586.075	Short-term bank loans
Utang usaha	15.120.371.936	-	-	15.120.371.936	Trade payables
Utang lain-lain	4.376.169.096	-	-	4.376.169.096	Other payables
Beban masih harus dibayar	4.030.428	-	-	4.030.428	Accrued expenses
Utang lembaga keuangan	178.199.201	303.350.164	-	481.549.365	Financial institution loan
Jumlah	20.678.356.736	303.350.164	-	20.981.706.900	Total

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020				
	Kurang dari 1 Tahun/ <i>Less than 1 Year</i>	Lebih 1 Tahun/ <i>More than Year</i>	Lebih dari 2 Tahun/ <i>More than 2 Years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
<u>Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</u>					<u>Financial Liabilities Measured at Amortized Cost</u>
Utang bank jangka pendek	7.400.000.000	-	-	7.400.000.000	Short-term bank loans
Utang usaha	710.996.503	-	-	710.996.503	Trade payables
Utang lain-lain	2.160.000.000	-	-	2.160.000.000	Other payables
Beban masih harus dibayar	630.611.352	-	-	630.611.352	Accrued expenses
Jumlah	10.901.607.855	-	-	10.901.607.855	Total

	31 Desember 2019/ December 31, 2019				
	Kurang dari 1 Tahun/ <i>Less than 1 Year</i>	Lebih 1 Tahun/ <i>More than Year</i>	Lebih dari 2 Tahun/ <i>More than 2 Years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
<u>Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</u>					<u>Financial Liabilities Measured at Amortized Cost</u>
Utang lain-lain	186.137.044	-	-	186.137.044	Other payables
Beban masih harus dibayar	142.606.407	-	-	142.606.407	Accrued expenses
Jumlah	328.743.451	-	-	328.743.451	Total

Risiko Suku Bunga

Risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, profil instrumen keuangan Entitas yang dipengaruhi bunga adalah:

Interest Rate Risk

The risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

On the statement of financial position date, the Entity's profile of financial instruments that are affected by the interest, as follows:

	31 Juli 2022/ <i>July 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	31 Desember 2019/ <i>December 31, 2019</i>	
Instrumen dengan bunga tetap					Flat interest instrument
Liabilitas keuangan	382.130.737	481.549.365	-	-	Financial liabilities

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Juli 2022/ July 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Instrumen dengan bunga mengambang					Floating interest instrument
Aset keuangan	3.233.910.019	6.534.397.027	9.655.375.712	1.732.490.187	Financial assets
Liabilitas keuangan	7.222.399.388	999.586.075	7.400.000.000	-	Financial liabilities
Liabilitas keuangan – neto	<u>(3.988.489.369)</u>	<u>5.534.810.952</u>	<u>2.255.375.712</u>	<u>1.732.490.187</u>	Financial liabilities – net

Entitas tidak secara signifikan terekspos risiko suku bunga. Sehingga, Entitas tidak memiliki kebijakan atau pengaturan tertentu untuk mengelola risiko tingkat bunga. Tidak terdapat aktivitas lindung nilai tingkat bunga pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

The Entity is not significantly exposed to interest rate risk. Thus, the Entity does not have a policy or a particular arrangement to interest rate risk. There is no interest rate hedging activities as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019.

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

b. Fair Value of Financial Instruments

Nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

The table below shows the carrying values and fair values of the financial assets and financial liabilities recorded in the statements of financial position as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019:

	31 Juli 2022/July 31, 2022		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan bank	3.243.910.019	3.243.910.019	Cash on hand and in banks
Piutang usaha – neto	11.067.247.930	11.067.247.930	Trade receivables – net
Piutang lain-lain – neto	4.343.384.220	4.343.384.220	Other receivables – net
Aset lancar lainnya	50.000.000	50.000.000	Other current assets
Jumlah Aset Keuangan	<u>18.704.542.169</u>	<u>18.704.542.169</u>	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang bank jangka pendek	7.222.399.388	7.222.399.388	Short-term bank loans
Utang usaha	1.708.668.293	1.708.668.293	Trade payables
Utang lain-lain	578.519.398	578.519.398	Other payables
Beban masih harus dibayar	486.321.306	486.321.306	Accrued expenses
Utang lembaga keuangan	382.130.737	382.130.737	Financial institution loan
Jumlah Liabilitas Keuangan	<u>10.378.039.122</u>	<u>10.378.039.122</u>	Total Financial Liabilities

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2021/December 31, 2021		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan bank	6.544.397.027	6.544.397.027	Cash on hand and in banks
Piutang usaha – neto	13.493.042.361	13.493.042.361	Trade receivables – net
Piutang lain-lain – neto	16.940.304.735	16.940.304.735	Other receivables – net
Aset lancar lainnya	50.000.000	50.000.000	Other current assets
Jumlah Aset Keuangan	37.027.744.123	37.027.744.123	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang bank jangka pendek	999.586.075	999.586.075	Short-term bank loans
Utang usaha	15.120.371.936	15.120.371.936	Trade payables
Utang lain-lain	4.376.169.096	4.376.169.096	Other payables
Beban masih harus dibayar	4.030.428	4.030.428	Accrued expenses
Utang lembaga keuangan	481.549.365	481.549.365	Financial institution loan
Jumlah Liabilitas Keuangan	20.981.706.900	20.981.706.900	Total Financial Liabilities
	31 Desember 2020/December 31, 2020		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan bank	9.657.303.253	9.657.303.253	Cash on hand and in banks
Piutang usaha – net	3.106.137.227	3.106.137.227	Trade receivables – net
Piutang lain-lain – net	1.930.393.427	1.930.393.427	Other receivables – net
Jumlah Aset Keuangan	14.693.833.907	14.693.833.907	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang bank jangka pendek	7.400.000.000	7.400.000.000	Short-term bank loans
Utang usaha	710.996.503	710.996.503	Trade payables
Utang lain-lain	2.160.000.000	2.160.000.000	Other payables
Beban masih harus dibayar	630.611.352	630.611.352	Accrued expenses
Jumlah Liabilitas Keuangan	10.901.607.855	10.901.607.855	Total Financial Liabilities
	31 Desember 2019/December 31, 2019		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan bank	1.766.051.113	1.766.051.113	Cash on hand and in banks
Piutang usaha – net	190.795.000	190.795.000	Trade receivables – net
Piutang lain-lain – net	4.334.715.299	4.334.715.299	Other receivables – net
Jumlah Aset Keuangan	6.291.561.412	6.291.561.412	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang lain-lain	186.137.044	186.137.044	Other payables
Beban masih harus dibayar	142.606.407	142.606.407	Accrued expenses
Jumlah Liabilitas Keuangan	328.743.451	328.743.451	Total Financial Liabilities

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value for each class of financial instruments that are practical to estimate that value:

Entitas memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan jangka pendek yang terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar lainnya, utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, dan utang lembaga keuangan. Karena instrumen keuangan tersebut jatuh tempo dalam jangka pendek maka nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan tersebut mendekati nilai wajarnya.

The Entity has current financial assets and financial liabilities consisting of cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables, other current assets, short-term bank loans, trade payables, other payables, accrued expenses, and financial institution loan. The carrying value of financial assets and financial liabilities are estimated to approximate their fair values because these will mature in less than one year.

39. SEGMENT OPERASI

39. OPERATING SEGMENTS

Segmen operasi yang dilaporkan sesuai dengan informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Segmen operasi disajikan sebagai berikut:

The operating segments reported in accordance with the information used by operational decision makers in order to allocate resources and evaluate performance of a segment of the operation. The operating segments presented are as follows:

Pendapatan terdiri dari pendapatan jasa dan penjualan produk.

Revenues consist of service income and sales product.

	31 Juli 2022/July 31, 2022 (Tujuh Bulan/Seven Months)			
	Pendapatan Jasa/ Service Income	Penjualan Produk/ Sales of Products	Jumlah/Total	
PENDAPATAN	30.315.822.263	22.097.298.162	52.413.120.425	REVENUES
BEBAN POKOK				
PENDAPATAN	(18.954.152.609)	(15.682.376.793)	(34.636.529.402)	COST OF REVENUES
LABA KOTOR	11.361.669.654	6.414.921.369	17.776.591.023	GROSS PROFIT
Pendapatan lain-lain	51.284.754	37.381.618	88.666.372	Other income
Beban penjualan	(459.405.954)	(334.862.444)	(794.268.398)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(5.361.911.812)	(3.908.314.378)	(9.270.226.190)	General and administrative expenses
Beban keuangan	(214.034.008)	(156.010.062)	(370.044.070)	Finance charges
Beban lain-lain	(61.494.292)	(44.823.383)	(106.317.675)	Other expenses
LABA SEBELUM				
MANFAAT (BEBAN)				INCOME BEFORE
PAJAK				INCOME TAX BENEFIT
PENGHASILAN	5.316.108.342	2.008.292.720	7.324.401.062	(EXPENSE)
MANFAAT (BEBAN)				
PAJAK				INCOME TAX
PENGHASILAN				BENEFIT (EXPENSE)
Kini	(1.101.147.179)	(802.629.641)	(1.903.776.820)	Current
Tangguhan	118.585.988	86.437.699	205.023.687	Deferred
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(982.561.191)	(716.191.942)	(1.698.753.133)	Total Income Tax Benefit (Expense)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Juli 2022/July 31, 2022 (Tujuh Bulan/Seven Months)			
	Pendapatan Jasa/ Service Income	Penjualan Produk/ Sales of Products	Jumlah/Total	
LABA PERIODE BERJALAN SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA	4.333.547.151	1.292.100.778	5.625.647.929	INCOME FOR THE PERIOD BEFORE PROFORMA ADJUSTMENT
Proforma laba rugi	(92.949.979)	(67.751.532)	(160.701.511)	Proforma of profit or loss
LABA PERIODE BERJALAN	4.240.597.172	1.224.349.246	5.464.946.418	INCOME FOR THE PERIOD
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				ITEM NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(475.885.382)	(346.874.352)	(822.759.734)	Remeasurement of employee benefits obligation
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	104.694.784	76.312.357	181.007.141	Income tax related to item not to be reclassified to profit or loss
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan – Setelah Pajak	(371.190.598)	(270.561.995)	(641.752.593)	Total Other Comprehensive Income for the Period – Net of Tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	3.869.406.574	953.787.251	4.823.193.825	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD
INFORMASI LAINNYA				OTHER INFORMATION
Penyusutan	99.959.622	72.860.882	172.820.504	Depreciation
Amortisasi	1.564.696.288	1.140.512.043	2.705.208.331	Amortization
Aset Segmen	39.979.282.644	29.141.024.816	69.120.307.460	Segment Assets
Liabilitas Segmen	9.553.294.804	6.963.426.619	16.516.721.423	Segment Liabilities
	31 Juli 2021/July 31, 2021 (Tujuh Bulan/Seven Months)			
	Pendapatan Jasa/ Service Income	Penjualan Produk/ Sales of Products	Jumlah/Total	
PENDAPATAN BEBAN POKOK	16.901.243.441	1.311.780.222	18.213.023.663	REVENUES
PENDAPATAN	(8.224.394.124)	(1.877.583.334)	(10.101.977.458)	COST OF REVENUES
LABA (RUGI) KOTOR	8.676.849.317	(565.803.112)	8.111.046.205	GROSS PROFIT (LOSS)
Pendapatan lain-lain	18.971.570	1.472.467	20.444.037	Other income
Beban penjualan	(173.413.967)	(13.459.425)	(186.873.392)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(2.129.867.105)	(165.308.402)	(2.295.175.507)	General and administrative expenses
Beban keuangan	(643.916.606)	(49.977.215)	(693.893.821)	Finance charges

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Juli 2021/July 31, 2021 (Tujuh Bulan/Seven Months)			
	Pendapatan Jasa/ Service Income	Penjualan Produk/ Sales of Products	Jumlah/Total	
Beban lain-lain	(10.675.767)	(828.594)	(11.504.361)	Other expenses
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	5.737.947.442	(793.904.281)	4.944.043.161	INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	(934.939.298)	(72.564.772)	(1.007.504.070)	Current
Tangguhan	59.383.296	4.609.000	63.992.296	Deferred
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(875.556.002)	(67.955.772)	(943.511.774)	Total Income Tax Benefit (Expense)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	4.862.391.440	(861.860.053)	4.000.531.387	INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				ITEM NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(180.689.036)	(14.024.075)	(194.713.111)	Remeasurement of employee benefits obligation
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	39.167.857	3.039.990	42.207.847	Income tax related to item not to be reclassified to profit or loss
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan – Setelah Pajak	(141.521.179)	(10.984.085)	(152.505.264)	Total Other Comprehensive Income for the Period – Net of Tax
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	4.720.870.261	(872.844.138)	3.848.026.123	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD
INFORMASI LAINNYA				OTHER INFORMATION
Penyusutan	79.036.119	6.134.343	85.170.462	Depreciation
Amortisasi	2.307.372.918	179.085.413	2.486.458.331	Amortization
Aset Segmen	4.218.888.153	327.446.561	4.546.334.714	Segment Assets
Liabilitas Segmen	2.495.029.539	193.650.273	2.688.679.812	Segment Liabilities
	31 Desember 2021/December 31, 2021 (Satu Tahun/One Year)			
	Pendapatan Jasa/ Service Income	Penjualan Produk/ Sales of Products	Jumlah/Total	
PENDAPATAN BEBAN POKOK	26.061.108.933	19.566.926.364	45.628.035.297	REVENUES
PENDAPATAN	(17.349.192.566)	(13.025.937.396)	(30.375.129.962)	COST OF REVENUES
LABA KOTOR	8.711.916.367	6.540.988.968	15.252.905.335	GROSS PROFIT

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2021/December 31, 2021 (Satu Tahun/One Year)			
	Pendapatan Jasa/ Service Income	Penjualan Produk/ Sales of Products	Jumlah/Total	
Pendapatan lain-lain	12.567.424	9.435.740	22.003.164	Other income
Beban penjualan	(148.171.091)	(111.248.253)	(259.419.344)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(2.900.262.588)	(2.177.544.502)	(5.077.807.090)	General and administrative expenses
Beban keuangan	(561.697.931)	(421.728.104)	(983.426.035)	Finance charges
Beban lain-lain	(225.501.459)	(169.308.622)	(394.810.081)	Other expenses
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	4.888.850.722	3.670.595.227	8.559.445.949	INCOME BEFORE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	(1.137.361.429)	(853.941.687)	(1.991.303.116)	Current
Tangguhan	62.657.349	47.043.729	109.701.078	Deferred
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(1.074.704.080)	(806.897.958)	(1.881.602.038)	Total Income Tax Benefit (Expense)
LABA TAHUN BERJALAN	3.814.146.642	2.863.697.269	6.677.843.911	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				ITEM NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(190.651.192)	(143.142.713)	(333.793.905)	Remeasurement of employee benefits obligation
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	41.327.347	31.028.962	72.356.309	Income tax related to item not to be reclassified to profit or loss
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan – Setelah Pajak	(149.323.845)	(112.113.751)	(261.437.596)	Total Other Comprehensive Income for the Year – Net of Tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3.664.822.797	2.751.583.518	6.416.406.315	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
INFORMASI LAINNYA				OTHER INFORMATION
Penyusutan	110.703.926	83.117.551	193.821.477	Depreciation
Amortisasi	2.452.437.096	1.841.312.900	4.293.749.996	Amortization
Aset Segmen	35.235.321.654	16.958.662.031	52.193.983.685	Segment Assets
Liabilitas Segmen	15.938.255.208	7.671.037.776	23.609.292.984	Segment Liabilities

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember 2020/December 31, 2020 (Satu Tahun/One Year)				
	Pendapatan Jasa/ Service Income	Penjualan Produk/ Sales of Products	Jumlah/Total	
PENDAPATAN	11.148.178.430	21.554.366.906	32.702.545.336	REVENUES
BEBAN POKOK				
PENDAPATAN	(8.568.308.879)	(16.566.336.331)	(25.134.645.210)	COST OF REVENUES
LABA KOTOR	2.579.869.551	4.988.030.575	7.567.900.126	GROSS PROFIT
Pendapatan lain-lain	6.354.972	12.286.976	18.641.948	Other income
Beban penjualan	(258.223.526)	(499.260.455)	(757.483.981)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(1.203.376.791)	(2.326.660.364)	(3.530.037.155)	General and administrative expenses
Beban keuangan	(455.482.955)	(880.650.306)	(1.336.133.261)	Finance charges
Beban lain-lain	(12.551.565)	(24.267.735)	(36.819.300)	Other expenses
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	656.589.686	1.269.478.691	1.926.068.377	INCOME BEFORE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	(170.576.279)	(329.799.504)	(500.375.783)	Current
Tangguhan	8.760.473	16.937.875	25.698.348	Deferred
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(161.815.806)	(312.861.629)	(474.677.435)	Total Income Tax Benefit (Expense)
LABA TAHUN BERJALAN	494.773.880	956.617.062	1.451.390.942	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				ITEM NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	131.136.717	253.545.359	384.682.076	Remeasurement of employee benefits obligation
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(28.850.078)	(55.779.979)	(84.630.057)	Income tax related to item not to be reclassified to profit or loss
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan – Setelah Pajak	102.286.639	197.765.380	300.052.019	Total Other Comprehensive Income for the Year – Net of Tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	597.060.519	1.154.382.442	1.751.442.961	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
INFORMASI LAINNYA				OTHER INFORMATION
Penyusutan	12.007.850	23.216.494	35.224.344	Depreciation
Amortisasi	1.336.952.883	2.584.922.117	3.921.875.000	Amortization
Aset Segmen	10.557.717.498	20.412.744.384	30.970.461.882	Segment Assets
Liabilitas Segmen	4.023.319.263	7.778.858.233	11.802.177.496	Segment Liabilities

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2019/December 31, 2019 (Satu Tahun/One Year)			
	Pendapatan Jasa/ Service Income	Penjualan Produk/ Sales of Products	Jumlah/Total	
PENDAPATAN	4.750.900.000	1.966.972.001	6.717.872.001	REVENUES
BEBAN POKOK				
PENDAPATAN	(2.645.915.689)	(1.095.464.454)	(3.741.380.143)	COST OF REVENUES
LABA KOTOR	2.104.984.311	871.507.547	2.976.491.858	GROSS PROFIT
Pendapatan lain-lain	6.670.292	2.761.641	9.431.933	Other income
Beban penjualan	(50.775.886)	(21.022.279)	(71.798.165)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(1.938.462.972)	(802.564.228)	(2.741.027.200)	General and administrative expenses
Beban lain-lain	(4.865.156)	(2.014.277)	(6.879.433)	Other expenses
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	117.550.589	48.668.404	166.218.993	INCOME BEFORE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	(33.550.839)	(13.890.750)	(47.441.589)	Current
Tangguhan	17.330.345	7.175.126	24.505.471	Deferred
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(16.220.494)	(6.715.624)	(22.936.118)	Total Income Tax Benefit (Expense)
LABA TAHUN BERJALAN	101.330.095	41.952.780	143.282.875	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				ITEM NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(25.420.425)	(10.524.588)	(35.945.013)	Remeasurement of employee benefits obligation
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	6.355.106	2.631.147	8.986.253	Income tax related to item not to be reclassified to profit or loss
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan – Setelah Pajak	(19.065.319)	(7.893.441)	(26.958.760)	Total Other Comprehensive Income for the Year – Net of Tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	82.264.776	34.059.339	116.324.115	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
INFORMASI LAINNYA				OTHER INFORMATION
Penyusutan	28.949.168	11.985.561	40.934.729	Depreciation
Aset Segmen	4.578.719.081	1.895.685.498	6.474.404.579	Segment Assets
Liabilitas Segmen	535.751.022	221.812.132	757.563.154	Segment Liabilities

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

40. TRANSAKSI NON KAS

40. NON-CASH TRANSACTIONS

Terdapat akun dalam laporan keuangan yang penambahannya merupakan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas, dengan rincian sebagai berikut:

There were accounts in the financial statements that the addition represents an activity that does not affect cash flows, with the details as follows:

	31 Juli 2022/ July 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Utang lain-lain – pihak berelasi sehubungan dengan pelepasan entitas anak	12.000.000.000	-	-	-	<i>Other payables – related parties related with disposal of the subsidiary</i>
Peningkatan modal disetor melalui pembagian dividen saham (lihat Catatan 22)	7.000.000.000	-	-	-	<i>Increase in paid-in capital through the distribution of stocks dividends (see Note 22)</i>
Pengurangan piutang lain-lain – pihak berelasi sehubungan dengan pelepasan entitas anak	3.000.000.000	-	-	-	<i>Decrease in other receivables – related parties related with the disposal of the subsidiary</i>
Pengurangan tambahan modal disetor sehubungan dengan pelepasan entitas anak	(3.000.000.000)	-	-	-	<i>Decrease in additional paid-in capital related parties related with the disposal of the subsidiary</i>
Penambahan aset tetap melalui fasilitas utang lembaga keuangan	-	591.500.000	-	-	<i>Addition of fixed assets through a financial institution loan facility</i>
Penambahan tambahan modal disetor melalui piutang lain-lain – pihak berelasi sehubungan dengan kombinasi bisnis entitas anak	-	3.000.000.000	-	-	<i>Increase in additional paid-in capital through other receivables – related parties related with the business combination of the subsidiary</i>
Penambahan investasi saham kepada PT Trans Mega Selaras	-	-	4.950.000.000	-	<i>Addition of investment in shares PT Trans Mega Selaras</i>
Penambahan utang lain-lain atas investasi saham kepada PT Trans Mega Selaras	-	-	(4.950.000.000)	-	<i>Addition of other payables on investment in shares to PT Trans Mega Selaras</i>
Penambahan utang lain-lain – pihak berelasi atas dividen yang belum dibayarkan	-	-	1.500.000.000	-	<i>Addition of other payables – related parties for unpaid dividends</i>
Pengurangan sisa porsi konsolidasi tahun 2019 atas piutang lain-lain – pihak berelasi kepada PT Trans Merga Selaras	-	-	559.300.000	-	<i>Reduction of the remaining 2019 consolidated portion of other receivables – related parties to PT Trans Merga Selaras</i>
Jumlah	19.000.000.000	3.591.500.000	2.059.300.000	-	Total

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

41. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun-akun dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2019 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tanggal 31 Juli 2022 sebagai berikut:

	Dilaporkan Sebelumnya/ <i>As Previously Reported</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Setelah Reklasifikasi/ <i>After Reclassifications</i>	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain				Statements of profit or loss and other comprehensive income
Beban pokok pendapatan				Cost of revenues
Perjalanan dinas	31.363.041	(31.363.041)	-	Business trip expense
Beban penjualan				Selling expenses
Promosi dan pemasaran	-	40.435.124	40.435.124	Promotion and marketing
Perjalanan dinas	-	31.363.041	31.363.041	Business trip expense
Beban umum dan administrasi				General and administrative expenses
Koordinasi marketing	40.435.124	(40.435.124)	-	Coordination marketing

Certain accounts in the statements of financial position and profit or loss and other comprehensive income as of December 31, 2019 have been reclassified to conform with the presentation with the statements of profit or loss and other comprehensive income as of July 31, 2022 as follows:

42. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING

a) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 001A/DHS-PKS/XII/2019, antara Entitas dengan PT Teknologi Rancang Olah Nusantara, tanggal 26 Desember 2019, Entitas menyetujui untuk melakukan pembelian aplikasi sebesar Rp 18.550.000.000. Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu selama 2 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian.

Pada tanggal 2 Juni 2021, perjanjian tersebut diperbaharui dengan Amandemen Perjanjian No. 018A/TKDN-PKS/VI/2021, Entitas menyetujui untuk melakukan pembelian aplikasi sebesar Rp 31.406.000.000. Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu selama 4 tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian (lihat Catatan 14 dan 35).

42. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

a) Based on the Cooperation Agreement No. 001A/DHS-PKS/XII/2019, between the Entity and PT Teknologi Rancang Olah Nusantara, dated December 26, 2019, the Entity agreed to purchase the application amounting to Rp 18,550,000,000. This agreement is effective for a period of 2 years from the date of signing this agreement.

On June 2, 2021, the agreement had renewed with an Amendment to the Agreement No. 018A/TKDN-PKS/VI/2021, the Entity agreed to purchase the application amounting to Rp 31,406,000,000. This agreement is effective for a period of 4 years from the date of signing this agreement (see Notes 14 and 35).

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- b) Berdasarkan Akta Sewa Ruko No. 33, tanggal 29 September 2020, Entitas menyewa ruko yang beralamat di Jalan Trembesi Blok G1 No. 826, Mini Office Central 88, Jakarta Utara. Sewa berlaku sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan 29 September 2021.

Sewa ruko tersebut telah diperpanjang sampai dengan tanggal 29 September 2022, sesuai dengan Akta Sewa Ruko No. 21, tanggal 26 Oktober 2021.

Berdasarkan Akta Perpanjangan Sewa No. 7, tanggal 22 September 2022, Entitas memperpanjang sewa ruko sampai dengan tanggal 29 September 2023.

- c) Berdasarkan Perjanjian No. KU.003/KONT-DOPAJ/7/SKDAJI/2021, antara Entitas dan Satuan Kerja Direktorat Angkutan Jalan, tanggal 7 Januari 2021, Entitas sebagai penyedia menyetujui untuk menyelesaikan pekerjaan *Fleet Management System* Angkutan Perkotaan dengan Skema *Buy the Services* sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya yang membutuhkan peralatan telematika untuk melakukan pengawasan.

Jenis kontrak tersebut adalah kontrak *Gabungan Lump Sum*. Perjanjian mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini. Entitas harus menyelesaikan pekerjaan tersebut sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sumber dana sebagai berikut:

- DIPA TA.2021 sebesar Rp 29.935.066.238.
- DIPA TA.2022 sebesar Rp 32.396.039.000.
- DIPA TA.2023 sebesar Rp 34.015.841.000.

- d) Berdasarkan Perjanjian No. KU.003/KONT-DPAJ/1/SKDAJI/2021, antara Entitas dan Satuan Kerja Direktorat Angkutan Jalan, tanggal 11 Januari 2021, Entitas menyetujui kontrak pengadaan Sewa Alat Pengawasan Angkutan Jalan Perintis. Jenis kontrak tersebut adalah kontrak *Gabungan Lump Sum* dan *Unit Price* dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 5.836.462.060. Perjanjian berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini. Entitas harus menyelesaikan pekerjaan tersebut sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2021.

- b) *Based on the Shophouse Lease Deed No. 33, dated September 29, 2020, the Entity leased a shophouse with address at Jalan Trembesi Blok G1 No. 826, Mini Office Central 88, Jakarta Utara. The lease was valid from September 29, 2020 to September 29, 2021.*

The rent for the shophouse had been extended until September 29, 2022, in accordance with the Shophouse Lease Deed No. 21, dated October 26, 2021.

Based on the Deed of Lease Extension No. 7, dated September 22, 2022, the Entity extended the shophouse lease until September 29, 2023.

- c) *Based on Agreement No. KU.003/KONT-DOPAJ/7/SKDAJI/2021, between the Entity and Satuan Kerja Direktorat Angkutan Jalan, dated January 7, 2021, the Entity as a provider agreed to complete the work of the Urban Transport Fleet Management System with the Buy Services Scheme in accordance with its scope of work which requires telematics equipment to carry out supervision.*

This type of contract is a Combined Lump Sum. The agreement is valid from the date of signing the agreement. The entity must complete the work from January 1, 2021 until December 31, 2023 with the details of the funds as follows:

- *DIPA TA.2021 amounting to Rp 29,935,066,238.*
- *DIPA TA.2022 amounting to Rp 32,396,039,000.*
- *DIPA TA.2023 amounting to Rp 34,015,841,000.*

- d) *Based on Agreement No. KU.003/KONT-DPAJ/1/SKDAJI/2021, between the Entity and the Satuan Kerja Direktorat Angkutan Jalan, dated January 11, 2021, the Entity agreed to a procurement contract for the rental of Pioneer Road Transportation Supervision Equipment. This type of contract is a Combined Lump Sum and Unit Price contract with a contract value including Value Added Tax (VAT) amounting to Rp 5,836,462,060. The agreement is effective as of the date of signing this agreement. The Entity must complete the work since the Work Start Order (SPMK) is issued until December 31, 2021.*

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Perpanjangan Perjanjian berdasarkan Perjanjian No. KU.003/KONT-DMOPABPAJ/4/SKDAJ/I/2022, Entitas dan Satuan Kerja Direktorat Angkutan Jalan, tanggal 27 Januari 2022, Entitas menyetujui kontrak pengadaan Sewa Alat Pengawasan Angkutan Jalan Perintis.

Renewal of agreement based on Agreement No. KU.003/KONT-DMOPABPAJ/4/SKDAJ/I/2022, between the Entity and Satuan Kerja Direktorat Angkutan Jalan, dated January 27, 2022, the Entity approved a contract for the procurement of Pioneer Road Transportation Monitoring Equipment Rental.

Jenis kontrak tersebut adalah kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 5.663.435.000. Perjanjian berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini. Entitas harus menyelesaikan pekerjaan tersebut sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2022.

This type of contract is a Combined Lump Sum and Unit Price contract with a contract value including Value Added Tax (VAT) amounting to Rp 5,663,435,000. The agreement is effective as of the date of signing this agreement. The Entity must complete the work since the Work Start Order (SPMK) is issued until December 31, 2022.

e) Berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 07/LEG/PEBRUARI/2022, tanggal 22 Februari 2022, Entitas menyetujui untuk membeli sebidang tanah sebesar Rp 7.500.000.000 dengan luas 353 m² yang terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan rincian pembayaran sebagai berikut (lihat Catatan 10):

e) *Based on the Sale and Purchase Agreement No. 07/LEG/PEBRUARI/2022, dated February 22, 2022, the Entity agreed to purchase a plot of land amounting to Rp 7,500,000,000 with an area of 353 m² located in Tanjung Priok, Jakarta Utara with payment details as follows (see Note 10):*

- Sebesar Rp 50.000.000 telah dibayarkan pada tanggal 12 Januari 2022.
- Sebesar Rp 365.001.950 untuk membayar biaya Pajak Waris.
- Sebesar Rp 75.000.000 untuk membayar biaya proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan.
- Sebesar Rp 61.884.001 untuk membayar tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, 2015, 2016 dan 2017.
- Sebesar Rp 56.000 untuk membayar tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.
- Sisa pembayaran sebesar Rp 6.948.058.039 akan dibayar pada saat penanda-tanganan Akta Jual-Beli dengan Kredit Pemilikan Rumah Bank. Apabila permohonan Kredit Pemilikan Rumah Bank ditolak, maka pembayaran akan dilakukan dengan cara tunai.

- *Rp 50,000,000 has been paid on January 12, 2022.*
- *Rp 365,001,950 to pay the Inheritance Tax fee.*
- *Rp 75,000,000 to pay for the Certificate of Building Use Rights renewal process fee.*
- *Rp 61,884,001 to pay Property Tax arrears in 2013, 2015, 2016 and 2017.*
- *Rp 56,000 to pay arrears of Vehicle tax.*
- *The remaining payment of Rp 6,948,058,039 will be paid at the time of signing the Deed of Sale and Purchase with the House ownership credit Bank. If the Bank House ownership credit application is rejected, the payment will be made in cash.*

f) Berdasarkan Nota Kesepahaman No. 001/TKDN/PKS/III/2022, antara Entitas dan PT Transportasi Jakarta, tanggal 1 Maret 2022, Entitas menyetujui untuk melakukan kerjasama dalam hal pengadaan perangkat dan sistem yang akan diterapkan pada kendaraan yang dimiliki oleh PT Transportasi Jakarta. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

f) *Based on the Memorandum of Understanding No. 001/TKDN/PKS/III/2022, between the Entity and PT Transportasi Jakarta, dated March 1, 2022, the Entity agreed to cooperate in the procurement of equipment and systems to be applied to vehicles owned by PT Transportasi Jakarta. This Memorandum of Understanding is valid for a period of 1 year from the date of signing this Memorandum of Understanding.*

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

g) Berdasarkan Perjanjian No. 001A/TKDN-PKS/III/2022, antara Entitas dan David Santoso, tanggal 1 Maret 2022, Entitas menyetujui untuk melakukan kerjasama dalam hal pengelolaan dan pemakaian bangunan kantor. Entitas memiliki hak untuk melanjutkan kerjasama ini menjadi jual beli bangunan kantor sebesar Rp 5.500.000.000. Entitas memutuskan untuk melakukan opsi jual beli atas bangunan kantor. Sampai dengan tanggal laporan ini, jual beli masih dalam proses (lihat Catatan 10, 35 dan 43).

g) *Based on Agreement No. 001A/TKDN-PKS/III/2022, between the Entity and David Santoso, dated March 1, 2022, the Entity agreed to cooperate in the management and use of office buildings. The Entity has the right to continue this collaboration into a sale and purchase of office buildings amounting to Rp 5,500,000,000. The entity decides to exercise a buy and sell option on an office building. As of the date of this report, the sale and purchase is still on process (see Notes 10, 35 and 43).*

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

43. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Akta Notaris

Notarial Deeds

a) Berdasarkan Akta Notaris No. 33, tanggal 10 Agustus 2022 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, Pemegang Saham Entitas menyetujui untuk menetapkan David Santoso sebagai pihak pengendali Entitas sebagaimana dimaksud dalam POJK 3/2021.

a) *Based on Notarial Deed No. 33, dated August 10, 2022 from Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the Stockholders of the Entity agreed to appoint David Santoso as the controlling party of the Entity as referred to in POJK 3/2021.*

b) Berdasarkan Akta Notaris No. 110, tanggal 28 September 2022 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, Pemegang Saham mengambil beberapa keputusan sebagai berikut:

b) *Based on the Notarial Deed No. 110, dated September 28, 2022 from Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the Stockholders made the following decisions:*

- Menyetujui rencana Entitas untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Entitas tersebut ke Bursa Efek Indonesia.
- Menyetujui perubahan status Entitas dari suatu Entitas Tertutup menjadi Entitas Terbuka dan menyetujui perubahan nama Entitas menjadi PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk.
- Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Entitas dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 750.000.000 saham baru yang mewakili 25% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Entitas setelah Penawaran Umum Perdana, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku ditempat dimana saham-saham dicatatkan.

- *Approval on the Entity's plan to conduct an initial public offering of the Entity's shares to the Indonesia Stock Exchange.*
- *Approval on the changes of the Entity's status from a Private Entity to a Public Entity and approved the change of the Entity's name to PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk.*
- *Approval to issue shares in the Entity's deposit/portfolio and offer/sell new shares to be issued from the portfolio through Initial Public Offering to the public in the maximum amount of 750,000,000 new shares presenting 25% of the total issued and paid-up capital of the Entity after to the Initial Public Offering, with due observance of the prevailing laws and regulations including the regulations of the Capital Market and the Regulations of the Indonesian Stock Exchange in effect at the place where the shares are listed.*

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

-
- Menyetujui untuk menerbitkan Waran Seri I Entitas dalam jumlah sebanyak-banyaknya 375.000.000 atau 11,28% dari total jumlah saham ditempatkan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, yang akan diberikan sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.
 - Menyetujui untuk memberikan program Alokasi Saham kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation*), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 5% dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham Entitas akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
 - Menyetujui untuk mencatat seluruh saham Entitas, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan atau dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Entitas pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*).
 - Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Entitas dalam rangka Penawaran Umum, untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 mengenai "Pokok-Pokok Anggaran Dasar Entitas yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik", Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 mengenai "Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perusahaan Terbuka", Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 mengenai "Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik" dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 mengenai "Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik", Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 mengenai "Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik" untuk selanjutnya disebut sebagai "Anggaran Dasar".
 - Approval to issue the Entity's Series I Warrants in the maximum amount of 375,000,000 or 11.28% of the total number of issued shares fully paid at the time of registration statement in the framework of the Public Offering, which will be given as incentives for new stockholders whose names are listed in the Register of Stockholders on the Allotment Date.
 - Approval to provide an Employee Stock Allocation program, with an allocation of a maximum of 5% of all new shares to be offered/sold to the public through a Public Offering, with due observance of the prevailing Indonesian Stock Exchange regulations in the place where the Entity's shares will be registered and the prevailing laws and regulations in the capital market sector.
 - Approval to record all shares of the Entity, after the Initial Public Offering of shares offered or sold to the public through the capital market, as well as shares owned by stockholders (other than public stockholders) of the Entity on the Indonesia Stock Exchange (*Company Listing*).
 - Approval on the changes to the Entity's Articles of Association in the context of a Public Offering, to be adjusted to Bapepam and LK Regulation No. IX.J.1 regarding "Principles of the Articles of Association of Entities conducting Public Offerings of Equity Securities and Public Companies", Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding "Plan and Organizing General Meeting of Stockholders ("GMS") of a Public Company", Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding "Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies" and Financial Services Authority Regulations No. 34/POJK.04/2014 regarding "Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies", Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 regarding "Secretary of Issuers or Public Companies" hereinafter referred to as the "Articles of Association".

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- Menyetujui perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Entitas sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Entitas dalam Bursa Efek Indonesia dalam rangka Penawaran Umum.
- Menyetujui peningkatan modal dasar Entitas dari Rp 60.000.000.000 menjadi Rp 120.000.000.000 terbagi atas 6.000.000.000 lembar saham masing-masing bernilai nominal Rp 20. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 2.200.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 44.000.000.000.
- Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Budi Setiyadi	:
Komisaris	:	Kelik Irwantono	:
Komisaris Independen	:	Ir. Resdiansyah	:

Direksi

Direktur Utama	:	David Santoso	:
Direktur	:	Rudy Budiman Setiawan	:
	:	Yudhi Haryadi	:

- c) Berdasarkan Akta Notaris No. 98, tanggal 31 Oktober 2022, dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0071518 tanggal 1 November 2022, pemegang saham Entitas menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut (lihat Catatan 1c):

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Budi Setiyadi	:
Komisaris Independen	:	Ir. Resdiansyah	:

Direksi

Direktur Utama	:	David Santoso	:
Direktur	:	Rudy Budiman Setiawan	:
	:	Yudhi Haryadi	:

- *Approval on the changes in the capital structure and composition of stockholders in the Entity in accordance with the results of the Public Offering and listing of the Entity's shares on the Indonesia Stock Exchange in the context of a Public Offering.*
- *Approval on the increase in the authorized capital of the Entity from Rp 60,000,000,000 to Rp 120,000,000,000 divided into 6,000,000,000 shares each with a nominal value of Rp 20. From the authorized capital, 2,200,000,000 shares had been issued and paid-up with a total par value of Rp 44,000,000,000.*
- *Approval on the changes in the composition of the Board of Commissioners and Directors with details as follows:*

Board of Commissioners

	:	President Commissioner	:
	:	Commissioner	:
	:	Independent Commissioner	:

Directors

	:	President Director	:
	:	Director	:

- c) *Based on Notarial Deed No. 98, dated October 31, 2022, from Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, which had been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0071518 dated November 1, 2022, the stockholders of the Entity approved the changes to the composition of the Board of Commissioners and the Directors with the following details (see Note 1c):*

Board of Commissioners

	:	President Commissioner	:
	:	Independent Commissioner	:

Directors

	:	President Director	:
	:	Director	:

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- d) Berdasarkan Akta Ratifikasi Notaris No. 100, tanggal 26 September 2022 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, Pemegang Saham mengambil beberapa keputusan sebagai berikut:
- Menerima laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik untuk tahun 2018, 2019 dan 2020.
 - Memberikan pembebasan dan pelunasan atas tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021.
 - Penegasan kembali atas pembagian dividen yang dicatatkan dalam laporan keuangan tahun 2020.
 - Menyetujui penggunaan laba bersih Entitas tahun 2021 sebesar Rp 6.677.843.911 sebagai berikut:
 - Sebesar Rp 1.000.000.000 ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
 - Sebesar Rp 5.677.843.911 ditetapkan sebagai saldo laba ditahan Entitas.
 - Menegaskan bahwa penyetoran modal Entitas telah dilakukan seluruhnya oleh para pemegang saham.

Ratifikasi atas tindakan Entitas untuk periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 dilakukan karena Entitas sampai dengan tahun 2021 belum pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Sehingga, ratifikasi atas tindakan Entitas untuk tahun 2021 serta tahun-tahun sebelumnya, diperlukan guna memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Entitas yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2022 menyatakan bahwa pemegang saham Entitas menyetujui, memutuskan dan mengesahkan bahwa Entitas berkomitmen untuk melakukan pencadangan laba setiap tahunnya sesuai dengan hasil operasional tahunan yang diperoleh dari Entitas hingga dapat memenuhi ketentuan yang termaktub dalam Pasal 70 UUPT.

- d) *Based on Notarial Ratification Deed No. 100, dated September 26, 2022 from Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the Stockholders made the following decisions:*
- Received the financial statements that have been audited by public accounting firms for the years 2018, 2019 and 2020.*
 - Grant release and discharge of full responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions that had been carried out for the years ended December 31 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 and 2021.*
 - Reaffirmation of the distribution of dividends recorded in the 2020 financial statements.*
 - Agreed on the usage of the Entity's in 2021 net income amounting to Rp 6,677,843,911, as follows:*
 - An amount of Rp 1,000,000,000 is set as a mandatory reserve to comply with Article 70 of the Limited Liability Company Law.*
 - The amount of Rp 5,677,843,911 is determined as the Entity's retained earnings balance.*
 - Affirmed that the Entity's capital has been fully paid by the stockholders.*

Ratification of the Entity's actions for the period 2011 to 2021 was carried out because the Entity until 2021 had never held an Annual General Meeting of Shareholders. Thus, ratification of the Entity's actions for 2021 and previous years, is required to comply with the provisions of Article 66 paragraph (1) and Article 78 paragraph (2) and (3) Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Companies as amended by Law No. 11 Year 2020 regarding Job Creation.

Based on the Circular Decision in lieu of the Extraordinary General Meeting of the Entity's Shareholders which was signed on October 29, 2022 stated that the Entity's shareholders agreed, decided and ratified that the Entity is committed to making a earning reserve every year in accordance with the annual operating results obtained from the Entity until can fulfill the reserve contained in Article 70 UUPT.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- e) Berdasarkan Akta Notaris No. 102, tanggal 26 September 2022 dari Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, Pemegang Saham mengambil beberapa keputusan sebagai berikut:
- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Entitas tahun 2021 sebesar Rp 6.677.843.911 sebagai berikut:
- Sebesar Rp 1.000.000.000 ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
 - Sebesar Rp 5.677.843.911 ditetapkan sebagai saldo laba ditahan Entitas.
- b. Menyetujui penggunaan laba ditahan Entitas sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp 8.500.000.000, dibagikan sebagai dividen saham kepada para pemegang saham secara proporsional.
- c. Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2021.
- f) Sesuai dengan perjanjian kerjasama dalam hal pengelolaan dan pemakaian bangunan kantor yang terletak di Komplek Perumahan Batu Ceper Permai Blok V No. 17-18, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang antara Entitas dan David Santoso pada tanggal 1 Maret 2022, Entitas telah melakukan perjanjian pengikatan jual beli berdasarkan Akta Notaris No. 41, tanggal 11 November 2022, oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dengan nilai bangunan sebesar Rp 5.500.000.000 (lihat Catatan 10, 35 dan 42).
- e) *Based on Notarial Deed No. 102, dated September 26, 2022 from Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the Stockholders made the following decisions:*
- a. *Agreed on the usage of the Entity's in 2021 net income amounting to Rp 6,677,843,911, as follows:*
- *An amount of Rp 1,000,000,000 is set as a mandatory reserve to comply with Article 70 of the Limited Liability Company Law.*
 - *The amount of Rp 5,677,843,911 is determined as the Entity's retained earnings balance.*
- b. *Agreed to use of the Entity's retained earnings from 2018 to 2021 amounting to Rp 8,500,000,000, distributed as share dividends to the stockholders proportionally.*
- c. *Approved and authorized the audited financial statements for 2021.*
- f) *In accordance with the cooperation agreement in terms of management and use of the office building located in Komplek Perumahan Batu Ceper Permai Blok V No. 17-18, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang between the Entity and David Santoso on March 1, 2022, the Entity has entered into a binding sale and purchase agreement based on Notary Deed No. 41, November 11, 2022, by Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, with a building value of Rp 5,500,000,000 (see Notes 10, 35 and 42).*

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 106/TKDN/IX/2022, tanggal 28 September 2022, Entitas telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai berikut (lihat Catatan 1c):

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Dr. Ir. Resdiansyah

Anggota Komite

Kelik Irwantono
Luluk Sri Utami

Nomination and Remuneration Committee

Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. 106/TKDN/IX/2022, dated September 28, 2022, the Entity had established a Nomination and Remuneration Committee, as follows (see Note 1c):

Head of Nomination and Remuneration Committee

Committee Members

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengalami perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 128/TKDN/XI/2022, tanggal 1 November 2022, dengan rincian sebagai berikut (lihat Catatan 1c):

The composition of the Nomination and Remuneration Committee had been changed in accordance with the Decision Letter of the Board of Commissioners No. 128/TKDN/XI/2022, dated November 1, 2022, with the following details (see Note 1c):

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

:

Dr. Ir. Resdiansyah

:

Head of Nomination and Remuneration Committee

Anggota Komite

:

Drs. Herwan Gozali

:

Committee Members

:

Luluk Sri Utami

:

Komite Audit

Audit Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 107/TKDN/IX/2022 tanggal 28 September 2022, Entitas telah membentuk Komite Audit, sebagai berikut (lihat Catatan 1c):

Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. 107/TKDN/IX/2022 dated September 28, 2022, the Entity had established an Audit Committee, as follows (see Note 1c):

Ketua Komite Audit

:

Dr. Ir. Resdiansyah

:

Head of Audit Committee

Anggota

:

Dwi Afrilianto

:

Members

:

Muhammad Arif Hartono

:

Audit Internal

Internal Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 108/TKDN/IX/2022 tanggal 28 September 2022, Entitas telah membentuk Audit Internal, sebagai berikut (lihat Catatan 1c):

Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. 108/TKDN/IX/2022 dated September 28, 2022, the Entity had established an Internal Audit, as follows (see Note 1c):

Ketua Audit Internal

:

Citra Dewi

:

Head of Internal Audit

Anggota

:

Ibnu Sina Azly

:

Members

:

Dini Afrilyan

:

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 109/TKDN/IX/2022 tanggal 28 September 2022, Entitas telah mengangkat Wendy Jolanda Waas sebagai Sekretaris Perusahaan, (lihat Catatan 1c).

Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. 109/TKDN/IX/2022 dated September 28, 2022, the Entity had appointed Wendy Jolanda Waas as Corporate Secretary, (see Note 1c).

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Utang Lembaga Keuangan

- a) Berdasarkan Perjanjian Fasilitas pembiayaan No. XXXVII/30/09/2022/PKS/BM-TKDN, antara Entitas dan PT Digital Auto Sejahtera, tanggal 30 September 2022, Entitas menyetujui untuk menerima pembiayaan sebesar Rp 2.000.000.000 dari PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia yang diwakili oleh PT Digital Auto Sejahtera. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dimulai tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2023.
- b) Berdasarkan Perjanjian Penyedia Fasilitas Pinjaman No.30232/LGL-TDF/PKS/IX/2022 antara Entitas dan PT Tri Digi Fin, tanggal 30 September 2022, Entitas menyetujui untuk menerima pembiayaan sebesar Rp 2.000.000.000 dari PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia yang diwakili oleh PT Tri Digi Fin. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dimulai tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2023.

Utang Bank Jangka Pendek

- a) Berdasarkan Surat No. B.99.e-RO-JKS/RLG/08/2022, tanggal 29 Agustus 2022, Entitas telah mendapat persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mengenai pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) (lihat Catatan 16).

BRI dengan Entitas telah melakukan perpanjangan kontrak addendum sesuai dengan Akta No. 84 dan 85, tanggal 28 November 2022. Pada Addendum KMK BRI tersebut, telah dihapuskan perihal negatif *covenant* dan telah mengakomodir persetujuan atas tindakan pelaksanaan IPO. Pihak BRI telah memberikan penegasan melalui persetujuan perubahan pengurus sebagaimana Surat No. B 4254-KC/V/ADK/12/2022, tanggal 12 Desember 2022 perihal Persetujuan Perubahan Pengurus Entitas.

- b) Berdasarkan Surat No. R03.SME.JTP/464/2022, tanggal 17 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”), utang bank kepada Bank Mandiri telah dilunasi oleh Entitas.

Financial Institution Loans

- a) *Based on the Financing Facility Agreement No. XXXVII/30/09/2022/PKS/BM-TKDN, between the Entity and PT Digital Auto Sejahtera, dated September 30, 2022, the Entity agreed to receive financing of Rp 2,000,000,000 from PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia represented by PT Digital Auto Sejahtera. The agreement is valid for a period of 1 year from September 2, 2022 to September 2, 2023.*
- b) *Based on the Loan Facility Provider Agreement No. 30232/LGL-TDF/PKS/IX/2022, between the Entity and PT Tri Digi Fin, dated September 30, 2022, the Entity agreed to receive financing of Rp 2,000,000,000 from PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia represented by PT Tri Digi Fin. The agreement is valid for a period of 1 year from September 30, 2022 to September 30, 2023.*

Short-Term Bank Loans

- a) *Based on Letter No. B.99.e-RO-JKS/RLG/08/2022, dated August 29, 2022, the Entity had received approval from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) regarding the conducting of the Initial Public Offering (IPO) (see Note 16).*

BRI and the Entity have extended the addendum contract in accordance with Deed No. 84 and 85, dated November 28, 2022. In the Addendum to BRI's KMK, the negative covenants have been abolished and have accommodated approval for IPO implementation actions. BRI has provided confirmation through the approval of changes in management as stated in Letter No. B 4254-KC/V/ADK/12/2022, dated December 12, 2022 regarding Approval for Changes in Entity Management.

- b) *Based on Letter No. R03.SME.JTP/464/2022, dated October 17, 2022, issued by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”), the bank loan to Bank Mandiri has been repaid by the Entity.*

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak

Pada tanggal 30 Desember 2022, Entitas melakukan perjanjian dengan BPC Banking Technologies (Asia Pacific) Pte., Ltd. sehubungan dengan lisensi perangkat lunak sebesar USD 750.000 untuk periode selama 2 tahun.

Perjanjian Layanan Profesional

Pada tanggal 30 Desember 2022, Entitas melakukan perjanjian dengan BPC Banking Technologies (Asia Pacific) Pte., Ltd. sehubungan dengan *professional services, software and project document* dengan harga kontrak sebesar USD 150.000.

Perjanjian Pemeliharaan Perangkat Lunak

Pada tanggal 30 Desember 2022, Entitas melakukan perjanjian dengan BPC Banking Technologies (Asia Pacific) Pte., Ltd. sehubungan dengan pemeliharaan perangkat lunak sebesar USD 135.000 per tahun.

Software License Agreement

On December 30, 2022, the Entity entered into an agreement with BPC Banking Technologies (Asia Pacific) Pte., Ltd. in connection with a software license amounting to USD 750,000 for a period of 2 years.

Professional Services Agreement

On December 30, 2022, the Entity entered into an agreement with BPC Banking Technologies (Asia Pacific) Pte., Ltd. in connection with professional services, software and project documents with a contract price amounting to USD 150,000.

Software Maintenance Agreement

On December 30, 2022, the Entity entered into an agreement with BPC Banking Technologies (Asia Pacific) Pte., Ltd. in connection with software maintenance amounting to USD 135,000 per annum.

44. INFORMASI PENTING LAINNYA

a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 (PP No. 35 Tahun 2021)

Pada tanggal 2 Februari 2021, PP No. 35 Tahun 2021 mengenai “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja” telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, mengenai “Cipta Kerja”.

Peraturan Pemerintah ini antara lain memuat:

- PKWT berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu;
- Jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan PKWT;
- Uang kompensasi bagi Pekerja/Buruh PKWT;
- Perlindungan Pekerja/Buruh dan perizinan berusaha pada kegiatan alih daya;
- Waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu;
- Waktu kerja lembur dan upah kerja lembur;

44. OTHER IMPORTANT INFORMATION

a) Republic of Indonesia Government Regulation No. 35 Year 2021 (PP No. 35 Year 2021)

On February 2, 2021, Government Regulation No. 35 Year 2021 regarding “Work Agreement for Specific Time (“PKWT”), Transfer, Working Time and Time off, and Termination of Employment” had been signed by the President of the Republic of Indonesia. This regulation was issued to implement the provisions of Article 81 and Article 185 letter b of Law No. 11 Year 2020, regarding “Jobs Creation”.

This Government Regulation contains, amongst others:

- PKWT based on time period or completion of a certain job;*
- Type and nature or work activities, time period, and deadline of extension for PKWT;*
- Compensation for PKWT Workers/ Laborers;*
- Protection of Workers/Laborers and business license on outsourcing activities;*
- Working time in a certain business sector or occupation;*
- Overtime and overtime pay;*

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- g. Batasan Perusahaan tertentu yang dapat menerapkan istirahat panjang;
- h. Tata cara Pemutusan Hubungan Kerja;
- i. Pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

- g. *Certain company restrictions that can implement long breaks;*
- h. *Procedures for Termination of Employment;*
- i. *Severance pay, reward payment, and compensation payment.*

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juni 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Entitas telah menerapkan PP No. 35 Tahun 2021. Tidak ada dampak material terhadap laporan keuangan

For the seven-month period ended July 31, 2022 and for the year ended December 31, 2021, the Entity had implemented PP No. 35 Year 2021. There is no material effect on the financial statements.

b) Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 mengenai “Harmonisasi Peraturan Perpajakan”

b) Law No. 7 Year 2021 regarding “Harmonization of Tax Regulations”

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 mengenai “Harmonisasi Peraturan Perpajakan”, atau disebut dengan “UU HPP” telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. UU HPP terdiri atas sembilan bab yang memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai. Beberapa ketentuan penting pada UU HPP, antara lain sebagai berikut:

On October 29, 2021, the Law No. 7 Year 2021 regarding “Harmonization of Tax Regulation” or referred to as “UU HPP” was signed by the President of the Republic of Indonesia. UU HPP consists of nine chapters that have six regulatory scopes, namely General Provisions and Tax Procedures (KUP), Income Tax (PPh), Value Added Tax (PPN), Voluntary Disclosure Program (PPS), Carbon Tax, and Excise. Several important provisions in the HPP Law, among others, are as follows:

1. Pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi.
2. Pengaturan mengenai besaran sanksi dan pengenaan sanksi bagi Wajib Pajak.
3. Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan *ultimum remedium*.
4. Pengaturan terkait pajak internasional.
5. Pemberian natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai.
6. Batas peredaran bruto tertentu tidak kena pajak bagi orang pribadi pengusaha atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 500.000.000.
7. Perubahan lapisan dan tarif penghasilan kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi.
8. Pemberlakuan tarif PPh Badan dan Badan Usaha Tetap menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022.

1. *Application of the Identification Number/ID Number (NIK) as an individual Taxpayer Identification Number (NPWP).*
2. *Regulation regarding the amount of sanctions and the imposition of sanctions for Taxpayers.*
3. *Enforcement of tax criminal law by prioritizing ultimum remedium.*
4. *Arrangement of international tax.*
5. *Giving in kind and/or enjoyment to employees can be deducted by the employer and constitutes income for the employee.*
6. *Certain gross turnover limits are not taxable for individual entrepreneurs on the share of gross turnover up to Rp 500,000,000.*
7. *Changes in layers and rates of taxable income for individual taxpayer.*
8. *The application of Corporate Income Tax rate for corporate taxpayer and permanent establishment to 22% starting from the 2022 Fiscal Year.*

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. Penghapusan barang kebutuhan pokok dan beberapa jasa seperti jasa pendidikan dan jasa pelayanan kesehatan medis dari barang dan jasa yang tidak dikenai PPN (*negative list*) dan memindahkannya menjadi barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
10. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022, kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
11. Kemudahan dan kesederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu.
12. Program pengungkapan sukarela yang akan dimulai pada 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.
13. Pemberlakuan pajak karbon dengan implementasi 1 April 2022.
14. Perubahan ketentuan cukai.

UU HPP mengamendemen regulasi yang telah ada, yaitu:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP);
2. Undang-Undang Pajak penghasilan (UU PPh);
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan atas Barang Mewah;
4. Undang-Undang Cukai (UU Cukai);
5. Undang-Undang No. 2 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*).

Atas masing-masing ruang lingkup pengaturan memiliki waktu pemberlakuan kebijakan yang berbeda. Ketentuan terkait PPh berlaku mulai Tahun Pajak 2022, ketentuan mengenai PPN dan pajak karbon mulai 1 April 2022, kebijakan Program Pengungkapan Sukarela berlaku 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, sedangkan pengaturan mengenai KUP dan perubahan mengenai ketentuan cukai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Sampai dengan tanggal laporan audit ini, Entitas masih mengevaluasi dampak dari UU HPP tersebut. Dampak tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan jika diketahui dan dapat diperkirakan.

9. *Elimination of goods and services of basic needs and some services such as education services and health services from goods and services that are not subject to VAT (negative list) and transfer them to goods and services that are exempt from the imposition of VAT.*
10. *VAT rate increase from 10% to 11% which will take effect April 1, 2022, then to 12% which will take effect no later than January 1, 2025.*
11. *Ease and simplicity of VAT with final rates for certain taxable goods or services.*
12. *Voluntary disclosure program that will start on January 1, 2022 up to June 30, 2022.*
13. *Enactment of carbon tax with the implementation of April 1, 2022.*
14. *Changes in excise regulations.*

The UU HPP amended a number of existing laws, as follows:

1. *The Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP);*
2. *The Income Tax Law (UU PPh);*
3. *The Law on Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods (UU PPN and PPnBM);*
4. *The Excise Law (UU Cukai);*
5. *Law No. 2 Year 2020;*
6. *Omnibus Law.*

Each regulatory scope has different policy enforcement time., provisions related to PPh are effective from the 2022 Fiscal Year, provisions regarding VAT and carbon taxes are effective from April 1, 2022, the Voluntary Disclosure Program policy is valid from January 1, 2022 to June 30, 2022, while regulations regarding KUP and provisions regarding excise are effective from the date of promulgation.

As of the date of this audit report, the Entity is currently evaluating the impact of UU HPP. Such effect will be reported in the financial statements when they are known and can be estimated.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

c) Siaran Pers atas Persyaratan Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa Sesuai PSAK No. 24 Mengenai “Imbalan Kerja”

Pada bulan April 2022, DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK No. 24 mengenai “Imbalan Kerja” yang diadopsi dari IAS 19 “Employee Benefit”. Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam *International Financial Reporting Standards Interpretation Committee (“IFRIC”) Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19)*.

Dengan menerapkan materi penjelasan tersebut maka Entitas perlu merubah kebijakan akuntansi menyangkut atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari kebijakan yang diterapkan saat ini. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan, Entitas masih melakukan berbagai tindakan yang relevan, baik secara internal maupun eksternal, untuk menerapkan materi penjelasan tersebut, sehingga dampaknya belum dapat ditentukan dan dicatat dalam laporan keuangan Entitas untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.

c) Press Release on the Requirements for Attribution of Benefits in the Service Period in accordance with PSAK No. 24 Regarding “Employee Benefits”

In April 2022, DSAK IAI (Institute of Indonesia Chartered Accountants’ Accounting Standard Board) issued an explanatory material through a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with PSAK No. 24 regarding “Employee Benefits” which was adopted from IAS 19 “Employee Benefits”. The explanatory material conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia similar to those responded and concluded in the *International Financial Standards Interpretation Committee (“IFRIC”) Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19)*.

By adopting the said explanatory material, the Entity would need to change its accounting policy regarding attribution of benefits to periods of service that is currently applied. Up to the date of authorization of the financial statements, the Entity is still preparing necessary action, internal and external, to adopt such explanatory material and therefore related impact has not been able to determine and recorded in the Entity’s financial statements for the seven-month period ended July 31, 2022.

45. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI

Amendemen standar yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 1 (Amendemen 2020), mengenai “Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang”.

Amendemen PSAK No. 1 ini diadopsi dari Amendemen IAS No. 1: *Presentation of Financial Statements*. Amendemen tersebut mengklarifikasi salah satu kriteria dalam mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka panjang yaitu mensyaratkan entitas memiliki hak untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas setidaknya selama 12 bulan setelah periode pelaporan.

45. NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The amended standards which became effective for financial statements beginning on or after January 1, 2023 are as follows:

- PSAK No. 1 (Amendment 2020), regarding “Presentation of Financial Statements concerning Classification of Liabilities as Short-Term or Long-Term”.

Amendments to PSAK No. 1 was adopted from the IAS Amendment No. 1: *Presentation of Financial Statements*. The amendments clarify one of the criteria for classifying a liability as long-term, that is, it requires the entity to have the right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Amendemen tersebut juga terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. menetapkan bahwa hak entitas untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas harus ada pada akhir periode pelaporan;
 - b. mengklarifikasi bahwa klasifikasi tidak terpengaruh oleh niat atau harapan manajemen tentang apakah entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas;
 - c. mengklarifikasi bagaimana kondisi pinjaman mempengaruhi klasifikasi dan
 - d. memperjelas persyaratan untuk entitas mengklasifikasikan liabilitas berdasarkan pada kemampuan untuk menyelesaikan liabilitas dengan menerbitkan instrumen ekuitas sendiri.
- PSAK No. 1 (Amendemen 2021), mengenai “Penyajian Laporan Keuangan yang Mengubah Istilah “Signifikan” Menjadi “Material” dan Memberi Penjelasan Mengenai Kebijakan Akuntansi Material”.
 - PSAK No. 16 (Amendemen 2021), mengenai “Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensifkan”.

Secara umum, Amendemen PSAK No. 16 tersebut:

- a. Paragraf 17 (e) mengklasifikasi hal berikut:
 - melarang pengurangan hasil neto penjualan setiap item yang dihasilkan, saat membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen, dari biaya pengujian (seperti sampel yang dihasilkan ketika menguji apakah aset tersebut berfungsi dengan baik).
 - mengklarifikasi arti dari ‘pengujian’, yang menegaskan bahwa ketika menguji apakah suatu aset berfungsi dengan baik, suatu entitas menilai kinerja teknis dan kinerja fisik dari aset tersebut.
- b. Paragraf 20A menambahkan paragraf 20A yang mengatur bahwa:
 - entitas mengakui hasil penjualan dan biaya perolehan atas item yang dihasilkan saat membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen dalam Laba Rugi.

The amendments also relate to the following:

- a. specifies that the entity's right to defer settlement of the liability must exist at the end of the reporting period;
 - b. clarify that the classification is not affected by management's intentions or expectations of whether the entity will exercise its right to suspend settlement of the liability;
 - c. clarify how loan conditions affect classification and
 - d. clarify the requirements for an entity to classify a liability based on its ability to settle the liability by issuing its own equity instruments.
- PSAK No. 1 (Amendment 2021), regarding “Presentation of Financial Statements that Change the Term “Significant” to “Material” and Provides Explanation of Material Accounting Policies”.
 - PSAK No. 16 (Amendment 2021), regarding “Fixed Assets on Yield Prior to Intensified Use”.

In general, the amendments to PSAK No. 16:

- a. Paragraph 17(e) classifies the following:
 - prohibits deducting the net proceeds from the sale of each item produced, while bringing the asset to the location and condition necessary for the asset to be ready for use in accordance with management's intent, from the cost of testing (such as samples generated when testing whether the asset is functioning properly).
 - clarify the meaning of 'test', which confirms that when testing whether an asset is functioning properly, an entity assesses the technical performance and physical performance of the asset.
- b. Paragraph 20A adds paragraph 20A which provides that:
 - the entity recognizes the proceeds from the sale and cost of the items produced when bringing the property, plant and equipment to the location and condition necessary for the asset to be ready for use in accordance with management's intention in Profit and Loss.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

-
- selanjutnya entitas mengukur biaya perolehan atas item tersebut dengan menerapkan persyaratan pengukuran dalam PSAK No. 14: Persediaan.
 - c. Paragraf 74A menambahkan paragraf 74A yang mengatur jika tidak disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan keuangan juga mengungkapkan:
 - persyaratan sebelumnya dalam paragraf 74(d) tidak diubah tetapi telah dipindahkan ke paragraf 74A(a).
 - jumlah hasil dan biaya perolehan (yang masuk dalam L/R sesuai paragraf 20A) terkait *item* yang dihasilkan yang bukan merupakan output dari aktivitas normal entitas serta pengungkapan dalam pos mana dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang mencakup hasil dan biaya perolehan tersebut.
 - PSAK No. 25 (Amendemen 2021), mengenai “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang definisi “Estimasi Akuntansi” dan penjelasannya”.
 - PSAK No. 46 (Amendemen 2021), mengenai “Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal”. Amendemen ini mengusulkan agar entitas mengakui - 116 - sset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya misalnya dari transaksi sewa, untuk menghilangkan perbedaan praktik di lapangan atas transaksi tersebut dan transaksi serupa.
- Standar baru yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 dan penerapan dini diperkenankan adalah sebagai berikut:
- PSAK No. 74, mengenai “Kontrak Asuransi”.
- PSAK No. 74 merupakan adopsi dari IFRS No. 17: *Insurance Contract* yang berlaku efektif 1 Januari 2023. PSAK No. 74 ini telah mencakup relaksasi beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Amendemen IFRS No. 17: *Insurance Contract* yang antara lain memberikan penambahan pengecualian ruang lingkup, penyesuaian penyajian laporan keuangan, penerapan opsi mitigasi risiko dan beberapa modifikasi pada ketentuan transisi.
- *the entity then measures the cost of the item by applying the measurement requirements in PSAK No. 14: Inventories.*
 - c. *Paragraph 74A adds paragraph 74A which provides that if not presented separately in the statement of profit or loss and other comprehensive income, the financial statements also disclose:*
 - *the previous requirement in paragraph 74(d) was not modified but has been moved to paragraph 74A(a).*
 - *the amount of proceeds and costs (which are included in the L/R in accordance with paragraph 20A) relating to items produced that are not an output of the entity’s normal activities and the disclosure in which items in the statement of profit or loss and other comprehensive income include those results and costs.*
 - *PSAK No. 25 (Amendment 2021), regarding “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors regarding the definition of “Accounting Estimates” and their explanations”.*
 - *PSAK No. 46 (Amendment 2021), regarding “Income Tax on Deferred Tax on Assets and Liabilities arising from a Single Transaction”. This amendment proposes that entities recognize deferred tax assets and liabilities at the time of initial recognition, for example from a lease transaction, to eliminate differences in practice in the field for such transactions and similar transactions.*
- New standard which is effective for financial statements beginning on or after January 1, 2025 and early adoption is permitted as follows:*
- *PSAK No. 74, regarding “Insurance Contracts”.*
- PSAK No. 74 is an adoption of IFRS No. 17: Insurance Contract effective January 1, 2023. PSAK No. 74 has included relaxation of several provisions as regulated in Amendments to IFRS No. 17: Insurance Contract which, amongst others, provides for additional scope exceptions, adjustments in the presentation of financial statements, application of risk mitigation options and some modifications to transitional provisions.*

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Penerapan PSAK No. 74 Kontrak Asuransi akan membuat Laporan Keuangan perusahaan asuransi menjadi “berdaya banding” (*comparable*) dengan industri-industri lain seperti perbankan dan perusahaan jasa keuangan lainnya karena PSAK No. 62 Kontrak Asuransi yang berlaku saat ini (adopsi dari IFRS No. 4) masih memungkinkan pelaporan yang bervariasi di setiap yurisdiksi/negara. Selain itu, PSAK No. 74 juga mensyaratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis asuransi dengan pendapatan dari kegiatan investasi sehingga seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan) dari laporan keuangan, termasuk pemegang polis maupun investor, mendapatkan informasi yang transparan atas laporan keuangan perusahaan yang memiliki kontrak asuransi untuk produk perlindungan asuransi dengan fitur investasi.

Implementation of PSAK No. 74 The Insurance Contract will make the insurance company's Financial Statements "comparable" with other industries such as banking and other financial service companies due to PSAK No. 62 The current Insurance Contract (adoption of IFRS No. 4) still allows for varying reporting in each jurisdiction / country. In addition, PSAK No. 74 also requires a clear separation between income generated from the insurance business and income from investment activities so that all stakeholders of the financial statements, including policyholders and investors, receive transparent information on the financial statements of companies that have insurance contracts for protection products. insurance with investment features.

Manajemen Entitas sedang mengevaluasi dampak dari standar baru, amendemen, dan penyesuaian standar ini terhadap laporan keuangan .

The management of the Entity is currently evaluating the impact of the new standards, amendments and improvements to standards on the financial statements.

46. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

46. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

Sehubungan dengan rencana Entitas untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, maka laporan keuangan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang sebelumnya diterbitkan dalam Laporan Auditor Independen No. 00155/3.0428/AU.1/05/1725-2/1/X/2022, tanggal 3 Oktober 2022, No. 00158/3.04281/AU.1/05/1725-2/1/XI/2022, tanggal 2 November 2022, No. 00163/3.0428/AU.1/05/1725-2/1/XI/2022, tanggal 10 November 2022, No. 00170/3.0428/AU.1/05/1725-2/1/XII/2022, tanggal 9 Desember 2022 dan No. 00172/3.0428/AU.1/05/1725-2/1/XII/2022, tanggal 26 Desember 2022, diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan sebagai berikut:

Pursuant to the Entity's plan to conduct Initial Public Offering of Shares, the financial statements for the seven-month period then ended as of July 31, 2022, which was issued in the Independent Auditor's Report No. 00155/3.0428/AU.1/05/1725-2/1/X/2022, dated October 3, 2022, No. 00158/3.04281/AU.1/05/1725-2/1/XI/2022, dated November 2, 2022, No. 00163/3.0428/AU.1/05/1725-2/1/XI/2022, dated November 10, 2022, No. 00170/3.0428/AU.1/05/1725-2/1/XII/2022, dated December 9, 2022 and No. 00172/3.0428/AU.1/05/1725-2/1/XII/2022, dated December 26, 2022, have been reissued with accompanying changes and additional disclosures as follows:

a. Informasi

Perubahan pada sampul dan judul laporan keuangan atas cakupan semua periode.

a. Information

Changes to the cover and title of the financial statements for the coverage of all periods.

b. Umum

- Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi (lihat Catatan 1c dan 43).

b. General

- *Changes in the composition of the Board of Commissioners and Directors, Nomination and Remuneration Committee (see Notes 1c and 43).*

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

<ul style="list-style-type: none">• Penambahan pengungkapan informasi rincian pelepasan saham PT Trans Mega Selaras (lihat Catatan 1c).	<ul style="list-style-type: none">• <i>Additional disclosures of information on the details of the disposal of PT Trans Mega Selaras's shares (lihat Catatan 1c).</i>
<p>c. Laporan Posisi Keuangan</p> <p>Perubahan penyajian mengenai istilah komponen ekuitas lainnya menjadi penghasilan komprehensif lain.</p>	<p>c. <i>Statements of Financial Position</i></p> <p><i>Additional disclosures regarding in the term other equity components to other comprehensive income.</i></p>
<p>d. Laporan Arus Kas</p> <p>Penambahan pengungkapan sehubungan dengan pemisahan penambahan, penerimaan dan pembayaran pada aktivitas operasi dan pendanaan.</p>	<p>d. <i>Statements of Cash Flows</i></p> <p><i>Additional disclosures to the separation of additions, receipts and payments to operating and financing activities.</i></p>
<p>e. Persediaan</p> <p>Perubahan penyajian pada jenis persediaan Entitas (lihat Catatan 8).</p>	<p>e. <i>Inventory</i></p> <p><i>Changes in the presentation of the Entity's inventory types (see Note 8).</i></p>
<p>f. Aset Tetap</p> <p>Perubahan penyajian informasi atas aset tetap yang telah disusutkan penuh (lihat Catatan 15).</p>	<p>f. <i>Fixed Assets</i></p> <p><i>Changes in the presentation of information on fixed assets that have been fully depreciated (see Note 15).</i></p>
<p>g. Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja</p> <p>Penambahan pengungkapan nomor dan tanggal laporan aktuaris.</p>	<p>g. <i>Estimated Liabilities for Employee Benefits</i></p> <p><i>Additional disclosures of actuary report number and date.</i></p>
<p>h. Pendapatan</p> <p>Penambahan pengungkapan pada informasi penjualan berdasarkan sifat hubungan (lihat Catatan 27).</p>	<p>h. <i>Revenues</i></p> <p><i>Additional disclosures to the sales information based on the nature of the relationship (see Note 27).</i></p>
<p>i. Beban Pokok Pendapatan</p> <p>Penambahan pengungkapan pada informasi pembelian yang melebihi 10% (lihat Catatan 28).</p>	<p>i. <i>Cost of Revenues</i></p> <p><i>Additional disclosures on purchase information that exceeds 10% (see Note 28).</i></p>
<p>j. Transaksi Non Kas</p> <p>Penambahan pengungkapan pada informasi transaksi non kas (lihat Catatan 40).</p>	<p>j. <i>Non-cash Transaction</i></p> <p><i>Additional disclosures to non-cash transaction information (see Note 40).</i></p>
<p>k. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan</p> <p>Penambahan pengungkapan, mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none">• Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi (lihat Catatan 1c dan 43).	<p>k. <i>Events After Reporting Period</i></p> <p><i>Additional disclosures, regarding:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Changes in the composition of the Board of Commissioners and Directors, Nomination and Remuneration Committee (see Notes 1c and 43).</i>

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 JULI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 2020
AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

-
- Penambahan pengungkapan atas akta notaris terbaru (lihat Catatan 43).
 - Tambahan keterangan atas akta ratifikasi (lihat Catatan 43).
 - Penambahan pengungkapan perjanjian perangkat lunak (lihat Catatan 43).

- *Additional disclosures on the latest notarial deed (see Note 43).*
 - *Additional information on the deed of ratification (see Note 43).*
 - *Additional disclosures on the software agreement (see Note 43).*
-

47. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Entitas bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 25 Januari 2023.

47. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Entity are responsible for the preparation of the financial statements which were completed on January 25, 2023.